



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta meningkatkan hasil pembangunan daerah secara adil dan merata dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa pelaksanaan pembangunan di Kota Salatiga melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan Daerah sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi dan selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Wali Kota;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah, adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025–2045, yang selanjutnya disebut RPJPD, adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.

10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Daerah ke dalam struktur ruang dan pola ruang.
11. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Daerah.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
18. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
19. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
21. Program Pembangunan Daerah adalah Program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen Arah Kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
22. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
23. Pengendalian dan Evaluasi adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.

BAB II RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Wali Kota terpilih hasil pemilihan Wali Kota Tahun 2024.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada:
 - a. RPJPD;
 - b. RTRW;
 - c. RPJMN;
 - d. RPJMD Provinsi Jawa Tengah; dan
 - e. KLHS.
- (4) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah kabupaten/kota sekitar.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029;
- b. pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai periode RPJMD;
- c. pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPJMD;
- d. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD; dan
- e. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJMD.

Pasal 4

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I berisi pendahuluan;
 - b. bab II berisi gambaran umum Daerah;
 - c. bab III berisi visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
 - d. bab IV berisi program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - e. bab V berisi penutup;
- (2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Wali Kota melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD mencakup pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD; dan
 - b. evaluasi terhadap hasil RPJMD.

- (3) Tata cara Pengendalian dan Evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil Pengendalian dan Evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil Pengendalian dan Evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya:
 - a. bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran Daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RKPD dan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal RPJMD Tahun 2030-2034 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada RPJPD pada tahapan 5 (lima) tahun kedua yaitu tahun 2030-2034 serta mengacu pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2022 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 20 Agustus 2025

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2025 NOMOR 7

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(6-160/2025)

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 19970

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Pada hakikatnya Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam RPJMN dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun. RPJMN sebagai rencana jangka menengah selanjutnya diterjemahkan secara konkrit, spesifik dan operasional menjadi rencana operasional tahunan.

Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, Pembangunan Daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil Pembangunan Daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera.

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Daerah sesuai dengan visi dan misi Wali Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun.

RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota untuk waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi Pembangunan Daerah, kebijakan umum, program Pembangunan Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
BATANG TUBUH PERDA NOMOR 7 TAHUN 2025	iii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	I-6
1.4. Maksud dan Tujuan	I-7
1.5. Sistematika Penyusunan	I-7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-50
2.3. Aspek Daya Saing	II-78
2.4. Aspek Pelayanan Umum	II-88
2.5. Gambaran Keuangan Daerah	II-140
2.6. Permasalahan dan Isu Strategis	II-171
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	III-1
3.1. Visi dan Misi	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran	III-5
3.3. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-11
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	IV-1
4.1. Program Perangkat Daerah	IV-1
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV-90
BAB V PENUTUP	V-1
5.1. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan	V-1
5.2. Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Manajemen Risiko	V-3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah dan Jumlah RT/RW Kota Salatiga Berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan	II-2
Tabel 2.2	Kelerengan Lahan Kecamatan di Kota Salatiga	II-6
Tabel 2.3	Suhu Udara Kota Salatiga	II-6
Tabel 2.4	Curah Hujan Tahunan Kota Salatiga Tahun 2020-2024	II-7
Tabel 2.5	Jenis Tanah Kota Salatiga.....	II-9
Tabel 2.6	Luas Tutupan Lahan Kota Salatiga	II-13
Tabel 2.7	Potensi Pertanian Kota Salatiga.....	II-14
Tabel 2.8	Klasifikasi Kemampuan Lahan Dalam Tingkat Kelas	II-18
Tabel 2.9	Luas Kelas Kemampuan Lahan Kota Salatiga	II-19
Tabel 2.10	Evaluasi Kesesuaian Lahan Kota Salatiga	II-23
Tabel 2.11	Tabel Standar Konsumsi Lahan Per Kapita	II-26
Tabel 2.12	Konsumsi Lahan Per kapita Kota Salatiga.....	II-26
Tabel 2.13	Hasil Analisis Daya Dukung Lahan Kota Salatiga.....	II-29
Tabel 2.14	Perhitungan Nilai Produksi Total Kota Salatiga.....	II-30
Tabel 2.15	<i>Cut Off Point</i> Indeks Ketahanan Pangan	II-39
Tabel 2.16	Konsumsi Listrik per Kapita 2019 – 2021	II-41
Tabel 2.17	Jumlah dan Distribusi/Persebaran Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023.....	II-48
Tabel 2.18	Kepadatan Penduduk Kota Salatiga Tahun 2023	II-49
Tabel 2.19	Proyeksi Penduduk Kota Salatiga Tahun 2025-2030	II-49
Tabel 2.20	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan Tahun 2020-2024.....	II-96
Tabel 2.21	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Kesehatan Tahun 2020-2024.....	II-98
Tabel 2.22	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan PUPR Tahun 2020-2024.....	II-100
Tabel 2.23	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024	II-102
Tabel 2.24	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024.....	II-103
Tabel 2.25	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Sosial Tahun 2020-2024.....	II-105
Tabel 2.26	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020-2024.....	II-106
Tabel 2.27	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-107
Tabel 2.28	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Pangan Tahun 2020-2024.....	II-108
Tabel 2.29	Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanahan Tahun 2020-2024.....	II-109
Tabel 2.30	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024	II-111



Tabel 2.31	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Administrasi Penduduk dan Catatan Sipil Tahun 2020-2024.....	II-112
Tabel 2.32	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020-2024	II-113
Tabel 2.33	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-114
Tabel 2.34	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Perhubungan Tahun 2020-2024.....	II-115
Tabel 2.35	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informasi Tahun 2020-2024.....	II-116
Tabel 2.36	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024.....	II-117
Tabel 2.37	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Penanaman Modal Tahun 2020-2024.....	II-117
Tabel 2.38	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024.....	II-119
Tabel 2.39	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik Tahun 2020-2024.....	II-120
Tabel 2.40	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Persandian Tahun 2020-2024.....	II-120
Tabel 2.41	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Kebudayaan Tahun 2020-2024.....	II-121
Tabel 2.42	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024.....	II-121
Tabel 2.43	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Kearsipan Tahun 2020-2024.....	II-122
Tabel 2.44	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024	II-123
Tabel 2.45	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Pariwisata Tahun 2020-2024.....	II-124
Tabel 2.46	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanian Tahun 2020-2024.....	II-125
Tabel 2.47	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024.....	II-125
Tabel 2.48	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Perindustrian Tahun 2020-2024.....	II-127
Tabel 2.49	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Penunjang Urusan Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020-2024	II-129
Tabel 2.50	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Penunjang Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020-2024	II-130
Tabel 2.51	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Penunjang Urusan Kepegawaian Tahun 2020-2024	II-131
Tabel 2.52	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Penunjang Urusan Keuangan Tahun 2020-2024	II-132
Tabel 2.53	Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Berdasarkan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026	II-133
Tabel 2.54	Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (Rupiah)	II-144



Tabel 2.55	Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (Rupiah)	II-147
Tabel 2.56	Perkembangan Pembiayaan Daerah Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (Rupiah)	II-150
Tabel 2.57	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	II-150
Tabel 2.58	Perkembangan APBD Kota Salatiga Tahun 2020-2024	II-152
Tabel 2.59	Neraca Daerah Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	II-156
Tabel 2.60	Current Ratio Kota Salatiga Tahun 2020-2024	II-157
Tabel 2.61	Rasio Utang Kota Salatiga Tahun 2020-2024	II-157
Tabel 2.62	Rasio Perputaran Aktiva Kota Salatiga Tahun 2020-2024	II-158
Tabel 2.63	Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2030	II-162
Tabel 2.64	Proyeksi Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2030	II-166
Tabel 2.65	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2030	II-170
Tabel 2.66	Pengelompokan Isu Strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Salatiga.....	II-201
Tabel 2.67	Rumusan Kesimpulan Isu Strategis Kota Salatiga Tahun 2025-2029.....	II-206
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029.....	III-7
Tabel 3.2	Strategi dan Arah Kebijakan dalam Rangka Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD	III-17
Tabel 3.3	Pentahapan Arah Kebijakan Dalam Mencapai Sasaran Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2025-2029	III-33
Tabel 3.4	Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-39
Tabel 3.5	Dukungan Terhadap 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) RPJMN 2025-2029	III-50
Tabel 3.6	Dukungan Program Lokasi Priotas Atas Kebijakan Pengembangan Wilayah Nasional Dan Proyek Strategis Nasional di Wilayah Kedungsepur	III-53
Tabel 3.7	Dukungan Pemerintah Kota Salatiga Terhadap Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah yang Didelegasikan ke Kabupaten/Kota	III-55
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030.....	IV-49
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama	IV-90
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Daerah	IV-91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-7
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kecamatan di Kota Salatiga	II-2
Gambar 2.2	Peta Ketinggian Tempat Kota Salatiga (mdpl)	II-4
Gambar 2.3	Peta Kelerengan Lahan (%) Kota Salatiga	II-5
Gambar 2.4	Peta bantuan Geologi Kota Salatiga.....	II-9
Gambar 2.5	Peta jenis Tanah Kota Salatiga	II-11
Gambar 2.6	Peta Sebaran Sungai Kota Salatiga	II-12
Gambar 2.7	Peta Kelas kemampuan Lahan Kota Salatiga	II-20
Gambar 2.8	Peta Potensi Kemampuan Lahan Kota Salatiga	II-21
Gambar 2.9	Peta Evaluasi Kesesuaian lahan Kota Salatiga	II-25
Gambar 2.10	Peta Daya Dukung Lahan Kota Salatiga	II-28
Gambar 2.11	Peta Status Daya Dukung Pangan Kota Salatiga	II-33
Gambar 2.12	Peta Status Daya Dukung Air Eksisting Kota Salatiga	II-34
Gambar 2.13	Perkembangan Indeks Ketahanan pangan Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	II-40
Gambar 2.14	Perkembangan Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kota Salatiga Tahun 2022-2024.....	II-41
Gambar 2.15	Penanganan dan Pengurangan Sampah Kota Salatiga Tahun 2020 – 2024.....	II-43
Gambar 2.16	Trend Perkembangan Nilai Emisi GRK Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	II-44
Gambar 2.17	Kontribusi Penurunan Emisi Berdasarkan Sektor Kota Salatiga Tahun 2019-2024	II-44
Gambar 2.18	Perkembangan Indeks Resiko Bencana Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	II-45
Gambar 2.19	Perkembangan Indeks Ketahanan Daerah Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	II-46
Gambar 2.20	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	II-47
Gambar 2.21	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-50
Gambar 2.22	Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga Dibandingkan Dengan Nasional, Prov Jawa Tengah dan Kota Lainnya tahun 2024	II-51
Gambar 2.23	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional tahun 2020-2024.....	II-52
Gambar 2.24	Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kota Salatiga Dibandingkan dengan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Lainnya tahun 2024	II-52
Gambar 2.25	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-53
Gambar 2.26	Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota di Provinsi Jawa Tengah 2024.....	II-54
Gambar 2.27	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-55

Gambar 2.28	Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota di Provinsi Jawa Tengah 2024.....	II-55
Gambar 2.29	Estimasi Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kota Salatiga Tahun 2021-2024	II-56
Gambar 2.30	Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Salatiga dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-57
Gambar 2.31	Perbandingan PDRB Per Kapita Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	II-57
Gambar 2.32	Tipologi Klassen Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	II-58
Gambar 2.33	Perkembangan TPT Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-59
Gambar 2.34	Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Salatiga Dibandingkan Dengan Nasional, Prov Jawa Tengah dan Kota Lainnya tahun 2024.....	II-60
Gambar 2.35	Perkembangan Indeks Gini Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-61
Gambar 2.36	Posisi Relatif Indeks Gini Kota Salatiga Dibandingkan Dengan Nasional, Prov Jawa Tengah dan Kota Lainnya tahun 2024.....	II-61
Gambar 2.37	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional 2020-2024.....	II-62
Gambar 2.38	Posisi Relatif IPM Kota Salatiga Dibandingkan Dengan Nasional, Prov Jawa Tengah dan Kota Lainnya tahun 2024	II-63
Gambar 2.39	Perkembangan Usia Harapan Hidup Kota Salatiga Tahun 2020 -2024	II-64
Gambar 2.40	Perbandingan Usia Harapan Hidup Kota Se Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	II-64
Gambar 2.41	Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Salatiga Tahun 2020-2024	II-65
Gambar 2.42	Perkembangan Prevalensi Stunting pada Balita Tahun 2020-2024.....	II-66
Gambar 2.43	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Salatiga Tahun 2020 – 2024.....	II-67
Gambar 2.44	Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	II-68
Gambar 2.45	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	II-69
Gambar 2.46	Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	II-70
Gambar 2.47	Angka Literasi dan Numerasi Kota Salatiga Tahun 2022-2023.....	II-71
Gambar 2.48	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Salatiga Tahun 2021-2024.....	II-72
Gambar 2.49	Perkembangan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2021-2024	II-73
Gambar 2.50	Persentase Penduduk Kota Salatiga Memiliki Jaminan Pemeliharaan Kesehatan tahun 2020-2024	II-74
Gambar 2.51	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kota Salatiga Tahun 2022-2024.....	II-75
Gambar 2.52	Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Salatiga Tahun 2021-2023.....	II-76

Gambar 2.53	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) Kota Salatiga Tahun 2020-2025.....	II-76
Gambar 2.54	Ketimpangan Gender (IKG) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-77
Gambar 2.55	Angka Ketergantungan Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	II-78
Gambar 2.56	Perkembangan Rasio PDRB Industri Pengolahan Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	II-79
Gambar 2.57	Perkembangan Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kota Salatiga Tahun 2020-2024	II-79
Gambar 2.58	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	II-80
Gambar 2.59	Indeks Inovasi Daerah Kota Salatiga Tahun 2021- 2024.....	II-81
Gambar 2.60	Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Tahun 2020 - 2024	II-83
Gambar 2.61	Realisasi Nilai Ekspor (USD\$) Kota Salatiga Tahun 2021-2024	II-84
Gambar 2.62	Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik Kota Salatiga Tahun 2020- 2024	II-85
Gambar 2.63	Perkembangan Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	II-86
Gambar 2.64	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) Tahun 2020-2024	II-87
Gambar 2.65	Perkembangan Inflasi Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	II-88
Gambar 2.66	Indeks Reformasi Birokrasi Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	II-89
Gambar 2.67	Indeks Reformasi Hukum Kota Salatiga Tahun 2023-2024	II-90
Gambar 2.68	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Salatiga Tahun 2021-2024.....	II-91
Gambar 2.69	Indeks Pelayanan Publik Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	II-92
Gambar 2.70	Indeks Integritas Nasional Tahun 2020-2024	II-93
Gambar 2.71	Perkembangan Persentase Penegakan Perda Kota Salatiga Tahun 2020 – 2024.....	II-93
Gambar 2.72	Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dan Komponen Kota Salatiga tahun 2021-2024	II-95
Gambar 2.73	Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (Rupiah).....	II-140
Gambar 2.74	Perkembangan Masing-Masing Unsur Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024 (Rupiah).....	II-142
Gambar 2.75	Proporsi Unsur Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	II-143
Gambar 2.76	Perkembangan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (Rupiah)	II-146
Gambar 2.77	Perkembangan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (Rupiah).....	II-148
Gambar 2.78	Perkembangan SILPA tahun Berjalan Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (Rupiah)	II-149
Gambar 3.1	Visi Misi Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029.....	III-5
Gambar 3.2	Struktur Frase Visi Terhadap Misi RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029.....	III-5
Gambar 3.3	Cascading Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029	III-6



Gambar 3.4	Keselarasan Visi dan Misi RPJMD 2025–2029 dengan Visi dan Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045.....	III-9
Gambar 3.5	Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025–2029 dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.....	III-10
Gambar 3.6	Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025–2029 dengan Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025–2029.....	III-10
Gambar 3.7	Penahapan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025 – 2029.....	III-24

BAB

1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan disusun dan ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan melalui berbagai tahapan dan proses yang melibatkan identifikasi, penyusunan, dan pengorganisasian berbagai kegiatan dengan mengerahkan berbagai sumber daya yang dimiliki dan diperlukan. Penyusunan perencanaan pembangunan tidak terlepas dari hasil analisis situasi yang mendalam berdasarkan identifikasi masalah yang ada, sumber daya yang tersedia, dan potensi yang dapat dimanfaatkan. Perencanaan pembangunan yang baik dan dapat diukur adalah perencanaan yang tidak hanya mencakup langkah-langkah yang jelas dan terstruktur, tetapi juga dapat dievaluasi dan dipantau untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan tercapai secara efektif dan efisien.

Perencanaan pembangunan secara nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Perencanaan tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan nasional dalam suatu sistem yang utuh dan terpadu, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dan kota. Selain itu, keberadaan sistem perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta optimalisasi penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan baik ditingkat pusat maupun daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Pasal 201 ayat (8) bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Kota Salatiga pada Bulan November tahun 2024 telah melaksanakan pemilihan kepala daerah walikota dan wakil walikota, dan telah ditetapkan walikota dan wakil wali kota terpilih dan telah dilantik oleh Presiden-RI pada tanggal 25 Februari 2025. Berdasarkan penetapan tersebut, Kota Salatiga perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahun ke depan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

RPJMD Kota Salatiga disusun berdasarkan pada amanat yang tertuang dalam pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 beserta perubahannya tentang Pemerintahan Daerah. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) yang paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 merupakan bentuk komitmen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan yang menerjemahkan target pembangunan berkelanjutan jangka panjang dari RPJPD menjadi tahapan realistis dan terukur melalui visi dan misi Wali Kota. Jika RPJPD adalah dokumen strategis 20 tahun yang menetapkan arah pembangunan secara menyeluruh, maka RPJMD adalah skenario operasional yang memuat visi dan misi kepala Wali Kota, menjabarkannya ke dalam program prioritas, target kinerja, dan kebijakan konkret. Dengan demikian, RPJMD menjadi jembatan strategis yang memastikan setiap program pembangunan yang dijalankan selama satu periode pemerintahan tetap berada di jalur yang benar dan berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

Penyusunan RPJMD Kota Salatiga secara teknis mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan RPJMD berpedoman pada Rencana Tata Ruang dan

Wilayah (RTRW) dan RPJPD, serta memperhatikan RTRW Daerah lain. Penyusunan RPJMD yang berpedoman pada dokumen perencanaan lainnya agar tercipta sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota, dan keterpaduan struktur dan pola ruang dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya terutama yang berdekatan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dalam penyusunan RPJMD meliputi 6 (enam) tahapan yaitu: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), perumusan rancangan akhir dan penetapan RPJMD. Kota Salatiga dalam menyusun RPJMD menggunakan pendekatan berorientasi proses meliputi teknokratik, partisipatif, politis, *bottom up* dan *top down*. Selain itu digunakan pula pendekatan yang berorientasi pada substansi, meliputi: tematik-holistik, integratif dan spasial. Dalam hal ini kebijakan pembangunan diprioritaskan pada pelaksanaan tema tertentu yang bersifat menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir untuk suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan memiliki kedudukan yang strategis. RPJMD akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta bersifat indikatif. RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), sehingga RPJMD ini akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Salatiga setiap tahunnya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum pelaksanaan penyusunan Dokumen RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044

- (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161)
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 Nomor 3);
 21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 Nomor 7).

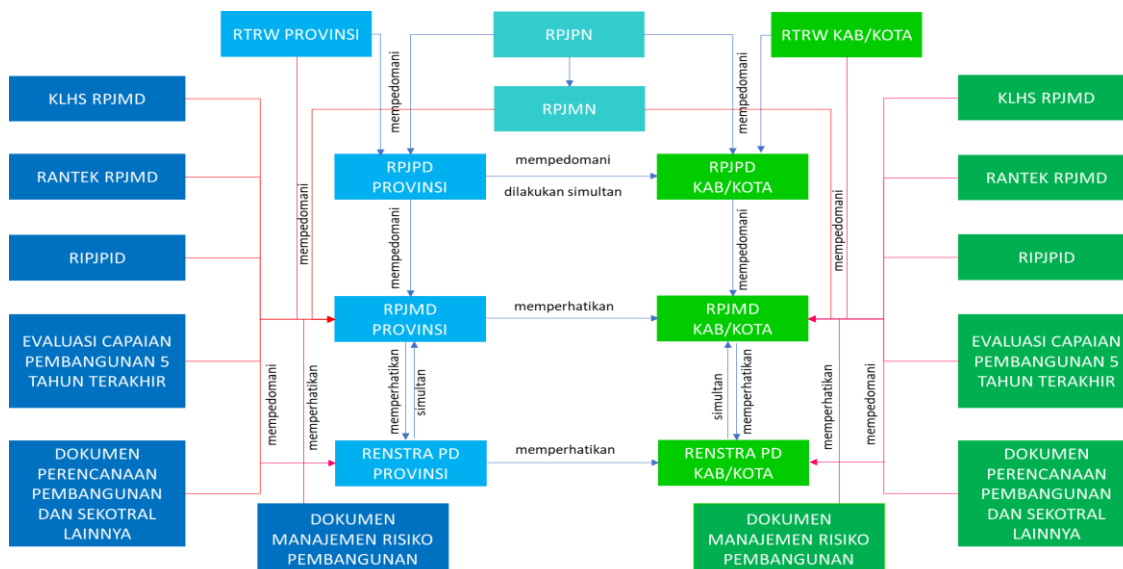
1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Penyusunan RPJMD Kota Salatiga tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045, RTRW Kota Salatiga Tahun 2023-2043 dan RPJMN Tahun 2025-2029. RPJMD Kota Salatiga disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, di mana proses penyusunannya dilakukan secara simultan. RPJMD Kota Salatiga dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan beberapa dokumen perencanaannya lainnya yang ada dilingkup Kota Salatiga, antara lain KLHS RPJMD, Rancangan Teknokratik RPJMD, RIPJPID, hasil evaluasi Pembangunan lima tahun terakhir dan beberapa dokumen perencanaan lainnya yang bersifat sektoral.

RPJMD Kota Salatiga dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan dokumen manajemen risiko pemerintah daerah. Manajemen risiko membantu mengidentifikasi berbagai ancaman atau hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan RPJMD. Keterkaitan manajemen risiko terhadap RPJMD terletak pada fungsi manajemen risiko sebagai instrumen proaktif untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan potensi ancaman maupun peluang yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD. Melalui pendekatan manajemen risiko, Pemerintah Kota Salatiga dapat meminimalkan dampak negatif dari ketidakpastian, mengoptimalkan alokasi sumber daya, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga target tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD dapat terealisasi secara efektif dan efisien.

RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah yang diterjemahkan ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai dengan target kinerja dan pendanaan setiap tahunnya. RPJMD Selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan manajemen risiko level kota, sedangkan Renstra akan menjadi acuan dalam penyusunan manajemen risiko level perangkat daerah. Gambaran keterkaitan

RPJMD Kota Salatiga tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat sebagai berikut.



Sumber: Inmenagri Nomor 2 Tahun 2025.

Gambar 1.1. Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD Kota Salatiga adalah sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah di Kota Salatiga Tahun 2025-2029. Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Salatiga tahun 2025-2029.
2. Menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah Kota Salatiga selama tahun 2025-2029.
3. Mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kota Salatiga dengan daerah sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan memuat uraian mengenai latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan; dan sistematika penulisan.

2. BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab II Gambaran Umum Daerah memuat uraian mengenai aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum, gambaran keuangan daerah, proyeksi keuangan daerah, permasalahan dan isu Strategis daerah.

3. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab III Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran memuat uraian mengenai penjelasan atas visi dan misi, penjabaran misi ke dalam tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang disertai dengan indikator dan target kinerja. Selanjutnya penjabaran strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai yang didukung dengan program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

4. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab IV Program Perangkat Daerah yang memuat uraian mengenai daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah, dan indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030. Selanjutnya memuat indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

5. BAB V PENUTUP

Bab V Penutup memuat uraian mengenai pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta manajemen risiko dalam pelaksanaan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029.

--oOo--

BAB

2

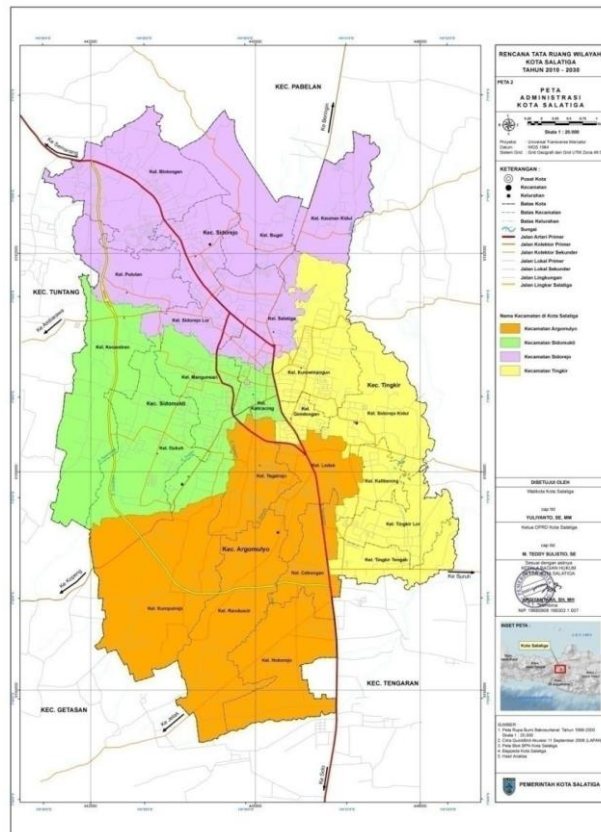
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Posisi dan Peran Strategis daerah

Kota Salatiga berada di lereng timur Gunung Merbabu yang memiliki ketinggian 450 – 825 m dari permukaan air laut. Secara geografis, Kota Salatiga terletak di 007.17'.00" dan 007.17'.23" Lintang Selatan dan antara 110.27'.56,81" dan 110.32'.4,64" Bujur Timur. Memiliki posisi dan peran strategis karena berada dijalur utama yang menghubungkan Kota Semarang dan Kota Surakarta, kota ini menjadi titik penting dalam lalu lintas transportasi dan perdagangan di Jawa Tengah. Secara administrasi, batas-batas Kota Salatiga diantaranya:

Sebelah Utara	▪ Kecamatan Pabelan (Desa Pabelan, Kauman Lor dan Pejaten) ▪ Kecamatan Tuntang (Desa Kesongo dan Watu Agung)
Sebelah Timur	▪ Kecamatan Pabelan (Desa Ujung-Ujung, Sukoharjo dan Glawan) ▪ Kecamatan Tenganan (Desa Bener, Tegal Waton dan Nyamat)
Sebelah Selatan	▪ Kecamatan Getasan (Desa Sumogawe, Samirono, Jetak) ▪ Kecamatan Tenganan (Desa Patemon dan Karang Duren)
Sebelah Barat	▪ Kecamatan Tuntang (Desa Candirejo, Jombor, Sraten dan Gedangan) ▪ Kecamatan Getasan (Desa Polobogo)



Sumber : Peta RTRW Kota Salatiga
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kecamatan di Kota Salatiga

Kota Salatiga terbagi dalam 4 kecamatan, 23 kelurahan, 210 RW dan 1.146 RT dengan total luas mencapai 54,98 km². Kecamatan Argomulyo merupakan kecamatan dengan luas terbesar mencapai 18,53 km² dan memiliki presentase sekitar 32,63 persen dari keseluruhan total wilayah di Kota Salatiga. kemudian disusul dengan Kecamatan Sidorejo sebesar 15,61 km². Gambaran wilayah kecamatan, kelurahan, RT dan RW selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Luas Wilayah dan Jumlah RT/RW Kota Salatiga Berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan

No	Kecamatan/Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah RW	Jumlah RT
	Kecamatan Sidorejo	15,61	62	320
1	Kelurahan Pulutan	2,13	5	20
2	Kelurahan Blotongan	4,2	15	74
3	Kelurahan Sidorejo Lor	2,6	16	95
4	Kelurahan Salatiga	2,05	12	83
5	Kelurahan Bugel	2,54	7	23
6	Kelurahan Kauman Kidul	2,09	7	25
	Kecamatan Sidomukti	10,8	40	237
1	Kelurahan Kecandran	3,48	7	27
2	Kelurahan Dukuh	3,64	10	75

No	Kecamatan/Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah RW	Jumlah RT
3	Kelurahan Mangunsari	2,96	16	96
4	Kelurahan Kalicacing	0,72	7	39
	Kecamatan Tingkir	10,43	49	305
1	Kelurahan Tingkir Tengah	1,38	10	32
2	Kelurahan Tingkir Lor	1,73	8	25
3	Kelurahan Kalibening	0,97	3	9
4	Kelurahan Sidorejo Kidul	2,75	9	40
5	Kelurahan Gendongan	0,58	5	38
6	Kelurahan Kutowinangun Kidul	1,04	8	70
7	Kelurahan Kutowinangun Lor	1,98	6	91
	Kecamatan Argomulyo	18,14	59	284
1	Kelurahan Noborejo	3,19	10	37
2	Kelurahan Cebongan	1,5	6	25
3	Kelurahan Randuacir	3,93	10	43
4	Kelurahan Ledok	1,93	14	72
5	Kelurahan Tegalrejo	1,96	9	63
6	Kelurahan Kumpulrejo	5,63	10	44

Sumber : Kecamatan Dalam Angka Masing-Masing Kecamatan.2025

1. Ketinggian

Kota Salatiga memiliki ketinggian mencapai 450-825 mpdpl. Kecamatan dengan letak paling tinggi merupakan Kecamatan Argomulyo, terutama di wilayah Kelurahan Randuacir, Kelurahan Noborejo dan Kelurahan Kumpulrejo. Kecamatan Sidorejo merupakan wilayah terbesar kedua setelah Argomulyo, dengan luas daerah sebesar 15.61 km² atau 28,60 persen dari keseluruhan total wilayah di Kota Salatiga. Kecamatan Sidorejo merupakan wilayah kecamatan dengan ketinggian tempat terendah di Kota Salatiga terutama di wilayah Kelurahan Kauman Kidul, Kelurahan Bugel dan Kelurahan Pulutan.



Kemiringan lereng dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu datar (0-8%), landai (8-15%), agak curam (15-25%), curam (25-40%), dan sangat curam ($\geq 40\%$). Di Kota Salatiga, sebagian besar wilayahnya didominasi oleh kemiringan datar hingga landai. Kota ini terletak pada ketinggian antara 450-825 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi oleh beberapa gunung, seperti Merbabu, Telomoyo, dan Gajah Mungkur, yang berkontribusi pada kesuburan tanah dan potensi alamnya. Dari segi topografi, wilayah Kota Salatiga dibagi menjadi tiga kategori diantaranya:

kurang dari 8% (datar) hingga lebih dari 40% (sangat curam). Selengkapnya secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Kelerengan Lahan Kecamatan di Kota Salatiga

Kecamatan	Klas Kelerengan-%	Luas (Ha)	Persentase (%)
Kecamatan Argomulyo	< 8 % (Datar)	1,210.03	22.17
	8 -15 % (Landai)	491.91	9.01
	15 - 25 % (Agak Curam)	77.95	1.43
Kecamatan Sidomukti	< 8 % (Datar)	783.89	14.36
	8 -15 % (Landai)	264.82	4.85
	15 - 25 % (Agak Curam)	63.11	1.16
	25 - 40 % (Curam)	2.34	0.04
Kecamatan Sidorejo	< 8 % (Datar)	790.32	14.48
	8 -15 % (Landai)	458.12	8.39
	15 - 25 % (Agak Curam)	200.68	3.68
	25 - 40 % (Curam)	84.14	1.54
	> 40 % (Sangat Curam)	22.52	0.41
Kecamatan Tingkir	< 8 % (Datar)	646.28	11.84
	8 -15 % (Landai)	252.92	4.63
	15 - 25 % (Agak Curam)	93.84	1.72
	25 - 40 % (Curam)	14.92	0.27
	> 40 % (Sangat Curam)	0.09	0.0017

Sumber : RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045

3. Iklim

Iklim merupakan rata-rata kondisi cuaca dalam jangka waktu yang panjang, yaitu lebih dari 30 tahun. Kota Salatiga terletak pada ketinggian antara 450-825 mdpl dan dikelilingi oleh gunung Merbabu, Telomoyo, dan Gajah Mungkur. Kondisi geomorfologi ini berpengaruh terhadap tipe iklim, terutama pada elemen suhu udara dan curah hujan.

a. Suhu Udara

Suhu udara mencerminkan tingkat panas dan dingin di atmosfer, dan bervariasi tergantung pada lokasi serta waktu di permukaan bumi. Di Kota Salatiga, suhu udara tergolong sejuk, dengan rata-rata tahunan berkisar antara 26-27,5 derajat Celsius, dan suhu ini relatif merata di keempat kecamatan yang ada di Kota Salatiga. Untuk informasi lebih lengkap, dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 2.3. Suhu Udara Kota Salatiga

Kecamatan	Suhu oC	Luas (Ha)
Kecamatan Argomulyo	25 - 26 oC	1,584.72
	27 - 27.5 oC	232.25
Kecamatan Sidomukti	25 - 26 oC	101.48
	26 - 27 oC	920.99
Kecamatan Sidorejo	27 - 27.5 oC	101.39
	26 - 27 oC	969.78

Kecamatan	Suhu oC	Luas (Ha)
	27 - 27.5 oC	626.79
Kecamatan Tingkir	26 - 27 oC	147.16
	27 - 27.5 oC	898.04

Sumber : RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045

b. Curah Hujan

Berdasarkan letak geografis, kondisi klimatologi wilayah Kota Salatiga beriklim tropis. Musim penghujan antara bulan November – Juni dipengaruhi oleh musim Barat, sedang musim kemarau antara bulan Juli – Oktober yang dipengaruhi oleh Angin Musim Timur. Curah hujan Kota Salatiga selama 2020-2024 menunjukkan variabilitas tahunan yang signifikan, mencapai puncaknya pada 2020 (3.032 mm) dan 2021 (2.999 mm), lalu menurun drastis di 2023 (1.746 mm), dan sedikit pulih di 2022 (2.425 mm) dan 2024 (2.423 mm). Secara musiman, bulan-bulan awal tahun (Januari-Maret) dan akhir tahun (November-Desember) cenderung menjadi periode dengan curah hujan tinggi, seringkali melampaui 300 mm, bahkan mencapai di atas 500 mm pada beberapa kesempatan (seperti Januari dan Maret 2021). Sebaliknya, bulan-bulan tengah tahun, terutama Juni, Juli, Agustus, dan September, umumnya merupakan periode kering dengan curah hujan yang jauh lebih rendah, bahkan seringkali mencapai 0 mm di bulan-bulan seperti Juli, Agustus, dan September pada tahun 2023, serta Juli dan Agustus 2024. Pola ini mengindikasikan adanya musim kemarau dan musim hujan yang jelas, dengan implikasi penting untuk manajemen sumber daya air di wilayah tersebut. Kondisi curah hujan dan hari hujan Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4. Curah Hujan Tahunan Kota Salatiga Tahun 2020-2024

Bulan	Curah Hujan (mm)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	391	550	239	281	214
Februari	501	306	223	194	381
Maret	469	556	290	219	246
April	348	168	137	377	152
Mei	266	120	228	221	105
Juni	81	176	238	6	98
Juli	72	19	20	0	3
Agustus	78	80	8	0	0
September	21	140	103	0	159
Oktober	180	144	275	107	38
November	167	414	448	68	335
Desember	458	326	216	273	692
Jumlah	3.032	2.999	2.425	1.746	2.423

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga.2025

Secara spasial, distribusi rata-rata curah hujan tahunan di Kota Salatiga dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

4. Geologi

Kondisi geologi di Kota Salatiga terdiri dari satuan morfologi gunung api, yang mencakup puncak Gunung Merbabu dan Gunung Telomoyo, dengan ketinggian umumnya lebih dari 1400 mdpl. Sementara itu, satuan morfologi tubuh gunung api terletak pada ketinggian antara 400-1400 mdpl dan memiliki kemiringan lereng antara 10°-50°. Satuan ini membentang dari tenggara ke barat laut sepanjang lereng Gunung Merbabu dan Gunung Telomoyo, serta mencakup area kecil di barat laut yang terdiri dari sedimen tersier. Sungai-sungai di daerah ini umumnya memiliki pola aliran sub-dendritik dan radial yang mengalir menuju Rawa Pening. Dari segi kondisi tanah, Kota Salatiga didominasi oleh tanah Latosol Coklat dan Latosol Coklat tua, yang membuatnya cocok untuk berbagai jenis tanaman karena teksturnya yang remah dan gembur.

Berdasarkan peta geologi lembar Salatiga, secara regional Kota Salatiga merupakan bagian dari peta geologi Pegunungan Kendeng bagian barat (Sukardi dan T. Budhitrisna, 1992) yang terdiri dari kelompok batuan sedimen atau endapan vulkanik. Oleh karena itu, Kota Salatiga memiliki tiga jenis batuan, yaitu 1) Endapan Kolokium, hasil rombakan dari Breksi Vulkanik Tufa; 2) Endapan Vulkanik Muda yang terdiri dari Tufa Lahan Breksi dan Lava; 3) Tufa, Batu Pasir, dan Breksi Vulkanik dengan sisipan Napal. Jenis batuan induk ini akan mempengaruhi jenis tanah yang ada.

Sumber : Peta RTRW Kota Salatiga 2023-2043

Gambar 2.4. Peta bantuan Geologi Kota Salatiga

5. Jenis tanah

Jenis tanah di Kota Salatiga meliputi Aluvial Coklat Kekelabuan, Andosol Coklat, Latosol Coklat yang berasosiasi dengan Andosol Coklat, serta Latosol Coklat Kemerahan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

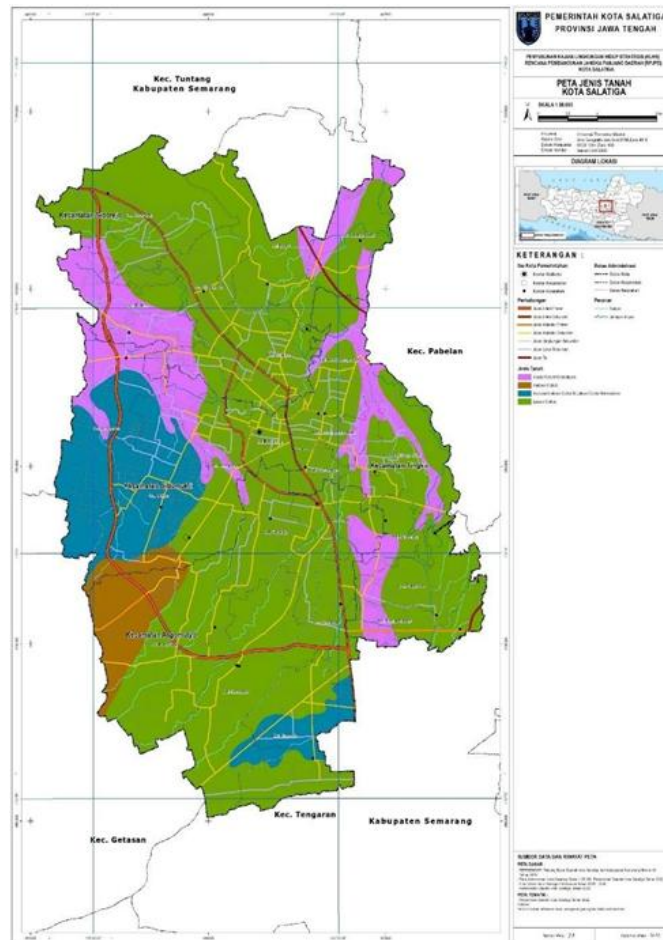
Tabel 2.5. Jenis Tanah Kota Salatiga

Luas (Ha)						
No	Kecamatan/ Kelurahan	Aluvial Coklat	Andosol Coklat	Asosiasi Andosol Coklat & Latosol	Latosol Coklat	Jumlah
		Kekelabuan		Coklat Kemerahan		
I	Kecamatan Argomulyo					
1	Noborejo	-	-	99,74	207,57	307,31
2	Cebongan	3	-	2,59	148,48	154,07
3	Randuacir	-	-	26,55	382,99	409,53
4	Ledok	24,67	-	-	164,6	189,27
5	Tegalrejo	5,65	-	-	190,09	195,74
6	Kumpulrejo	-	187,02	-	372,49	559,51
	Jumlah	33,32	187,02	128,88	1.466,21	1.815,43
II	Kecamatan Sidomukti					
1	Kecandran	99,13	-	254,41	-	353,54
2	Dukuh	16,46	45,25	305,35	3,28	370,34
3	Manqunsari	77,82	4,8	2,99	202,72	288,33

Luas (Ha)						
No	Kecamatan/ Kelurahan	Aluvial Coklat	Andosol Coklat	Asosiasi Andosol Coklat & Latosol	Latosol Coklat	Jumlah
		Kekelabuan		Coklat Kemerahan		
4	Kalicacing	-	-	-	69,75	69,75
	Jumlah	193,4	50,05	562,75	275,75	1.081,96
III	Kecamatan Sidorejo					
1	Pulutan	174,19	-	-	38,27	212,46
2	Blotongan	18,77	-	-	405,15	423,92
3	Sidorejo Lor	38,51	-	-	219,2	257,7
4	Salatiga	2,1	-	-	202,94	205,04
5	Bugel	13,71	-	-	236,12	249,83
6	Kauman Kidul	91,11	-	-	118,82	209,93
	Jumlah	338,4	-	-	1.220,48	1.558,88
IV	Kecamatan Tingkir					
1	Tingkir Tengah	34,23	-	-	105,27	139,5
2	Tingkir Lor	19,63	-	-	154,53	174,16
3	Kalibening	30,94	-	-	64,95	95,89
4	Sidorejo Kidul	66,56	-	-	210,18	276,74
5	Gendongan	-	-	-	57,17	57,17
6	Kutowinangun Kidul	29,25	-	-	68,52	97,77
7	Kutowinangun Lor	50,95	-	-	149,87	200,82
	Jumlah	231,56	-	-	810,5	1.042,06
	Jumlah Total	796,67	237,07	691,63	3.772,94	5.498,32

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Batas Daerah Antara Kota Salatiga Dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah dan Perhitungan Interpretasi Pemetaan RTRW Kota Salatiga, Diolah, 2022

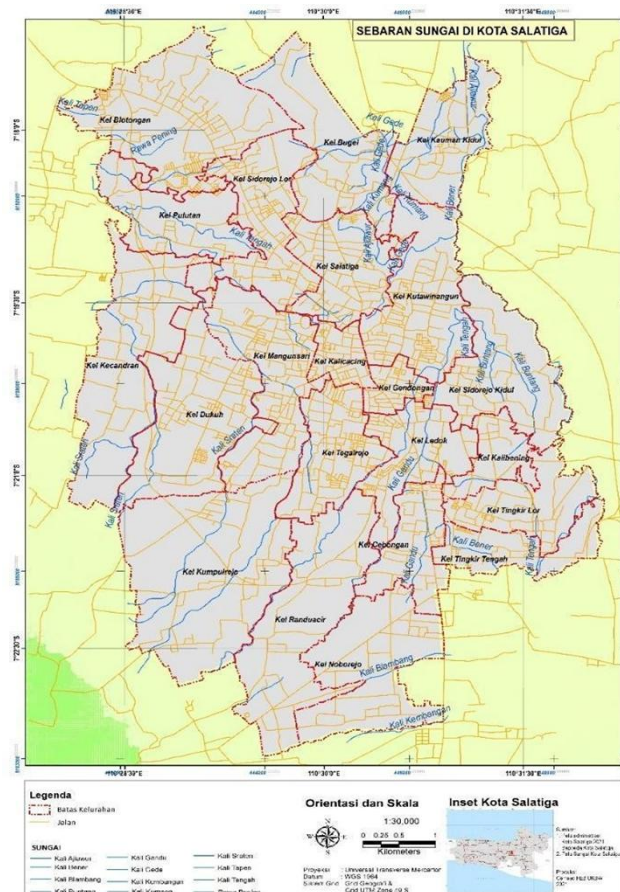
Sebaran jenis tanah di Kota Salatiga dapat dilihat secara spasial pada Peta Jenis Tanah Kota Salatiga berikut.



Sumber : Peta RTRW Kota Salatiga 2023-2043
Gambar 2.5. Peta Jenis Tanah Kota Salatiga

6. Geohidrologi dan Hidrologi

Kota Salatiga terletak di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tuntang dan DAS Rawa Pening, yang merupakan bagian dari wilayah kerja DAS Jratunseluna. Dalam hal hidrologi, Kota Salatiga memiliki dua sumber air yaitu air permukaan dan air bawah tanah (hidrogeologi). Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, masyarakat dapat memanfaatkan air permukaan yang berasal dari sungai dan mata air. Sementara itu, air bawah tanah dapat diperoleh melalui pengeboran sumur dangkal. Mata air dan sungai di daerah ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai sumber air bersih bagi penduduk, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun kontinuitas. Beberapa mata air di Kota Salatiga meliputi Kali Senjoyo, Kali Tengah, Kali Sraten, Kali Kedawung, Kali Buntang, Kali Ajiawur, dan Kali Londo. Dengan adanya aliran sungai dan mata air tersebut, terdapat potensi yang cukup besar untuk pengembangan sebagai salah satu sumber air yang sangat bermanfaat bagi kebutuhan air di Kota Salatiga.



Sumber : Peta RTRW Kota Salatiga 2023-2043

Gambar 2.6. Peta Sebaran Sungai Kota Salatiga

Sumber-sumber air baku dari mata air yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih antara lain:

- 1) Mata air Senjoyo melayani Kelurahan: Tingkir Lor, Tingkir Tengah, Ledok, Tegalrejo, Mangunsari, Kalicacing, Kecandran, Sidorejo Lor, Pulutan dan Mangunsari;
- 2) Mata air Kaligojek melayani Kelurahan: Kalibening, Sidorejo Kidul, Kutowinangun Kidul, Kutowinangun Lor dan Salatiga;
- 3) Mata air Kaligethek, Kalitaman dengan debit 18 (delapan belas) liter per detik dan Kalisombo timur dengan debit 10 (sepuluh) liter per detik melayani Kelurahan: Kutowinangun Lor, Bugel, Salatiga, Sidorejo Lor dan Blotongan;
- 4) Sumur artesis Jalan Sukowati melayani Kelurahan: Kalicacing, Mangunsari dan Kecandran;
- 5) Sumur artesis Cebongan melayani Kelurahan: Ledok dan Tegalrejo;
- 6) Sumur artesis Tegalsari melayani Kelurahan: Kalibening dan Sidorejo Kidul;

Sedangkan untuk aliran sungai yang dapat dimanfaatkan yaitu:

- 1) Sungai Senjoyo di Kelurahan: Tingkir Tengah, Tingkir Lor, Sidorejo Kidul, Kutowinangun Lor dan Kutowinangun Kidul;
- 2) Sungai Setro di Kelurahan Kauman Kidul;

- 3) Sungai Jetis di Kelurahan: Randuacir, Noborejo, Cebongan, Ledok, Sidorejo Kidul, Kutowinangun Lor dan Kutowinangun Kidul;
- 4) Sungai Ngaglik di Kelurahan: Kumpulrejo, Randuacir, Tegalrejo, Ledok, Gendongan, Kutowinangun Lor dan Kutowinangun Kidul;
- 5) Sungai Nanggulan di Kelurahan: Kutowinangun Lor dan Kutowinangun Kidul;
- 6) Sungai Ngawen di Kelurahan: Kumpulrejo, Tegalrejo dan Mangunsari;
- 7) Sungai Sraten di Kelurahan: Kumpulrejo, Mangunsari, Kelurahan Dukuh dan Kecandran;
- 8) Sungai Sawahan di Kelurahan: Kumpulrejo, Dukuh dan Kecandran;
- 9) Sungai Ngemplak di Kelurahan: Dukuh dan Kecandran.

7. Penggunaan Lahan

Luas tutupan lahan berdasarkan hasil pemetaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2021 seluas 5.498,2 hektare dengan luas terbesar sebagai fungsi budidaya non terbangun seluas 3.044,32 hektare dan fungsi tutupan lahan terbangun seluas 2454,24 hektare. Secara rinci, luas tutupan lahan Kota Salatiga Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Batas Daerah Antara Kota Salatiga Dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah dan Hasil Olah Pemetaan Tahun 2021 dengan dasar Foto Udara Kota Salatiga Tahun 2019-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6. Luas Tutupan Lahan Kota Salatiga

No	Tutupan Lahan	Argomulyo	Sidomukti	Sidorejo	Tingkir	Jumlah
A	Terbangun					
1	Bangunan Hankam	14,4	21,94	6,92	2,79	46,06
2	Bangunan Industri	115,27	9,09	1,08	15,65	141,08
3	Bangunan Kesehatan	2,36	17,39	0,86	5,58	26,18
4	Bangunan Olahraga	1,62	3,1	0,27	0,13	5,12
5	Bangunan Pariwisata dan Hiburan	1,86	-	0,61	0,01	2,48
6	Bangunan Pendidikan	15,21	23,34	57,69	13,55	109,79
7	Bangunan Perdagangan Jasa	10,97	17,51	26,67	9,55	64,71
8	Bangunan Peribadatan	4,08	4,46	5,41	2,98	16,93
9	Bangunan Perkantoran	4,65	9,94	10,97	2,3	27,86
10	Bangunan Permukiman	514,61	391,38	511,03	391,06	1.808,07
11	Bangunan Transportasi	-	-	0,16	1,77	1,93
12	Bangunan Utilitas	5,38	0,18	1,42	0,01	6,98
13	Jalan	50,19	47,62	66,15	31,92	195,87
14	Permukaan/Lapangan Diperkeras		0,26		0,08	0,34
15	Lapangan Olahraga	0,3		0,54		0,84
	Jumlah	740,9	546,21	689,78	477,38	2454,24

No	Tutupan Lahan	Argomulyo	Sidomukti	Sidorejo	Tingkir	Jumlah
B	Non Terbangun					
13	Hutan Kota	1,06	-	-	-	1,06
14	Kolam	0,01		2,17	1,79	3,98
16	Makam	12,9	10,54	31,26	14,24	68,94
17	Perkebunan			336,76	1,55	338,31
18	Peternakan	0	1,19			1,19
19	Sawah	12,95	51,32	273,51	242,95	580,73
20	Sungai	9,85	8,97	7,84	8,71	35,38
21	Taman	32,18	10,58	13,79	7,28	63,84
22	Tegalan/ Ladang	1.005,67	453,15	203,95	288,11	1.950,87
	Jumlah	1.074,63	535,74	869,27	564,65	3.044,32
	Jumlah Total	1.815,53	1.081,95	1.559,05	1.042,03	5.498,56

Sumber: KLHS RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029

2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Kota Salatiga memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang bisa dikembangkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Berikut adalah beberapa potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kota Salatiga mengacu pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043:

1. Potensi Pertanian

Potensi pertanian Kota Salatiga ditunjukkan dengan ditetapkannya kawasan pertanian seluas kurang lebih 1.357,26 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh koma dua enam) hektar berupa kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura dan kawasan perkebunan.

Tabel 2.7. Potensi Pertanian Kota Salatiga

No	Kawasan	Lokasi
1	Kawasan tanaman pangan	a. Kelurahan Ledok di Kecamatan Argomulyo b. Kecamatan Sidomukti, meliputi: 1. Kelurahan Kecandran; dan 2. Kelurahan Mangunsari. c. Kecamatan Sidorejo, meliputi: 1. Kelurahan Blotongan; 2. Kelurahan Bugel; 3. Kelurahan Kauman Kidul; 4. Kelurahan Pulutan; 5. Kelurahan Salatiga; dan 6. Kelurahan Sidorejo Lor. d. Kecamatan Tingkir, meliputi: 1. Kelurahan Kalibening; 2. Kelurahan Kutowinangun Kidul;

No	Kawasan	Lokasi
		3. Kelurahan Kutowinangun Lor; 4. Kelurahan Sidorejo Kidul; 5. Kelurahan Tingkir Lor; dan 6. Kelurahan Tingkir Tengah
2	Kawasan hortikultura	a. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Argomulyo b. Kecamatan Sidomukti, meliputi: 1. Kelurahan Dukuh; 2. Kelurahan Kecandran; dan 3. Kelurahan Mangunsari. c. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Sidorejo d. Kecamatan Tingkir, meliputi: 1. Kelurahan Kalibening; 2. Kelurahan Kutowinangun Kidul; 3. Kelurahan Kutowinangun Lor; 4. Kelurahan Sidorejo Kidul; 5. Kelurahan Tingkir Lor; dan 6. Kelurahan Tingkir Tengah
3	Kawasan perkebunan	a. Kelurahan Ledok di Kecamatan Argomulyo b. Kecamatan Sidorejo, meliputi: 1. Kelurahan Blotongan; 2. Kelurahan Bugel; 3. Kelurahan Kauman Kidul; dan 4. Kelurahan Sidorejo Lor. c. Kecamatan Tingkir, meliputi: 1. Kelurahan Kutowinangun Kidul; 2. Kelurahan Kutowinangun Lor; dan 3. Kelurahan Sidorejo Kidul.

Sumber : RTRW Kota Salatiga 2023-2043

Dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 417,20 (empat ratus tujuh belas koma dua puluh) hektar tersebar pada:

- a. Kelurahan Ledok di Kecamatan Argomulyo
- b. Kecamatan Sidomukti, meliputi:
 - 1). Kelurahan Kecandran; dan
 - 2). Kelurahan Mangunsari.
- c. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Sidorejo
- d. Kecamatan Tingkir, meliputi:
 - 1). Kelurahan Kalibening;

- 2). Kelurahan Kutowinangun Lor;
- 3). Kelurahan Sidorejo Kidul;
- 4). Kelurahan Tingkir Lor; dan
- 5). Kelurahan Tingkir Tengah.

2. Potensi Perikanan

Potensi perikanan di Kota Salatiga ditunjukkan dengan ditetapkan nya kawasan perikanan berupa kawasan perikanan budi daya seluas kurang lebih 5,83 (lima koma delapan tiga) hektar terdapat pada:

a. Kecamatan Sidorejo, meliputi:

- 1). Kelurahan Blotongan;
- 2). Kelurahan Bugel;
- 3). Kelurahan Kauman Kidul; dan
- 4). Kelurahan Pulutan.

b. Kecamatan Tingkir, meliputi:

- 1). Kelurahan Kalibening;
- 2). Kelurahan Kutowinangun Lor; dan
- 3). Kelurahan Tingkir Tengah.

3. Potensi Pertambangan dan Energi

Potensi pertambangan dan energi ditunjukkan dengan ditetapkan nya Kawasan Pertambangan dan Energi berupa kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) dengan luas kurang lebih 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) hektar yang berada pada Kelurahan Bugel di Kecamatan Sidorejo.

4. Potensi Peruntukan Industri

Potensi peruntukkan industri ditunjukkan dengan ditetapkan nya Kawasan Peruntukan Industri (KPI) seluas kurang lebih 230,39 (dua ratus tiga puluh koma tiga sembilan) hektar tersebar pada:

a. Kecamatan Argomulyo, meliputi:

- 1). Kelurahan Cebongan;
- 2). Kelurahan Kumpulrejo;
- 3). Kelurahan Ledok;
- 4). Kelurahan Noborejo; dan
- 5). Kelurahan Randuacir.

b. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Sidomukti.

c. Kecamatan Sidorejo, meliputi:

- 1). Kelurahan Blotongan;
- 2). Kelurahan Kauman Kidul;
- 3). Kelurahan Pulutan; dan
- 4). Kelurahan Salatiga.

d. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Tingkir.

5. Potensi Pariwisata

Potensi pariwisata Kota Salatiga ditunjukkan dengan ditetapkannya kawasan pariwisata dengan luas kurang lebih 87,04 (delapan puluh tujuh koma nol empat) hektar terdapat pada:

a. Kecamatan Argomulyo, meliputi:

- 1). Kelurahan Cebongan; dan
- 2). Kelurahan Kumpulrejo;

b. Kecamatan Sidorejo, meliputi:

- 1). Kelurahan Blotongan;
- 2). Kelurahan Bugel;
- 3). Kelurahan Kauman Kidul; dan
- 4). Kelurahan Salatiga.

c. Kecamatan Tingkir, meliputi:

- 1). Kelurahan Kutowinangun Kidul;
- 2). Kelurahan Tingkir Lor; dan
- 3). Kelurahan Tingkir Tengah

6. Potensi Perdagangan dan Jasa

Potensi perdagangan dan jasa ditunjukkan dengan ditetapkannya Kawasan Perdagangan dan Jasa (K) dengan luas kurang lebih 618,40 (enam ratus delapan belas koma empat nol) hektar terdapat di seluruh Kelurahan. Kawasan Perdagangan dan Jasa (K) yang di dalamnya terdapat kegiatan sektor informal berupa area khusus untuk PKL.

2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

2.1.3.1. Daya Dukung

1. Kemampuan Lahan untuk Alokasi Pemanfaatan Ruang

A. Analisis Kemampuan Lahan dalam Tingkat Kelas Untuk Alokasi Pemanfaatan Ruang

Analisis kemampuan lahan merujuk pada Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Tahun 2021. Kemampuan lahan merupakan karakteristik lahan yang mencakup sifat tanah (fisik dan kimia), topografi, drainase dan kondisi lingkungan hidup lain. Analisis kemampuan lahan dalam tingkat kelas dilakukan dengan teknik overlay peta dengan menggunakan data fisik alam dalam bentuk peta yaitu topografi/ kemiringan lereng, jenis tanah, drainase dan lahan kritis. Data tersebut dianalisis menggunakan overlay peta untuk menghasilkan klasifikasi kelas lahan.

Lahan diklasifikasikan ke dalam 8 (delapan) kelas, yang ditandai dengan huruf romawi I sampai dengan VIII. Dua kelas pertama (kelas I dan kelas II) merupakan lahan yang cocok untuk penggunaan pertanian dan 2 (dua) kelas terakhir (kelas VII dan kelas VIII) merupakan lahan yang harus dilindungi atau

untuk fungsi konservasi. Kelas III sampai dengan kelas VI dapat dipertimbangkan untuk berbagai pemanfaatan lainnya dan masih dapat digunakan untuk pertanian. Rincian klasifikasi kemampuan lahan dan penggunaannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8. Klasifikasi Kemampuan Lahan Dalam Tingkat Kelas

No	Kelas	Kriteria	Penggunaan
1.	I	1) Tidak mempunyai atau hanya sedikit hambatan yang membatasi penggunaannya. 2) Sesuai untuk berbagai penggunaan, terutama pertanian. 3) Karakteristik lahannya antara lain: topografi hampir datar - datar, ancaman erosi kecil, kedalaman efektif dalam, drainase baik, mudah diolah, kapasitas menahan air baik, subur, tidak terancam banjir.	Pertanian: a. Tanaman pertanian semusim. b. Tanaman rumput. c. Hutan dan cagar alam.
2.	II	1) Mempunyai beberapa hambatan atau ancaman kerusakan yang mengurangi pilihan penggunaannya atau memerlukan tindakan konservasi yang sedang. 2) Pengelolaan perlu hati-hati termasuk tindakan konservasi untuk mencegah kerusakan.	Pertanian: a. Tanaman semusim. b. Tanaman rumput. c. Padang Penggembalaan d. Hutan Produksi e. Hutan Lindung f. Cagar Alam
3.	III	1) Mempunyai beberapa hambatan yang berat yang mengurangi pilihan penggunaan lahan dan memerlukan tindakan konservasi khusus dan keduanya. 2) Mempunyai pembatas lebih berat dari kelas II dan jika dipergunakan untuk tanaman perlu pengelolaan tanah dan tindakan konservasi lebih sulit diterapkan. 3) Hambatan pada angka I membatasi lama penggunaan bagi tanaman semusim, waktu pengolahan, pilihan tanaman atau kombinasi dari pembatas tersebut.	1. Pertanian: a. Tanaman semusim. b. Tanaman yang memerlukan pengolahan tanah. c. Tanaman rumput. d. Padang rumput. e. Hutan produksi. f. Hutan lindung dan cagar alam. 2. Non-pertanian.
4.	IV	1) Hambatan dan ancaman kerusakan tanah lebih besar dari kelas III, dan pilihan tanaman juga terbatas. 2) Perlu pengelolaan hati-hati untuk tanaman semusim, tindakan konservasi lebih sulit diterapkan.	1. Pertanian: a. Tanaman semusim dan tanaman pertanian pada umumnya. b. Tanaman rumput. c. Hutan produksi. d. Padang penggembalaan e. Hutan lindung dan suaka alam. 2. Non-pertanian.
5.	V	1) Tidak terancam erosi tetapi mempunyai hambatan lain yang tidak mudah untuk dihilangkan, sehingga membatasi pilihan penggunaannya. 2) Mempunyai hambatan yang membatasi pilihan macam penggunaan dan tanaman. 3) Terletak pada topografi datar-hampir datar tetapi sering terlanda banjir, berbatu atau iklim yang kurang sesuai.	1. Pertanian: a. Tanaman rumput. b. Padang penggembalaan. c. Hutan produksi. d. Hutan lindung dan suaka alam. 2. Non-pertanian
6.	VI	1) Mempunyai faktor penghambat berat yang menyebabkan penggunaan tanah sangat terbatas karena mempunyai ancaman kerusakan yang tidak dapat dihilangkan. 2) Umumnya terletak pada lereng curam, sehingga jika dipergunakan untuk penggembalaan dan hutan produksi harus dikelola dengan baik untuk menghindari erosi.	1. Pertanian: a. Tanaman rumput. b. Padang penggembalaan. c. Hutan produksi. d. Hutan lindung dan cagar alam. 2. Non-pertanian
7.	VII	Mempunyai faktor penghambat dan ancaman berat yang tidak dapat dihilangkan, karena itu pemanfaatannya harus bersifat konservasi. Jika digunakan untuk padang rumput atau hutan produksi harus dilakukan pencegahan erosi yang berat.	a. Padang rumput. b. Hutan produksi.
8.	VIII	1) Sebaiknya dibiarkan secara alami. 2) Pembatas dan ancaman sangat berat dan tidak mungkin dilakukan tindakan konservasi, sehingga perlu dilindungi.	a. Hutan lindung. b. Rekreasi alam. c. Cagar alam.

Sumber : Permen LH No 17 Tahun 2009

Berdasarkan Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Kota Salatiga tahun 2021, kelas kemampuan lahan berada pada kelas I sampai dengan Kelas VII. Sebaran kelas kemampuan lahan dapat dilihat pada tabel berikut.

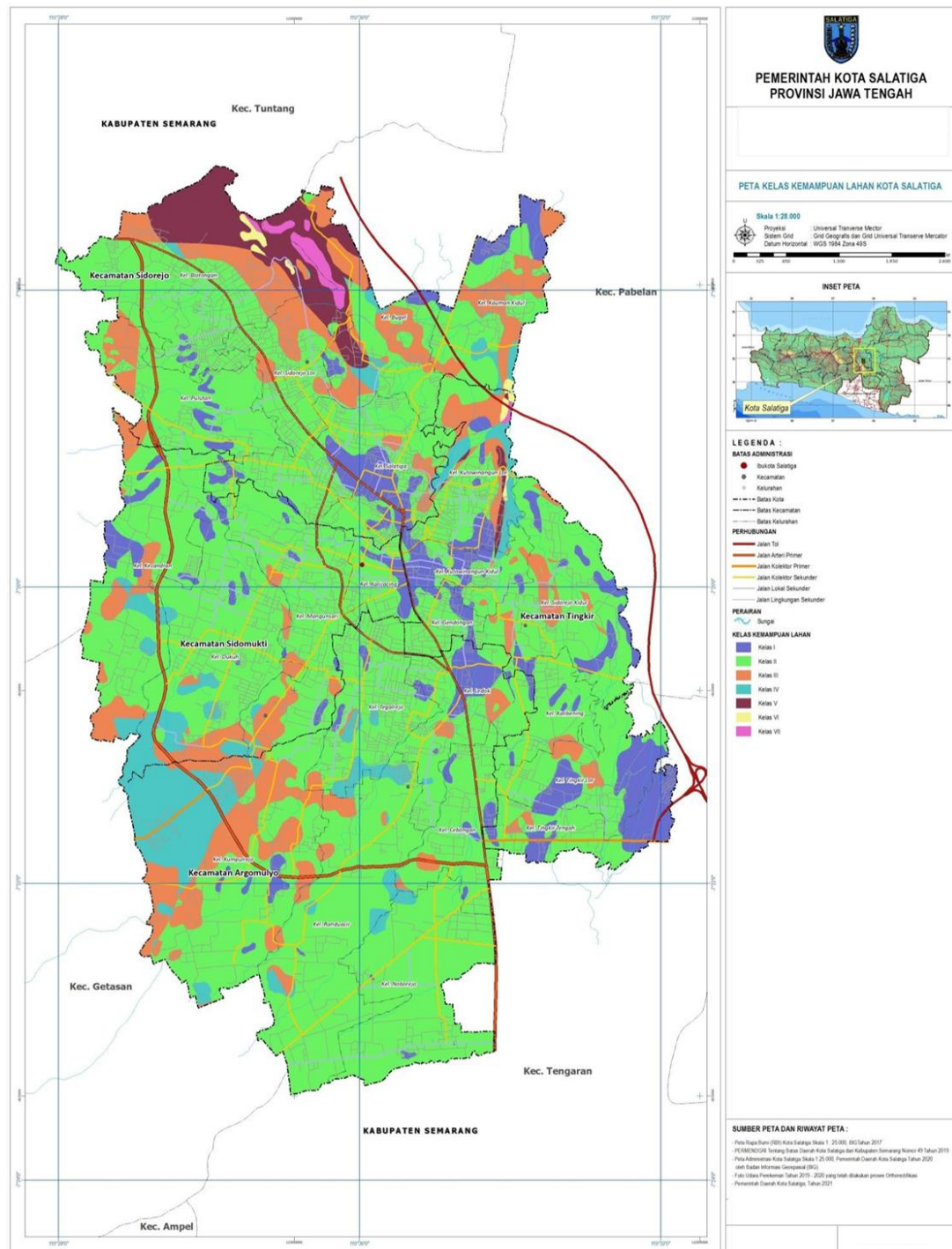
Tabel 2.9. Luas Kelas Kemampuan Lahan Kota Salatiga

No	Kecamatan/ Kelurahan	Kelas Kemampuan Lahan (Dalam Ha)							Jumlah (Ha)
		I	II	III	IV	V	VI	VII	
A	Kec. Argomulyo	70,54	1.341,29	207,11	196,59	-	-	-	1.815,53
1	Kel. Cebongan	9,74	136,54	6,37	1,42	-	-	-	154,07
2	Kel. Kumpulrejo	13,09	241,55	161,85	143,02	-	-	-	559,51
3	Kel. Ledok	38,98	136,72	12,62	0,95	-	-	-	189,27
4	Kel. Noborejo	1,62	298,39	0,00	7,31	-	-	-	307,31
5	Kel. Randuacir	0,48	364,25	20,43	24,46	-	-	-	409,63
6	Kel. Tegalrejo	6,63	163,84	5,84	19,42	-	-	-	195,74
B	Kec. Sidomukti	65,16	809,58	123,47	83,74	-	-	-	1.081,95
1	Kel. Dukuh	9,48	272,54	31,79	56,52	-	-	-	370,34
2	Kel. Kalicacing	14,60	55,15	-	-	-	-	-	69,75
3	Kel. Kecandran	33,52	243,70	53,42	22,89	-	-	-	353,53
4	Kel. Mangunsari	7,56	238,19	38,25	4,33	-	-	-	288,33
C	Kec. Sidorejo	123,64	915,07	287,21	27,57	171,93	8,87	24,77	1.559,05
1	Kel. Blotongan	4,43	232,93	64,35	2,36	106,51	7,22	6,13	423,92
2	Kel. Bugel	9,39	89,03	70,81	12,74	49,51	-	18,52	250,00
3	Kel. Kauman Kidul	29,62	101,23	65,89	11,54	0,00	1,65	-	209,93
4	Kel. Pulutan	11,22	169,28	31,96	-	-	-	-	212,46
5	Kel. Salatiga	55,00	134,54	14,41	0,94	0,15	-	-	205,04
6	Kel. Sidorejo Lor	13,97	188,07	39,79	-	15,76	-	0,11	257,70
D	Kec. Tingkir	231,87	672,90	90,19	31,73	9,36	4,38	1,60	1.042,03
1	Kel. Gendongan	11,28	45,89	-	-	-	-	-	57,17
2	Kel. Kalibening	6,55	86,69	2,65	-	-	-	-	95,89
3	Kel. Kutowinangun Kidul	37,14	55,84	3,24	1,37	0,18	-	-	97,77
4	Kel. Kutowinangun Lor	23,45	95,18	37,03	29,99	9,18	4,38	1,60	200,82
5	Kel. Sidorejo Kidul	36,47	210,83	29,07	0,36	-	-	-	276,74
6	Kel. Tingkir Lor	56,23	104,25	13,68	-	-	-	-	174,16
7	Kel. Tingkir Tengah	60,73	74,22	4,52	-	-	-	-	139,47
	Jumlah	491,21	3.738,83	707,98	339,62	181,30	13,25	26,36	5.498,56

Sumber : KLHS RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029

Luas sebaran berdasarkan kelas kemampuan lahan yang ada di Kota Salatiga yaitu Kelas I seluas 491,21 Ha, Kelas II seluas 3.738,83 Ha, Kelas III seluas 707,98 Ha, Kelas IV seluas 339,62 Ha, Kelas V seluas 181,30 Ha, Kelas VI seluas 13,25 Ha, Kelas VII seluas 26,36 Ha.

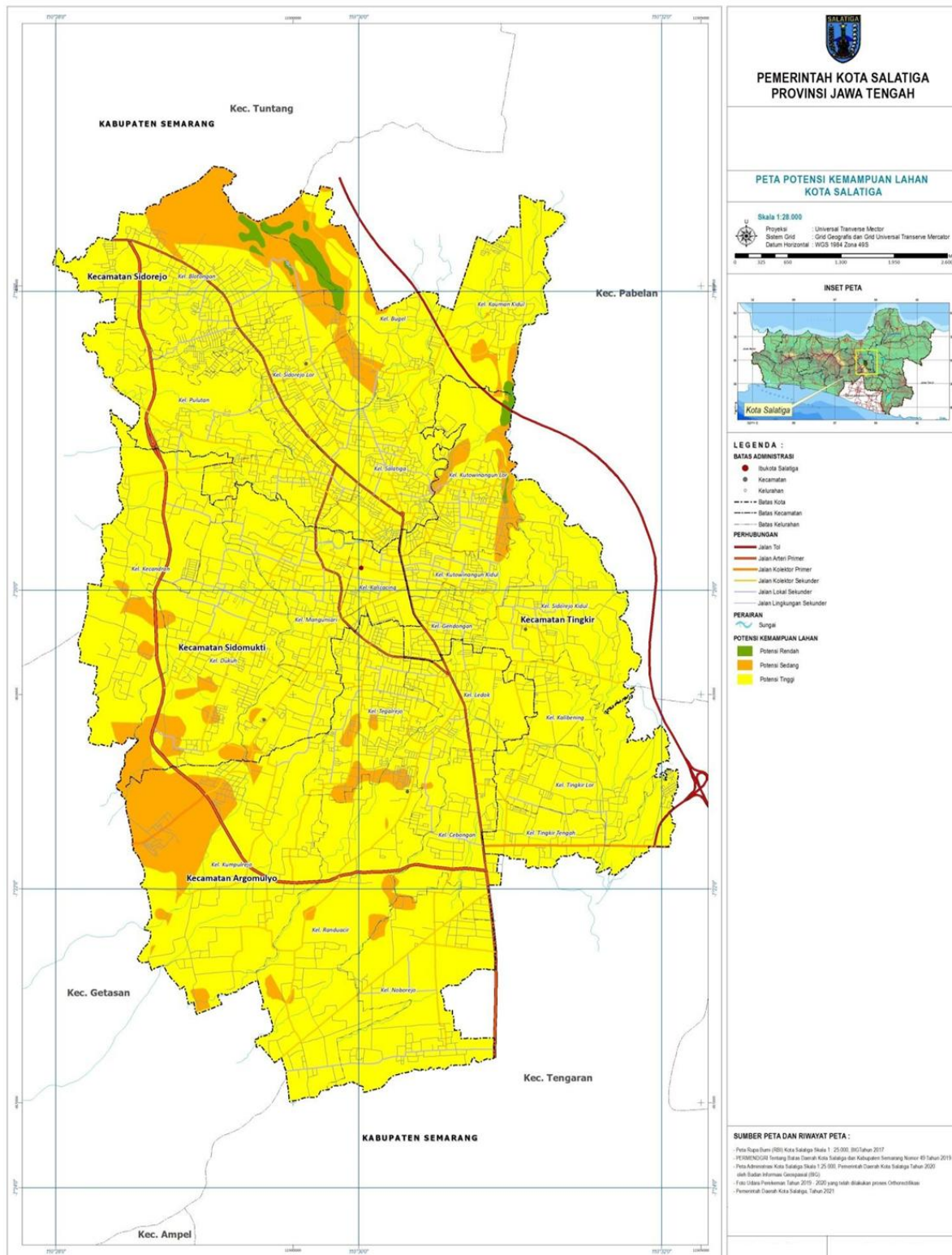
Kelas kemampuan lahan Kota Salatiga secara spasial dapat dilihat pada Peta Kelas Kemampuan Lahan Kota Salatiga.



Sumber: KLHS RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029

Gambar 2.7. Peta Kelas Kemampuan Lahan Kota Salatiga

Selain itu lahan di Kota Salatiga juga dapat dilihat berdasarkan potensi kemampuan lahan Kota Salatiga sebagaimana gambar peta berikut.



Sumber: KLHS RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029
Gambar 2.8. Peta Potensi Kemampuan Lahan Kota Salatiga

Berdasarkan peta tersebut diperoleh hasil analisis kemampuan lahan yang dapat ditentukan nilai potensi kemampuan lahan menjadi tiga (3) kelas, yaitu:

1) Tinggi

Merupakan kawasan dengan potensi kemampuan lahan yang tinggi, dengan karakteristik :

- a) Faktor kemiringan lereng dari datar hingga agak miring, memberikan kemudahan dalam penggunaan berbagai jenis pemanfaatan lahan.
- b) Semakin datar bentuk topografi permukaan lahan, semakin sedikit ancaman terhadap erosi, drainase baik, kapasitas menahan air baik sehingga tanah menjadi gembur dengan kedalaman efektif solum tanah yang dalam.
- c) Meskipun potensi genangan air dan banjir semakin besar untuk daerah-daerah tertentu dengan topografi datar dan dekat dengan sungai, namun berdampak positif pada rendahnya muka air tanah.
- d) Pada daerah-daerah dengan topografi datar hingga agak miring, cenderung memiliki jenis tanah hasil pelapukan, sehingga lebih gembur dan mudah diolah.
- e) Pertanian tanaman musiman mudah sekali berkembang dengan periode produksi yang lebih singkat.

2) Sedang

Merupakan kawasan dengan potensi kemampuan lahan sedang, dengan karakteristik :

- a) Pada lahan dengan topografi miring hingga agak curam biasanya terjadi pembatasan pemanfaatan lahan.
- b) Pada fisik lahan seperti ini pemanfaatan lahan seperti bangunan permukiman sangat terbatas karena potensi longsor cukup besar. Pemanfaatan lahan untuk pertanian juga sangat terbatas untuk jenis tanaman tertentu.
- c) Tanaman-tanaman yang tidak terlalu membutuhkan proses pengolahan tanah yang sering, tahan terhadap cuaca, tahan terhadap keterbatasan air, dan memiliki perakaran yang kuat lebih cocok untuk kawasan ini.
- d) Kondisi seperti ini juga mendukung untuk jenis tanaman tahunan yang periode produksinya cukup panjang.

3) Rendah

Merupakan kawasan dengan potensi kemampuan lahan rendah, dengan karakteristik :

- a) Faktor kemiringan lereng dari curam hingga sangat curam memberikan banyak hambatan dalam penggunaan berbagai jenis pemanfaatan lahan.
- b) Semakin curam bentuk topografi permukaan lahan, semakin besar ancaman terhadap longsor, drainase buruk, kapasitas menahan air tidak baik sehingga tanah menjadi mudah tandus.
- c) Kedalaman efektif solum tanah yang tipis menjadikan lapisan atas permukaan tanah menjadi mudah terkikis sehingga hampir sebagian

besar daerah seperti ini memiliki jenis tanah dengan sifat fisik batuan induk yang keras dan mudah untuk menyerap air tanpa bisa menahan air.

Evaluasi kesesuaian penggunaan lahan dilakukan untuk melihat kesesuaian antara penggunaan lahan dengan hasil analisis kemampuan lahan, sehingga setiap penggunaan lahan sesuai dengan kemampuan lahan dan mendukung pengembangan kawasan. Beberapa parameter pemetaan yang digunakan yaitu :

- Peta penggunaan lahan.
- Peta kemampuan lahan sampai dengan tingkat unit pengelolaan.

Dari hasil analisis evaluasi kesesuaian lahan atau pemanfaatan ruang dapat diketahui beberapa penggunaan lahan yang terindikasi berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan hasil analisis dihasilkan kondisi evaluasi kesesuaian lahan Kota Salatiga didominasi oleh kondisi sesuai/cocok, adapun kondisi kesesuaian lahan lainnya yaitu sesuai/cocok dengan rekomendasi. Karakteristik kondisi evaluasi kesesuaian lahan di Kota Salatiga, yaitu :

- Sesuai/cocok : merupakan kawasan dengan hasil evaluasi kesesuaian dengan kondisi cocok, dengan beberapa parameter karakteristik, sebagai berikut :
 - Kondisi penggunaan lahan sesuai dengan kemampuan lahan.
 - Tidak terdapat faktor penghambat dalam kesesuaian lahannya.
 - Jika terdapat faktor penghambat dapat diatasi (tidak berpengaruh negatif).
- Sesuai/cocok dengan rekomendasi : merupakan kawasan dengan hasil evaluasi kesesuaian kondisi cocok dengan rekomendasi, dengan beberapa parameter karakteristik, sebagai berikut :
 - Kondisi penggunaan lahan sesuai dengan kemampuan lahan
 - Terdapat faktor penghambat dalam kesesuaian lahannya, namun bisa diatasi dengan alternatif penggunaan lahan lainnya.

Rekapitulasi hasil evaluasi kesesuaian lahan dapat dilihat pada berikut.

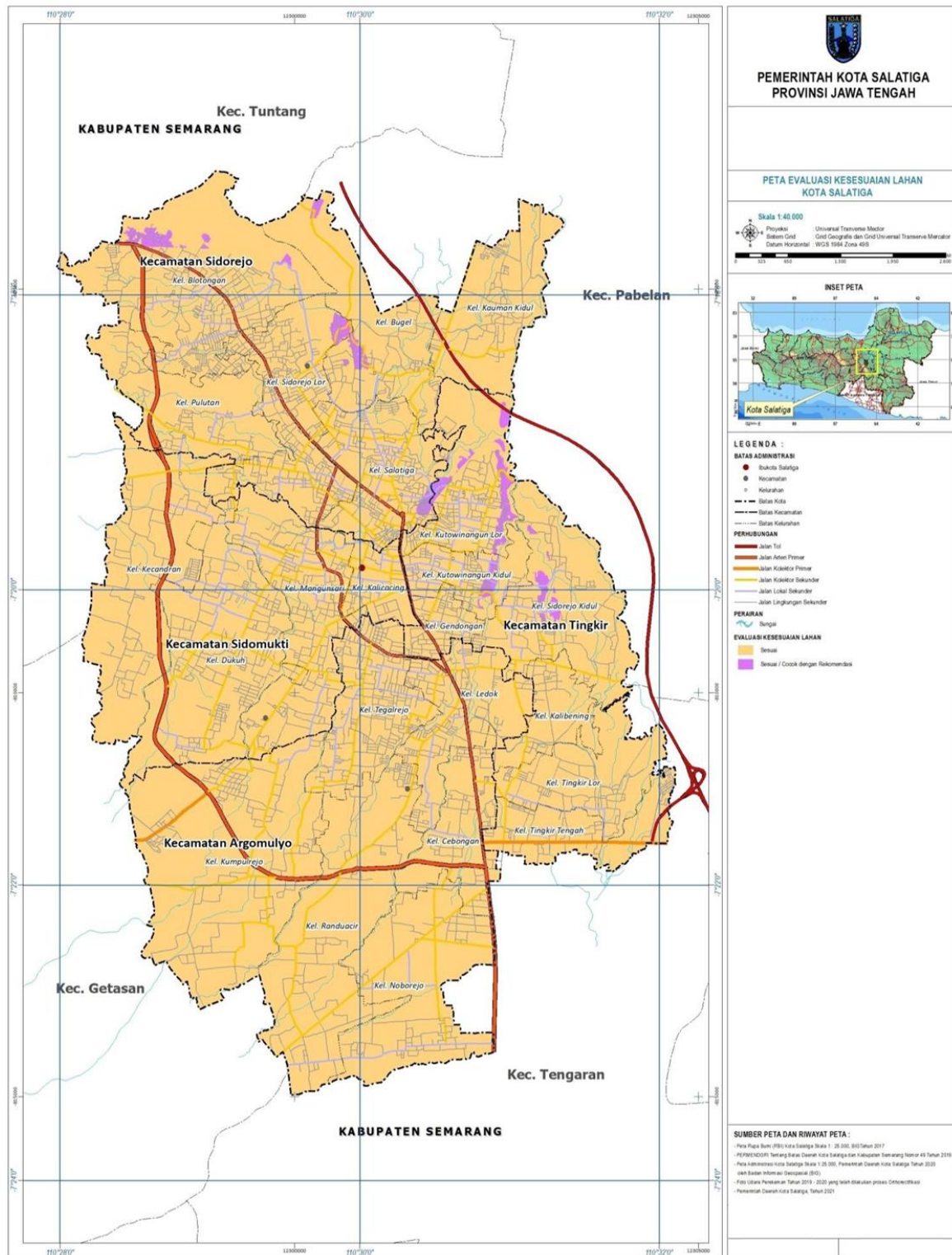
Tabel 2.10. Evaluasi Kesesuaian Lahan Kota Salatiga

No	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Evaluasi Kesesuaian (Dalam Ha)		Jumlah (Ha)
			Sesuai	Sesuai dengan Rekomendasi	
1	Kec. Argomulyo	Kel. Cebongan	154,07	-	154,07
		Kel. Kumpulrejo	559,51	-	559,51
		Kel. Ledok	189,27	-	189,27
		Kel. Noborejo	307,31	-	307,31
		Kel. Randuacir	409,63	-	409,63
		Kel. Tegalrejo	195,74	-	195,74
		Jumlah	1.815,53	-	1.815,53
2	Kec. Sidomukti	Kel. Dukuh	370,34	-	370,34
		Kel. Kalicacing	69,75	-	69,75
		Kel. Kecandran	353,53	-	353,53

No	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Evaluasi Kesesuaian (Dalam Ha)		Jumlah (Ha)
			Sesuai	Sesuai dengan Rekomendasi	
3	Kec. Sidorejo	Kel. Mangunsari	288,33	-	288,33
		Jumlah	1.081,95	-	1.081,95
		Kel. Blotongan	411,11	12,81	423,92
		Kel. Bugel	241,77	8,23	250,00
		Kel. Kauman Kidul	209,93	-	209,93
		Kel. Pulutan	212,46	-	212,46
		Kel. Salatiga	201,06	3,97	205,04
		Kel. Sidorejo Lor	251,06	6,64	257,70
4	Kec.Tingkir	Jumlah	1.527,40	31,65	1.559,05
		Kel. Gendongan	57,17	-	57,17
		Kel. Kalibening	95,89	-	95,89
		Kel. Kutowinangun Kidul	91,64	6,14	97,77
		Kel. Kutowinangun Lor	178,81	22,01	200,82
		Kel. Sidorejo Kidul	267,42	9,32	276,74
		Kel. Tingkir Lor	174,16	-	174,16
		Kel. Tingkir Tengah	139,47	-	139,47
Jumlah Total		5.429,43	69,12	5.498,56	

Sumber : Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Salatiga, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kesesuaian lahan Kota Salatiga dengan kategori “sesuai” seluas kurang lebih 5.429,43 Ha dan “sesuai dengan rekomendasi” seluas kurang lebih 69,12 Ha. Kategori “sesuai” paling banyak terdapat di Kecamatan Argomulyo seluas 1.815,53 Ha. Secara spasial hasil evaluasi kesesuaian penggunaan lahan di Kota Salatiga dapat dilihat pada Peta Evaluasi Kesesuaian Lahan Kota Salatiga.



Sumber: KLHS RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029

Gambar 2.9. Peta Evaluasi Kesesuaian Lahan di Kota Salatiga

Daya dukung lahan dihitung dari kebutuhan lahan per kapita. Daya dukung lahan dapat diketahui melalui perhitungan daya tampung lahan. Nilai yang didapat dari hasil perhitungan daya tampung dapat digunakan sebagai acuan untuk mengetahui kawasan mana saja yang berada pada kondisi

ambang batas yang masih dapat dimanfaatkan. Daya dukung lahan berdasarkan daya tampung, dihitung dengan menggunakan variabel luasan fungsi lahan dibagi dengan jumlah penduduk eksisting, dengan rumus sebagai berikut:

$$A = L/P$$

Dimana:

A = Daya dukung lahan L = Luas Lahan (ha)

P = Populasi Penduduk (jiwa)

Apabila nilai daya dukung lahan tersebut melebihi nilai yang ditentukan maka dikatakan populasi penduduk pada wilayah tersebut sudah melebihi daya dukung lingkungannya (di luar ambang batas). Nilai daya dukung lahan yang ditunjukkan dengan konsumsi lahan per kapita untuk berbagai ukuran populasi kota menurut Yeates (1980) sebagai berikut:

Tabel 2.11. Tabel Standar Konsumsi Lahan Perkapita

No	Populasi Penduduk (Jiwa)	Konsumsi Lahan (Ha/Jiwa)
1	10.000	0,100
2	25.000	0,091
3	50.000	0,086
4	100.000	0,076
5	250.000	0,070
6	500.000	0,066
7	1.000.000	0,061
8	2.000.000	0,057

Sumber: Yeates (1980)

Daya dukung lahan Kota Salatiga, dapat diketahui bahwa standar minimal daya dukung lahan dari Yeates maka untuk ukuran Kota Salatiga dengan populasi penduduk kurang dari 250 ribu jiwa adalah 0,027 Ha/Jiwa. Nilai daya dukung lahannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12. Konsumsi Lahan Perkapita Kota Salatiga

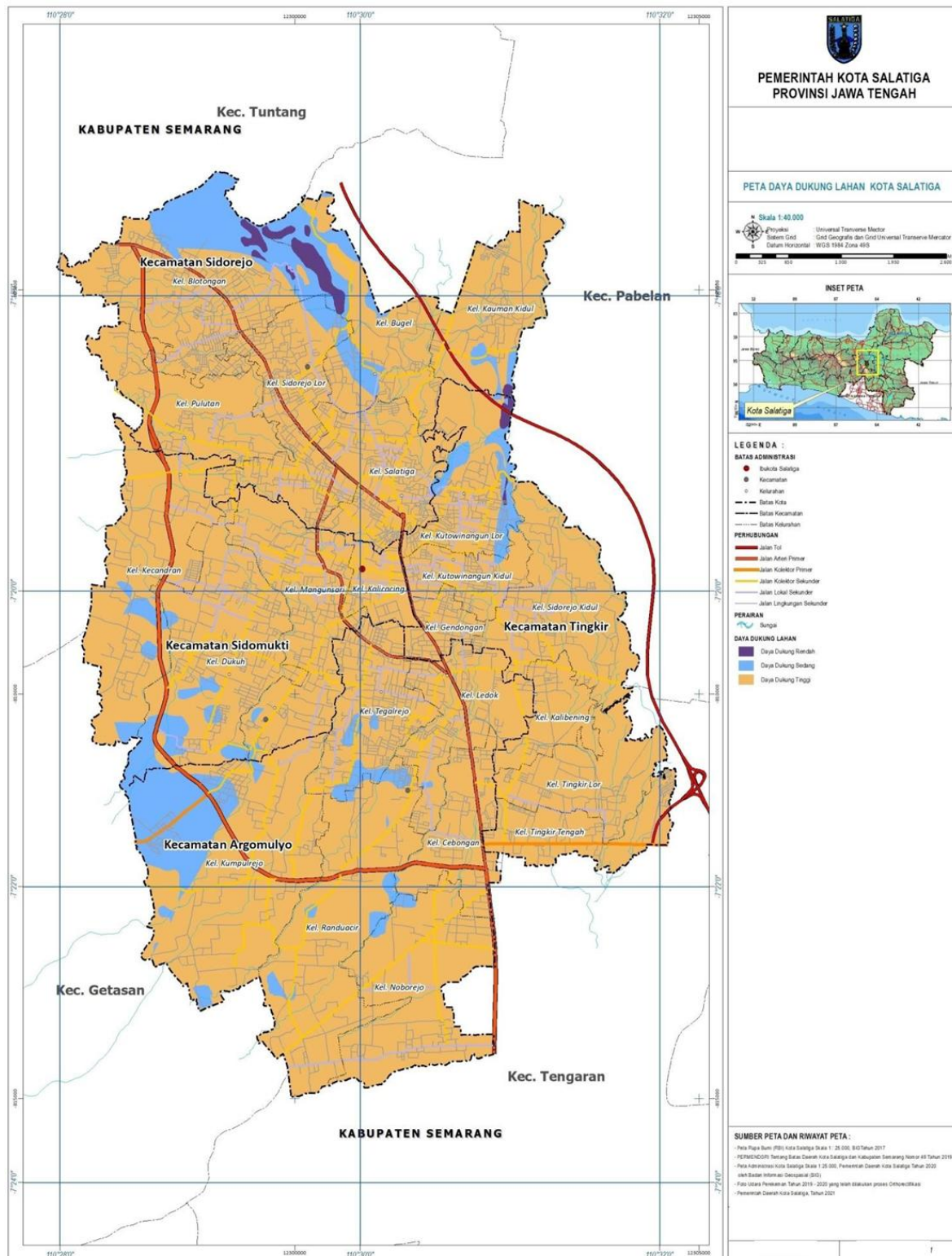
No	Kecamatan/ Kelurahan	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk	Konsumsi Lahan
		L	P	A
I	Kecamatan Argomulyo			
1	Noborejo	307,31	6.678	0,05
2	Cebongan	154,07	5.131	0,03
3	Randuacir	409,53	6.801	0,06
4	Ledok	189,27	11.036	0,02
5	Tegalrejo	195,74	12.307	0,02
6	Kumpulrejo	559,51	8.311	0,07

No	Kecamatan/ Kelurahan	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk	Konsumsi Lahan
		L	P	A
II	Kecamatan Sidomukti			
1	Kecandran	353,54	7.058	0,05
2	Dukuh	370,34	14.296	0,03
3	Mangunsari	288,33	17.494	0,02
4	Kalicacing	69,75	6.206	0,01
III	Kecamatan Sidorejo			
1	Pulutan	212,46	4.628	0,05
2	Blotongan	423,92	13.121	0,03
3	Sidorejo Lor	257,7	14.367	0,02
4	Salatiga	205,04	14.415	0,01
5	Bugel	249,83	3.498	0,07
6	Kauman Kidul	209,93	4.255	0,05
IV	Kecamatan Tingkir			
1	Tingkir Tengah	139,5	5.361	0,03
2	Tingkir Lor	174,16	5.015	0,03
3	Kalibening	95,89	2.348	0,04
4	Sidorejo Kidul	276,74	7.523	0,04
5	Gendongan	57,17	5.324	0,01
6	Kutowinangun Kidul	97,77	8.196	0,01

Sumber: KLHS RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029

B. Daya Dukung Lahan

Daya dukung lahan disajikan dalam bentuk peta sebagai berikut :



Sumber: KLHS RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029
Gambar 2.10. Peta Daya Dukung Lahan Kota Salatiga

Analisis Daya Dukung Lahan berdasarkan Dokumen Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Tahun 2021 yang dilakukan melalui analisis perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan

lahan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah. Daya dukung lahan Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13. Hasil Analisis Daya Dukung Lahan Kota Salatiga

Ketersediaan lahan (SL)	Kebutuhan Lahan (DL)	Daya Dukung Lahan	Keterangan
18.623 Ha	46.215 Ha	SL < DL defisit atau terlampaui	Kondisi tersebut berarti bahwa daya dukung lahan Kota Salatiga tidak mampu memenuhi kebutuhan standart hidup layak penduduk

Sumber : Dokumen Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Tahun 2021

Perhitungan secara lengkap, terkait Daya Dukung Lahan, disajikan pada uraian berikut ini.

1) Perhitungan ketersediaan (Supply) Lahan

Rumus :

$$S_L = \frac{\sum (P_i \times H_i)}{Hb} \times \frac{1}{Ptv_b}$$

Keterangan :

SL : Ketersediaan lahan (Ha)

Pi : Produksi aktual tiap jenis komoditi (satuan tergantung kepada jenis komoditas).

Komoditas yang diperhitungkan melalui pertanian (bahan makanan, buah-buahan, sayuran), peternakan dan perikanan.

Hi : Harga satuan tiap jenis komoditas (Rp/satuan) di tingkat produsen (<http://pangan.salatiga.go.id>, survei primer dan sekunder)

Hb : Harga satuan beras (Rp/kg) ditingkat produsen

Ptvb : Produktivitas beras (kg/ha)

Produksi padi = 36.960 kwintal (Dinas Pertanian Tahun 2021 semester 1) Luas panen = 567 ha

Indeks konversi gabah ke beras (1 Kg GKG/Gabah Kering Giling = 63,84% atau 0,6384 Kg beras) (Buku Konversi Gabah ke Beras/ SKG – BPS, 2018 revisi 10 Maret 2020) Produktivitas beras = $(36.960 \times 100 \times 0,6384) / 567 = 4.161 \text{ kg/ha}$

Dalam perhitungan ini, faktor konversi yang digunakan untuk menyetarakan produk non beras dengan beras adalah harga. Untuk memudahkan perhitungan dapat digunakan tabel berikut ini dalam menghitung total nilai produksi ($\sum (P_i \times H_i)$). Komoditas yang diambil adalah pertanian (bahan makanan, buah-buahan, kacang-kacangan), tanaman perkebunan, dan peternakan. Perhitungan nilai produksi total Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14. Perhitungan Nilai Produksi Total Kota Salatiga

No	Komoditas	Produksi (Pi) Kuantum	Satuan	Harga Satuan (Hi)	Nilai Produksi/ Satuan dalam Rupiah (PixHi)
1	Bahan Makanan	Jumlah	Satuan	Rata-Rata Harga Satuan	
1	Beras	2.359.526	kg	10.000	23.595.264.000
2	Jagung	65.000	kg	6.766	439.790.000
3	Singkong	247.800	kg	3.500	867.300.000
2	Sayur				
2	Cabe Rawit	11.200	kg	65.969	738.849.067
3	Bawang Merah	5.000	kg	21.666	108.330.000
4	Cabe Keriting	300	kg	35.333	10.599.900
3	Buah-Buahan				
1	Mangga	56.000	kg	12.000	672.000.000
2	Durian	17.350,00	kg	65.000	1.127.750.000
3	Jeruk	19.900,00	kg	12.000	238.800.000
4	Pisang	4.288.400,00	kg	10.000	42.884.000.000
5	Pepaya	711.300,00	kg	800	569.040.000
6	Salak	83.300,00	kg	22.500	1.874.250.000
7	Alpukat	254.000,00	kg	12.000	3.048.000.000
8	Duku-Langsat	199.200,00	kg	25.000	4.980.000.000
9	Manggis	1.900,00	kg	20.000	38.000.000
10	Nangka	84.700,00	kg	20.000	1.694.000.000
11	Rambutan	326.200,00	kg	30.000	9.786.000.000
12	Belimbing	1.000,00	kg	22.000	22.000.000
13	Jambu Biji	66.300,00	Kg	24.000	1.591.200.000
14	Jambu Air	9.200,00	kg	25.000	230.000.000
4	Perikanan				
1	Lele	376.677,00	kg	20.000	7.533.540.000
2	Nila	11.000,00	kg	27.000	297.000.000
5	Peternakan				
1	Sapi	950.410,00	Kg	110.000	104.545.100.000
2	Kambing	29.100,00	Kg	120.000	3.492.000.000
3	Domba	17.325,00	Kg	120.000	2.079.000.000
4	Babi	47.970,00	Kg	108.000	5.180.760.000
5	Ayam Ras	18.546.699,00	Kg	30.000	556.400.970.000
6	Ayam buras	15.960,00	Kg	57.500	917.700.000
	Jumlah Total				774.961.242.967

Sumber : Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Salatiga, 2021
Data produksi : Dinas Pertanian Kota Salatiga Tahun 2021, Kota Salatiga dalam Angka
Tahun 2021 – BPS Kota Salatiga

Data harga satuan : <https://hargajateng.org/> Sistem Informasi Harga dan Produksi Komoditi Jawa Tengah per 21 Juli 2021, <http://pangan.salatiga.go.id/> dan hasil survei primer dan sekunder tahun 2021

Sehingga diketahui :

$$\sum (P_i \times H_i) = \text{Rp. } 774.961.242.967$$

$$H_b = \text{Rp } 10.000/\text{Kg}$$

$$P_{tvb} = 4.161 \text{ Kg/Ha (Angka Setelah Konversi GKG Beras - Tahun 2019)}$$

$$SL = (774.961.242.967 / 10.000) \times (1 / 4.161) \\ = 18.623 \text{ Ha}$$

2) Perhitungan Kebutuhan (Demand) Lahan

Rumus :

$$D_L = N \times KHL_l$$

Keterangan :

DL : Total kebutuhan lahan setara beras (ha)

N : Jumlah penduduk (orang)

KHLL : Luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk

- Luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk merupakan kebutuhan hidup layak per penduduk dibagi produktifitas beras lokal.
- Kebutuhan hidup layak per penduduk diasumsikan sebesar 1 ton setara beras/kapita/tahun (1.000 kg/beras/tahun).
- Daerah yang tidak memiliki data produktivitas beras lokal, dapat menggunakan data rata-rata produktifitas beras nasional sebesar 2400 kg/ha/tahun.

Perhitungan kebutuhan lahan (DL) sebagai berikut :

Jumlah penduduk Kota Salatiga Tahun 2022 (N) sebesar 200.220 jiwa. Luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk di Kota Salatiga = 1 ton / 4,161 ton/ha = 0,24 ha

$$DL = 200.220 \times 0,24 \text{ ha} = \mathbf{48.052,80 \text{ Ha}}$$

3) Penentuan Status Daya Dukung Lahan

Status daya dukung lahan diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan lahan (St) dan kebutuhan lahan (DL).

- Bila $SL > DL$, daya dukung lahan dinyatakan surplus.
- Bila $SL < DL$, daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas didapatkan bahwa **Status Daya Dukung Lahan :**

$SL (18.623 \text{ Ha}) < DL, (48.052,80 \text{ Ha})$, hal ini berarti bahwa daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui. Kondisi tersebut berarti bahwa

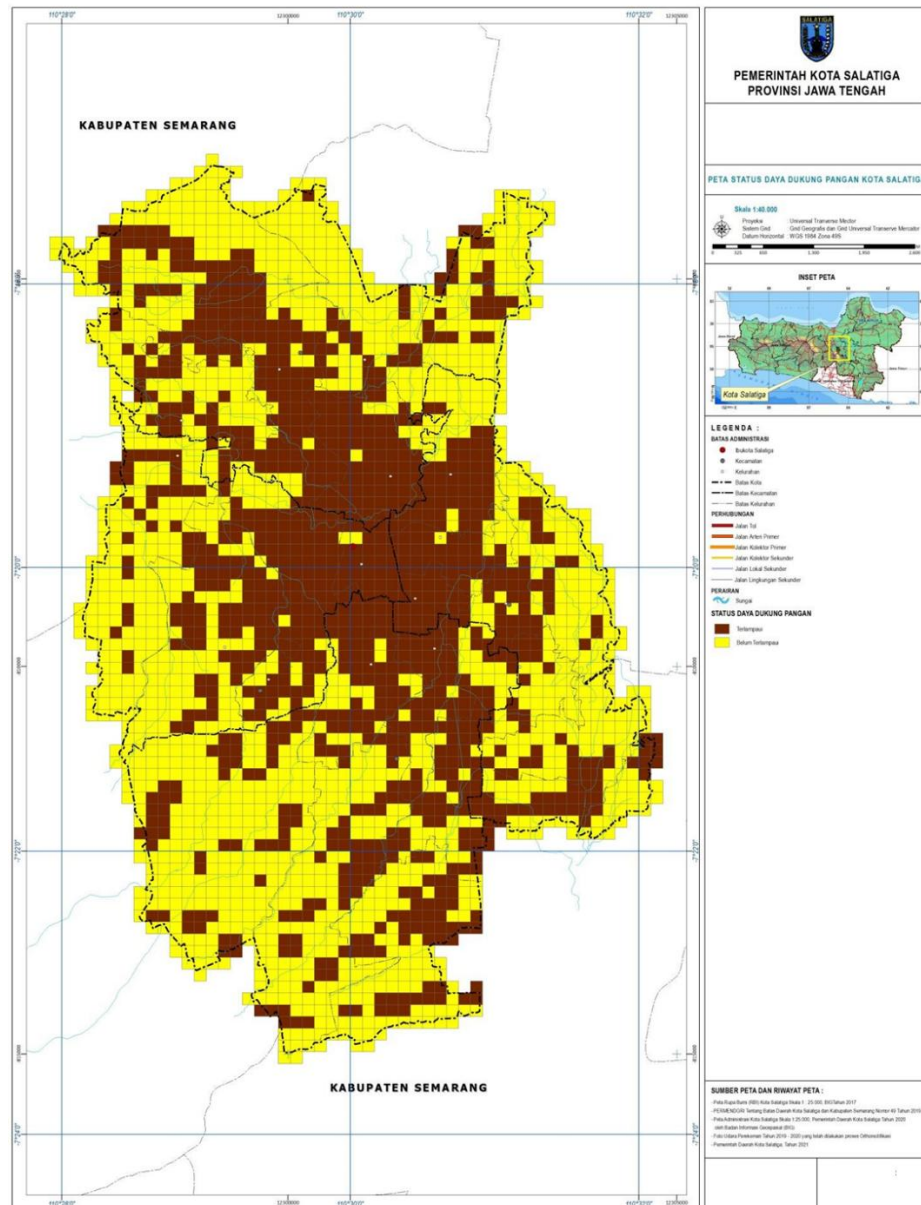
daya dukung lahan Kota Salatiga tidak mampu memenuhi kebutuhan standart hidup layak penduduk.

Adapun Status Daya Dukung Pangan dan Status Daya Dukung Air di Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

1) Status Daya Dukung Pangan

Berdasarkan hasil analisis KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, diketahui bahwa produktivitas lahan pertanian untuk pemenuhan pangan (beras) mempunyai nilai $< 0,12$ ton/orang/tahun yang berarti bahwa Kota Salatiga mengalami defisit/terlampau dalam pemenuhan pangan beras penduduk. Hal ini berarti bahwa Kota Salatiga belum mampu memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat kotanya. Kondisi ini dapat tercermin dari luasan lahan pertanian yang 11% dari total luas administrasi Kota Salatiga memberikan dampak terhadap kecilnya produksi pertanian sehingga tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Status daya dukung pangan defisit/terlampau ini, berarti bahwa Kota Salatiga tidak mampu swasembada pangan dalam arti jumlah penduduknya telah melampaui jumlah penduduk optimal. Status daya dukung pangan secara spasial dapat dilihat pada Peta Status Daya Dukung Pangan Kota Salatiga.



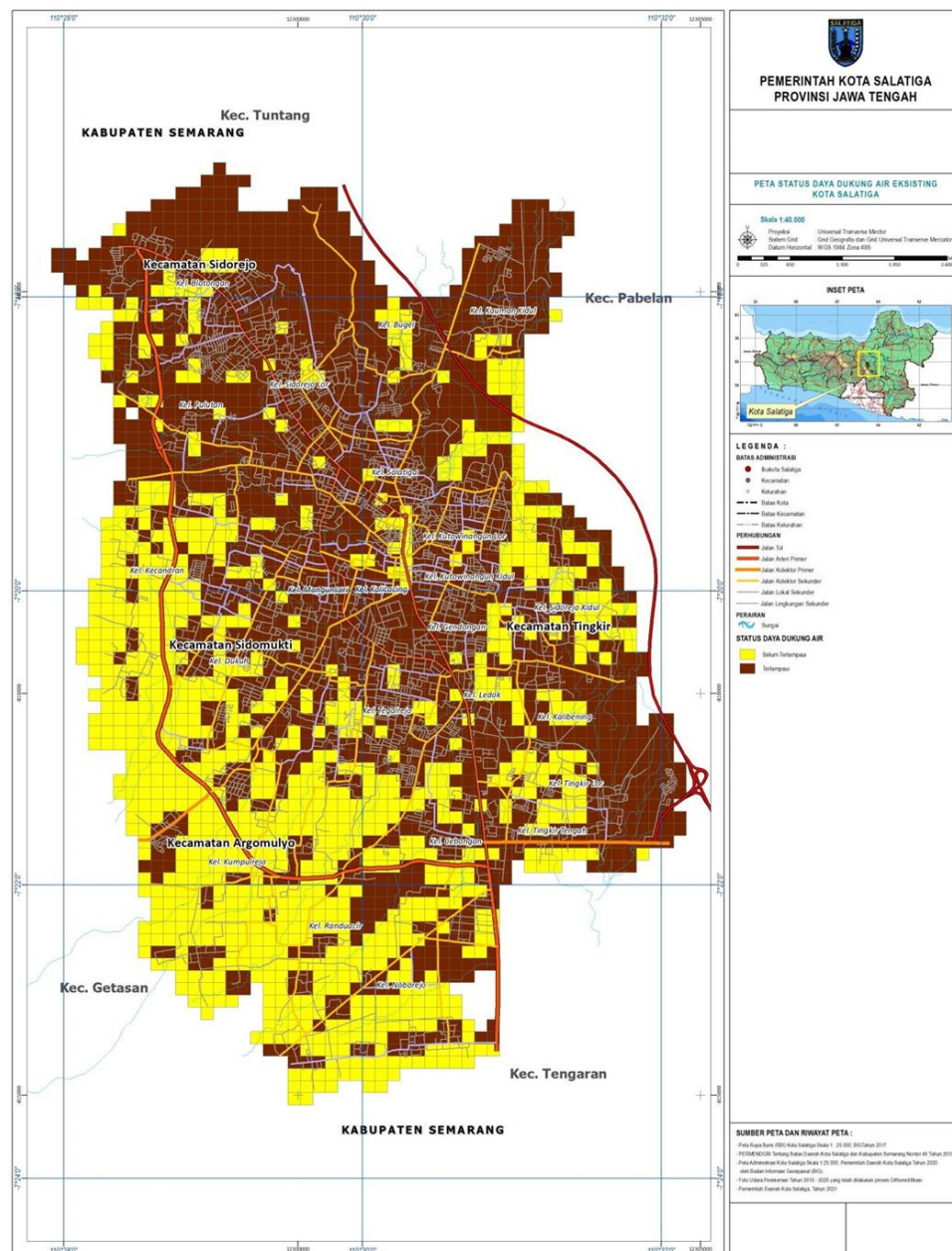
Sumber: KLHS RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029

Gambar 2.11. Peta Status Daya Dukung Pangan Kota Salatiga

2) Daya Dukung Air

Status daya dukung air Kota Salatiga, berdasarkan Dokumen Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Tahun 2021 yang dilakukan melalui analisis sistem grid, didapatkan hasil bahwa status daya dukung air pada status defisit/terlampaui. Status defisit/ terlampaui berarti bahwa Kota Salatiga tidak mampu memenuhi kebutuhan air.

Secara spasial, status daya dukung air di Kota Salatiga dapat dilihat pada Peta Status Daya Dukung Air Kota Salatiga.



Sumber: KLHS RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029

Gambar 2.12. Peta Status Daya Dukung Air Eksisting Kota Salatiga

2.1.3.2. Daya Tampung

1. Kualitas Air Sungai

Status kualitas sungai di Kota Salatiga berdasarkan dokumen DDDTLH Kota Salatiga yang diwakili oleh beberapa sungai didapatkan hasil status mutu air sungai cemar ringan dan cemar sedang. Sungai yang mengalami cemar ringan berada pada Sungai Jetis 1, Jetis 2, Jetis 3, sedangkan pada sungai di Banyuputih 1 dan Banyuputih 2 mengalami cemar sedang. Adanya pencemaran air pada status cemar ringan dan sedang ini berarti bahwa di beberapa sungai Kota Salatiga, terjadi penurunan kemampuan air dalam menetralsir sumber pencemar, sehingga berdampak pada

penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan, terutama badan air. Permasalahan yang menyebabkan adanya pencemaran air di Kota Salatiga diantaranya rendahnya kepedulian terhadap permasalahan pencemaran air serta penurunan kualitas air akibat dari adanya pencemaran sektor domestik dari septic tank yang overload maupun belum kedap air.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Kota Salatiga dalam pengendalian penurunan kualitas air pada beberapa tahun terakhir sebagai berikut.

- 1) **Monitoring Kualitas Air**
Kegiatan monitoring kualitas air dilakukan dengan tujuan untuk memantau kualitas air sungai yang sudah tercemar oleh beberapa limbah seperti limbah domestik, rumah sakit maupun industri.
- 2) **Pembuatan dan Pengembangan IPAL Komunal**
Pembuatan dan pengembangan IPAL komunal bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan limbah domestik agar tidak mencemari badan air dan hasil pengolahan limbah di IPAL yang keluar bisa sesuai dengan baku mutu.
- 3) **Pemantauan Kegiatan Usaha/ Industri**
Pemantauan kegiatan usaha/industri perlu dilakukan salah satunya dengan Pengawasan dan Penataan Izin Lingkungan.
- 4) **Peningkatan Sarana Sanitasi dan Pengelolaan Limbah Cair**
 - Peningkatan kualitas septic tank
 - Peningkatan kualitas pengumpulan/pengangkutan lumpur tinja
 - Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (2 tahun sekali)
 - Pembuatan dan pengembangan IPAL komunal
 - Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
- 5) **Pembuatan Sumur Resapan**
Sumur resapan bertujuan untuk memudahkan proses pemasukan air ke dalam tanah untuk mendukung ketersediaan air dalam tanah dan turut meningkatkan kualitas air tanah.
- 6) **Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Pelaku Usaha**
Dalam rangka melakukan upaya untuk mengurangi pencemaran air, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan sosialisasi terkait pengelolaan lingkungan hidup dalam lingkup lingkungan perairan kepada para pelaku usaha yang banyak memanfaatkan air.
- 7) **Pemasangan Jaring Pengaman Sungai**
Pemasangan jaring bertujuan agar tidak ada yang membuang sampah di sungai sehingga kualitas air sungai tidak tercemar oleh sampah-sampah.
- 8) **Peningkatan Kualitas Air**
Peningkatan kualitas air, dilakukan melalui kegiatan Peningkatan

Kapasitas (Kelompok Pemakai Air) yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Salatiga dengan kelompok sasaran anggota KSM Tirta Nungal. Tujuan dari adanya kegiatan ini adalah perlu adanya peningkatan pelayanan Air Bersih Non PDAM di Kota Salatiga, penyediaan air bersih merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, serta untuk mendukung dan menampung peran aktif masyarakat, maka sangat dipandang perlu dibentuk Paguyuban Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pengelola Air Bersih Non PDAM. Beberapa kegiatannya meliputi:

- a) Pemeriksaan Mutu Eksternal (PME) Kualitas Air Minum Pokmair
 - b) BINTEK Pokmair (Kelompok Pemakai Air)
 - c) Peningkatan Kapasitas (Kelompok Pemakai Air)
- 9) Program Kali Bersih
- Program kali bersih atau yang biasa disebut dengan Prokasih merupakan program kerja sebagai upaya pengendalian pencemaran air sungai untuk meningkatkan kualitas air sungai agar berfungsi sesuai peruntukannya, karena kriteria sungai bersih yang sesungguhnya adalah tidak ada sampah di sungai, aliran air tidak tersumbat.
- 10) Pemantauan Kegiatan Usaha/ Industri
- Penataan izin lingkungan terutama yang berkaitan dengan limbah cair yang langsung dibuang ke badan air. Untuk mengendalikan tingkat pencemaran dari industri dan unit usaha termasuk fasilitas kesehatan pemerintah, DLH Kota Salatiga secara rutin melakukan pengujian kualitas air limbah.

2. Kualitas Air Tanah

Kualitas air tanah di Kota Salatiga digambarkan melalui kondisi kualitas mata air pada 8 titik pemantauan yaitu sumber mata air Senjoyo 1921, Senjoyo 1973, Senjoyo 1990, Kaligojog, Kalisombo 1, Kalisombo 2, Kaligethak dan Kalitaman. Pemantauan kualitas mata air mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Berdasarkan hasil pemantauan, parameter yang telah melampaui baku mutu yaitu 1) parameter besi di Mata Air Senjoyo 1921; 2) parameter mangan di Mata Air Senjoyo 1921; 3) parameter nitrat di Mata Air Senjoyo 1990. Untuk parameter lainnya (MPN Coliform, MPN E Coli, Bau, TDS, Kekeruhan, Rasa, Warna, Fluorida, Klorida, Nitrit, Ammonia, Aluminium, Ph dan Zat Organik) berada pada status tidak melampaui baku mutu yang dipersyaratkan.

Selain dilakukan pengujian mata air di atas, dilakukan juga pengujian terhadap kualitas air PDAM di Kota Salatiga pada 66 titik sampel.

Berdasarkan hasil pengujian, terdapat 7 titik yang memiliki parameter melebihi baku mutu air minum menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023. Beberapa lokasi tersebut yaitu:

- SR. DKK Jl. Hasanudin Salatiga (dari Ngaglik) melebihi baku mutu pada parameter E. coli
- SR. KU Klaseman RT 09/02 (dari Ngaglik) melebihi baku mutu pada parameter E. coli dan Total Bakteri Coliform
- Bronc. Kalisomco melebihi baku mutu pada parameter Nitrat (Sebagai NO₂-)
- Reservoir Kalitaman melebihi baku mutu pada parameter Nitrat (Sebagai NO₂-) dan Kekeruhan
- Sumur Ex Terminal Soka melebihi baku mutu pada parameter Mangan (Mn)
- SR Ponimin Jl Dewi Kunthi melebihi baku mutu pada parameter Total Bakteri Coliform
- Sumur Kecandran melebihi baku mutu pada parameter Kekeruhan dan Besi (Fe)

Adanya kandungan mikrobiologi E. coli dan Total Bakteri Coliform dalam air dapat disebabkan karena kontaminasi limbah domestik akibat sanitasi yang belum optimal dan terkena kontaminasi limbah ternak. Sedangkan pada air yang memiliki kandungan Nitrat dapat disebabkan kegiatan pertanian akibat penggunaan pupuk nitrogen yang berlebihan serta kegiatan industri maupun umkm yang menggunakan atau menghasilkan nitrat.

Pada sumber air yang mengandung parameter mangan (Mn) dapat disebabkan adanya kontaminasi gas buang dari penggunaan mangan sebagai bahan tambahan bensin. Sedangkan pada air yang terkontaminasi kandungan besi (Fe) dapat disebabkan pencemaran limbah industri atau rumah tangga yang mengandung zat besi serta potensi korosi pada pipa air atau rangka sumur yang terbuat dari besi atau baja.

3. Kualitas Udara

Udara sebagai sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya harus dijaga dan dipelihara kelestarian fungsinya. Adapun pemicu kualitas udara di Kota Salatiga yaitu peningkatan penduduk yang berdampak pada peningkatan aktivitas transportasi. Sedangkan, tekanan terhadap kualitas udara dihasilkan dari kegiatan transportasi, yaitu peningkatan pemakaian kendaraan bermotor, penggunaan bahan bakar untuk kegiatan rumah tangga, kegiatan industri.

Berdasarkan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2021 dan Tahun 2022, yang dilakukan pengujian kualitas udara ambien didapatkan hasil bahwa kualitas udara masih memenuhi baku

mutu yang diperbolehkan, sehingga bisa dikatakan kualitas udara ambien di Kota Salatiga masih cukup bagus.

Hasil pemantauan kualitas udara di empat lokasi pengambilan sampel di Kota Salatiga dapat diketahui bahwa konsentrasi NO_2 di semua titik sampel di tahun 2021 dan tahun 2022 masih berada di bawah baku mutu (memenuhi baku mutu) yang ditetapkan yaitu $65 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$. Sedangkan parameter hasil pemantauan SO_2 di empat lokasi pengambilan sampel di tahun 2021 dan 2022 juga masih di bawah baku mutu (memenuhi baku mutu) Udara Ambien yang dipersyaratkan yakni $75 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Kota Salatiga dalam pengendalian penurunan kualitas udara pada beberapa tahun terakhir sebagai berikut.

a. Inventarisasi Gas Rumah Kaca

Kegiatan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan kegiatan monitoring rutin setiap tahun untuk mengetahui tren emisi di Kota Salatiga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sumber emisi yang paling mendominasi di Kota Salatiga dan sebagai bahan dasar dalam menyusun rekomendasi atau Rencana Aksi Daerah dalam pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

b. Monitoring Udara Ambien

Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan setahun sekali di beberapa titik pantau yaitu pemukiman, jalan, dan industri. Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan sebagai upaya dalam pengawasan lingkungan maka dilakukan kegiatan rutin berupa monitoring kualitas udara untuk mengetahui kondisi kualitas udara serta sumber pencemarnya.

c. Uji Emisi Kendaraan

Dinas Perhubungan Kota Salatiga melakukan uji emisi kendaraan setiap tahunnya sebagai bentuk monitoring terhadap kualitas udara di Kota Salatiga.

d. Penambahan RTH

Dinas Lingkungan Hidup melakukan peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Salatiga sebagai upaya meningkatkan tutupan vegetasi. Penambahan RTH publik ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas udara di Kota Salatiga.

2.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

1. Indeks Ketahanan Pangan

Hasil perhitungan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2024, yang didasarkan pada sembilan indikator untuk wilayah kabupaten dan delapan indikator untuk wilayah kota yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan, memberikan gambaran tentang peringkat pencapaian ketahanan pangan suatu daerah

dibandingkan dengan daerah lainnya. Berikut adalah sembilan indikator yang digunakan dalam Indeks Ketahanan Pangan (IKP):

- Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih.
- Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
- Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran
- Persentase rumah tangga tanpa akses listrik
- Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun
- Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih
- Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk
- Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting)
- Angka harapan hidup pada saat lahir

Metode pembobotan diterapkan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif dari setiap indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Dalam penyusunan Indeks Ketahanan Pangan (IKP), metode pembobotan ini mengacu pada pendekatan yang dikembangkan oleh EIU dalam penyusunan *Global Food Security Index* (GFSI). Untuk analisis wilayah perkotaan, hanya delapan indikator dari aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan yang digunakan, karena ketersediaan pangan di daerah perkotaan tidak dipengaruhi oleh produksi lokal, melainkan berasal dari perdagangan antar wilayah. Oleh karena itu, bobot rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih ditetapkan nol, karena IKP kota tidak mempertimbangkan indikator dari aspek ketersediaan pangan. Nilai bobot 0,30 dari indikator aspek ketersediaan pangan kemudian dialihkan secara proporsional kepada delapan indikator lainnya berdasarkan masing-masing aspeknya

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang dihasilkan untuk setiap wilayah dikelompokkan ke dalam enam kategori berdasarkan titik pemisah (*cut off point*) IKP. Wilayah yang termasuk dalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota yang cenderung memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di kelompok yang lebih tinggi, sedangkan wilayah dalam kelompok 6 adalah kabupaten/kota yang menunjukkan ketahanan pangan terbaik. Berikut adalah titik pemisah (*cut off point*) IKP.

Tabel 2.15. *Cut off Point* Indeks Ketahanan Pangan

Kelompok IKP	Kabupaten	Kota	Provinsi
1	<= 41,52	<= 28,84	<= 37,61
2	> 41,52 – 51,42	> 28,84 – 41,44	> 37,61 – 48,27
3	> 51,42 – 59,58	> 41,44 – 51,29	> 48,27 – 57,11
4	> 59,58 – 67,75	> 51,29 – 61,13	> 57,11 – 65,96
5	> 67,75 – 75,68	> 61,13 – 70,64	> 65,96 – 74,40
6	> 75,68	> 70,64	> 74,40

Sumber: Buku Indeks Ketahanan Pangan, 2024

Pada tahun 2023, Kota Salatiga menempati peringkat lima teratas dalam Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di antara kota-kota di Indonesia. Berdasarkan peringkat IKP Kota, lima kota dengan skor tertinggi adalah Denpasar (95,80), Salatiga (94,20), Bekasi (93,55), Solok (92,87), dan Madiun (92,49). Kondisi ini sejalan dengan skor PPH Kota Salatiga yang juga menunjukkan peningkatan positif, yaitu sebesar 95,51. IKP Kota Salatiga (94,20) secara relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah (84,80).

Dari tahun 2020 hingga 2024, indeks ketahanan pangan Kota Salatiga menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Meskipun di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 2,85 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 indeks ketahanan pangan mencapai 82,64 dan meningkat menjadi 91,35 pada tahun 2024. Selama lima tahun terakhir, indeks ketahanan pangan Kota Salatiga meningkat sebesar 8,71. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada grafik berikut.

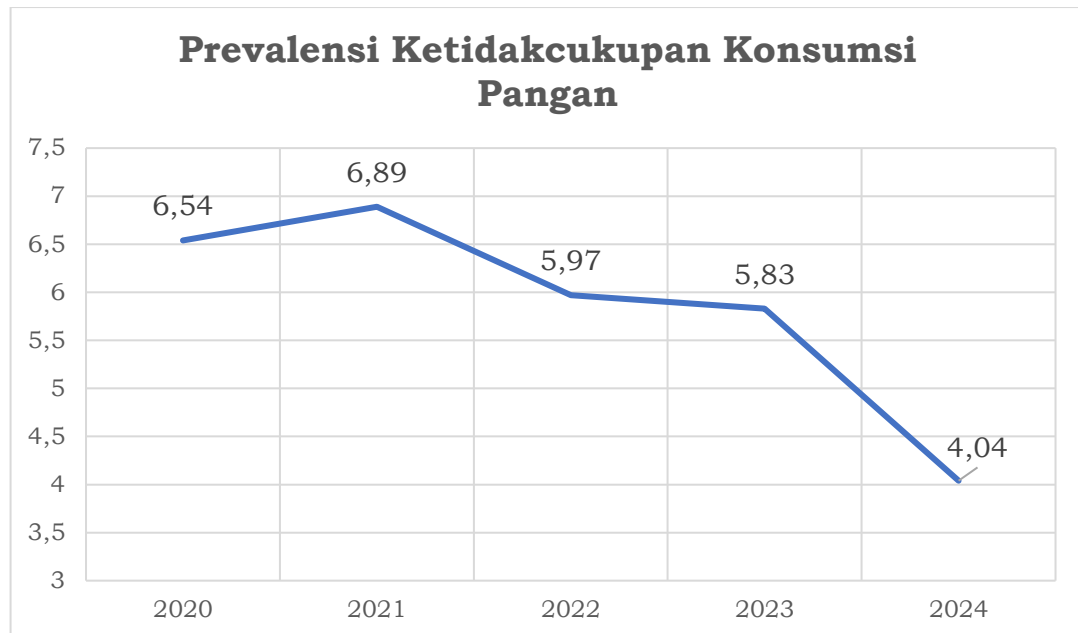


Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga, 2024

Gambar 2.13. Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Kota Salatiga tahun 2020 – 2024

2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kota Salatiga dari tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuatif. Dari tahun 2020 sebesar 6,54% meningkat menjadi 6,89% di tahun 2021. Pada 2022 terjadi penurunan hingga di tahun 2024 mencapai angka 4,04%. Secara rinci dapat dijelaskan pada grafik berikut.



Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga, 2025

Gambar 2.14. Perkembangan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Salatiga Tahun 2020 – 2024

3. Konsumsi Listrik Per kapita

Konsumsi listrik per kapita merupakan perbandingan antara total penjualan listrik dan jumlah penduduk. Pada tahun 2021, Kota Salatiga mencatat peningkatan konsumsi listrik dari 126.934.190 kWh pada tahun 2019 menjadi 262.271.447 kWh. Kenaikan penjualan listrik ini diperkirakan disebabkan oleh perbaikan kondisi masyarakat setelah pandemi Covid-19, yang meningkatkan permintaan listrik dan menyebabkan pertumbuhan konsumsi listrik di Kota Salatiga melebihi angka konsumsi tahun 2019 sebelum pandemi. Selain itu, peningkatan permintaan listrik juga didorong oleh Program Stimulus Covid-19 yang memberikan subsidi untuk sambungan listrik murah, yang berdampak positif terhadap konsumsi listrik. Pada tahun 2021, kelompok rumah tangga menjadi kontributor terbesar dalam konsumsi energi listrik, diikuti oleh sektor industri dan usaha.

Tabel 2.16. Konsumsi Listrik per Kapita 2019 - 2021

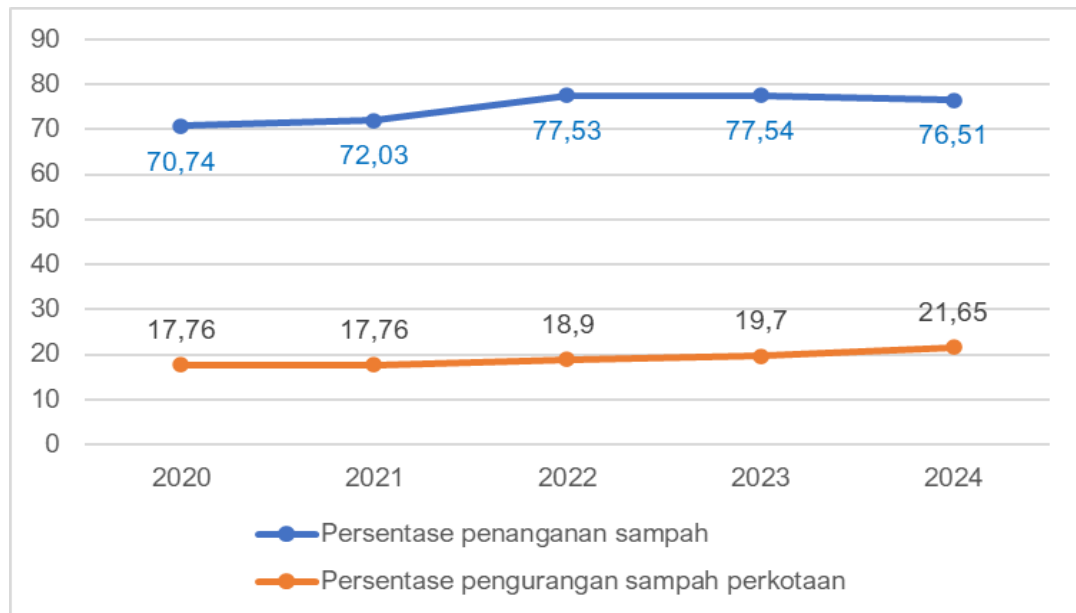
TUJUAN 7 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YG PRODUKTIF & MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YG LAYAK UNTUK SEMUA										
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern										
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Base-line (2018)	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021
7.1.1 (a)	Konsumsi listrik per kapita	BPS	KWH	PM	PM	126,934,190	PM	Data Belum Tersedia	PM	262,271,447

Sumber : Laporan Pencapaian TPB/SDGs Kota Salatiga Tahun 2021

4. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah merujuk pada persentase rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah secara langsung dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin, minimal dua kali dalam seminggu. Selain itu, layanan ini juga mensyaratkan bahwa sampah yang dikumpulkan terdiri dari setidaknya tiga kategori atau lebih, sesuai dengan prinsip pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Di Kota Salatiga, indikator ini menjadi salah satu tolok ukur dalam upaya meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan. Pada tahun 2025, proporsi rumah tangga yang menerima layanan penuh pengumpulan sampah ditetapkan target baseline sebesar 10 persen. Pemerintah Kota Salatiga menargetkan peningkatan signifikan lima tahun ke depan mencapai 100 persen pada tahun 2025.

Sementara itu, indikator kinerja pengelolaan sampah di Kota Salatiga saat ini ditunjukkan melalui indikator Penanganan dan Pengurangan dan Sampah Perkotaan. Penanganan sampah di Kota Salatiga menunjukkan tren positif secara keseluruhan dari tahun 2020 hingga 2024. Persentase penanganan sampah, yang mencakup berbagai upaya pengelolaan, secara konsisten meningkat dari 70,74% pada tahun 2020 menjadi 77,53% pada tahun 2022, dan kemudian stabil di kisaran 76,51%% pada tahun 2024. Stabilitas ini mengindikasikan adanya sistem penanganan sampah yang cukup baik dan berkelanjutan. Persentase pengurangan sampah perkotaan yang menunjukkan tren naik secara progresif dari 17,76% pada tahun 2020 menjadi 21,65% pada tahun 2024. Peningkatan ini sangat signifikan, mencerminkan keberhasilan program-program yang berfokus pada pengurangan sampah di sumbernya, seperti daur ulang, komposting, atau kampanye kesadaran masyarakat. Secara umum, data ini menggambarkan komitmen dan kemajuan Salatiga dalam mengelola sampahnya, khususnya dalam aspek pengurangan sampah yang merupakan kunci menuju pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.



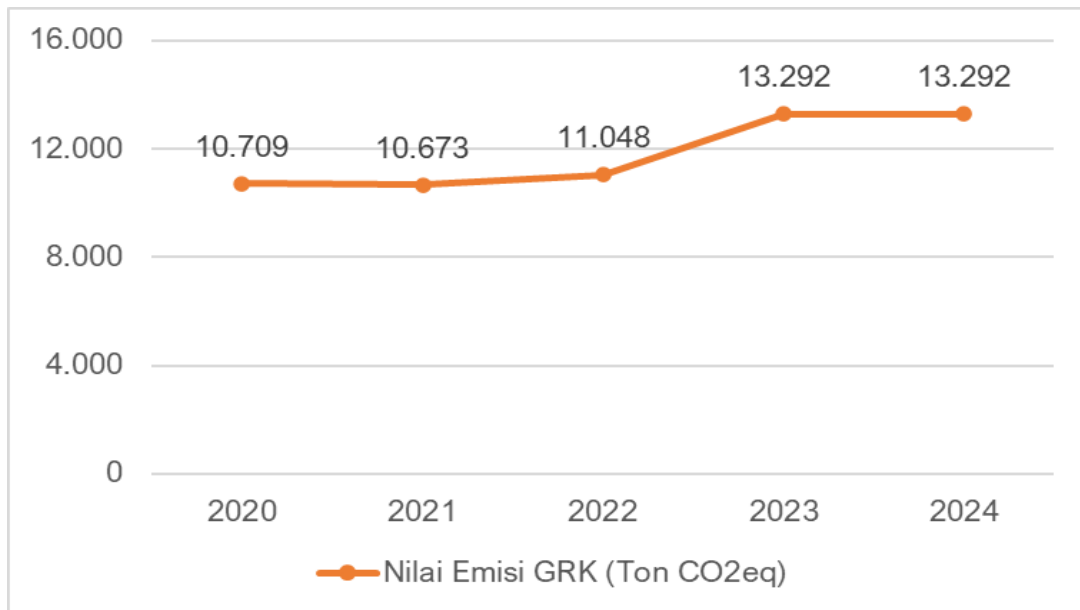
Sumber: DLH Kota Salatiga.2025

Gambar 2.15. Penanganan dan Pengurangan Sampah di Kota Salatiga Tahun 2020-2024

2.1.5. Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

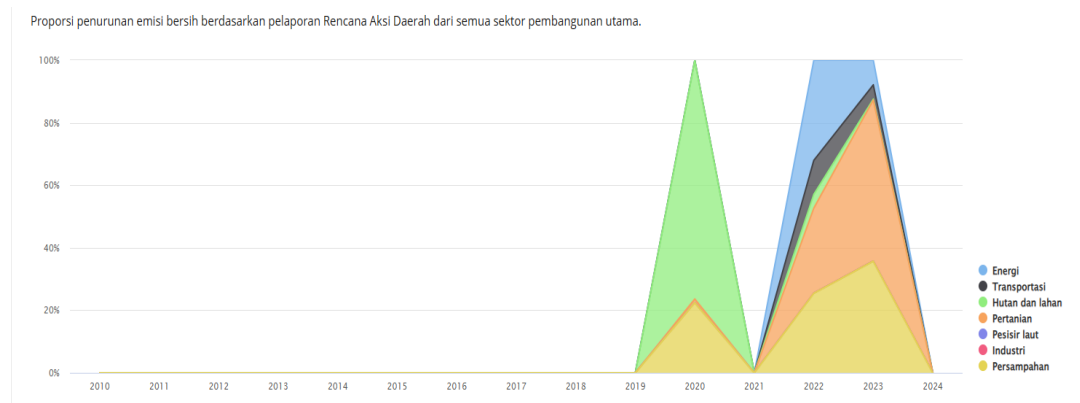
1. Penurunan Intensitas Emisi GRK

Perkembangan nilai emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kota Salatiga menunjukkan tren peningkatan yang dari tahun 2020 hingga 2023, kemudian stagnan pada level tertinggi di tahun 2024. Dimulai dari 10.709 ton CO₂eq pada tahun 2020, emisi sedikit menurun menjadi 10.673 ton CO₂eq pada tahun 2021. Namun, terjadi kenaikan signifikan mulai tahun 2022 menjadi 11.048 ton CO₂eq, dan melonjak tajam pada tahun 2023 mencapai 13.292 ton CO₂eq. Angka ini kemudian bertahan di level yang sama pada tahun 2024, yaitu 13.292 ton CO₂eq. Kondisi tersebut menunjukkan Kota Salatiga menghadapi tantangan serius dalam mengendalikan emisi GRK, dengan adanya peningkatan substansial dalam beberapa tahun terakhir yang memerlukan perhatian dan intervensi kebijakan yang lebih agresif untuk mencapai target pengurangan emisi dan mendukung keberlanjutan lingkungan.



Sumber: DLH Kota Salatiga.2025

Gambar 2.16. Trend Perkembangan Nilai Emisi GRK Kota Salatiga Tahun 2020-2024

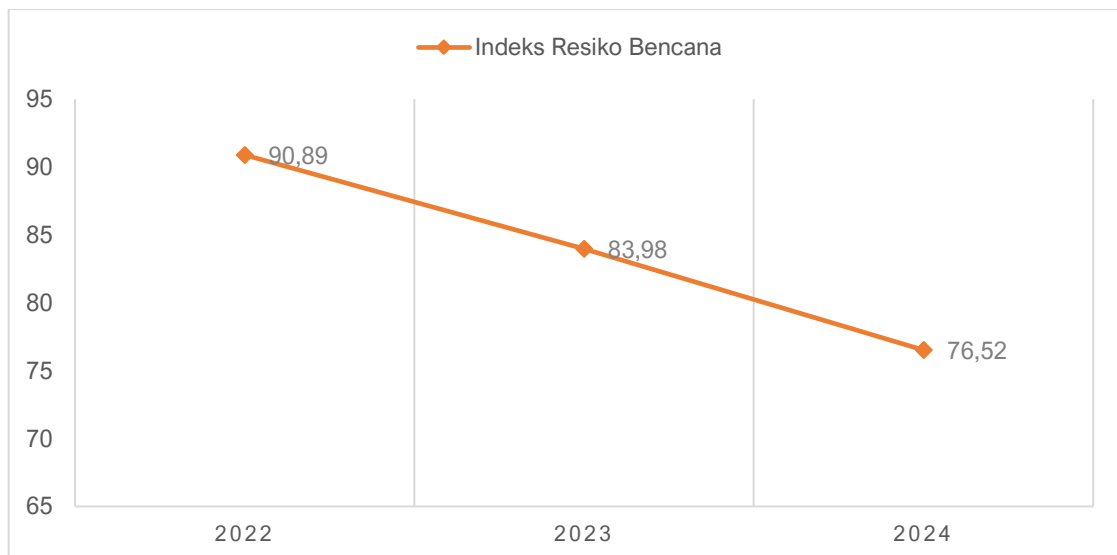


Sumber: DLH Kota Salatiga.2025

Gambar 2.17. Kontribusi Penurunan Emisi Berdasarkan Sektor Kota Salatiga Tahun 2019-2024

2. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana Kota Salatiga selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan tiap tahunnya. Dari tahun 2022 sebesar 90,89 menjadi 76,52 di tahun 2024. Selama tiga tahun terakhir indeks risiko bencana Kota Salatiga mengalami penurunan sebesar 14,32. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Salatiga menjadi lebih aman dan tahan terhadap bencana. Upaya mitigasi dan penanggulangan bencana yang telah dilakukan mulai memberikan hasil positif. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



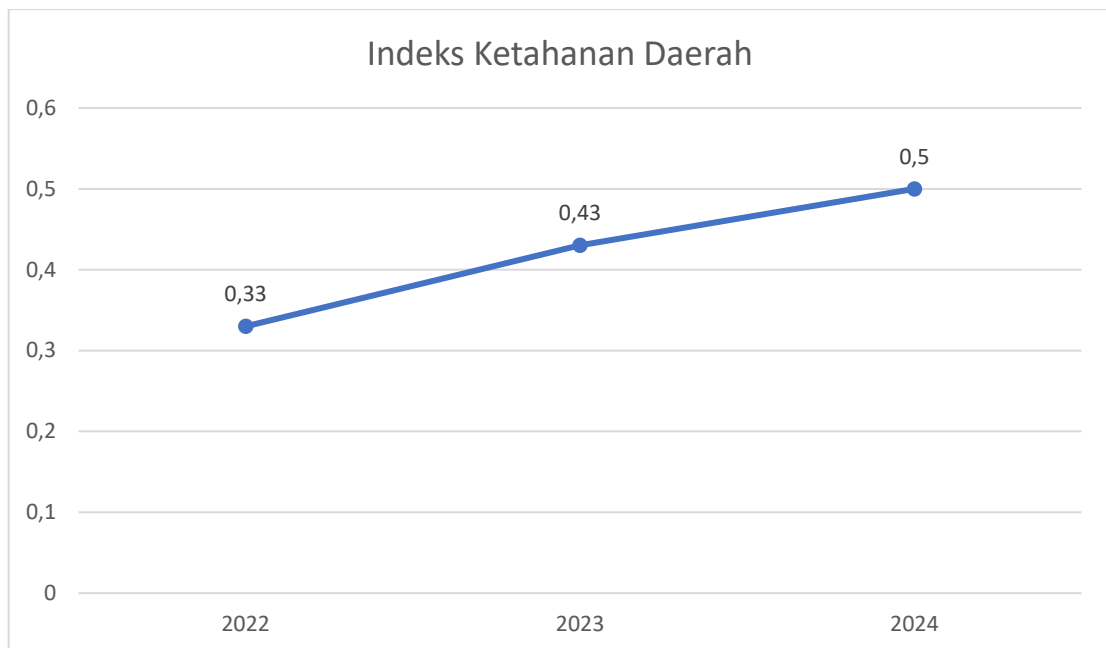
Sumber: BPBD Kota Salatiga, 2025

Gambar 2.18. Perkembangan Indeks Risiko Bencana Kota Salatiga Tahun 2022-2024

3. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi ketahanan suatu daerah terhadap berbagai tantangan dan ancaman yang timbul, termasuk bencana alam, perubahan iklim, kerawanan sosial, ekonomi, dan faktor lainnya. IKD bertujuan untuk membantu pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengidentifikasi area yang mungkin memerlukan perhatian khusus serta sumber daya untuk meningkatkan ketahanan dan kesiapsiagaan daerah.

Indeks Ketahanan Daerah Kota Salatiga, terlihat adanya fluktuasi dalam kemampuan masyarakat menghadapi bencana selama periode 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, indeks berada di angka 0,33. Angka ini kemudian mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 menjadi sebesar 0,43, menunjukkan adanya perbaikan dalam kapasitas ketahanan masyarakat dan daerah terhadap potensi bencana. Pada tahun 2024, indeks ini kembali mengalami kenaikan menjadi 0,50. Kondisi tersebut menunjukkan, bahwa upaya peningkatan ketahanan bencana perlu dijaga konsistensinya dan diperkuat secara berkelanjutan untuk memastikan masyarakat selalu siap dan resilient menghadapi ancaman bencana.



Sumber: BPBD Kota Salatiga, 2025

Gambar 2.19. Perkembangan Indeks Ketahanan Daerah Kota Salatiga Tahun 2022-2024

2.1.6. Demografi

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024), data kependudukan Kota Salatiga menunjukkan dinamika yang menarik. Jumlah penduduk Kota Salatiga secara keseluruhan mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023, sebelum menurun pada tahun 2024. Dimulai dengan 196.082 jiwa pada tahun 2020, tren melonjak drastis ditahun 2023, namun kemudian sedikit mengalami penurunan menjadi 198.971 jiwa pada tahun 2024.

Sejalan dengan fluktuasi jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk Kota Salatiga juga menunjukkan pola yang sangat dinamis. Pada tahun 2020, pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 1,18 yang kemudian menurun menjadi 0,83 pada tahun 2021, menandakan perlambatan pertumbuhan hingga tahun 2022 dengan angka laju pertumbuhan sebesar 0,8. Namun, pada tahun 2023, pertumbuhan penduduk mengalami lonjakan tajam hingga mencapai puncaknya di angka 1,21 yang mencerminkan peningkatan signifikan dalam penambahan populasi. Setelah itu, laju pertumbuhan penduduk di Kota Salatiga menurun drastis hingga di bawah nol pada tahun 2024 yaitu -1,19.



Sumber : Disdukcapil Kota Salatiga. 2025

Gambar 2.20. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Salatiga Tahun 2020 – 2024

2. Rasio Penduduk

Kota Salatiga adalah sebuah kota kecil yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari 4 kecamatan dan 23 kelurahan. Berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, Kecamatan Sidorejo memiliki jumlah penduduk terbanyak dengan total 54.755 jiwa. Disusul oleh Kecamatan Argomulyo dengan 51.376 jiwa. Sementara itu, Kecamatan Tingkir dan Sidomukti memiliki jumlah penduduk yang relatif lebih sedikit, masing-masing 47.206 jiwa dan 23.058 jiwa. Ini menunjukkan bahwa Sidorejo adalah kecamatan terpadat di Kota Salatiga pada tahun 2024.

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di masing-masing kecamatan menunjukkan bahwa keempat kecamatan memiliki jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa secara keseluruhan, perempuan mendominasi populasi di tiga dari empat kecamatan, mengindikasikan rasio jenis kelamin yang cenderung seimbang namun dengan sedikit kelebihan perempuan di tingkat kota secara agregat (meskipun data total kota tidak ditampilkan, ini adalah inferensi dari mayoritas kecamatan).

Tabel 2.17.
Jumlah dan Distribusi/Persebaran Penduduk Kota Salatiga
Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan/ Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	Sidorejo	27.048	27.707	54.755
1	Blotongan	6.544	6.558	13.102
2	Sidorejo Lor	7.134	7.412	14.546
3	Salatiga	7.065	7.283	14.348
4	Bugel	1.822	1.839	3.661
5	Kauman Kidul	2.130	2.240	4.370
6	Pulutan	2.353	2.375	4.728
	Tingkir	23.266	23.940	47.206
1	Kutowinangun Kidul	3.859	4.111	7.970
2	Gendongan	2.560	2.701	5.261
3	Sidorejo Kidul	3.898	4.007	7.905
4	Kalibening	1.223	1.167	2.390
5	Tingkir Lor	2.541	2.588	5.129
6	Tingkir Tengah	2.726	2.725	5.451
7	Kutowinangun Lor	6.459	6.641	13.100
	Argomulyo	25.681	25.695	51.376
1	Noborejo	3.439	3.480	6.919
2	Ledok	5.450	5.509	10.959
3	Tegalrejo	6.261	6.184	12.445
4	Kumpulrejo	4.316	4.315	8.631
5	Randuacir	3.603	3.576	7.179
6	Cebongan	2.612	2.631	5.243
	Sidomukti	22.576	23.058	45.634
1	Kecandran	3.801	3.717	7.518
2	Dukuh	7.208	7.450	14.658
3	Mangunsari	8.646	8.785	17.431
4	Kalicacing	2.921	3.106	6.027
	Jumlah	97.382	98.571	198.971

Sumber : Disdukcapil Kota Salatiga. 2025

3. Kepadatan Penduduk

Kecamatan Sidorejo memiliki kepadatan menengah sebesar 3.508 jiwa/km², mengindikasikan keseimbangan antara populasi dan ketersediaan lahan. Sebaliknya, Kecamatan Tingkir menjadi yang terpadat dengan 4.526 jiwa/km², dan Sidomukti menyusul dengan 4.225 jiwa/km², meskipun keduanya memiliki luas wilayah yang lebih kecil, menunjukkan konsentrasi penduduk yang tinggi di area-area tersebut. Di sisi lain, Kecamatan Argomulyo, sebagai wilayah terluas, mencatat kepadatan terendah sebesar 2.832 jiwa/km², menyiratkan adanya area yang lebih jarang penduduk atau belum padat pembangunan. Secara keseluruhan, Kota Salatiga memiliki kepadatan rata-rata 3.619 jiwa/km², mencerminkan karakteristik kota yang cukup padat dengan distribusi yang bervariasi di setiap wilayah administrasinya.

Tabel 2.18.
Kepadatan Penduduk Kota Salatiga Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas		Penduduk		Kepadatan (Jiwa/km ²)
		km ²	%	Jiwa	%	
1	Argomulyo	15,61	28,39	54.755	27,52	3.508
2	Tingkir	10,43	18,97	47.206	23,73	4.526
3	Sidomukti	18,14	32,99	51.376	25,82	2.832
4	Sidorejo	10,8	19,64	45.634	22,94	4.225
Kota Salatiga		54,98	54,98	100	198.971	3.619

Sumber : Disdukcapil Kota Salatiga. 2025

4. Proyeksi Penduduk

Menurut proyeksi jumlah penduduk Kota Salatiga, diperkirakan akan meningkat dari 198.901 jiwa pada tahun 2025 menjadi 201.979 jiwa pada tahun 2030. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan penduduk sebesar 3.078 jiwa atau sekitar 1,55 persen dalam periode lima tahun. Jika dilihat berdasarkan kecamatan, pertumbuhan penduduk terjadi di tiga kecamatan, sementara satu kecamatan menunjukkan peningkatan yang sangat kecil. Kecamatan Argomulyo diperkirakan akan naik dari 50.922 jiwa pada tahun 2025 menjadi 51.744 jiwa pada tahun 2030, yang menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Kecamatan Tingkir juga mengalami sedikit peningkatan dari 47.145 jiwa tahun 2025 menjadi 47.531 jiwa tahun 2030. Pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan terlihat di Kecamatan Sidomukti, yang diproyeksikan meningkat dari 46.457 jiwa pada tahun 2025 menjadi 48.211 jiwa pada tahun 2030. Kenaikan ini mencerminkan potensi perkembangan wilayah atau peningkatan hunian di kecamatan Sidomukti. Sementara itu, Kecamatan Sidorejo menunjukkan kenaikan yang sangat kecil, dari 54.377 jiwa menjadi 54.493 jiwa, yang menandakan tingkat pertumbuhan yang relatif stagnan.

Tabel 2.19.
Proyeksi Penduduk Kota Salatiga Tahun 2025 - 2030

No	Kecamatan	Proyeksi Penduduk (Jiwa)	
		2025	2030
1.	Argomulyo	50.922	51.744
2.	Tingkir	47.145	47.531
3.	Sidomukti	46.457	48.211
4.	Sidorejo	54.377	54.493
Kota Salatiga		198.901	201.979

Sumber: RPJPD Kota Salatiga 2025-2045

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

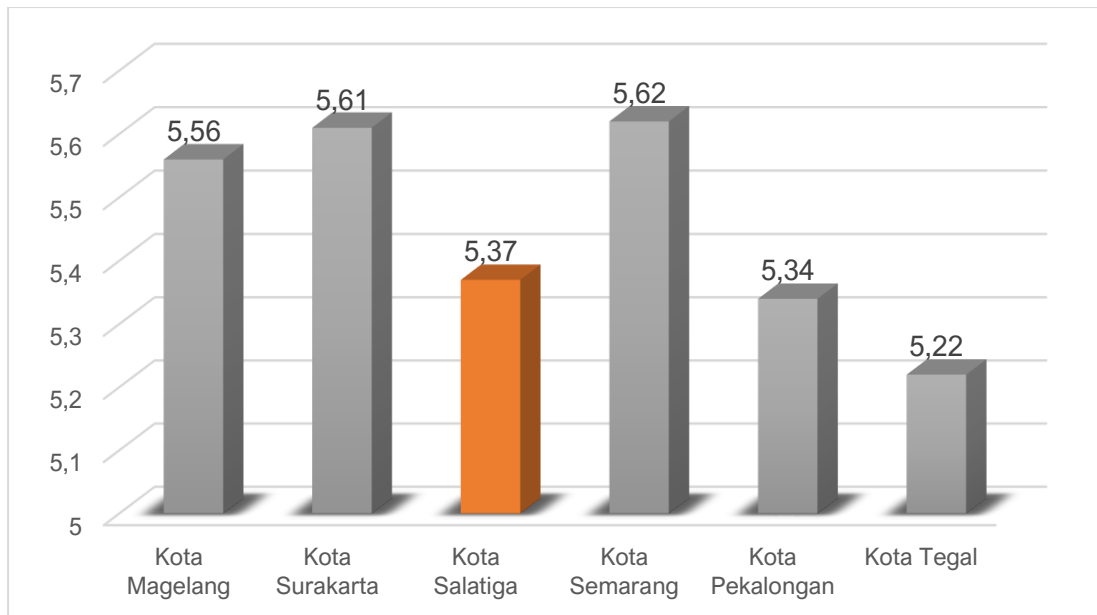
Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga dapat dianalisis melalui nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor produksi yang tercermin dalam nilai PDRB ADHK. Selama periode 2020 - 2024, terjadi fluktuasi cenderung meningkat dalam nilai laju pertumbuhan ekonomi. Dari tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga sebesar -1,68% menjadi 5,37% di tahun 2024. Kemudian jika dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Pergerakan laju ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sama dengan laju pertumbuhan ekonomu Kota Salatiga memiliki tren fluktuatif cenderung meningkat. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020-2024

Gambar 2.21. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga ditahun 2024 menunjukkan lebih tinggi dari Kota Pekalongan dan Kota Tegal. Namun pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga tlebih rendah dibandingkan dengan Kota Magelang, Surakarta, dan Semarang. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

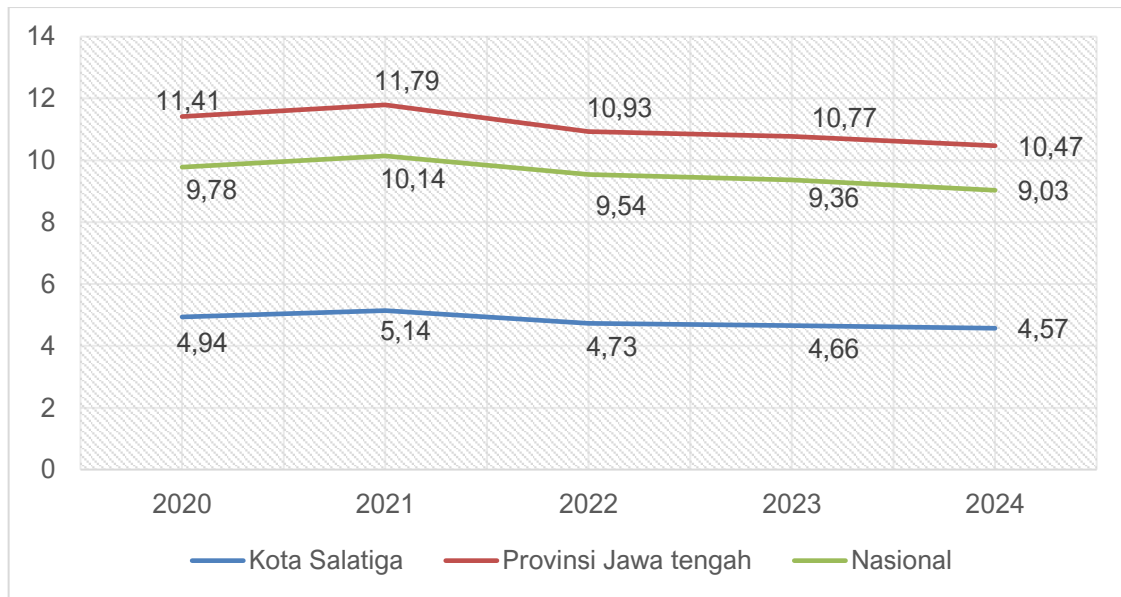


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah.2025

Gambar 2.22. Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga Dibandingkan Dengan Nasional, Prov Jawa Tengah dan Kota Lainnya tahun 2024

2. Tingkat Kemiskinan

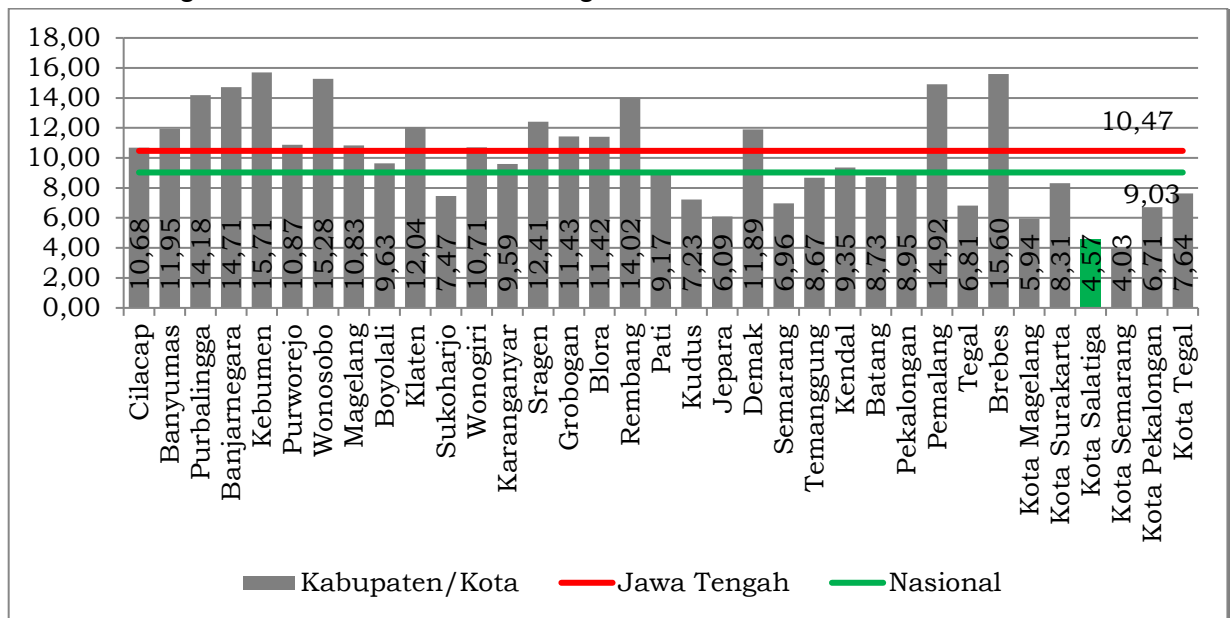
Kemiskinan merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis kesejahteraan ekonomi. Kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan, yang diukur dari segi pengeluaran. Persentase penduduk miskin di Kota Salatiga antara tahun 2020-2024 menunjukkan kondisi yang cenderung menurun. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin di Kota Salatiga sebesar 4,94% dan menurun menjadi 4,57% pada tahun 2024. Kenaikan persentase penduduk miskin yang terjadi pada tahun 2020-2021 disebabkan oleh pandemi COVID-19, yang mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat dan mengakibatkan penurunan pendapatan. Namun, pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kota Salatiga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa kondisi perekonomian mulai membaik karena masyarakat telah mampu beradaptasi dengan situasi pandemi dan program-program pemerintah berjalan dengan efektif. Fluktuasi persentase penduduk miskin di Kota Salatiga sejalan dengan perubahan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah dan secara nasional.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.23. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional tahun 2020-2024

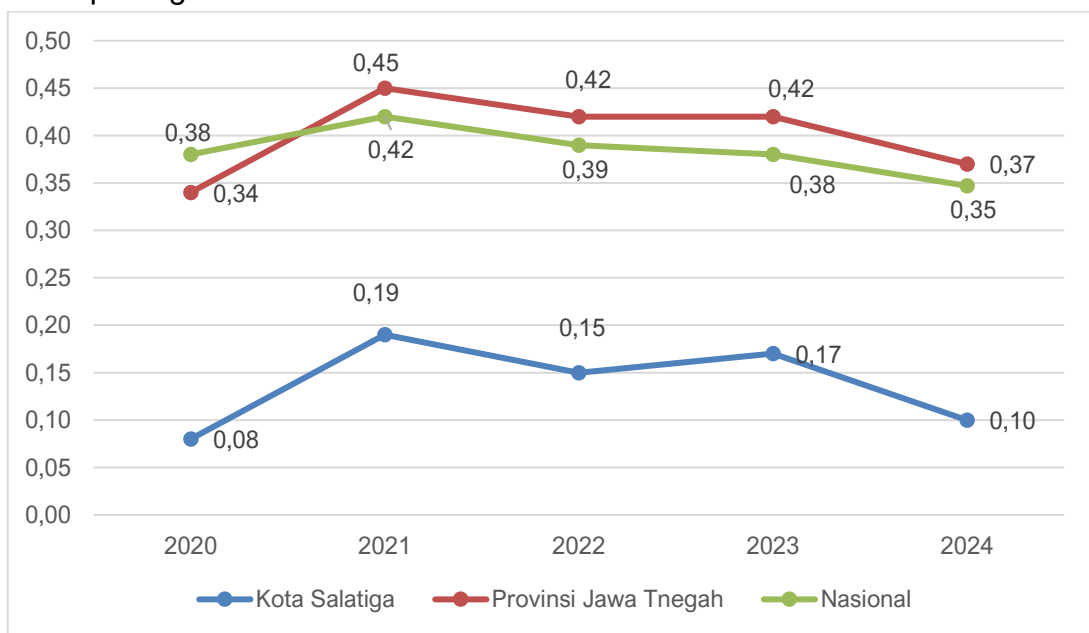
Persentase penduduk miskin di Kota Salatiga pada tahun 2024 terlihat paling rendah kedua dibanding kota lainnya di Jawa Tengah setelah Kota Semarang. Kondisi kemiskinan Kota Salatiga juga berada jauh lebih rendah dibandingkan Nasional dan Jawa Tengah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024.

Gambar 2.24. Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kota Salatiga Dibandingkan dengan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Lainnya tahun 2024

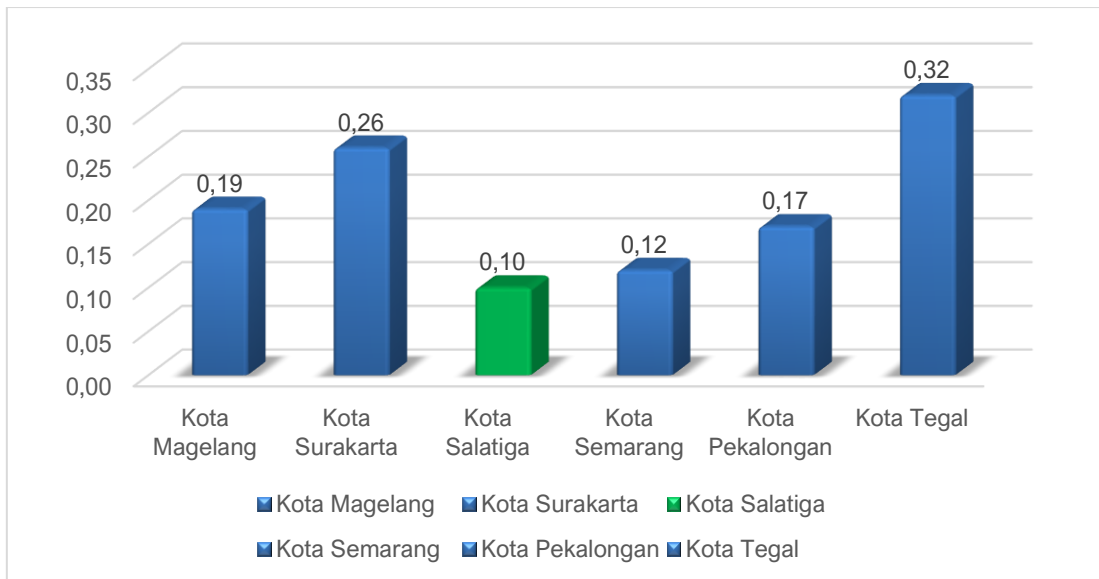
Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*, P2) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks ini memberikan informasi mengenai seberapa besar perbedaan pengeluaran di antara penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P2, semakin besar ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin tersebut. Perkembangan indeks keparahan kemiskinan Kota Salatiga memiliki tren fluktuatif cenderung menurun. Di tahun 2020 indeks keparahan kemiskinan mencapai 0,08 menjadi 0,10 di tahun 2024, meskipun di tahun 2021 mengalami peningkatan 0,11 dan tahun 2023 sebesar 0,02. Jika dibandingkan, indeks keparahan kemiskinan Kota Salatiga masih di bawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Selengkapnya secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.25. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020 – 2024

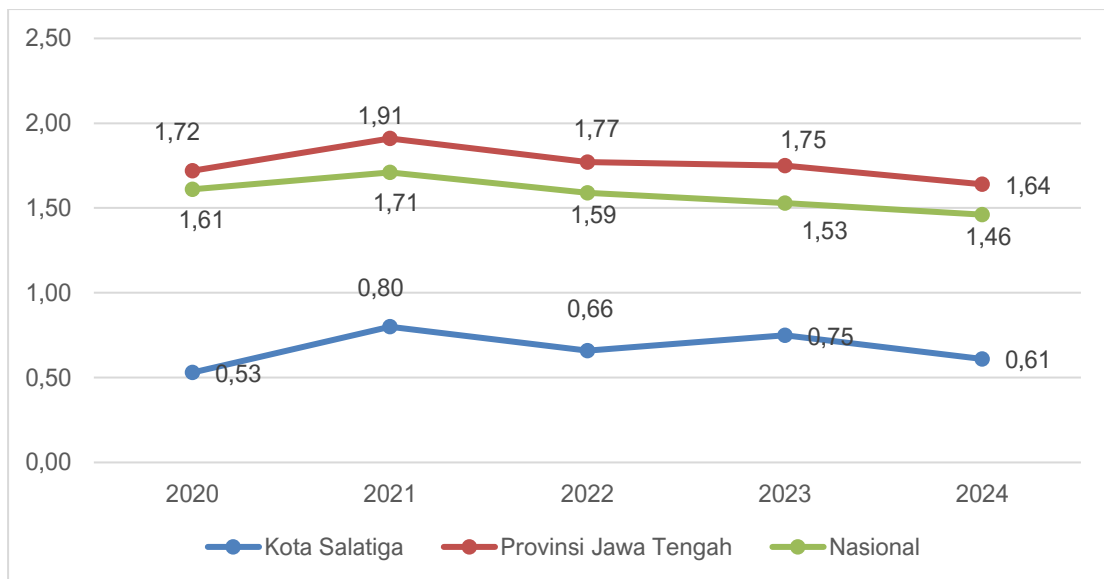
Indeks keparahan kemiskinan Kota Salatiga di tahun 2024 dibandingkan Kota disekitarnya menempati urutan terakhir dari enam kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2024 Kota Salatiga memiliki indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Salatiga menandakan kondisi kemiskinan tidak terlalu parah dibandingkan kota lain. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.26. Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota di Provinsi Jawa Tengah 2024

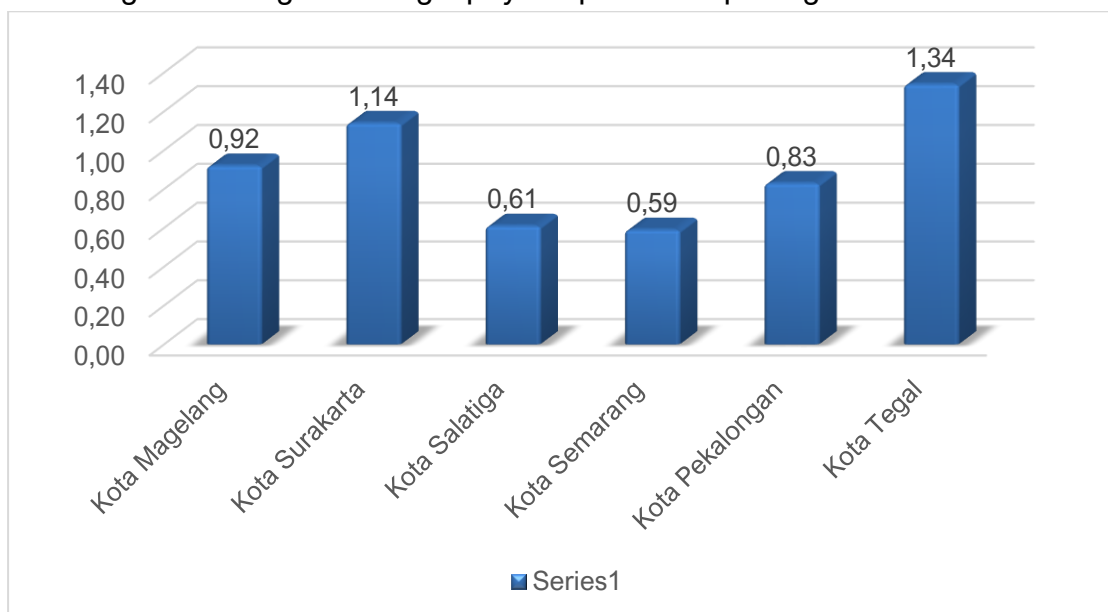
Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*, P1) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks ini memberikan gambaran tentang seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan yang ditetapkan. Semakin tinggi nilai P1, semakin besar kesenjangan, menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin jauh di bawah garis kemiskinan. Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan Kota Salatiga memiliki tren yang fluktuatif cenderung menurun, meskipun di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,27 kemudian di tahun 2023 juga mengalami peningkatan sebesar 0,09. Jika dibandingkan, indeks kedalaman kemiskinan Kota Salatiga lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah. 2025

Gambar 2.27. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020 – 2024

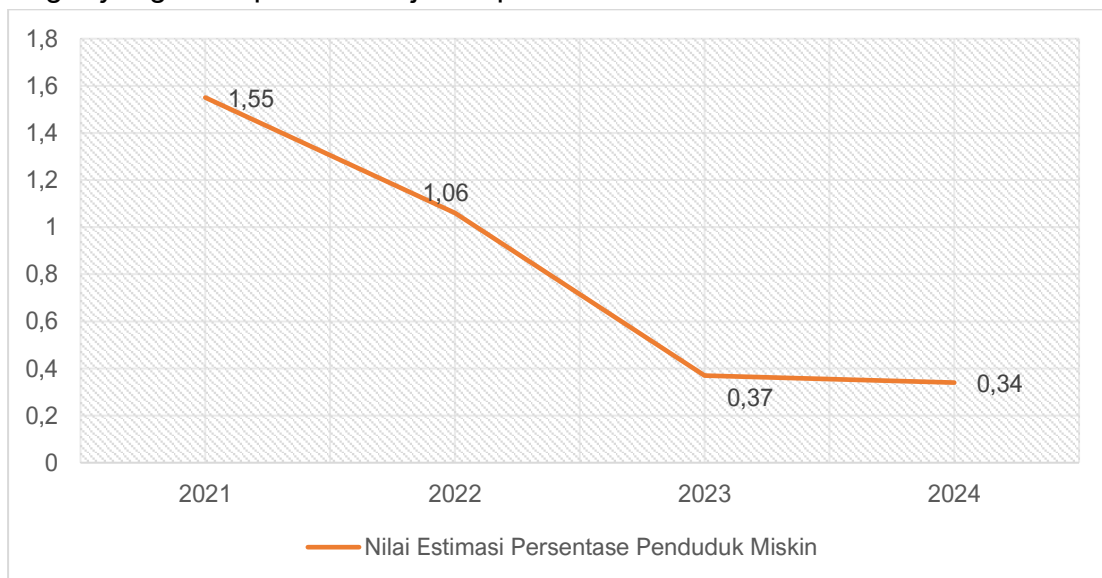
Indeks kedalaman kemiskinan Kota Salatiga jika dibandingkan dengan kota Se Provinsi Jawa Tengah menempati urutan ke dua terendah. Di tahun 2024 indeks kedalaman Kota Salatiga sebesar 0,61, lebih tinggi dari Kota Semarang dan lebih rendah dibandingkan Kota Magelang, Surakarta, Pekalongan dan Tegal. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah. 2025

Gambar 2.28. Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota di Provinsi Jawa Tengah 2024

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketika seseorang atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup yang paling mendasar, seperti makanan, air bersih, tempat tinggal, sanitasi, kesehatan, pendidikan, dan akses informasi. Secara nasional, upaya penghapusan kemiskinan ekstrem ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemerintah menetapkan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat tercapai menuju nol ditahun 2024. Berdasarkan rilis Kepmenko PMK dan BPS, angka kemiskinan di Kota Salatiga tahun 2024 sudah diangka 0,34, menurun dibandingkan kondisi ditahun 2021, yang menunjukkan target yang ditetapkan menuju nol persen ditahun 2024.



Sumber : Kepmenko PMK dan BPS. 2025

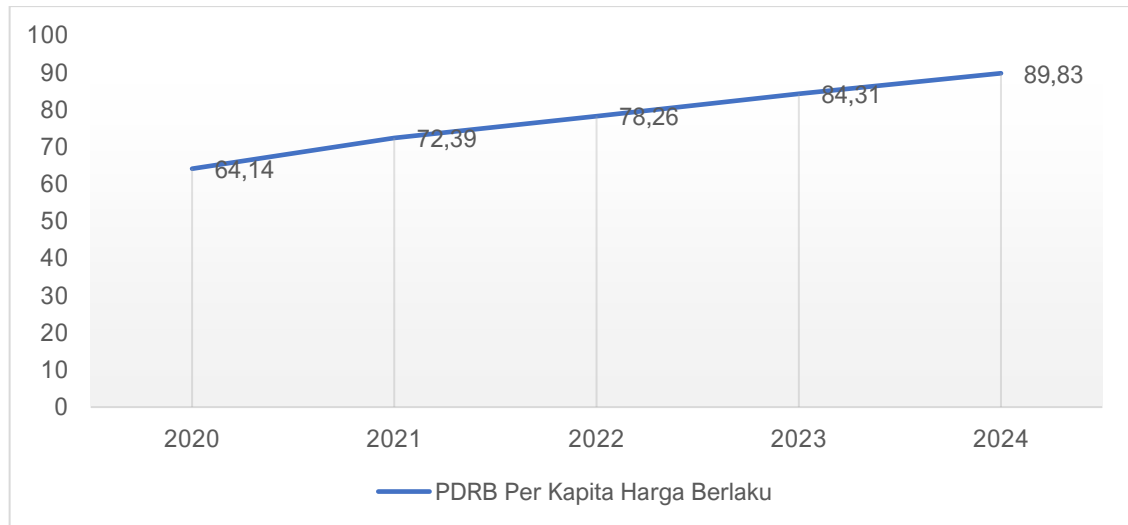
Gambar 2.29. Estimasi Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kota Salatiga Tahun 2021-2024

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan kesejahteraan masyarakat yang baik. Salah satu indikator lain yang berkaitan dengan PDRB dan dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat adalah PDRB Per Kapita. PDRB Per Kapita merupakan pendapatan rata-rata per orang yang diperoleh dari pembagian antara PDRB dan jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu. Indikator ini penting karena menggambarkan perkembangan ekonomi suatu daerah serta menunjukkan kinerja dan hasil pembangunan.

Nilai PDRB Per Kapita Kota Salatiga selama periode 2020-2024 menunjukkan tren yang cenderung meningkat, dimulai dari tahun 2020 sebesar 64,14 juta rupiah dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 89,83 juta rupiah tahun 2024. Selama lima tahun terakhir, PDRB Per Kapita Kota

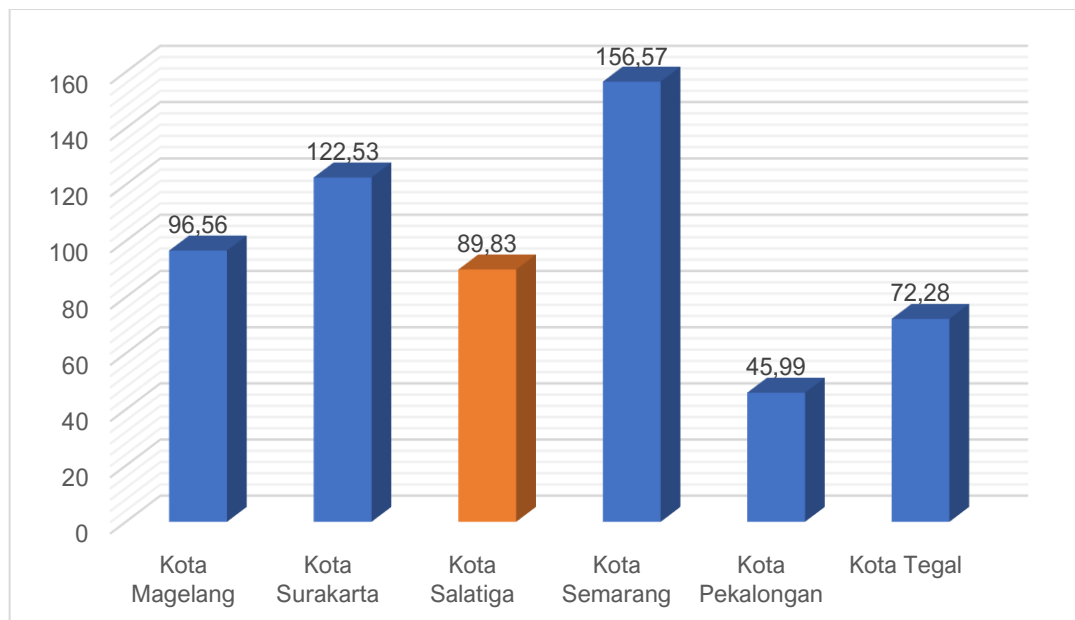
Salatiga mengalami peningkatan sebesar 25,69 juta rupiah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah. 2025

Gambar 2.30. Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Salatiga dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Jika dibandingkan dengan Kota di Provinsi Jawa Tengah, PDRB Per Kapita Kota Salatiga berada di posisi lebih tinggi dibandingkan Kota Pekalongan dan Kota Tegal. Namun lebih rendah dibandingkan Kota Magelang, Surakarta dan Semarang. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



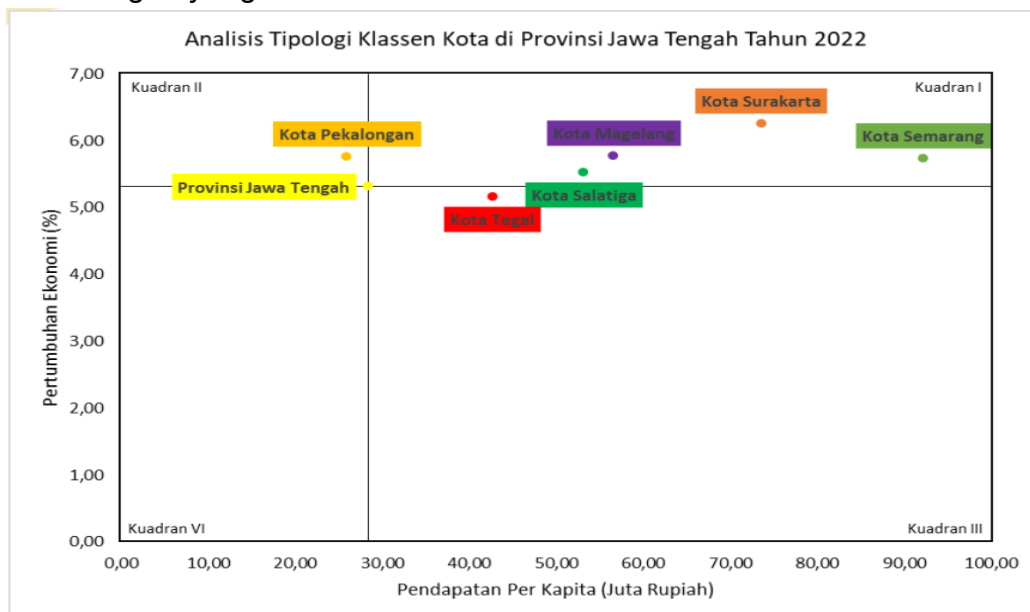
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah. 2025

Gambar 2.31. Perbandingan PDRB Per Kapita Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Untuk membandingkan nilai PDRB Per Kapita Kota Salatiga dengan kota di Provinsi Jawa Tengah digunakan analisis tipologi klassen. Namun tipologi klassen tidak hanya menggunakan basis data PDRB Per Kapita tapi juga menggunakan data pertumbuhan ekonomi. Sehingga analisis ini mampu mengidentifikasi tingkat perkembangan suatu wilayah. Hasil tipologi klassen merupakan klasifikasi wilayah.

Menurut tipologi klassen, wilayah dibagi menjadi menjadi empat klasifikasi yang pertama (Kuadran I) wilayah cepat maju dan cepat tumbuh yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita lebih tinggi dibanding rata-rata kabupaten/kota di provinsi. Kedua (Kuadran II) wilayah maju tapi tertekan yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi tapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota di provinsi. Ketiga (Kuadran III) wilayah berkembang cepat yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi tapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dari rata-rata kabupaten/kota di provinsi. Keempat (Kuadran VI) wilayah relatif tertinggal yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota di provinsi.

Berdasarkan analisis tipologi klassen pada kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 Kota Salatiga berada di Kuadran I, dimana Kuadran I merupakan wilayah cepat maju dan cepat tumbuh. Selain Kota Salatiga, kota lain yang berada di Kuadran I antara lain Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Tegal dan Kota Semarang. Sementara itu hanya ada satu kota yang berada di Kuadran II, yaitu Kota Pekalongan. Sedangkan untuk Kuadran IV, tidak ada kota di Provinsi Jawa Tengah yang berada di Kuadran IV.



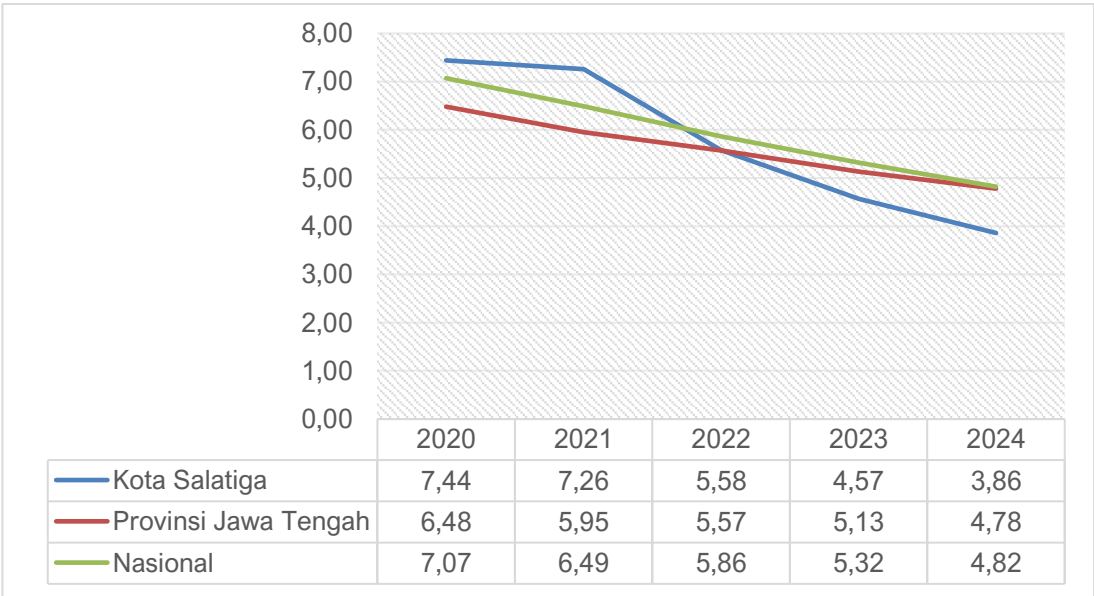
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023 (diolah)

Gambar 2.32. Tipologi Klassen Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023



4. Tingkat Pengangguran Terbuka

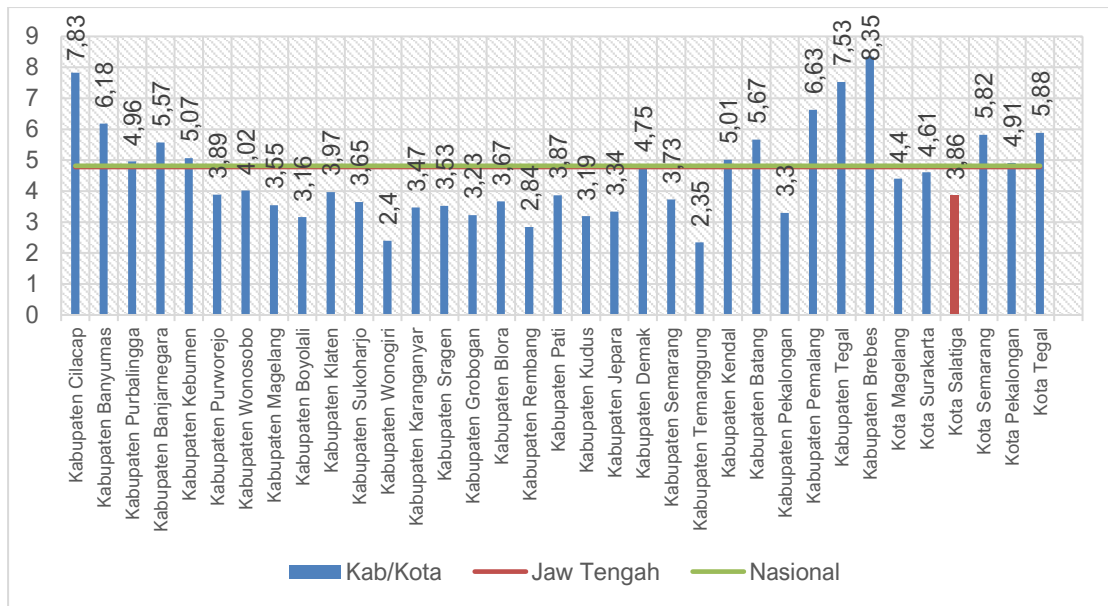
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja (penduduk berusia 15 tahun ke atas). Nilai TPT mencerminkan seberapa besar jumlah tenaga kerja yang belum dimanfaatkan. Menurut BPS, pengangguran mencakup penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau telah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Perkembangan TPT di Kota Salatiga antara tahun 2020-2024 menunjukkan tren menurun. Di tahun 2020 TPT Kota Salatiga sebesar 7,44% menjadi 3,86% di tahun 2024. Selama lima tahun terakhir TPT Kota Salatiga mengalami penurunan sebesar 3,58%. Penurunan TPT Kota Salatiga sejalan dengan penurunan TPT Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Secara rinci dapat dijelaskan pada gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah. 2025

Gambar 2.33. Perkembangan TPT Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

TPT Kota Salatiga pada tahun 2024 sebesar 3,86%. Jika dibandingkan dengan Kota sekitar, Kota Salatiga menempati posisi paling rendah dibandingkan kota Se Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

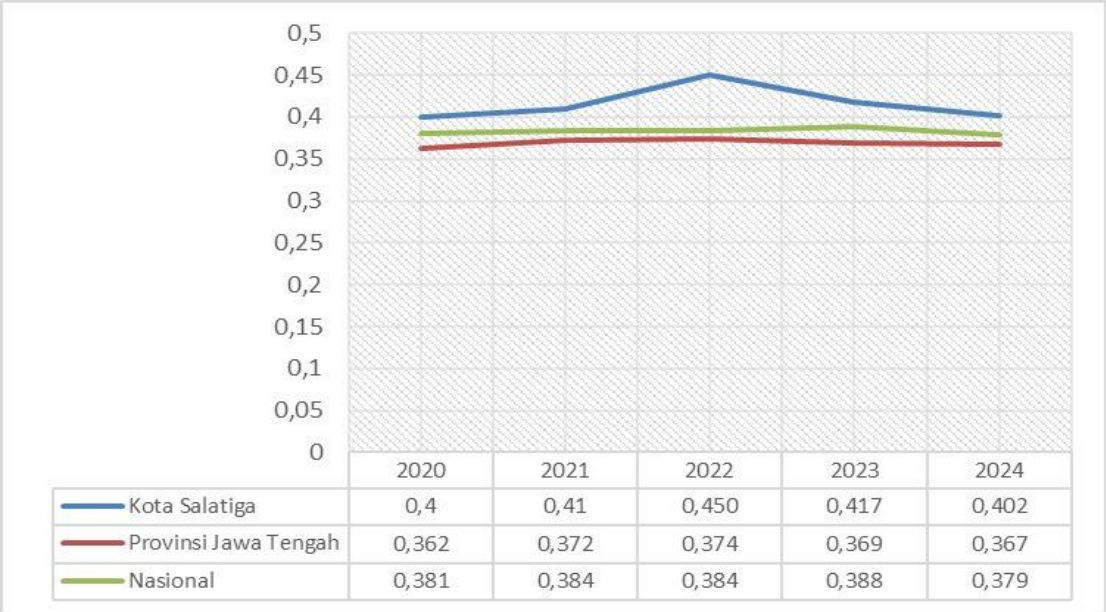


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah. 2025

Gambar 2.34. Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Salatiga Dibandingkan Dengan Nasional, Prov Jawa Tengah dan Kota Lainnya tahun 2024

5. Indeks Gini

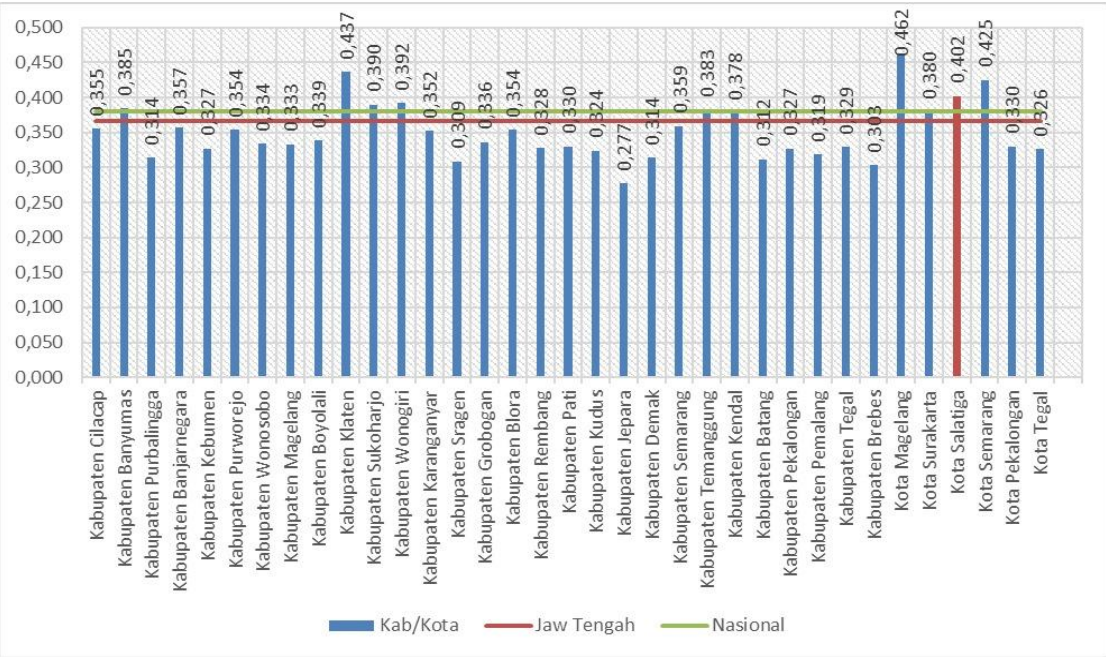
Untuk mengukur ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah Rasio Gini atau Indeks Gini. Indeks Gini merupakan ukuran ketimpangan pendapatan agregat yang nilainya berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1, semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan penduduk yang menunjukkan ketimpangan yang sempurna. Sebaliknya, semakin mendekati 0, semakin rendah tingkat ketimpangan pendapatan yang menunjukkan pemerataan yang sempurna. Tingkat ketimpangan dalam Indeks Gini dibagi menjadi tiga kategori diantaranya rendah ($\text{Indeks Gini} < 0,3$), sedang ($0,3 < \text{Indeks Gini} < 0,4$), dan tinggi ($\text{Indeks Gini} > 0,4$). Secara umum, Indeks Gini Kota Salatiga masih berada di atas Indeks Gini Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Dari tahun 2020 sampai 2024 indeks gini Kota Salatiga fluktuatif, cenderung meningkat. Dari tahun 2019 sebesar 0,40 menjadi 0,402 di tahun 2024 dengan meningkat di tahun 2022 dan tahun 2023. Gambaran nilai Indeks Gini Kota Salatiga dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas. 2020-2024

Gambar 2.35. Perkembangan Indeks Gini Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Indeks Gini Kota Salatiga pada tahun 2024, selain lebih tinggi dari rata-rata Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, dibandingkan kota lainnya juga berada posisi tertinggi kedua setelah Kota Magelang. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.



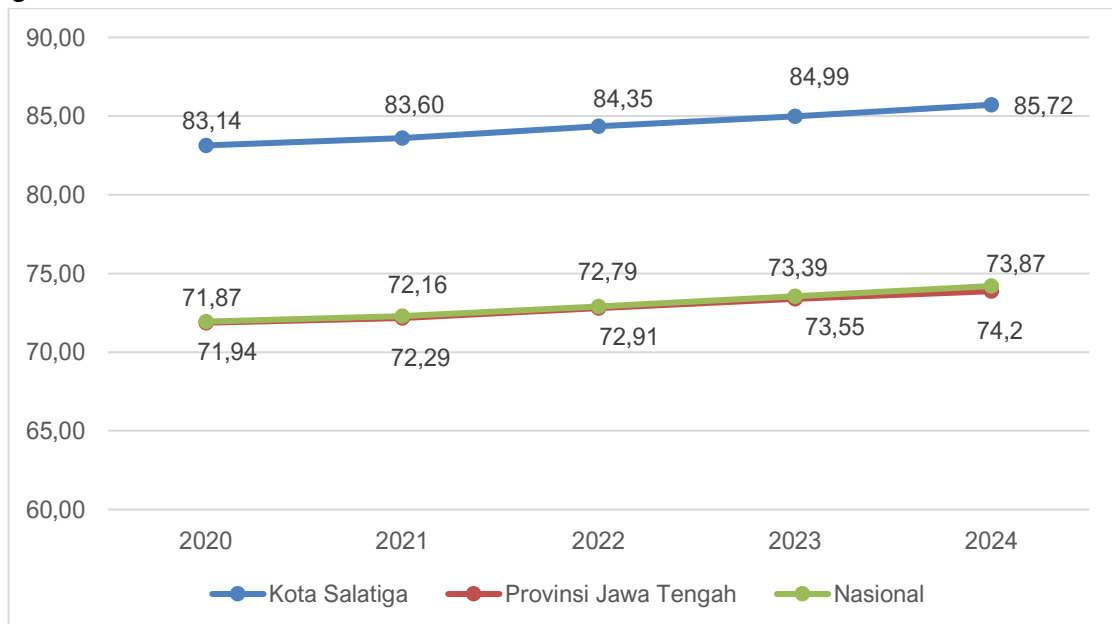
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024. Diolah

Gambar 2.36. Posisi Relatif Indeks Gini Kota Salatiga Dibandingkan Dengan Nasional, Prov Jawa Tengah dan Kota Lainnya tahun 2024

6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur hasil pembangunan suatu daerah dalam tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan kesehatan, pengetahuan, serta standar hidup yang layak. Dimensi umur panjang dan kesehatan diwakili oleh indikator angka harapan hidup, dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedangkan dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita. BPS mengelompokkan capaian IPM ke dalam empat kategori: Rendah ($IPM < 60$), Sedang ($60 \leq IPM \leq 70$), Tinggi ($70 \leq IPM \leq 80$), dan Sangat Tinggi ($IPM \geq 80$).

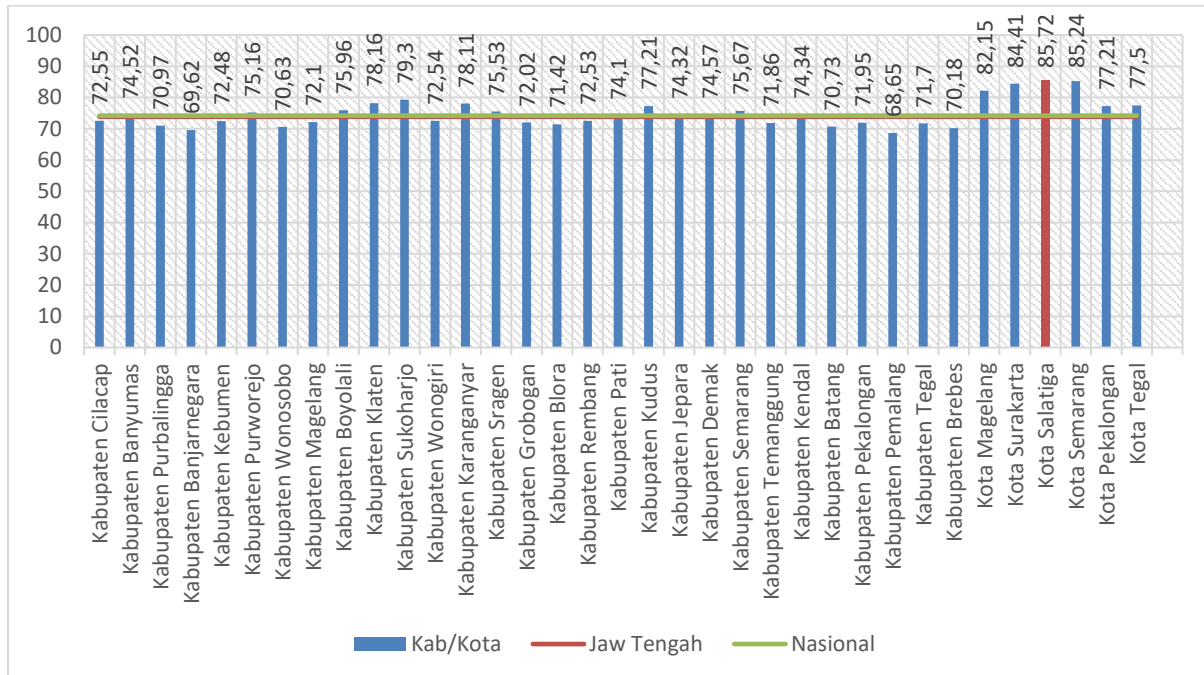
Sejak tahun 2020, nilai IPM di Kota Salatiga terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, nilai IPM Kota Salatiga adalah 83,14 dan terus meningkat hingga mencapai 85,72 pada tahun 2024. Dalam periode lima tahun, terjadi kenaikan IPM sebesar 2,58 poin. Perkembangan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pembangunan secara keseluruhan di Kota Salatiga. Dengan capaian ini, status pembangunan manusia di Kota Salatiga telah berada pada level sangat tinggi ($IPM \geq 80$). Perkembangan IPM di Kota Salatiga sejalan dengan perkembangan IPM di Provinsi Jawa Tengah dan secara nasional. Secara keseluruhan, nilai IPM Kota Salatiga lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Secara rinci dapat dijelaskan pada gambar berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024. Diolah

Gambar 2.37. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional 2020-2024

IPM Kota Salatiga termasuk paling tinggi di Jawa Tengah. Kondisi tersebut dapat dilihat pada grafik perbandingan dengan wilayah Kota Lainnya di Jawa Tengah.



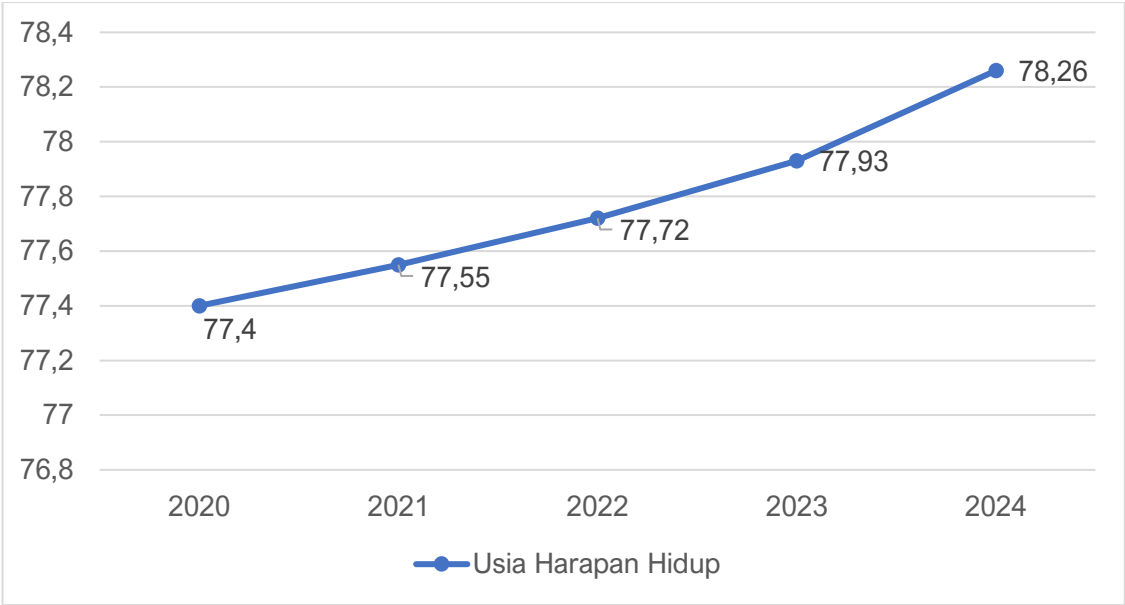
Sumber: Badan Pusat Statistik. 2025

Gambar 2.38. Posisi Relatif IPM Kota Salatiga Dibandingkan Dengan Nasional, Prov Jawa Tengah dan Kota Lainnya tahun 2024

2.2.2 Kesehatan Untuk Semua

1. Usia Harapan Hidup

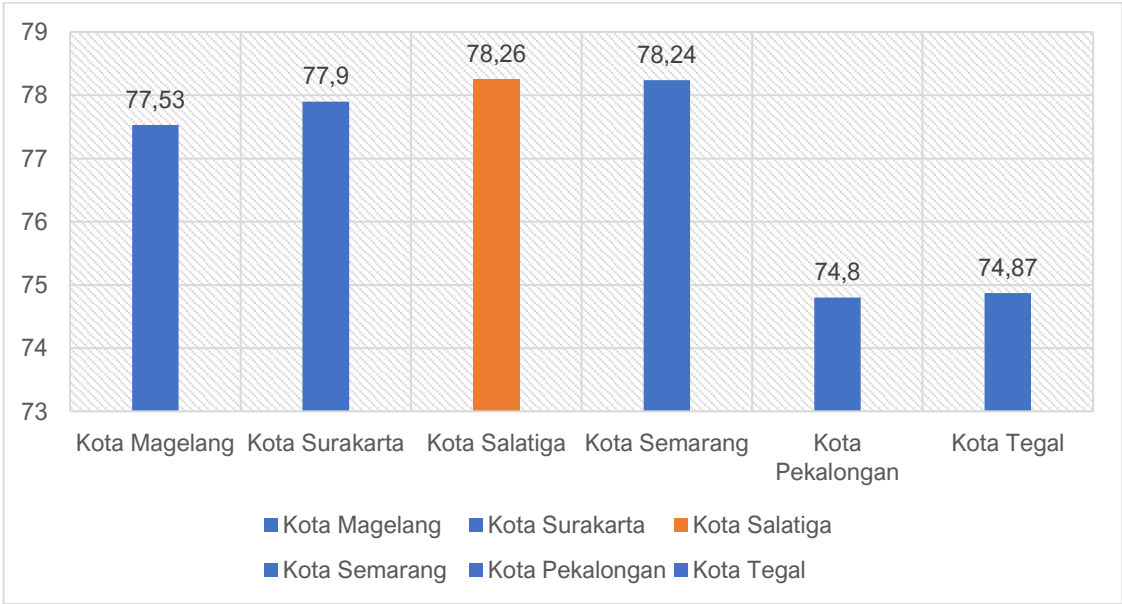
Usia Harapan Hidup (UHH) di Kota Salatiga menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, UHH tercatat sebesar 77,4 tahun, dan terus meningkat menjadi 77,55 tahun pada tahun 2021, mencerminkan peningkatan sebesar 0,15 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2022, di mana UHH mencapai 77,72 tahun, atau bertambah 0,17 tahun dari tahun 2021. Tren positif ini terus berlanjut hingga tahun 2023, dengan UHH mencapai 77,93 tahun, mengalami kenaikan sebesar 0,21 tahun. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2024, ketika UHH Kota Salatiga mencapai 78,26 tahun, naik 0,33 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, selama lima tahun terakhir, Usia Harapan Hidup di Kota Salatiga meningkat sebesar 0,86 tahun.



Sumber : BPS Kota Salatiga, 2025

Gambar 2.39. Perkembangan Usia Harapan Hidup Kota Salatiga Tahun 2020 -2024

Usia Harapan Hidup (UHH) di Kota Salatiga pada tahun 2024 tercatat sebesar 78,26 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Salatiga diharapkan dapat hidup hingga usia tersebut. Jika dibandingkan dengan kota-kota lain di sekitarnya, Kota Salatiga memiliki UHH tertinggi, sedikit lebih tinggi dari Kota Semarang sebesar 78,24 tahun dan lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Surakarta sebesar 77,9 tahun serta Kota Magelang sebesar 77,53 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



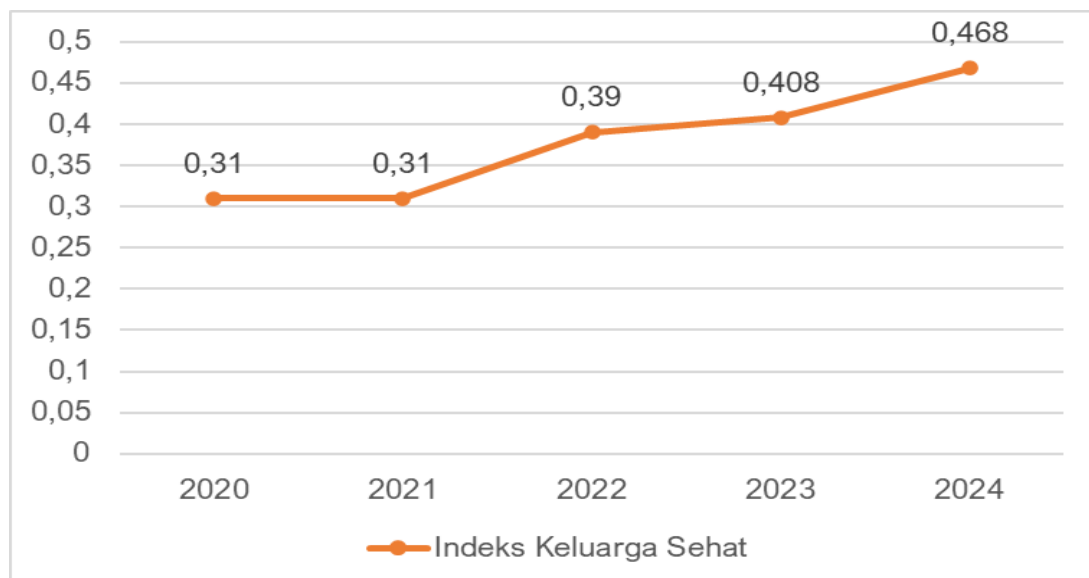
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.40. Perbandingan Usia Harapan Hidup Kota Se Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

2. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan suatu metode untuk menentukan apakah sebuah keluarga termasuk dalam kategori sehat, prasehat, atau tidak sehat, dengan ketentuan nilai IKS Sehat $> 0,80$, IKS Prasehat $0,50 - 0,80$, dan IKS Tidak Sehat $< 0,5$. Terdapat 12 indikator yang membentuk IKS, yaitu keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB), ibu melahirkan di fasilitas kesehatan, bayi menerima imunisasi dasar lengkap, bayi mendapatkan ASI eksklusif, balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, penderita TB paru menerima pengobatan sesuai standar, penderita hipertensi menjalani pengobatan secara teratur, penderita gangguan jiwa mendapatkan perawatan dan tidak ditelantarkan, tidak ada anggota keluarga yang merokok, keluarga terdaftar sebagai anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta keluarga memiliki akses terhadap air bersih dan menggunakan jamban sehat.

Indeks Keluarga Sehat Kota Salatiga menunjukkan tren peningkatan yang positif dan konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan menunjukkan bahwa semakin banyak keluarga di Kota Salatiga yang mengadopsi praktik-praktik kesehatan yang lebih baik, seperti akses terhadap layanan kesehatan, sanitasi yang layak, gizi seimbang, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Kesimpulannya, Kota Salatiga telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan kesehatan keluarga, namun masih ada ruang untuk perbaikan mengingat nilai indeks yang masih di bawah 0,5, mengindikasikan bahwa belum separuh lebih keluarga yang mencapai kategori sehat secara optimal.

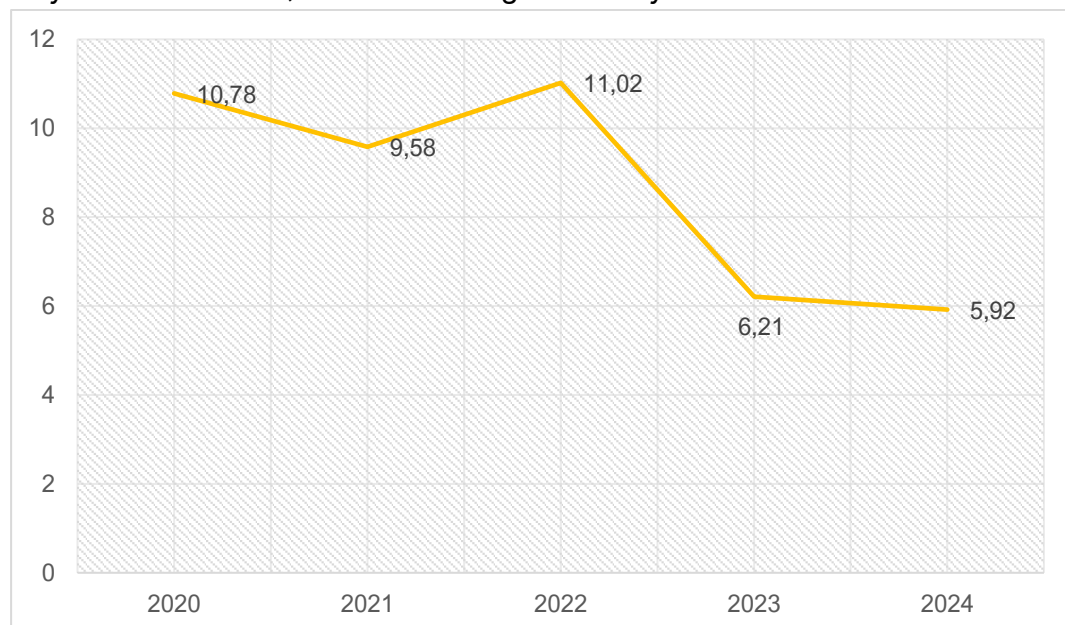


Sumber: Dinas Kesehatan Kota Salatiga.2025

Gambar 2.41. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Salatiga Tahun 2020-2024

3. Prevalensi Stunting pada Balita

Prevalensi stunting pada balita adalah persentase anak-anak di bawah usia lima tahun yang terklasifikasi sebagai *stunted* yaitu memiliki ukuran tinggi badan untuk usia yang lebih dari dua standar deviasi di bawah median dari Standar Pertumbuhan Anak WHO. Prevalensi stunting di Kota Salatiga menunjukkan penurunan yang signifikan antara tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, prevalensi stunting tercatat sebesar 10,78%, yang kemudian menurun menjadi 9,58% pada tahun 2021. Meskipun sempat meningkat lagi menjadi 11,02% di tahun 2022, angka ini mengalami penurunan drastis menjadi 6,21% di tahun 2023 dan terus menurun hingga mencapai 5,92% di tahun 2024. Penurunan sebesar 4,86% dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian dan pencegahan stunting di Kota Salatiga. Keberhasilan ini mencerminkan berbagai intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan gizi ibu dan anak, pelayanan kesehatan, serta edukasi gizi di masyarakat.



Sumber : Dinas kesehatan dan RSUD Kota Salatiga, 2024

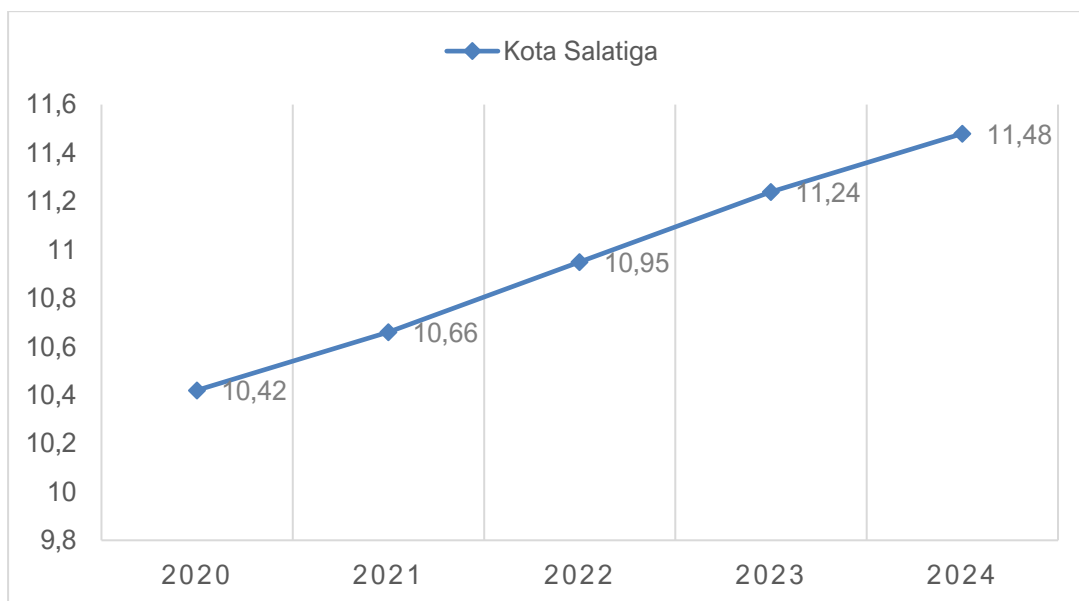
Gambar 2.42. Perkembangan Prevalensi Stunting pada Balita Tahun 2020 – 2024

2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

1. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan suatu populasi, khususnya dalam pendidikan formal. RLS menunjukkan jumlah tahun rata-rata yang dihabiskan oleh penduduk dalam menempuh pendidikan formal, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Rata-rata lama sekolah di Kota Salatiga menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020,

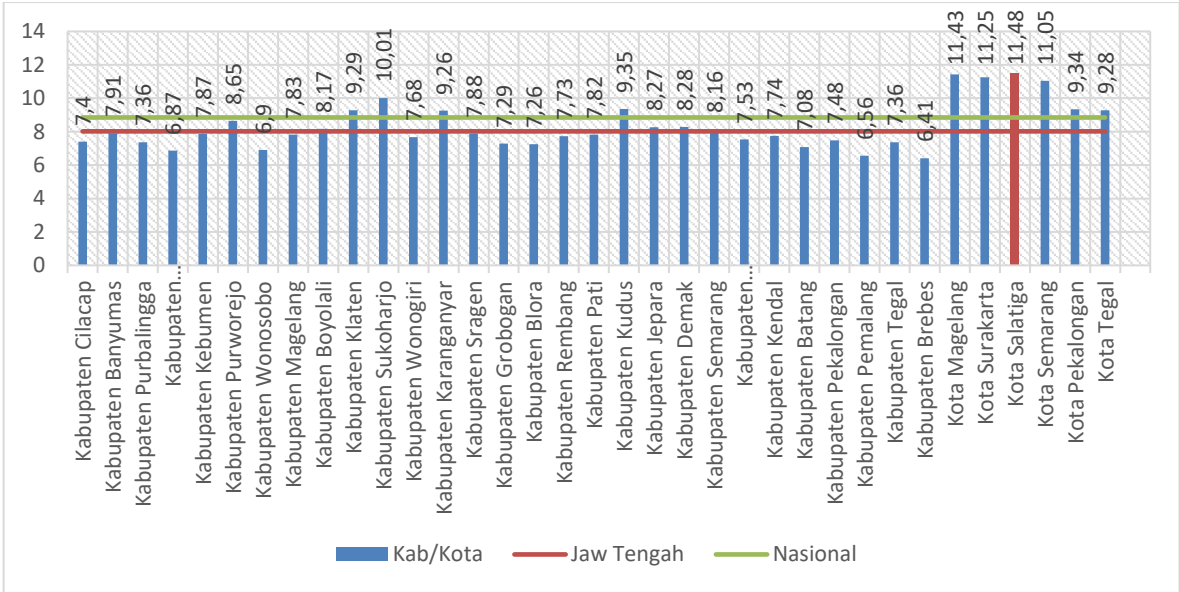
rata-rata lama sekolah tercatat sebesar 10,42 tahun. Angka ini terus meningkat mencapai 11,48 tahun di tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam akses pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal. Selama lima tahun terakhir, rata-rata lama sekolah di Kota Salatiga meningkat sebesar 1,06 tahun, menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang menyelesaikan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Dengan angka 11,48 tahun pada tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Salatiga telah menempuh pendidikan hingga tingkat menengah atas atau setara dengan SMA.



Sumber : BPS Kota Salatiga, 2025

Gambar 2.43. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Salatiga Tahun 2020 – 2024

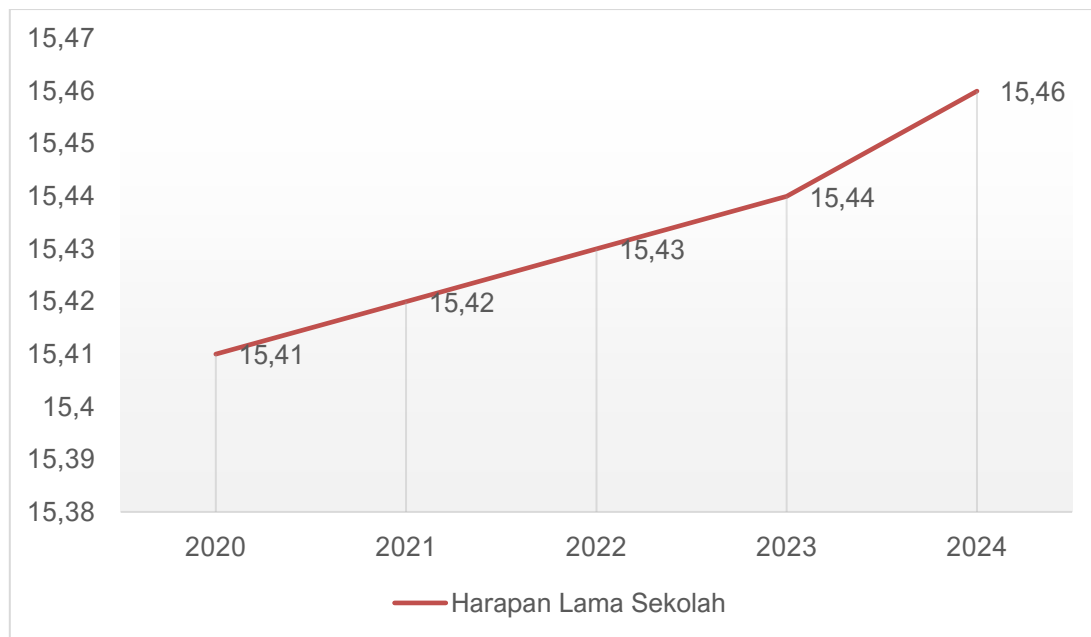
Rata-rata lama sekolah di Kota Salatiga merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan beberapa kota lain di sekitarnya. Pada tahun yang 2024, rata-rata lama sekolah di Kota Salatiga tercatat sebesar 11,48 tahun, yang menunjukkan bahwa, secara umum, penduduk di kota ini telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA atau awal pendidikan tinggi. Jika dibandingkan dengan kota-kota lain, Kota Salatiga memiliki angka yang sedikit lebih tinggi daripada Kota Magelang sebesar 11,43 tahun, Kota Surakarta sebesar 11,25 tahun, dan Kota Semarang sebesar 11,05 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025
Gambar 2.44. Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

2. Harapan Lama Sekolah

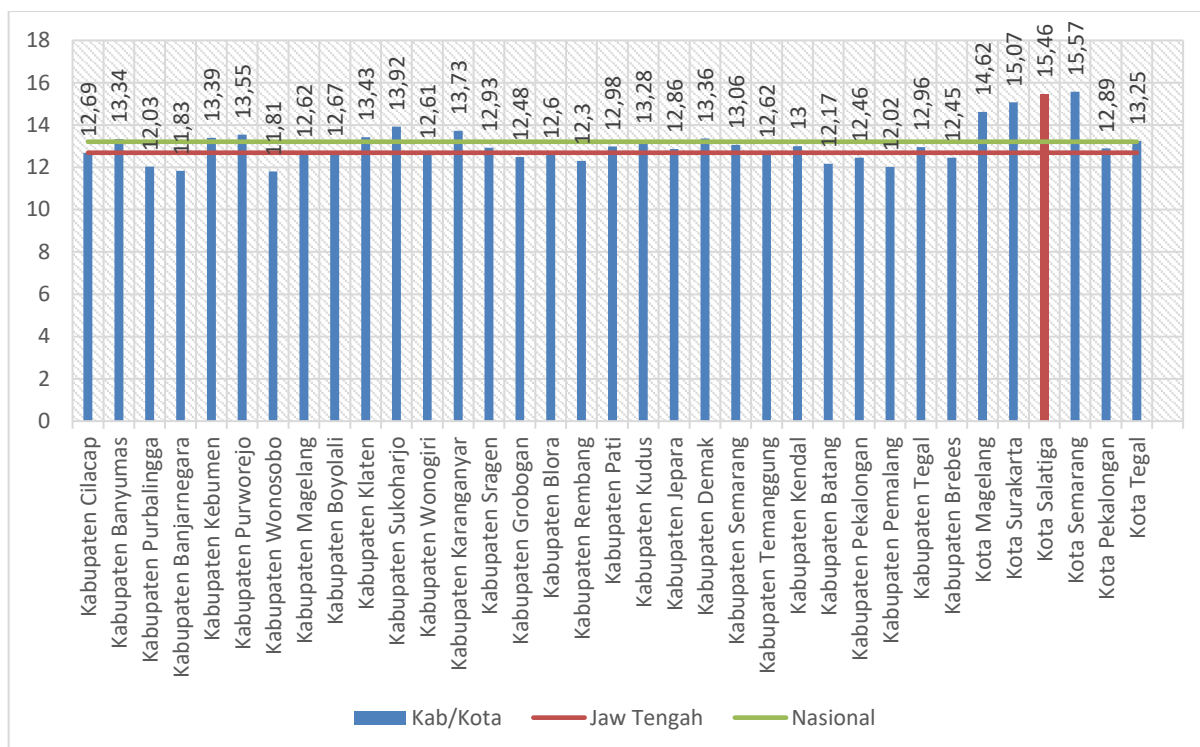
Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah tahun pendidikan yang diharapkan akan ditempuh oleh anak-anak yang baru lahir, berdasarkan kondisi pendidikan saat ini. HLS memberikan gambaran tentang potensi pendidikan yang dapat dicapai oleh generasi mendatang dalam suatu populasi. Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Salatiga menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, HLS tercatat sebesar 15,41 tahun, dan mengalami peningkatan secara bertahap setiap tahunnya hingga mencapai 15,46 tahun pada tahun 2024. Peningkatan HLS ini mengindikasikan bahwa anak-anak yang lahir di Kota Salatiga selama periode 2020 sampai 2024 memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang Diploma atau Sarjana (S1). Secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber : BPS Kota Salatiga, 2025

Gambar 2.45. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Salatiga Tahun 2020 – 2024

Pada tahun 2024, Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Salatiga tercatat sebesar 15,46 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kota Salatiga memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang Diploma atau Sarjana (S1). Jika dibandingkan dengan kota-kota lain di sekitarnya, Kota Salatiga menempati peringkat kedua tertinggi setelah Kota Semarang yang memiliki HLS sebesar 15,57 tahun. Sementara itu, Kota Magelang dan Kota Surakarta mencatat HLS masing-masing sebesar 14,62 tahun dan 15,07 tahun, sedangkan Kota Pekalongan dan Kota Tegal menunjukkan angka yang lebih rendah, yaitu 12,89 tahun dan 13,25 tahun.

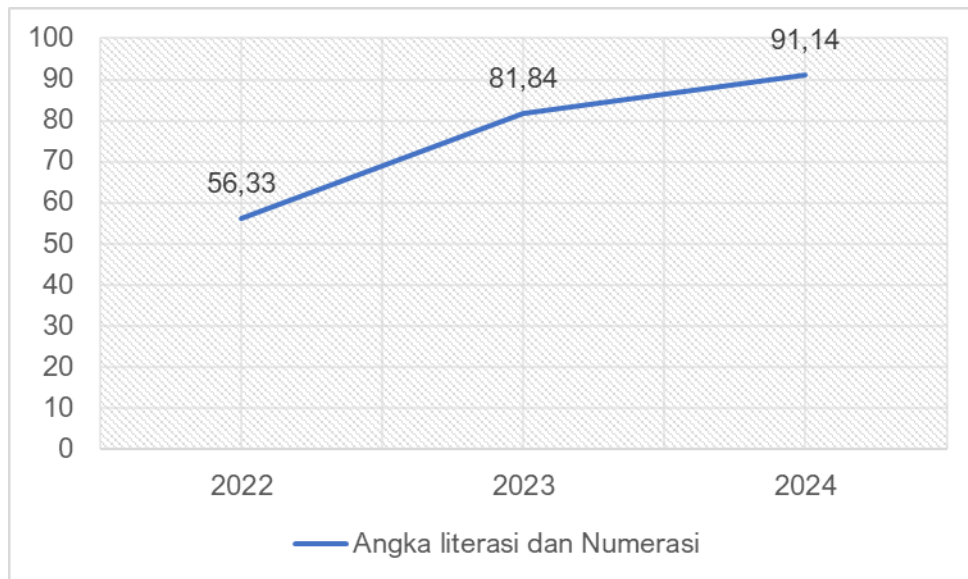


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.46. Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

3. Angka Literasi/Numerasi

Angka Literasi dan Numerasi siswa SD dan SMP di Kota Salatiga menunjukkan peningkatan yang sangat impresif dan konsisten dari tahun 2022 hingga 2024. Dimulai dari 56,33 pada tahun 2022, angka ini melonjak signifikan menjadi 81,84 pada tahun 2023, dan terus meningkat tajam hingga mencapai 91,14 pada tahun 2024. Peningkatan yang drastis dan stabil ini mengindikasikan adanya keberhasilan yang luar biasa dalam upaya peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa di tingkat dasar dan menengah pertama di Kota Salatiga. Pencapaian ini dapat didukung oleh berbagai inisiatif seperti peningkatan kualitas pengajaran, program membaca dan berhitung yang intensif, penyediaan sumber belajar yang memadai, serta dukungan dari berbagai pihak termasuk keluarga dan komunitas pendidikan. Berdasarkan pencapaian tersebut, Kota Salatiga telah menunjukkan komitmen dan keberhasilan yang sangat tinggi dalam meningkatkan literasi dan numerasi siswa SD dan SMP, mencerminkan kualitas pendidikan yang semakin baik dan pondasi belajar yang lebih kuat bagi generasi muda.



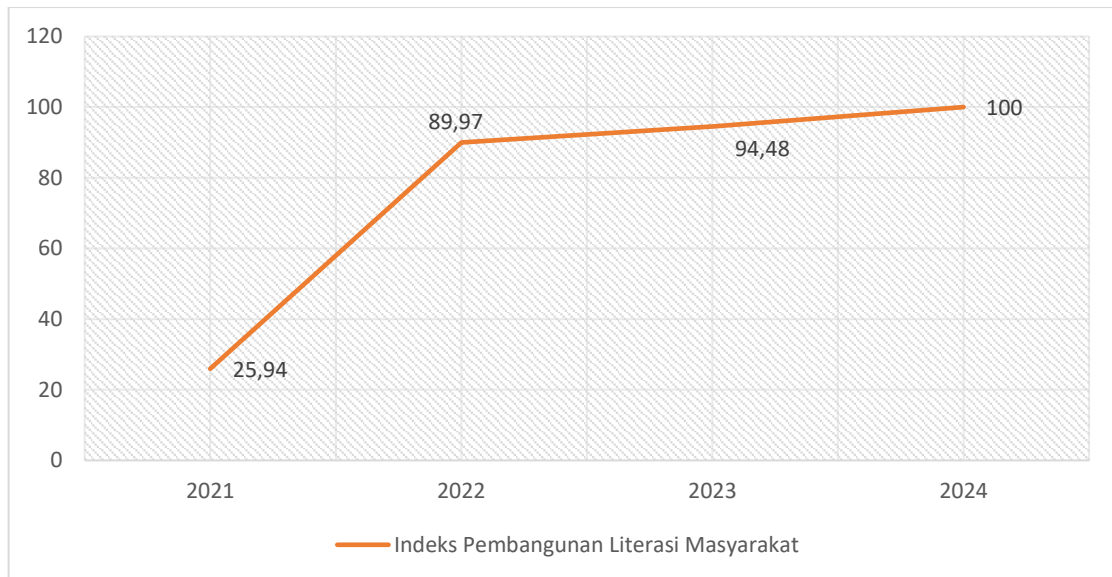
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Salatiga.2025

Gambar 2.47. Angka Literasi dan Numerasi Kota Salatiga Tahun 2022-2023

4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas sumber daya manusia. Dengan literasi, kemampuan seseorang dalam memahami dan menarik kesimpulan dari informasi yang diterima menjadi lebih baik. IPLM mengukur upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai sarana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi di masyarakat. Terdapat tujuh unsur dalam pembangunan literasi masyarakat, yaitu pemerataan layanan perpustakaan, kecukupan koleksi, kecukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan harian, jumlah perpustakaan ber-SNP, partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial/promosi, dan jumlah anggota perpustakaan. Perpustakaan Nasional mengelompokkan nilai IPLM ke dalam lima kategori: Sangat Rendah (0-29,9), Rendah (30-49,9), Sedang (50-79,9), Tinggi (80-89,9), dan Sangat Tinggi (90-100).

Dari tahun 2021 sampai 2024 indeks Pembangunan literasi masyarakat Kota Salatiga mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dari tahun 2021 indeks Pembangunan literasi masyarakat Kota Salatiga sebesar 25,94 menjadi 100 di tahun 2024. Selama empat tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 74,06. IPLM Kota Salatiga di tahun 2024 masuk dalam kategori sangat tinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



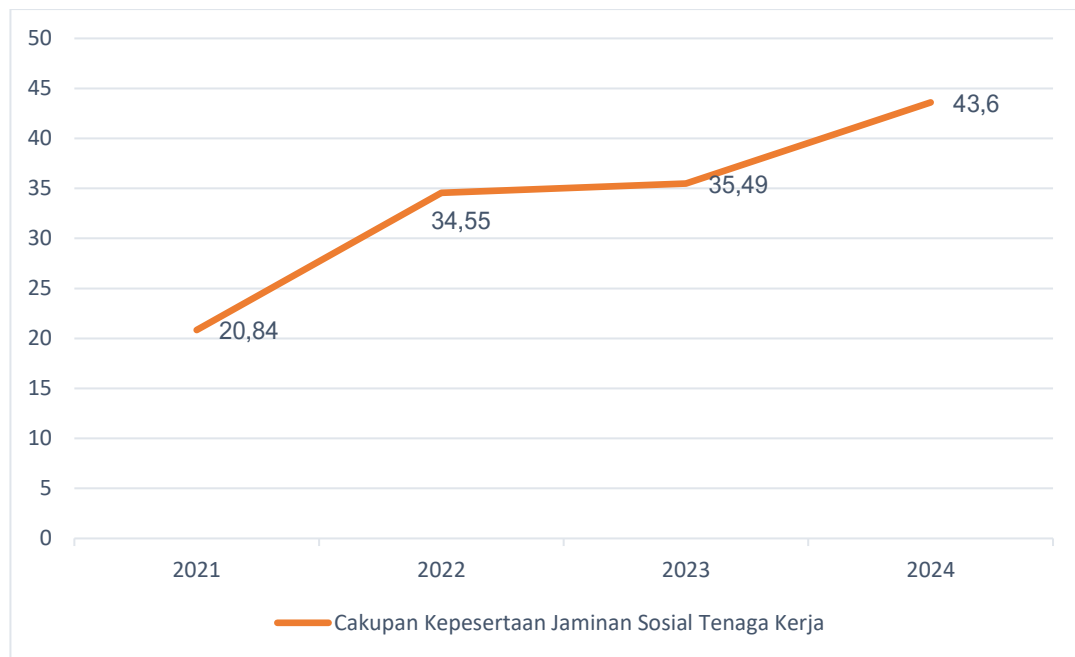
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga, 2025

Gambar 2.48. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Salatiga

2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja merupakan indikator yang menggambarkan tingkat partisipasi tenaga kerja dalam program perlindungan sosial ketenagakerjaan, seperti yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Program ini memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko yang dihadapi tenaga kerja, seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan kehilangan pekerjaan, sehingga berperan penting dalam menjamin keberlangsungan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Peningkatan cakupan kepesertaan mencerminkan komitmen dan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan sosial bagi tenaga kerja, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal. Semakin tinggi cakupan kepesertaan, semakin besar jumlah tenaga kerja yang telah memperoleh haknya atas jaminan sosial, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap stabilitas ekonomi dan sosial daerah. Cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja Kota Salatiga dari tahun 2021 sampai 2024 menunjukkan tren yang meningkat tiap tahunnya. Dari tahun 2021 sebesar 20,84% menjadi 43,6%. Hal ini menunjukkan bahwa selama empat tahun terakhir cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja Kota Salatiga mengalami peningkatan sebesar 22,76%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

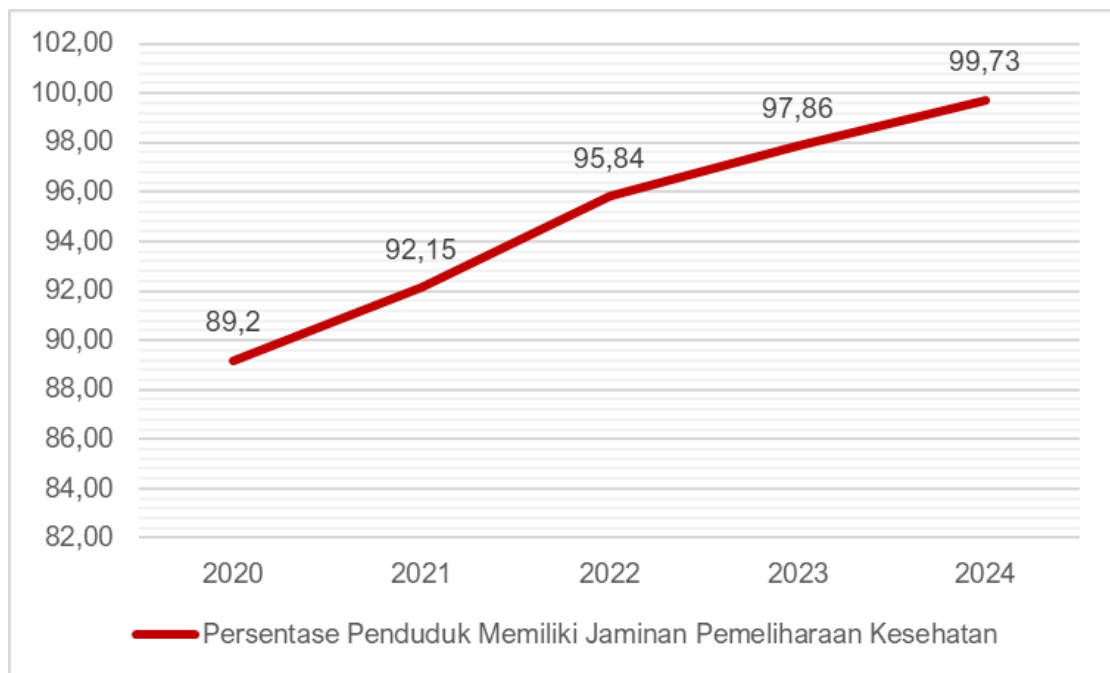


Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga, 2025

Gambar 2.49. Perkembangan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2021 – 2024

2. Persentase Penduduk Memiliki Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Persentase Penduduk Memiliki Jaminan Pemeliharaan Kesehatan menggambarkan seberapa besar penduduk di Kota Salatiga yang memiliki akses terhadap jaminan pemeliharaan kesehatan, seperti asuransi kesehatan atau program jaminan kesehatan nasional. Pada tahun 2024, penerima jaminan pemeliharaan kesehatan di Kota Salatiga sebesar 198.439 jiwa, jika dibandingkan dengan penduduk semetser II tahun 2024 sebesar 198.971 jiwa, maka penduduk Kota Salatiga 99,73% sudah memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan. Kota Salatiga memiliki kebijakan UHC (*Universal Health Coverage*), yang bertujuan untuk memastikan semua orang memiliki akses yang adil dan bermutu terhadap pelayanan kesehatan, tanpa adanya hambatan finansial. Belum terpenuhinya 100% seluruh penduduk memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan dipengaruhi oleh migrasi penduduk yang terjadi di Kota Salatiga.



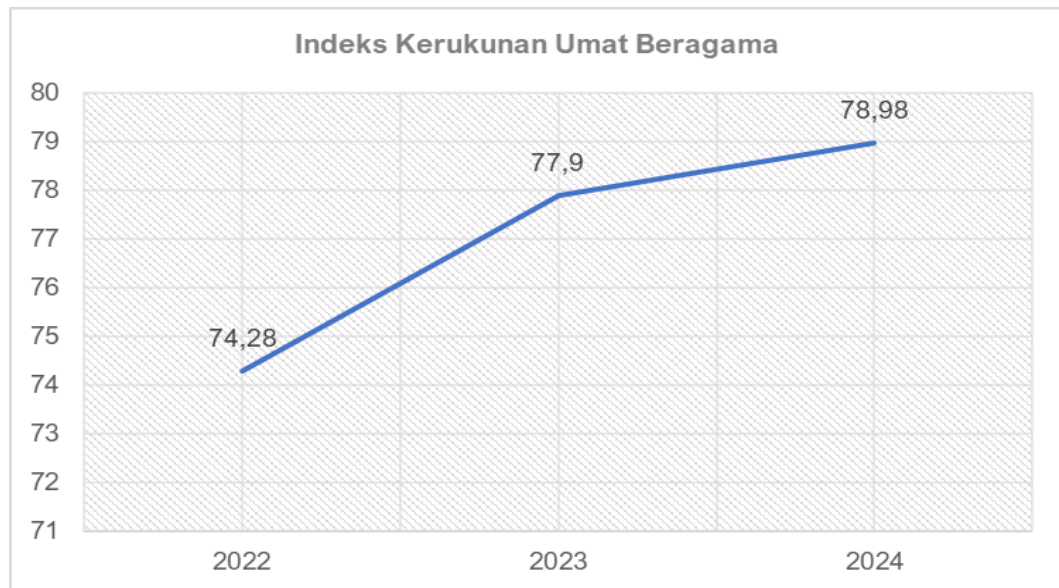
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Salatiga.2025

Gambar 2.50. Persentase Penduduk Kota Salatiga Memiliki Jaminan Pemeliharaan Kesehatan tahun 2020-2024

2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

1. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah instrumen utama yang digunakan untuk mengukur pencapaian program-program kerukunan. IKUB diukur berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Kriteria pencapaian IKUB dibagi menjadi beberapa kategori diantaranya IKUB Sangat Rendah (0-20), IKUB Rendah (21-40), IKUB Sedang (41-60), IKUB Tinggi (61-80), dan IKUB Sangat Tinggi (80-100). Nilai IKUB Kota Salatiga dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan perubahan yang positif. Pada tahun 2022, IKUB Kota Salatiga tercatat sebesar 74,28 meningkat menjadi 78,98 di tahun 2024 dan termasuk dalam kategori IKUB Tinggi.



Sumber: Kesbangpol Kota Salatiga, 2025

Gambar 2.51. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kota Salatiga Tahun 2022-2024

2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

1. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran standar yang digunakan untuk menilai pencapaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA terdiri dari Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA), yang didasarkan pada lima klaster hak anak dalam Konvensi Hak Anak. Lima klaster yang menjadi dasar terbentuknya IPA meliputi Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya; serta Perlindungan Khusus.

Nilai IPA Kota Salatiga dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan perubahan yang fluktuatif. Selama periode 2021-2022 nilai IPA Kota Salatiga mengalami perkembangan positif, namun pada tahun 2023 terjadi penurunan. Nilai IPA tertinggi untuk Kota Salatiga tercatat pada tahun 2022 yaitu sebesar 74,74 yang kemudian turun menjadi 72,57 pada tahun 2023.



Sumber : DP3APPKB Kota Salatiga.2025

Gambar 2.52. Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Salatiga Tahun 2021-2023

2. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) Kota Salatiga menunjukkan tren peningkatan yang sangat positif dan konsisten dari tahun 2021 hingga 2024. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa ada upaya yang kuat dan berhasil dalam meningkatkan berbagai aspek pembangunan keluarga di Salatiga, yang mungkin mencakup peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan fungsi keluarga dalam masyarakat, sehingga kualitas hidup keluarga secara keseluruhan menjadi lebih baik. Pemerintah Kota Salatiga telah menunjukkan komitmen yang kuat dan keberhasilan dalam program-program pembangunan keluarga, dengan indikator IBangga yang terus meningkat, mencerminkan peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga di Kota Salatiga.

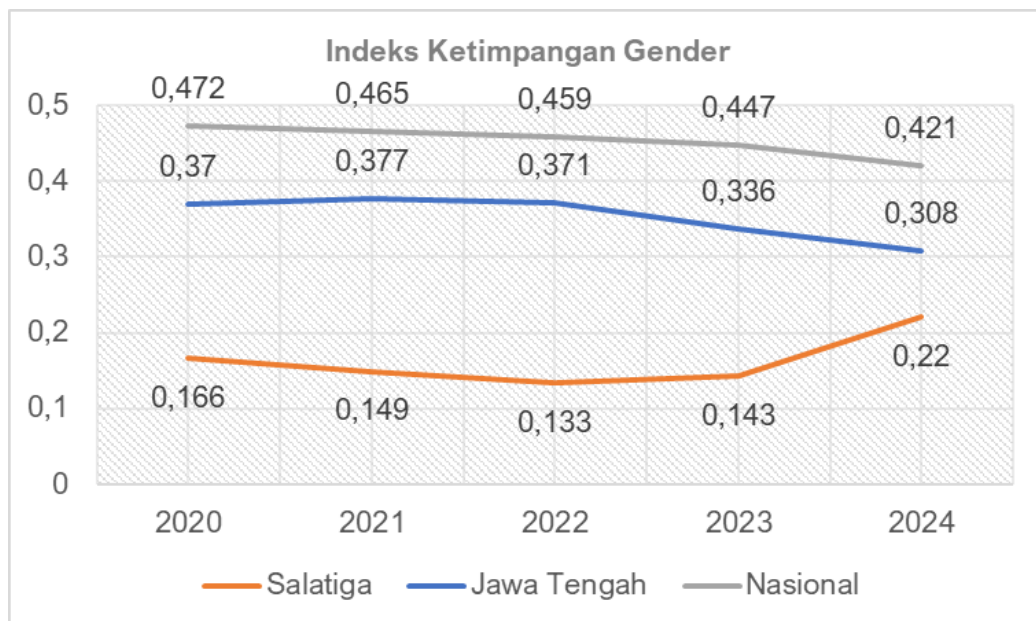


Sumber: DP3AP2KB Kota Salatiga.2025

Gambar 2.53. Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) Kota Salatiga Tahun 2021-2024

3. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Salatiga pencapaiannya lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Namun jika dilihat dari datanya, kinerja Kota Salatiga menunjukkan dinamika yang berbeda dibandingkan dengan tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dari tahun 2020 hingga 2024. Secara umum, nilai IKG menunjukkan tingkat ketimpangan: semakin rendah nilai IKG, semakin kecil ketimpangan gender. Untuk Kota Salatiga, IKG berfluktuasi namun menunjukkan tren penurunan hingga tahun 2022 (dari 0,166 menjadi 0,133), yang menandakan berkurangnya ketimpangan gender. Namun, IKG Salatiga kemudian meningkat kembali menjadi 0,22 pada tahun 2024, mengindikasikan adanya peningkatan ketimpangan gender. Sementara itu, Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren penurunan IKG yang konsisten dari 0,37 pada 2020 menjadi 0,308 pada 2024, dan tingkat Nasional juga menunjukkan tren penurunan dari 0,472 menjadi 0,421 dalam periode yang sama. Meskipun Kota Salatiga pada awalnya menunjukkan perbaikan dalam ketimpangan gender, tren kenaikan IKG di tahun-tahun terakhir mengisyaratkan adanya tantangan baru atau kemunduran dalam upaya kesetaraan gender, dan ini berbeda dengan tren positif yang terlihat di tingkat provinsi dan nasional yang menunjukkan perbaikan berkelanjutan.



Sumber: Badan Pusat Statistik.2025

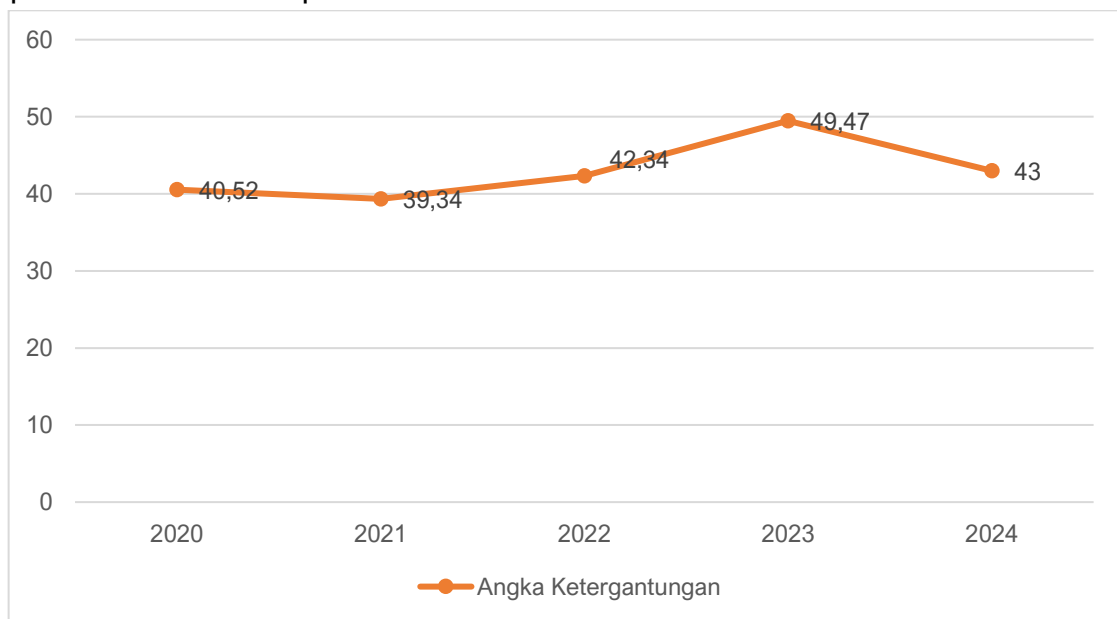
Gambar 2.54. Ketimpangan Gender (IKG) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

2.3 Aspek Daya Saing

2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

1. Angka Ketergantungan

Angka Ketergantungan atau penduduk berdasarkan umur menjadi salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka ketergantungan, semakin besar beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif untuk mendukung kehidupan penduduk yang belum produktif dan yang tidak produktif lagi. Sebaliknya, persentase angka ketergantungan yang lebih rendah menunjukkan berkurangnya beban yang ditanggung oleh penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan yang tidak produktif lagi. Penduduk Berdasarkan umur di Kota Salatiga dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2024, angka ketergantungan mengalami penurunan signifikan menjadi 43,00, dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat sebesar 49,47. Ini berarti bahwa pada tahun 2024, setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 43 penduduk usia tidak produktif.



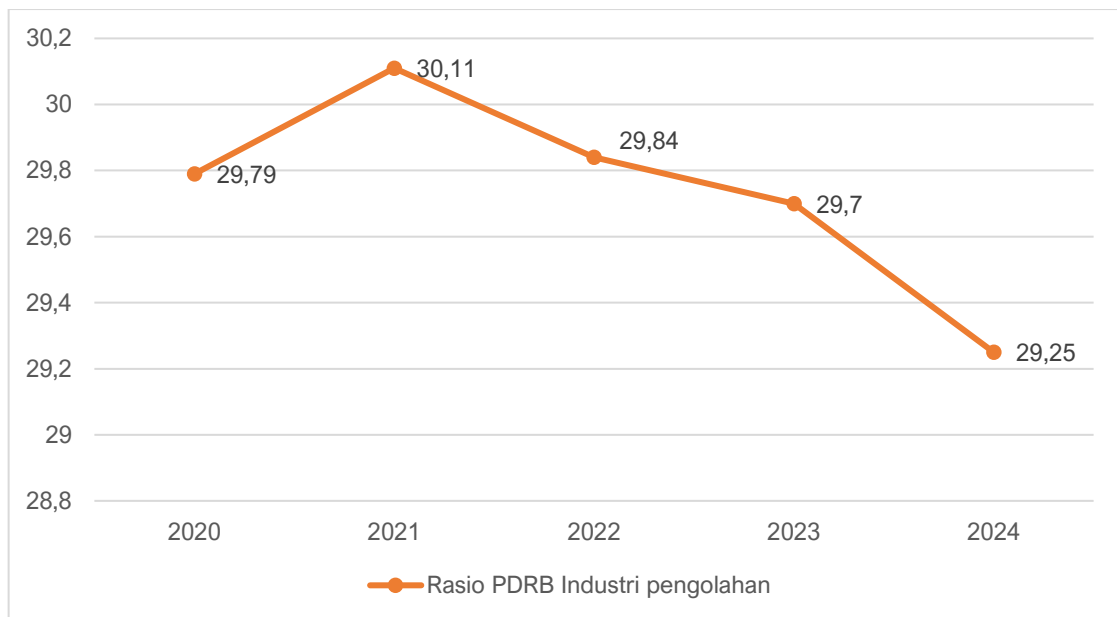
Sumber : BPS Kota Salatiga. 2025 (diolah)

Gambar 2.55. Angka Ketergantungan Kota Salatiga Tahun 2020-2024

2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

1. Rasio PDRB Industri Pengolahan

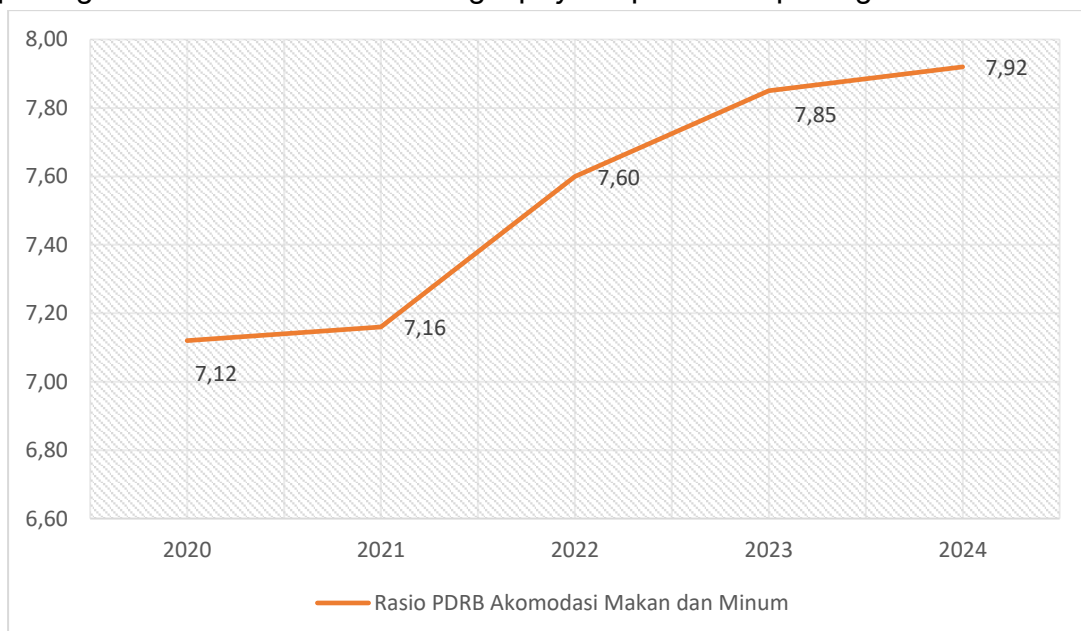
Rasio PDRB Industri Pengolahan Kota Salatiga dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat memiliki tren fluktuatif cenderung menurun. Dari tahun 2020 mencapai 29,79% menjadi 29,25% di tahun 2024. Meskipun di tahun 2021 mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,32% dari tahun sebelumnya. Selama lima tahun terakhir rasio PDRB Industri Pengolahan mengalami penurunan sebesar 054%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Kota Salatiga. 2025 (diolah)

Gambar 2.56. Perkembangan Rasio PDRB Industri Pengolahan Kota Salatiga Tahun 2020 – 2024

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kota Salatiga dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dari tahun 2020 sebesar 7,12% menjadi 7,92%. Selama lima tahun terakhir Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kota Salatiga mengalami peningkatan sebesar 0,8%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



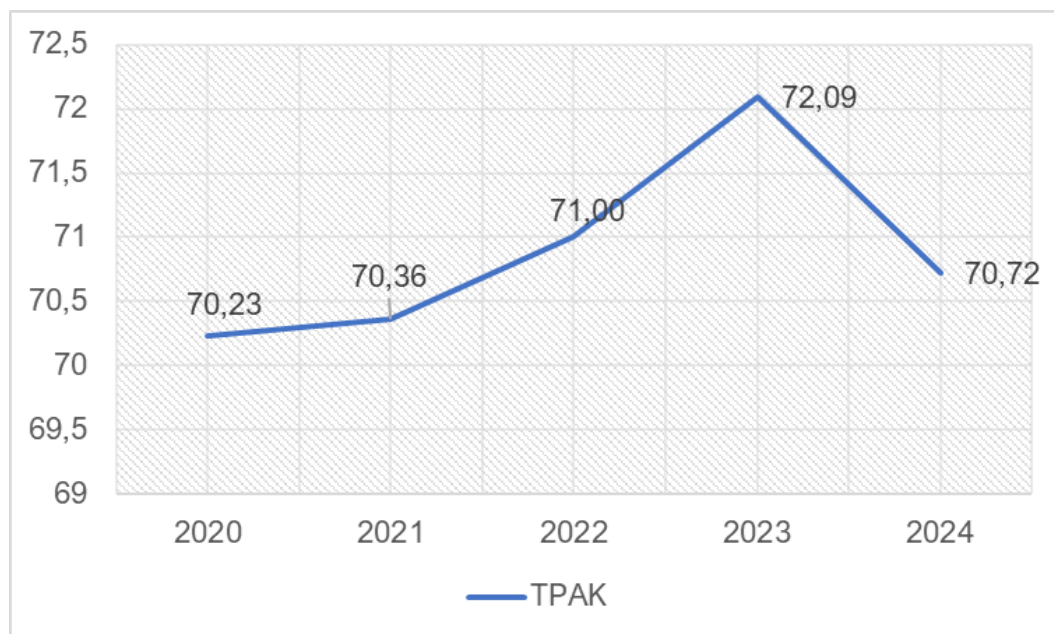
Sumber : BPS Kota Salatiga, 2025 (diolah)

Gambar 2.57. Perkembangan Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kota Salatiga Tahun 2020 – 2024

2. Rasio Kewirausahaan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memberikan gambaran mengenai penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Angka TPAK digunakan sebagai dasar untuk mengetahui jumlah penduduk yang aktif bekerja atau mencari pekerjaan. Semakin tinggi nilai TPAK, semakin besar proporsi penduduk usia kerja yang terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif. BPS mengelompokkan nilai TPAK menjadi tiga kategori: tinggi ($TPAK \geq 70$), sedang ($50 < TPAK < 70$), dan rendah ($TPAK \leq 50$).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Salatiga menunjukkan fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Dimulai dari 70,23% pada tahun 2020, TPAK menunjukkan kenaikan bertahap dan konsisten hingga mencapai puncaknya di 72,09% pada tahun 2023. Peningkatan ini menandakan adanya peningkatan proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi, baik mencari pekerjaan maupun sudah bekerja. Namun, pada tahun 2024, TPAK mengalami penurunan yang cukup signifikan kembali ke 70,72%, mendekati level tahun 2020. Kondisi tersebut menunjukkan Pemerintah Kota Salatiga berhasil meningkatkan partisipasi angkatan kerjanya secara berkelanjutan hingga tahun 2023, penurunan di tahun 2024 menunjukkan adanya potensi tantangan baru dalam pasar kerja, seperti penurunan motivasi untuk mencari kerja, perubahan struktur demografi, atau kondisi ekonomi yang kurang kondusif.



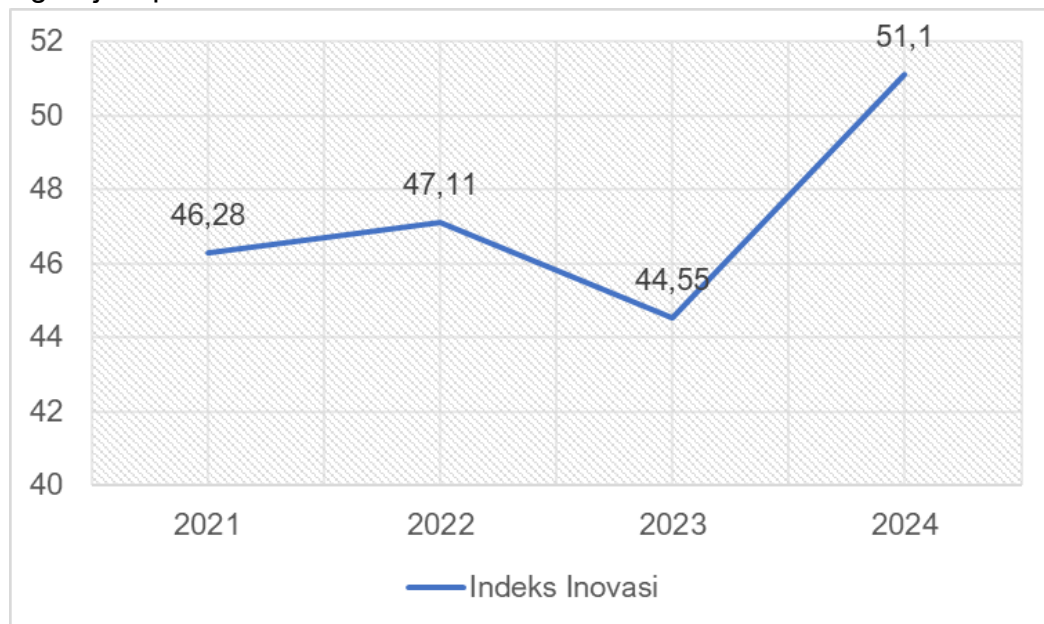
Sumber: BPS.2025

Gambar 2.58. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Salatiga Tahun 2020-2024

3. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah menjadi alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat inovasi dan kemajuan di suatu wilayah, seperti negara bagian, provinsi, atau kota. Tujuan dari indeks ini adalah untuk mengukur sejauh mana suatu daerah berhasil dalam mengembangkan inovasi di berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, teknologi, lingkungan, dan pelayanan publik. Indeks Inovasi Daerah berfungsi untuk membantu pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami dan mendorong inovasi dalam pembangunan daerah. Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri, perkembangan Indeks Inovasi Daerah Kota Salatiga menunjukkan kondisi yang baik.

Pencapaian Indeks Inovasi Kota Salatiga menunjukkan dinamika yang berfluktuasi namun berakhir dengan peningkatan signifikan pada periode 2021-2024. Pada tahun 2021, indeks inovasi berada di angka 46,28, kemudian meningkat signifikan ditahun 2024 menjadi 51,10 setelah mengalami penurunan ditahun 2023. Gambaran tersbeut menunjukkan bahwa meskipun trennya mengalami fluktuasi, Kota Salatiga menunjukkan komitmen yang kuat dan berhasil dalam mendorong inovasi, terutama terlihat dari peningkatan drastis di tahun terakhir, yang kemungkinan besar didorong oleh kebijakan, program, atau kolaborasi yang efektif. Pencapaian tingkat inovasi tertinggi pada tahun 2024, menandakan potensi besar untuk terus mengembangkan ekosistem inovasi, namun perlu menjaga momentum dan mengatasi potensi hambatan seperti yang terjadi pada tahun 2023.



Sumber: Bappeda Kota Salatiga.2025

Gambar 2.59. Indeks Inovasi Daerah Kota Salatiga Tahun 2021-2024

Guna mendukung peningkatan ekonomi daerah melalui peningkatan kinerja keuangan BUMD di Kota Salatiga, perlu dilakukan perhitungan Return on Asset (ROA) BUMD, yaitu indikator keuangan yang mengukur kemampuan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimilikinya. Indikator ROA ini perlu menjadi indikator yang ditargetkan pemerintah Kota Salatiga untuk menunjukkan seberapa efisien BUMD dalam menggunakan asetnya untuk menciptakan keuntungan. Semakin tinggi nilai ROA, semakin baik kinerja perusahaan dalam mengelola asetnya. Informasi dari ROA dapat digunakan untuk mendukung keputusan strategis. Misalnya, jika ROA suatu unit bisnis rendah, manajemen mungkin perlu mempertimbangkan restrukturisasi atau alokasi ulang aset ke unit yang lebih produktif.

2.3.3 Transformasi Digital

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet

Persentase rumah tangga yang memiliki akses internet merupakan indikator yang menggambarkan proporsi rumah tangga di suatu daerah yang dapat mengakses layanan internet, baik melalui jaringan kabel (fiber optik), nirkabel (Wi-Fi), maupun data seluler. Indikator ini mencerminkan tingkat penetrasi teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat serta menjadi salah satu ukuran kemajuan digital di suatu wilayah. Persentase rumah tangga yang memiliki akses internet di Kota Salatiga tahun 2023 mencapai 90,18%, yang mencerminkan bahwa sebagian besar rumah tangga di Kota Salatiga telah terhubung dengan layanan internet. Angka ini menjadi indikator penting dalam mendukung transformasi digital di berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan, ekonomi, dan layanan publik.

Pemerintah Kota Salatiga telah menetapkan *baseline* sebesar 91,43 persen pada tahun 2025 sebagai titik awal untuk meningkatkan akses internet secara bertahap di tahun-tahun mendatang. Proyeksi target persentase rumah tangga yang memiliki akses internet yang telah ditetapkan di tahun 2026 sebesar 91,94 persen sampai di tahun 2029 sebesar 92,70 persen. Peningkatan bertahap ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memperluas dan memperkuat akses layanan internet sebagai upaya mendukung kemajuan di berbagai sektor. Dengan target yang telah ditetapkan, diharapkan Kota Salatiga dapat memastikan akses internet yang lebih merata di seluruh wilayah, termasuk di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur digital.

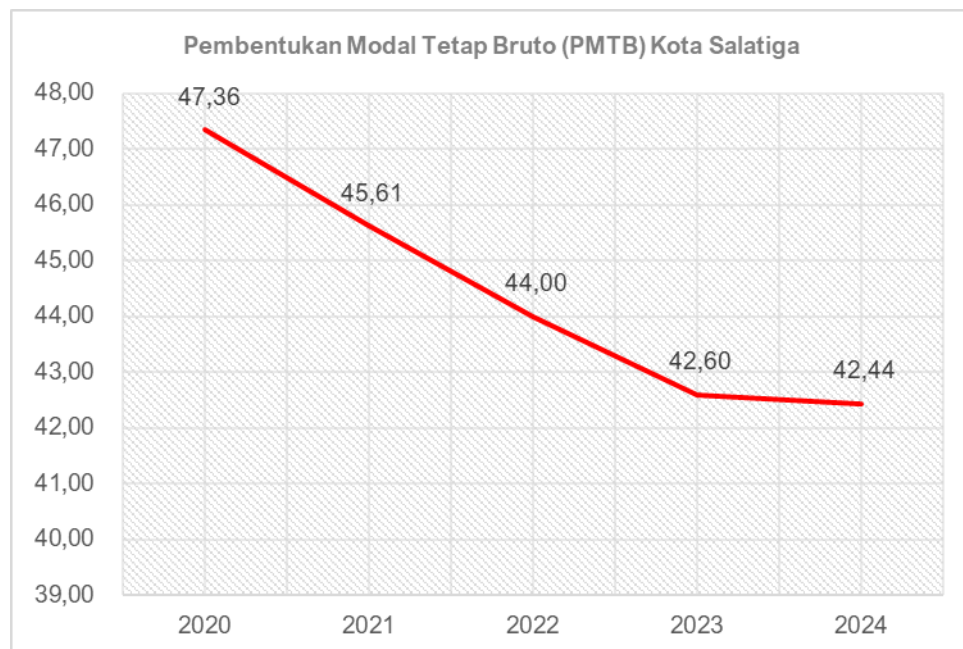
2.3.4 Integrasi Ekonomi Domestik Global

1. Pembentukan Modal Tetap Bruto, Ekspor Barang dan Jasa

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dalam penyajian PDRB berdasarkan pengeluaran lebih menjelaskan tentang proporsi pendapatan yang diinvestasikan dalam bentuk investasi fisik. Di sisi lain,

komponen ini juga dapat diartikan sebagai representasi dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan untuk investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung dalam proses produksi di berbagai sektor usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi dalam negeri maupun dari impor.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kota Salatiga menunjukkan tren penurunan dari 47,36% pada tahun 2020 menjadi 42,44% pada tahun 2024, mencerminkan penurunan kontribusi investasi terhadap PDRB. Penurunan ini mengindikasikan melemahnya aktivitas investasi di sektor-sektor produktif, yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketidakpastian ekonomi global pasca-pandemi, tingginya suku bunga yang menekan minat investasi, perlambatan realisasi proyek infrastruktur daerah, serta pergeseran kebijakan fiskal ke arah konsumsi dan bantuan sosial daripada belanja modal.



Sumber : PDRB Kota Salatiga Menurut Pengeluaran 2020 – 2024

Gambar 2.60. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Tahun 2020 - 2024

Sementara itu, realisasi ekspor Kota Salatiga menunjukkan tren yang berfluktuasi dari tahun 2021 hingga 2024. Ekspor mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 260.584.581,04 USD, meningkat signifikan dari tahun 2021 yang hanya 183.759.104,88 USD. Namun, setelah mencapai puncaknya, ekspor mengalami penurunan berturut-turut pada tahun 2023 menjadi 207.449.677,35 USD dan terus merosot pada tahun 2024 hingga mencapai 157.256.067,07 USD. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam sektor ekspor Kota Salatiga, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi global, perubahan permintaan pasar,

atau isu-isu internal lainnya yang perlu diidentifikasi dan ditangani untuk memulihkan kembali performa ekspor.



Sumber: Dinas Perdagangan Kota Salatiga.2025

Gambar 2.61. Realisasi Nilai Ekspor (USD\$) Kota Salatiga Tahun 2021-2024

2. Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB

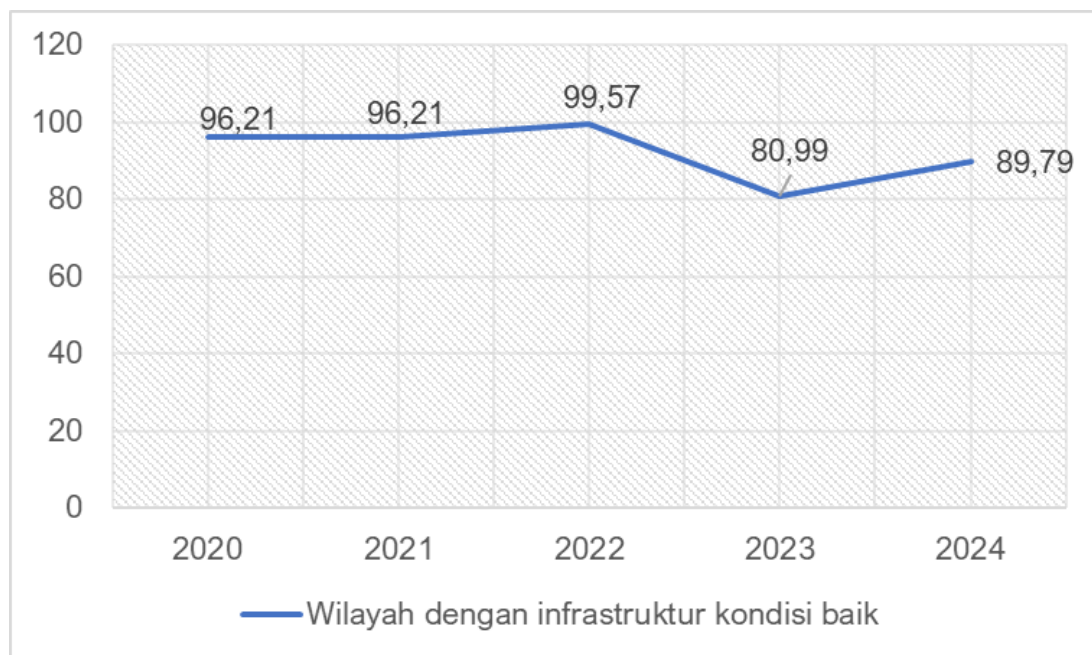
Total Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Milik Kabupaten/Kota per Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah rasio yang mengukur seberapa besar dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh bank-bank milik pemerintah daerah di suatu wilayah, dibandingkan dengan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah Kota Salatiga. Nilai Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB sebesar 59,02% pada tahun 2024 menunjukkan bahwa dana yang berhasil dihimpun oleh bank-bank milik pemerintah daerah mencapai sekitar 59,02% dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pencapaian tersebut menunjukkan indikator positif yang memberikan gambaran bahwa bank milik daerah memiliki peran penting dan dipercaya dalam ekosistem keuangan daerah, dengan potensi besar untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lokal.

2.3.5 Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1. Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik

Persentase wilayah dengan infrastruktur kondisi baik di Kota Salatiga menunjukkan stabilitas tinggi pada awalnya, diikuti oleh penurunan, dan kemudian mengalami peningkatan kembali. Pada tahun 2020 dan 2021, persentase ini sangat stabil di angka 96,21%, dan bahkan sedikit meningkat mencapai puncaknya di 99,57% pada tahun 2022, mengindikasikan hampir seluruh wilayah Salatiga memiliki infrastruktur dalam kondisi baik. Namun,

terjadi penurunan signifikan pada tahun 2023, di mana persentase turun menjadi 80,99%. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemeliharaan, kerusakan akibat cuaca, atau perluasan wilayah yang belum diikuti dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Meskipun demikian, pada tahun 2024, terdapat perbaikan dengan persentase kembali meningkat menjadi 89,79%, menunjukkan adanya upaya rehabilitasi atau pembangunan infrastruktur baru. Pemerintah Kota Salatiga menghadapi tantangan dalam mempertahankan kualitas infrastruktur di seluruh wilayahnya setelah sempat mencapai tingkat yang sangat tinggi, namun menunjukkan komitmen untuk memulihkan dan meningkatkan kembali kondisi infrastruktur yang baik.



Sumber: DPUPR Kota Salatiga.2025

Gambar 2.62. Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik Kota Salatiga Tahun 2020-2024

2. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Salatiga menunjukkan fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, cakupan berada di angka 93,94%, dan terakhir sebesar 94,80% pada tahun 2024. Kondisi pencapaian tersebut menunjukkan Pemerintah Kota Salatiga berhasil meningkatkan kembali cakupan ketersediaan rumah layak huni secara konsisten, bahkan melebihi tingkat tahun 2020, menunjukkan komitmen dan keberhasilan dalam menyediakan hunian yang layak bagi warganya.



Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga.2025

Gambar 2.63. Perkembangan Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Salatiga Tahun 2020 – 2024

2.3.6 Stabilitas Ekonomi Makro

1. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah menjadi indikator yang digunakan untuk menilai kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indikator ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui berbagai sumber pajak, seperti pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Di Kota Salatiga, Rasio Pajak Daerah tetap menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur efektivitas kebijakan fiskal dan kemandirian daerah. Rasio pajak daerah Kota Salatiga terhadap PDRB menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, rasio ini berada di angka 0,409% dan ditahun 2024, mencapai 0,532%. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa penerimaan pajak daerah tumbuh lebih cepat atau sebanding dengan pertumbuhan ekonomi daerah, yang tercermin dari PDRB.

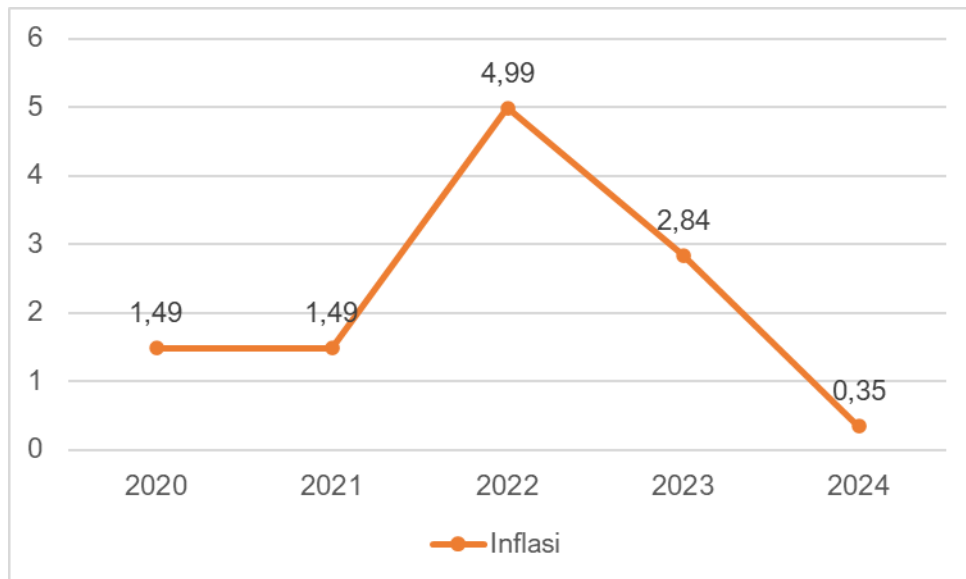


Sumber: Bappeda Kota Salatiga.2025

Gambar 2.64. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%) Tahun 2020-2024

2. Tingkat Inflasi

Inflasi di Kota Salatiga menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam periode 2020-2024. Pada tahun 2020 dan 2021, tingkat inflasi relatif stabil dan rendah di angka 1,49%. Namun, terjadi lonjakan tajam pada tahun 2022, di mana inflasi melonjak drastis hingga mencapai puncaknya di 4,99%. Kenaikan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi makro yang lebih luas, seperti pemulihan pasca-pandemi, gangguan rantai pasok global, atau kebijakan moneter. Setelah puncak tersebut, inflasi mulai menunjukkan tren penurunan yang signifikan pada tahun-tahun berikutnya, menjadi 2,84% pada tahun 2023 dan kemudian turun drastis ke level yang sangat rendah, yaitu 0,35% pada tahun 2024. Gambaran tersebut menunjukkan Kota Salatiga berhasil mengelola dan menurunkan tingkat inflasi secara substansial pasca-puncaknya di tahun 2022, mencapai stabilitas harga yang sangat baik pada tahun 2024, yang mengindikasikan upaya pengendalian inflasi yang efektif oleh Pemerintah Kota Salatiga.



Sumber: BPS Kota Salatiga.2025

Gambar 2.65. Perkembangan Inflasi Kota Salatiga Tahun 2020-2024

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi di Kota Salatiga menunjukkan pergerakan yang dinamis selama periode 2020 hingga 2024. Pada awalnya, indeks ini menunjukkan kenaikan bertahap dari 64,99 pada tahun 2020 menjadi 66,00 di tahun 2021, Namun, pada tahun 2023, indeks mengalami penurunan menjadi 64,93, kembali mendekati level tahun 2020, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan kebijakan, tantangan implementasi, atau penilaian yang lebih ketat. Meskipun demikian, terjadi kenaikan yang sangat signifikan pada tahun 2024, di mana indeks melonjak drastis ke 80,67. Gambaran tersebut menunjukkan komitmen yang kuat dan berhasil mencapai lompatan besar dalam reformasi birokrasi pada tahun 2024, melebihi pencapaian tahun-tahun sebelumnya, menandakan peningkatan substansial dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang lebih efektif.

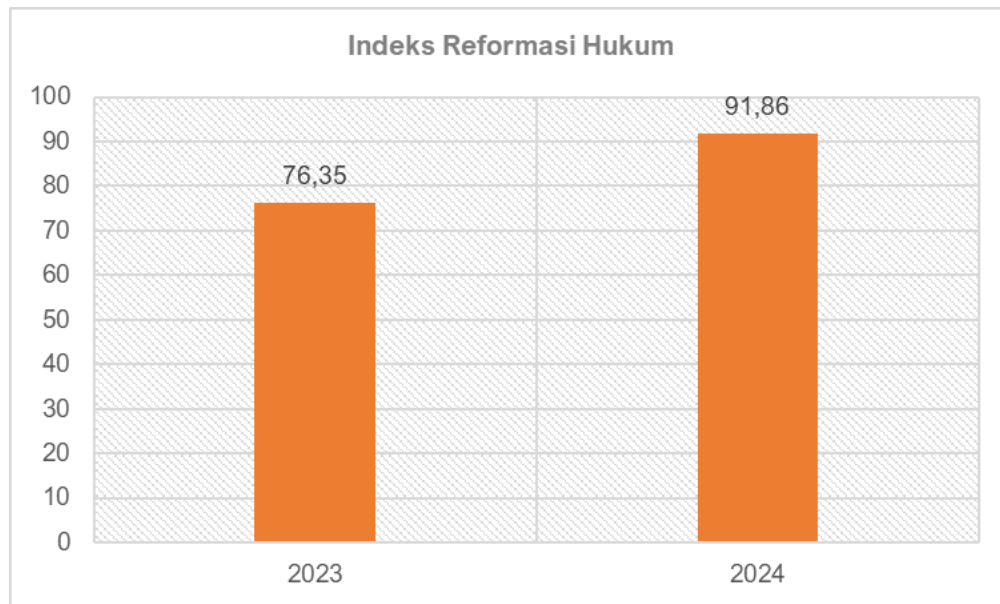


Sumber: Setda Kota Salatiga.2025

Gambar 2.66. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Salatiga Tahun 2020-2024

2. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum Kota Salatiga menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dalam kurun waktu satu tahun. Pada tahun 2023, indeks ini berada di angka 76,35, meningkat signifikan menjadi 91,86 pada tahun 2024. Peningkatan drastis ini menunjukkan adanya upaya serius dan keberhasilan yang luar biasa dalam reformasi sistem hukum di Kota Salatiga. Hal ini dapat didukung oleh berbagai inisiatif seperti penyempurnaan regulasi, peningkatan transparansi, percepatan proses hukum, atau penguatan integritas aparat penegak hukum. Melihat nilai Indeks Reformasi Hukum Kota Salatiga menunjukkan telah mencapai kemajuan yang luar biasa dalam indeks reformasi hukum dalam periode singkat, mendekati angka sempurna, yang mencerminkan komitmen kuat untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, efisien, dan akuntabel.



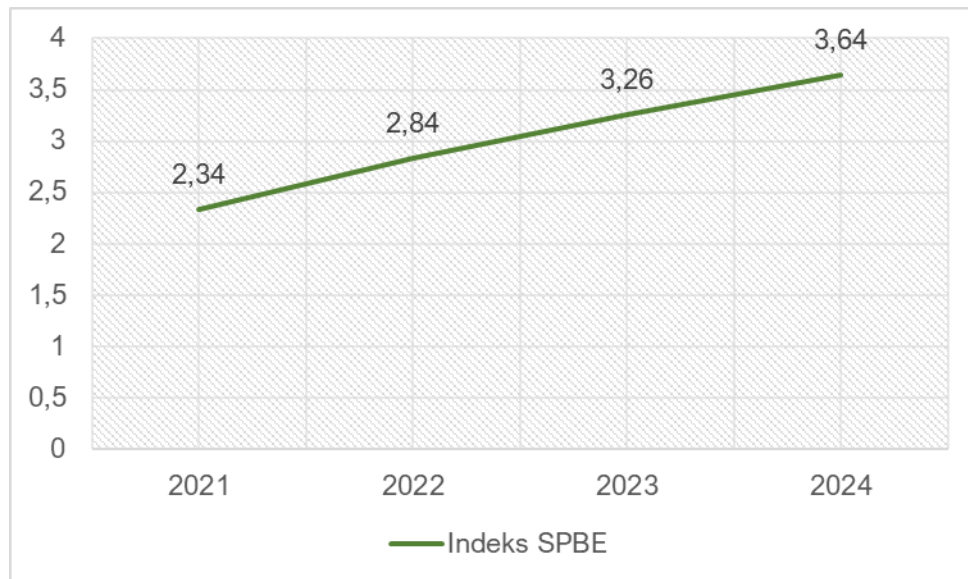
Sumber: Setda Kota Salatiga.2025

Gambar 2.67. Indeks Reformasi Hukum Kota Salatiga Tahun 2023-2024

3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-Government Index*) adalah indikator yang digunakan untuk menilai tingkat penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam layanan pemerintahan di suatu daerah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah telah beralih ke sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efisien dan transparan.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Salatiga menunjukkan peningkatan yang konsisten dan positif dari tahun 2021 hingga 2024. Tren kenaikan yang stabil ini mengindikasikan adanya komitmen kuat dan implementasi yang berhasil dalam transformasi digital di pemerintahan Kota Salatiga. Peningkatan ini didukung oleh berbagai inisiatif, seperti peningkatan infrastruktur TIK, pengembangan aplikasi layanan publik berbasis digital, peningkatan kapabilitas SDM digital, serta pengintegrasian sistem antar instansi. Kota Salatiga yang telah berhasil meningkatkan kualitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan melalui implementasi SPBE secara berkelanjutan, menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam menuju pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



Sumber: Diskominfo Kota Salatiga.2025

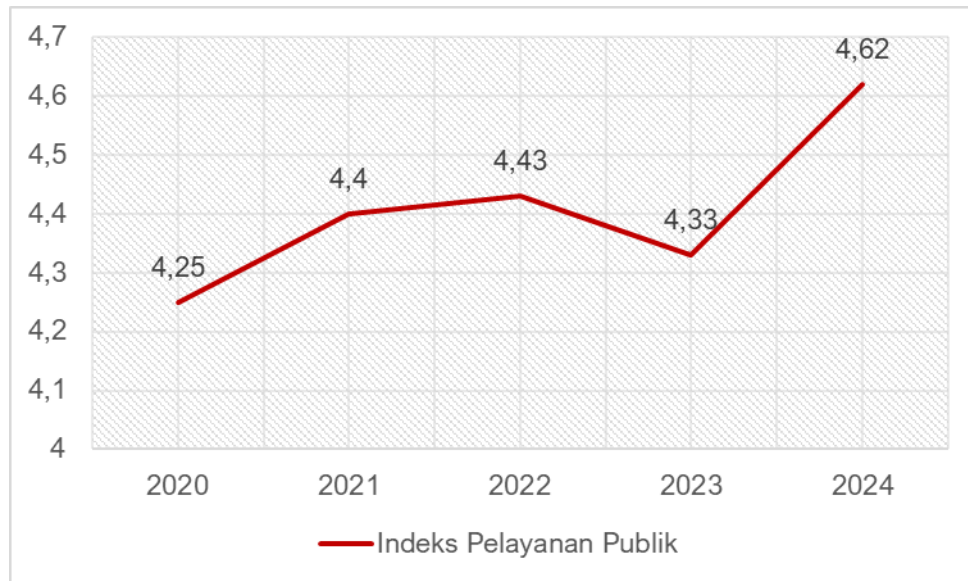
Gambar 2.68. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Salatiga Tahun 2021-2024

4. Indeks Pelayanan Publik

Berdasarkan PermenPAN RB No. 17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia. Penilaian ini didasarkan pada beberapa aspek, yaitu Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi. Penyusunan indikator IPP dilakukan dengan mengaitkan enam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan enam aspek penilaian kinerja instansi dalam pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan).

Pencapaian Indeks Pelayanan Publik Kota Salatiga menunjukkan fluktuasi namun berakhir dengan peningkatan yang kuat selama periode 2020 hingga 2024. Indeks ini awalnya menunjukkan tren kenaikan dari 4,25 pada tahun 2020 menjadi 4,62 ditahun 2024. Pada tahun 2023, nilai indeks Pelayanan Publik Kota Salatiga mengalami sedikit penurunan menjadi 4,33. Peningkatan drastis ditahun 2024 menunjukkan adanya upaya serius dan keberhasilan dalam reformasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Salatiga, yang dapat didukung oleh adopsi teknologi, peningkatan kompetensi ASN, penyederhanaan prosedur, atau peningkatan responsivitas terhadap keluhan

masyarakat. Kondisi tersebut mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kota Salatiga untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warganya.



Sumber: Setda Kota Salatiga.2025

Gambar 2.69. Indeks Pelayanan Publik Kota Salatiga Tahun 2020-2024

5. Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional merupakan indikator penting untuk menilai tingkat integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah. Indeks ini bertujuan untuk memantau, mengevaluasi, dan memperbaiki praktik antikorupsi, serta mendorong terciptanya budaya integritas di sektor publik. Dengan adanya indeks ini, diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang bersih, jujur, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Pada tahun 2025, Indeks Integritas Nasional Kota Salatiga ditetapkan sebagai baseline dengan capaian sebesar 81,59. Pemerintah Kota Salatiga menetapkan target untuk mencapai 98,28 pada tahun 2045. Target ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik.



Sumber: Inspektorat Kota Salatiga.2025

Gambar 2.70. Indeks Integritas Nasional Tahun 2020-2024

2.4.2 Hukum Berkeadilan, Kemanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

Penjelasan terhadap hukum berkeadilan, kemanan nasional yang tangguh dan demokrasi substansial direpfresentasikan dengan impelemntasi penegakan peraturan daerah melalui indikator Persentase Penegakan Perda. Kinerja Persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kota Salatiga selama periode 2019 hingga 2024 menunjukkan capaian 100% setiap tahunnya. Angka ini mencerminkan bahwa seluruh pelaksanaan dan penegakan Perda di Kota Salatiga dilakukan secara optimal dan konsisten. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, 2025

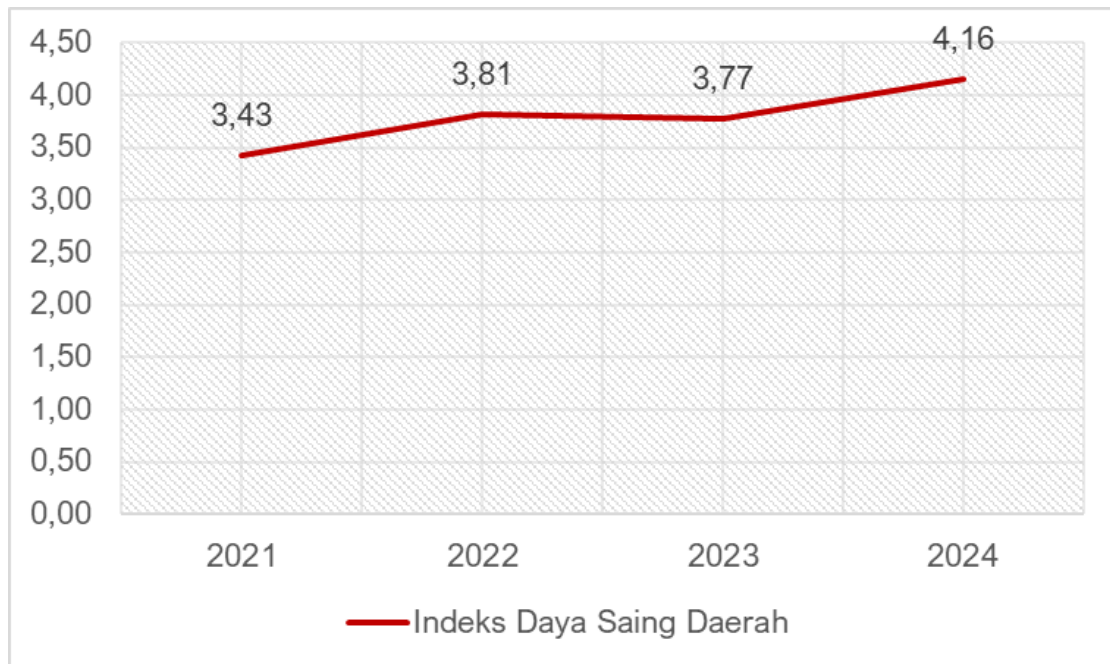
Gambar 2.71. Perkembangan Persentase Penegakan Perda Kota Salatiga Tahun 2020 – 2024

2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

1. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah instrumen yang digunakan untuk menilai daya saing di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk mendapatkan ukuran daya saing daerah yang komprehensif, yang dapat mencerminkan tingkat produktivitas suatu daerah. Kerangka pengukuran IDSD terdiri dari empat komponen yang membentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen ini didukung oleh 12 pilar daya saing. Komponen lingkungan pendukung terdiri dari pilar institusi, infrastruktur, adopsi TIK, dan kestabilan ekonomi makro. Komponen sumber daya manusia didukung oleh pilar kesehatan dan keterampilan. Komponen pasar terdiri dari pilar pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, dan ukuran pasar. Sementara itu, komponen ekosistem inovasi didukung oleh pilar dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi.

Indeks Daya Saing Daerah Kota Salatiga menunjukkan tren peningkatan yang positif dan berkelanjutan dari tahun 2021 hingga 2024. Dimulai dari 3,43 pada tahun 2021, indeks ini menunjukkan kenaikan yang stabil menjadi 3,81 di tahun 2022. Meskipun ada sedikit penurunan menjadi 3,77 pada tahun 2023, tren peningkatan kembali berlanjut secara signifikan pada tahun 2024, di mana indeks mencapai puncaknya di 4,16. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa Kota Salatiga berhasil menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi bisnis dan investasi, serta meningkatkan kapasitas inovasi dan sumber daya manusia, yang didukung oleh berbagai kebijakan pro-ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan kemudahan berusaha. Mengacu pada pencapaian tersebut, Kota Salatiga berhasil meningkatkan daya saing daerahnya secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi yang kuat dan daya tarik yang semakin meningkat bagi pelaku ekonomi.



Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). 2025

Gambar 2.72. Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dan Komponen Kota Salatiga tahun 2021-2024

2.4.4 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintah Daerah

1. Kinerja Indikator Kunci Urusan Pendidikan

Tingkat partisipasi warga negara dalam pendidikan dasar, menengah, maupun kesetaraan sangat penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Partisipasi yang tinggi memastikan bahwa setiap individu mendapatkan akses ke ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan, baik di dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat. Selain itu, pendidikan yang inklusif dan merata dapat mengurangi kesenjangan sosial serta memperkuat kohesi sosial dengan membangun kesadaran akan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan demokrasi. Dalam konteks kesetaraan, pendidikan juga menjadi jembatan bagi mereka yang tertinggal dalam sistem pendidikan formal untuk mendapatkan kesempatan kedua dalam meningkatkan taraf hidup mereka.

Capaian kinerja pada Urusan Pendidikan di Kota Salatiga dapat dilihat melalui tingkat partisipasi warga negara dalam pendidikan. Pada indikator Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD, capaian kinerja yang diperoleh cenderung meningkat meskipun terjadi penurunan sebesar 10,01% pada tahun 2021. Kemudian capaian kinerja pada indikator ini terus meningkat hingga mencapai angka 97,88% pada tahun 2024. Capaian kinerja tertinggi diperoleh pada tahun 2024 sedangkan yang terendah adalah pada tahun 2021, yaitu sebesar 84,81%.



Capaian kinerja pada indikator Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dapat dikatakan meningkat meskipun kenaikan persentase yang diperoleh tidak tajam. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar 0,31%, kemudian meningkat sebesar 0,009% pada tahun 2022 dan terus meningkat hingga mencapai angka 99,33% pada tahun 2024. Pada indikator ini, terjadi peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024, meskipun pada tahun 2021-2022 dan tahun 2023-2024 perolehan angka cenderung konstan.

Berbeda dengan dua indikator sebelumnya, pada indikator Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama, perolehan capaian kinerja justru cenderung mengalami penurunan dan fluktuatif. Terjadinya fluktuasi pada angka partisipasi pendidikan usia 13-15 tahun disebabkan faktor situasional, di mana tingginya mobilitas peserta didik dari luar untuk bersekolah di Kota Salatiga. Daerah yang bertetangga dengan Salatiga banyak yang memilih sekolah dasar di Salatiga, terutama SD dan SMP yang kesempatannya lebih banyak.

Pada indikator Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, capaian kinerja yang diperoleh cenderung meningkat. Pada tahun 2020, perolehan capaian kinerja adalah sebesar 34,88% yang merupakan perolehan terendah pada periode 2020-2024. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan yang cukup tajam yaitu sebesar 27.067%. Capaian kinerja pada indikator ini terus meningkat seiring berjalannya tahun, dan memperoleh angka sebesar 71,04% pada tahun 2024 yang merupakan perolehan capaian kinerja tertinggi pada periode tersebut. Capaian Indikator Urusan Pendidikan di Kota Salatiga selengkapnya ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.20. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	94,42	84,81	89,608	96,88	97,88
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	98,91	99,22	99,229	99,3	99,33
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	99,18	96,718	90,563	96,79	96,82

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	34,88	61,947	63,92	65,56	71,04

Sumber: LPPD Kota Salatiga series Tahun 2020-2024

2. Kinerja Indikator Kunci Urusan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berhubungan langsung dengan kualitas hidup masyarakat dan produktivitas daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas, memastikan akses yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, serta mencegah dan mengendalikan penyakit melalui kebijakan yang efektif. Investasi dalam sektor kesehatan, seperti pembangunan fasilitas medis, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta program promotif dan preventif, pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Capaian kinerja pada Urusan Kesehatan di Kota Salatiga di antaranya dapat dilihat melalui indikator rumah sakit (RS) tingkat kota yang terakreditasi, warga negara (semua kelompok umur) yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, maupun pasien/penderita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Rumah sakit (RS) tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi memiliki peran penting dalam memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Akreditasi menjadi indikator bahwa rumah sakit telah memenuhi berbagai aspek mutu, termasuk keselamatan pasien, kompetensi tenaga medis, kelengkapan fasilitas, serta efektivitas manajemen layanan. Dengan adanya akreditasi, masyarakat mendapatkan jaminan bahwa layanan yang diberikan telah melalui evaluasi ketat dan berkelanjutan, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap sistem kesehatan daerah. Selain itu, RS terakreditasi juga berkontribusi dalam penguatan sistem rujukan dengan menyediakan layanan kesehatan yang lebih komprehensif, baik dalam penanganan penyakit menular, kronis, hingga layanan kegawat darurat. RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi di Kota Salatiga, perolehan persentase capaian kinerjanya cenderung meningkat. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan sebesar 16,67% dan terus meningkat sebesar 16,66%. Pada tahun 2023, perolehan persentase capaian kinerja tidak mengalami penurunan maupun kenaikan, melainkan konstan di angka 83,33%. Pada tahun 2024, kembali terjadi

peningkatan hingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100% yang menunjukkan bahwa seluruh rumah sakit rujukan di Kota Salatiga telah terakreditasi.

Perolehan capaian kinerja pada indikator Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar cenderung meningkat. Pada tahun 2020, sebagian besar anak usia pendidikan dasar belum mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Hal ini ditunjukkan oleh perolehan capaian kinerja pada tahun tersebut yaitu sebesar 32,11% yang kemudian meningkat menjadi 33,1% di tahun 2021. Hal ini berarti bahwa pada 10 orang anak pada usia pendidikan dasar, hanya 3 anak yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang cukup tajam yaitu sebesar 66,9% dengan perolehan capaian kinerja sebesar 100% yang kemudian dapat dipertahankan hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tahun 2022 hingga 2024, seluruh anak pada usia pendidikan dasar di Kota Salatiga telah memperoleh pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar.

Pada indikator Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, perolehan capaian kinerja cenderung meningkat. Pada tahun 2020, perolehan capaian kinerja adalah sebesar 85,34% yang kemudian mengalami penurunan sebesar 14,46% di tahun 2021 menjadi 70,88%. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan sebesar 20,8% dan terus meningkat hingga mencapai angka 100% di tahun 2023 dan 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 hingga 2024, seluruh warga negara usia 60 tahun ke atas di Kota Salatiga telah mendapatkan skrining kesehatan yang sesuai dengan standar.

Pada indikator Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, capaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2020 cukup rendah, yaitu sebesar 27,11%. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan sebesar 6,6% dan kemudian meningkat secara drastis sebesar 57,75% menjadi 91,466% di tahun 2022. Perolehan capaian kinerja pada indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun hingga diperoleh angka 98,16% pada tahun 2024. Capaian kinerja Urusan Kesehatan di Kota Salatiga selengkapnya ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.21. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Kesehatan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Persen	0,41	0,00396	0,41	4,09	3,95
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	Persen	50	66,67	83,33	83,33	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	96,73	97,52	100	100	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	98,06	98,19	100	100	100
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	75,52	91,4	96,32	100	100
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	32,11	33,097	100	100	100
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	20,13	26,619	91,35	100	100
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	85,34	70,878	91,67	100	100
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	27,11	33,711	91,466	97,69	98,16
11	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	48,73	67,709	92,303	100	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	59,18	73,523	100	100	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	13,99	33,432	100	100	100
14	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	50,6	77,089	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Salatiga series Tahun 2020-2024

3. Kinerja Urusan Indikator Kunci Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

Kewenangan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di tingkat daerah mencakup berbagai aspek perencanaan, pembangunan, serta pengelolaan infrastruktur dan tata ruang yang sesuai dengan kebijakan nasional dan kebutuhan lokal. Dalam bidang pekerjaan umum, pemerintah daerah bertanggung jawab atas pembangunan serta pemeliharaan jalan kabupaten/kota, sistem drainase, jaringan irigasi, penyediaan air bersih, dan pengelolaan sanitasi lingkungan. Sementara dalam penataan ruang, kewenangan daerah meliputi penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, serta pengawasan rencana tata ruang wilayah (RTRW) guna memastikan pemanfaatan lahan yang tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan peruntukannya.

Luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan kota dan dilayani oleh jaringan irigasi mencerminkan kapasitas pemerintah kota dalam mengelola sumber daya air untuk mendukung sektor pertanian dan keberlanjutan lingkungan. Jaringan irigasi di tingkat kota umumnya mencakup sistem irigasi teknis, setengah teknis, dan sederhana yang berfungsi untuk mengalirkan air ke lahan pertanian guna



memastikan ketersediaan air secara merata sepanjang musim tanam. Pemerintah kota bertanggung jawab atas pembangunan, pemeliharaan, serta optimalisasi jaringan irigasi agar efisien dan berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan petani dan kebijakan tata ruang wilayah. Persentase luas daerah irigasi kewenangan Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi di Kota Salatiga cenderung meningkat. Pada tahun 2020 perolehan capaian kinerja adalah sebesar 89,29% yang kemudian mengalami kenaikan sebesar 8,09% di tahun 2021. Pada tahun 2021 dan 2022, capaian kinerja yang diperoleh cenderung tetap yaitu sebesar 97,38%. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 2,62% sehingga capaian kinerja yang diperoleh pada tahun tersebut adalah sebesar 100% dan dapat dipertahankan hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tahun 2020-2024, luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi terus meningkat setiap tahunnya, hingga pada tahun 2023 dan 2024, seluruh luas daerah irigasi kewenangan Kota telah dilayani oleh jaringan irigasi.

Rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) memiliki keuntungan besar dalam hal kesehatan, kebersihan, dan kualitas hidup. SPAM memastikan bahwa air yang dikonsumsi memenuhi standar kualitas, bebas dari kontaminasi, serta tersedia dalam jumlah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, seperti minum, memasak, dan sanitasi. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di Kota Salatiga cenderung meningkat. Pada tahun 2020, capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 52,25%. Pada tahun 2024, pencapaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 93,19%. Dengan demikian, kenaikan pada awal hingga akhir periode 2020-2024 adalah sebesar 40,94%. Sementara itu, penyediaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Akses SR PDAM yang memenuhi kualitas sesuai Permenkes 02/2023 atau hasil SKAM RT) di Kota Salatiga baru terlaksana di satu titik kawasan perumahan. Berdasarkan SKAM RT, akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan tahun 2024 sebesar 37,50% (Dinkes, 2025). Sedangkan capaian kinerja Urusan PUPR di Kota Salatiga selengkapnya ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.22. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan PUPR Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Persen	0	0	100	100	100
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh	Persen	0	0	0	0	0

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota						
3	Persentase luas daerah irigasi kewenangan Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	89,29	97,38	97,388	100	100
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kota	Persen	52,25	9,56	90,24	99,28	93,19
5	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	52,89	80,09	76,04	87,32	92,008
6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Persen	100	75,07	64,74	82,87	87,67
7	Rasio kemantapan jalan	Persen	93,49	93,75	95,65	96,93	91,97
8	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Persen	79,41	84,37	100	100	93,81
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen		100	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Salatiga series Tahun 2020-2024

4. Kinerja Indikator Kunci Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berkaitan dengan penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Pemerintah daerah berperan dalam perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, serta pengelolaan kawasan permukiman agar sesuai dengan standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Selain itu, upaya penataan kawasan permukiman juga mencakup peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, jalan lingkungan, serta pengelolaan kawasan kumuh agar lebih layak huni. Melalui program seperti bantuan rumah subsidi, rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta pengembangan perumahan berbasis komunitas, pemerintah daerah berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan hunian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Penataan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektare sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menciptakan lingkungan yang sehat, serta mencegah dampak sosial dan lingkungan yang lebih luas.

Permukiman kumuh sering kali memiliki infrastruktur yang tidak memadai, seperti akses air bersih yang terbatas, sanitasi yang buruk, serta sistem drainase yang tidak berfungsi dengan baik, yang dapat meningkatkan risiko penyakit dan bencana, seperti banjir dan kebakaran. Dengan melakukan penataan yang terencana, seperti perbaikan jalan, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan rumah layak huni, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertata, aman, dan nyaman bagi warganya. Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/kota yang ditangani di Kota Salatiga, capaian kinerja yang diperoleh pada periode 2020 hingga 2024 cenderung menurun. Pada tahun 2020, capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 57,39% dan terus meningkat hingga tahun 2023 dengan perolehan capaian kinerja sebesar 82,96% yang merupakan capaian tertinggi pada periode 2020-2024. Pada tahun 2024, terjadi penurunan tajam pada capaian kinerja sebesar 72,86%, sehingga capaian kinerja yang diperoleh pada tahun tersebut adalah sebesar 10,1% dan merupakan capaian terendah dalam periode tersebut.

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah hunian yang tidak memenuhi standar keselamatan, kecukupan luas, serta akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik. RTLH umumnya memiliki kondisi fisik yang buruk, seperti struktur bangunan yang rapuh, ventilasi yang tidak memadai, serta lingkungan yang kurang sehat, sehingga tidak layak untuk ditempati dalam jangka panjang. Pada indikator berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di Kota Salatiga, perolehan persentase menurun sehingga capaian kinerja yang diperoleh cenderung meningkat. Perolehan persentase pada tahun 2020 merupakan yang terbesar yaitu 9,59% kemudian terus menurun dari tahun ke tahun hingga mencapai angka 5,17%. Semakin kecil perolehan persentase capaian kinerja pada indikator ini, maka semakin sedikit jumlah unit rumah tidak layak huni yang ada di kota/kabupaten. Capaian kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Salatiga selengkapnya ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.23. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	Persen	0	0	TDI	100	0
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kota	Persen	0	0	TDI	100	0
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangan	Persen	57,39	58,02	58,81	82,96	10,01
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	9,59	8,59	7,675	5,97	5,17

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	3,06	100	100	47,69	65,69

Sumber: LPPD Kota Salatiga series Tahun 2020-2024

5. Kinerja Indikator Kunci Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat

Persentase gangguan Trantibum (Ketenteraman dan Ketertiban Umum) yang dapat diselesaikan di Kota Salatiga sudah mencapai 100% selama tahun 2020-2024. Gangguan Trantibum merupakan segala bentuk tindakan atau kondisi yang mengganggu keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Gangguan Trantibum dapat berasal dari berbagai faktor, seperti aktivitas kriminal, konflik sosial, penyalahgunaan narkoba, tawuran, hingga pelanggaran peraturan daerah seperti penggunaan fasilitas umum yang tidak sesuai peruntukannya atau kegiatan usaha ilegal di ruang publik.

Perlindungan kepada masyarakat, terutama kelompok rentan, melalui sistem respons cepat terhadap keadaan darurat seperti bencana, salah satunya diindikasikan melalui indikator pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Capaian kinerja Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di Kota Salatiga sudah sangat baik. Pada tahun 2020, capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 146,15% dan merupakan perolehan tertinggi dalam periode tahun 2020-2024. Kemudian terjadi penurunan sebesar 46,15% pada tahun 2021, sehingga capaian pada tahun tersebut adalah sebesar 100%. Perolehan capaian ini dapat dipertahankan hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kejadian kebakaran yang terjadi di Kota Salatiga telah ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran atau relawan kebakaran yang telah dibentuk atau di bawah pembinaan. Capaian kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat di Kota Salatiga selengkapnya ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.24. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	88.966	89.086	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	88.966	88.966	100	100	100
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	7.941	0	TDI	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	146,15	100	100	100	100
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	10	5,33	5	7

Sumber: LPPD Kota Salatiga series Tahun 2020-2024

6. Kinerja Indikator Kunci Urusan Sosial

Bidang sosial dalam pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak terlantar, dan masyarakat miskin. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan sosial yang mencakup perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta penanganan masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, dan kesejahteraan anak. Program-program seperti bantuan sosial, rehabilitasi sosial, serta layanan kesehatan dan pendidikan bagi kelompok marginal menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Selain itu, sinergi antara pemerintah, organisasi sosial, serta partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam memastikan bahwa kebijakan sosial dapat berjalan secara efektif dan merata di seluruh wilayah.

Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti mencerminkan efektivitas kebijakan sosial pemerintah dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi kelompok rentan. Pemerintah daerah, melalui dinas sosial dan berbagai program bantuan, bertanggung jawab untuk memastikan akses mereka terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, layanan kesehatan, tempat tinggal, serta pendidikan bagi anak-anak terlantar. Upaya ini dapat dilakukan melalui bantuan sosial tunai atau non-tunai, program rehabilitasi berbasis komunitas, serta pemberdayaan ekonomi agar mereka dapat hidup mandiri. Di Kota Salatiga, terkait persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, maupun gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, capaian kinerjanya sudah sangat baik. Capaian indikator ini sudah mencapai 100% dari tahun 2022-2024. Hal ini menunjukkan keberhasilan pendekatan inklusif dan berbasis masyarakat, di mana individu tetap dapat tinggal di lingkungan mereka dengan dukungan yang memadai dari

pemerintah, masyarakat sekitar, maupun sektor swasta. Capaian kinerja Urusan Sosial di Kota Salatiga selengkapnya ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.25. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Sosial Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	100	96,933	100	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kota	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Salatiga series Tahun 2020-2024

7. Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Tenaga Kerja

Capaian indikator kinerja Urusan Tenaga Kerja meliputi 5 indikator yang sebagian besar di antaranya cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2020-2024. Capaian kinerja yang diperoleh pada indikator Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi mengalami peningkatan pada tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 3,88%. Pada tahun 2021, capaian kinerja menurun sebesar 3,85% dengan perolehan capaian kinerja sebesar 0,029% dan merupakan perolehan terendah dalam periode 2020-2024. Pada tahun 2022 hingga 2023, capaian kinerja terus meningkat hingga mencapai angka 100% di tahun 2023 dan dapat dipertahankan di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 dan 2024, seluruh tenaga kerja di Kota Salatiga telah memiliki sertifikat kompetensi. Indikator ini mengukur jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi di suatu kabupaten/kota. Sertifikasi memastikan pekerja memiliki keterampilan sesuai standar industri, meningkatkan daya saing, dan menarik investasi. Peningkatan persentase tenaga kerja bersertifikat mencerminkan efektivitas program ketenagakerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Penerapan tata kelola kerja yang layak berperan penting dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, melindungi hak pekerja, dan meningkatkan produktivitas. Pemerintah daerah mendorong kepatuhan perusahaan melalui sosialisasi, pengawasan, dan regulasi ketenagakerjaan. Capaian kinerja pada Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak mengalami peningkatan dari 20,57% pada 2020 hingga mencapai 93,23% pada 2024, yang merupakan capaian tertinggi dalam periode tersebut.

Selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam penempatan tenaga kerja melalui bursa kerja, pelatihan, dan kerja sama dengan perusahaan. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan Antar Kerja cenderung menurun dalam periode 2020-2024. Capaian tertinggi terjadi pada 2022 dengan 96,76%, namun terus mengalami penurunan hingga mencapai 71,05% pada 2024. Penurunan ini menunjukkan perlunya optimalisasi kebijakan ketenagakerjaan untuk meningkatkan efektivitas layanan dan mengurangi tingkat pengangguran di daerah. Capaian kinerja Urusan Tenaga Kerja pada tahun 2020-2024 ditampilkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.26. Capaian Kinerja Indikator Kunci Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	66,67	46,15	85,71	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	3,88	0,029	0,273	100	100
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta rupiah /TK	93,11	94,44	90,59	100,95	106,18
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar	Persen	20,57	34,65	22,72	90,28	93,23
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	Persen	96,15	95,71	96,75	75,14	71,05

Sumber: LPPD Kota Salatiga series Tahun 2020-2024

8. Kinerja Indikator Kunci Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menyediakan layanan terpadu bagi anak korban kekerasan, seperti pusat rehabilitasi dan pendampingan

hukum, serta bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak dan masyarakat. Indikator Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kota mengukur sejauh mana anak korban kekerasan mendapatkan penanganan dari instansi terkait di suatu kota. Dalam periode 2020-2024, capaian kinerja yang diperoleh cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, capaian kinerja yang diperoleh merupakan yang terendah dalam periode 2020-2024, yaitu sebesar 0,02%. Capaian kinerja yang diperoleh terus meningkat dari tahun ke tahun sebesar 0,01% pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan yang besar sehingga pada tahun tersebut capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 100%. Capaian kinerja ini dapat dipertahankan hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 dan 2024, seluruh anak korban kekerasan yang ada di Kota Salatiga telah mendapatkan penanganan dari instansi terkait Kota Salatiga. Penanganan mencakup layanan medis, psikologis, hukum, serta rehabilitasi sosial guna memastikan pemulihan dan perlindungan bagi anak. Semakin tinggi persentase penanganan, semakin efektif sistem perlindungan anak dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan.

Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), mencerminkan tingkat kerentanan perempuan serta efektivitas upaya pencegahan dan penanganannya di suatu daerah. Kekerasan ini dapat berupa fisik, psikis, seksual, ekonomi, hingga eksploitasi. Pemerintah memiliki peran strategis dalam pencegahan, perlindungan, dan penegakan hukum untuk menekan angka kekerasan serta memastikan hak-hak perempuan terlindungi. Dalam periode 2020-2024, capaian kinerja rasio kekerasan terhadap perempuan awalnya menunjukkan angka rendah sebesar 0,01% pada 2020 dan 2021, tetapi mengalami peningkatan signifikan hingga 69,63 pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terus meningkat, sehingga efektivitas kebijakan perlindungan perlu diperkuat. Semakin rendah rasio kekerasan, semakin baik kondisi keamanan dan kesejahteraan perempuan dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam pencegahan, perlindungan, serta pemulihan korban untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan setara bagi perempuan. Capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2020-2024 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.27. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	31,59	3,49	7,15	4,23	9,23
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kota	Persen	0,02	0,03	0,04	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	0,01	0,01	22,81	26,70	69,63

Sumber: LPPD Kota Salatiga series Tahun 2020-2024

9. Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Pangan

Bidang urusan pangan dalam pemerintahan kabupaten/kota memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan bagi masyarakat. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mengelola cadangan pangan melalui berbagai mekanisme, seperti penyimpanan di gudang pangan, kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan, dan kebijakan pengadaan pangan strategis. Cadangan pangan yang memadai berperan penting dalam menjaga stabilitas pasokan serta melindungi masyarakat dari risiko kelangkaan dan lonjakan harga bahan pokok. Dengan peran ini, pemerintah daerah berkontribusi dalam menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung ketahanan pangan nasional. Capaian indikator kinerja kunci Urusan Pangan meliputi satu indikator, yaitu Persentase cadangan pangan yang cenderung mengalami peningkatan meskipun terjadi penurunan yang cukup drastis yaitu sebesar 57,43% pada tahun 2021 sehingga capaian kinerja pada tahun tersebut adalah sebesar 78,267% yang merupakan perolehan terendah pada periode tahun 2020-2024. Kemudian terjadi kenaikan sebesar 12,4% di tahun 2022. Capaian kinerja pada indikator ini terus meningkat hingga pada tahun 2024 terjadi lonjakan yang cukup besar di mana terdapat kenaikan capaian kinerja sebesar 171,51% sehingga perolehan capaian kinerja pada tahun tersebut mencapai 267,67% yang merupakan perolehan tertinggi pada periode tahun 2020-2024. Semakin tinggi persentase cadangan pangan, semakin baik kesiapan daerah dalam menghadapi situasi darurat, menjaga stabilitas harga, serta memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi sepanjang tahun. Oleh karena itu, pengelolaan cadangan pangan yang efektif menjadi indikator utama dalam menciptakan sistem pangan yang aman dan berkelanjutan. Capaian kinerja Urusan Pangan tahun 2020-2024 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.28. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Pangan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase cadangan pangan	Persen	135,7	78,26	90,66	96,16	267,676

Sumber: LPPD Kota Salatiga series Tahun 2020-2024



10. Kinerja Urusan Pertanahan

Capaian kinerja pada indikator Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan, Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal, Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee, dan Tersedianya tanah untuk masyarakat adalah sebesar 100% pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 dan 2023, seluruh luas tanah yang diberikan KKPR telah sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa seluruh penerima tanah tanah yang dikuasai negara yang akan didistribusikan kepada petani penggarap telah menerima tanah dengan luasan lebih besar sama dengan 0,5 ha. Pada kedua tahun tersebut pula, seluruh luasan tanah yang memperoleh izin membuka tanah telah dimanfaatkan berdasarkan izin.

Indikator Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi mengukur efektivitas pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik tanah garapan secara damai melalui mediasi. Sengketa sering terjadi antara masyarakat, pemilik lahan, dan pihak swasta, sehingga penyelesaian yang adil dan transparan sangat diperlukan. Perolehan capaian indikator Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi cenderung meningkat. Pada tahun 2020, capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 66,67% dan mengalami peningkatan sebesar 33,33% pada tahun 2021 sehingga capaian yang diperoleh pada tahun tersebut adalah sebesar 100% dan dapat dipertahankan hingga tahun 2022. Pada tahun 2023, terjadi penurunan sebesar 45,45% sehingga capaian kinerja pada tahun tersebut adalah 54,54%. Pada tahun 2024, capaian kinerja yang diperoleh kembali meningkat dan mencapai angka 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021, 2022, dan 2024, seluruh pengaduan perselisihan atau sengketa pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau Lembaga yang tidak berdampak luas telah ditangani melalui mediasi. Pada proses penanganan sengketa melalui mediasi, pemerintah memfasilitasi dialog dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang berlandaskan hukum. Keberhasilan mediasi menunjukkan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas, kepastian hukum, serta pemanfaatan lahan yang produktif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Capaian kinerja Urusan Pertanahan tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.29. Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanahan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan	Persen	0	0	100	100	0

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan						
2	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Persen	97	100	100	100	100
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Persen	0	0	100	100	0
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	0	0	100	100	0
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	Persen	0	0	100	100	0
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	66,67	100	100	54,54	100

Sumber: LPPD Kota Salatiga series Tahun 2020-2024

11. Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan tolak ukur penting dalam menilai kondisi lingkungan suatu daerah. IKLH mencerminkan kualitas udara, air, dan lahan yang menjadi faktor utama dalam mendukung kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem. Pemerintah daerah menggunakan IKLH sebagai indikator untuk mengukur efektivitas kebijakan lingkungan dan menentukan langkah-langkah strategis dalam pengelolaan sumber daya alam. Pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota, capaian kinerja yang diperoleh cenderung konstan atau tidak mengalami perubahan yang besar/signifikan, baik kenaikan maupun penurunan. Pada tahun 2020, capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 61%, kemudian mengalami penurunan sebesar 2,35% yang kemudian meningkat sebesar 2,69% di tahun 2021. Pada tahun 2023, capaian kinerja yang diperoleh kembali mengalami penurunan hingga mencapai angka 58,37% dan merupakan perolehan terendah pada periode tahun 2020-2024 dan meningkat kembali di tahun 2024 dengan perolehan capaian kinerja sebesar 61,45% yang merupakan perolehan tertinggi pada tahun tersebut. Dengan meningkatkan IKLH, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat, sekaligus menjaga keseimbangan alam untuk generasi mendatang.

Di wilayah perkotaan, sistem pengelolaan sampah regional atau terpadu harus berjalan dengan baik untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada indikator Terlaksananya pengelolaan sampah regional/terpadu di wilayah kota, capaian kinerja yang diperoleh cenderung menurun. Pada tahun 2020 capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 98,42% yang merupakan perolehan tertinggi pada periode tahun

2020-2024. Kemudian terjadi penurunan sebesar 26,392% di tahun 2021 yang menjadikan perolehan capaian kinerja pada tahun tersebut merupakan yang terendah dalam periode tahun 2020-2024, yaitu sebesar 72,028%. Pada tahun 2022, capaian kinerja kembali meningkat sebesar 24,409% sehingga menjadi 96,437%. Capaian kinerja terus meningkat dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2024 capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 98,15%.

Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan merupakan indikator kunci dalam memastikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan di suatu daerah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menerbitkan izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), serta peraturan perundang-undangan lingkungan hidup (PUU LH) yang harus dipatuhi oleh setiap pelaku usaha. Indikator ini mengukur sejauh mana perusahaan atau kegiatan usaha mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap izin dan regulasi lingkungan, semakin kecil risiko pencemaran dan kerusakan ekosistem. Pemerintah daerah terus melakukan pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku usaha yang melanggar aturan, guna menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Capaian kinerja pada indikator Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah cenderung menurun meskipun terjadi kenaikan di tahun 2021. Pada tahun 2020, capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 23,33%. Kemudian terjadi kenaikan sebesar 18,208% pada tahun 2021 dan menjadikan capaian kinerja pada tahun tersebut yang tertinggi dalam periode tahun 2020-2024, yaitu sebesar 41,538%. Selanjutnya, pada tahun 2022, terjadi penurunan yang cukup drastis yaitu sebesar 35,87% sehingga capaian kinerja pada tahun tersebut cukup rendah yaitu sebesar 5,66% dan merupakan yang terendah dalam periode tahun 2020-2024. Pada tahun 2023, capaian kinerja meningkat menjadi 7,69% dan kembali mengalami peningkatan sebesar 10,107% di tahun 2024 sehingga capaian kinerja pada tahun tersebut adalah sebesar 17,8%. Capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup tahun 2020-2024 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.30. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota	Persen	61	58,65	61,34	58,37	61,45
2	Terlaksananya pengelolaan sampah Regional/Terpadu di wilayah Kota	Persen	98,42	72,028	96,43	97,24	98,15
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan,	Persen	23,33	41,53	5,66	7,69	17,80

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah						

Sumber: LPPD Kota Salatiga series Tahun 2020-2024

12. Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Administrasi Penduduk dan Catatan Sipil

Administrasi kependudukan dan catatan sipil merupakan bidang strategis dalam pemerintahan daerah yang berperan penting dalam pencatatan identitas penduduk serta penyediaan data yang akurat untuk keperluan perencanaan pembangunan. Capaian kinerja Urusan Administrasi Penduduk dan Catatan Sipil meliputi 4 indikator kinerja kunci yang seluruhnya mengalami peningkatan pada tahun 2020-2024. Capaian kinerja Urusan Administrasi Penduduk dan Catatan Sipil ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.31. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Administrasi Penduduk dan Catatan Sipil Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Perekaman KTP Elektronik	Persen	97,56	94,32	96,26	99,21	97,95
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	76,22	75,12	81,73	83,84	85,85
3	Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun yang mempunyai Akte Kelahiran	Persen	98,51	97,62	99,07	99,07	99,44
4	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	33,33	3,33	3,12	40,62	100
5	Persentase Penduduk ber KTP elektronik IKU Disdukcapil	Persen	97,56	94,32	96,26	99,22	98,20
6	Penerbitan Akte perkawinan	Persen	100 (257 akta)	100 (279 akta)	100 (246 akta)	100 (223 akta)	NA

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
7	Penerbitan Akta Perceraian	Persen	100 (63 akta)	100 (46 akta)	100 (40 akta)	100 (43 akta)	NA
8	Penerbitan Akta Kematian	Persen	100 (1.531 akta)	100 (2.466 akta)	100 (1.790 akta)	100 (1.655 akta)	NA
9	Progress Capaian Identitas Kependudukan Digital	Persen	NA	NA	NA	NA	3,54 (5.268 NIK)

Sumber: LPPD Kota Salatiga series Tahun 2020-2024

13. Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Indikator Kinerja Kunci pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak dilaksanakan di Kota Salatiga karena tidak ada wilayah desa yang menjadi sasaran program dan kegiatan yang mengarah pada indikator yang ditetapkan.

Tabel 2.32. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	0	0	0	0	0
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	0	0	0	0	0

Sumber: LPPD Kota Salatiga series Tahun 2020-2024

14. Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pemerintah kabupaten/kota memiliki peran strategis dalam pengendalian penduduk dan pelaksanaan program keluarga berencana (KB) guna menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengendalikan angka kelahiran, mengurangi risiko kepadatan penduduk, serta memastikan bahwa setiap keluarga memiliki akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang memadai.

Capaian indikator kinerja kunci pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi 4 indikator. Pada indikator TFR (*Total Fertility Rate*) atau Angka Kelahiran Total, capaian kinerja yang diperoleh cenderung meningkat. Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total mengukur rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Pada tahun 2020, capaian kinerja yang diperoleh merupakan yang terendah dalam periode 2020-2024, yaitu sebesar 1,53. Pada tahun 2021, terjadi kenaikan sebesar 0,37 sehingga capaian kinerja pada tahun tersebut adalah sebesar 1,9 dan merupakan capaian kinerja tertinggi pada periode 2020-2024. Pada tahun 2022 hingga 2024,

perolehan capaian kinerja terus menurun hingga mencapai angka 1,71 di tahun 2024.

Indikator Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR) mengalami penurunan. Capaian tertinggi terjadi pada 2021 sebesar 71,89%, yang merupakan capaian tertinggi dalam periode 2020-2024. Tingginya angka mCPR mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perencanaan keluarga, mengurangi angka kelahiran yang tidak direncanakan, serta menekan risiko kehamilan yang tidak aman. Kemudian terjadi penurunan drastis ke 57,81% di tahun 2023. Tren kemudian membaik hingga mencapai 65,71% pada 2024. Meningkatkan angka mCPR menjadi kunci dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk dan mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, serta berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan.

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) merupakan indikator penting dalam menilai akses dan efektivitas program Keluarga Berencana (KB) di suatu daerah. Unmet Need mengukur persentase pasangan usia subur (PUS) yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi. Capaian kinerja pada indikator Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) cenderung membaik. Pada 2020, angka Unmet Need tercatat 15,34% dan menurun 1,14% di 2021, menunjukkan peningkatan layanan KB. Namun, pada 2022, angka ini meningkat tajam menjadi 20,54%, tertinggi dalam periode 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut, jumlah pasangan usia subur yang ingin ber-KB namun tidak terlayani adalah yang tertinggi dalam periode 2020-2024. Tingginya angka Unmet Need menunjukkan masih adanya kendala dalam layanan KB, seperti kurangnya akses terhadap alat kontrasepsi, keterbatasan informasi, atau faktor sosial dan budaya. Sejak 2023, angka Unmet Need terus menurun hingga mencapai 8,51% pada 2024, mencerminkan perbaikan layanan. Dengan menurunkan angka Unmet Need, diharapkan setiap keluarga dapat merencanakan kelahiran secara lebih baik, meningkatkan kesejahteraan, serta berkontribusi dalam pengendalian pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan. Capaian kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2020-2024 ditampilkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.33. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	TFR (Angka Kelahiran Total)		1,53	1,9	1,84	1,81	1,71
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	71,27	71,89	57,81	63,65	65,71

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	NA	NA	NA	14,19	8,51

Sumber: LPPD Kota Salatiga series Tahun 2020-2024

15. Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Perhubungan

Capaian kinerja Urusan Perhubungan meliputi dua indikator, yaitu Rasio konektivitas Kota dan Kinerja lalu lintas kota. Rasio konektivitas kota dan kinerja lalu lintas merupakan indikator utama dalam urusan perhubungan pemerintah daerah kabupaten/kota. Indikator ini mengukur seberapa baik sistem transportasi mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang, serta efektivitas pengelolaan lalu lintas dalam mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi perjalanan. Capaian Rasio Konektivitas Kota terus meningkat, dari 0,6765 pada 2021 menjadi 0,81 pada 2022, dan mencapai 0,88 pada 2024, angka tertinggi dalam periode 2020-2024. Semakin tinggi nilai rasio konektivitas, semakin baik aksesibilitas masyarakat dalam menjangkau berbagai destinasi, mendukung efisiensi perjalanan, dan mengurangi kemacetan. Semakin tinggi nilai rasio konektivitas, semakin baik aksesibilitas masyarakat dalam menjangkau berbagai destinasi, mendukung efisiensi perjalanan, dan mengurangi kemacetan.

Kinerja lalu lintas merupakan indikator utama dalam mengukur efektivitas sistem transportasi perkotaan yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Indikator ini mencerminkan kelancaran arus kendaraan, tingkat kemacetan, waktu tempuh, serta efisiensi sistem transportasi umum. Pemerintah daerah berperan dalam meningkatkan kinerja lalu lintas melalui berbagai kebijakan strategis, seperti rekayasa lalu lintas, optimalisasi jaringan jalan, penerapan sistem transportasi cerdas (ITS), serta pengembangan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Capaian kinerja lalu lintas kota mengalami peningkatan dari 0,3 pada 2021 hingga mencapai 0,39 pada 2023, yang merupakan angka tertinggi dalam periode 2020-2024. Namun, pada 2024 terjadi penurunan sebesar 0,08, sehingga capaian menjadi 0,31. Data capaian kinerja urusan perhubungan selama periode tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.34. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Perhubungan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio konektivitas Kota	Rasio	0	0,67	0,81	0,81	0,88
2	Kinerja lalu lintas Kota	Rasio	0	0,3	0,33	0,39	0,31

Sumber: LPPD Kota Salatiga series Tahun 2020-2024

16. Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informasi

Capaian kinerja urusan Kominfo kabupaten/kota dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti keterbukaan informasi publik, infrastruktur dan akses digital, literasi digital, serta keamanan informasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik, pengembangan ekonomi digital, dan pengawasan regulasi juga menjadi ukuran utama. Evaluasi terhadap indikator ini membantu pemerintah daerah meningkatkan layanan komunikasi dan informasi bagi masyarakat. Capaian kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi meliputi 3 indikator yang seluruhnya mengalami peningkatan dan mencapai angka 100% pada tahun 2022 hingga 2024. Capaian kinerja indikator akses internet untuk perangkat daerah dan penyebaran informasi publik di Kota Salatiga pada 2020-2024 tetap stabil di angka 100%. Seluruh perangkat daerah telah terhubung dengan internet dari Dinas Kominfo, dan masyarakat sasaran telah mengetahui kebijakan serta program prioritas pemerintah daerah.

Capaian kinerja layanan publik online dan terintegrasi di Kota Salatiga meningkat setiap tahun pada 2020-2024. Pada 2020, capaian terendah sebesar 3,13%, kemudian naik signifikan menjadi 52,05% pada 2021. Tahun 2022 mencapai 100% dan berhasil dipertahankan hingga 2024. Ini menunjukkan bahwa sejak 2022, seluruh layanan publik telah sepenuhnya online dan terintegrasi. Capaian kinerja urusan komunikasi dan informasi tahun 2020-2024 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.35. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informasi Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100	100	100	100
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	3,13	52,05	100	100	16,52
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kota	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Salatiga series Tahun 2020-2024

17. Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM

Capaian kinerja koperasi dan usaha kecil di Kota Salatiga pada 2020-2024 menunjukkan tren meningkat. Pada indikator koperasi berkualitas, capaian awal 50% pada 2020 meningkat menjadi 71,57% pada 2024, mencerminkan peningkatan kualitas koperasi berdasarkan RAT, volume usaha, dan aset. Sementara itu, pada indikator usaha kecil menjadi wirausaha, terjadi penurunan



pada 2021 hingga 30,21%, tetapi kembali meningkat hingga mencapai 100% pada 2023 dan bertahan hingga 2024. Ini menunjukkan bahwa sejak 2023, seluruh usaha kecil di Kota Salatiga telah bertransformasi menjadi wirausaha. Sementara itu, untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah, Kota Salatiga pada tahun 2024 telah menerbitkan sebanyak 196 produk halal. Capaian kinerja Urusan Koperasi dan UMKM ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.36. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	50	54,76	54,76	70,65	71,57
2	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Persen	60	30,21	45,33	100	100

Sumber: LPPD Kota Salatiga series Tahun 2020-2024

18. Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Penanaman Modal

Persentase peningkatan investasi merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Indikator ini mencerminkan pertumbuhan modal yang masuk ke kota, baik dari investor lokal maupun asing, yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah. Capaian kinerja Urusan Penanaman Modal mengalami fluktuasi signifikan selama periode 2020-2024. Pada 2020, capaian sebesar -61,85%, lalu meningkat tajam menjadi 154,35% pada 2021, yang merupakan capaian tertinggi. Namun, pada 2022 turun drastis ke -70,287%, angka terendah dalam periode tersebut. Pada 2023, capaian kembali naik 122,46%, sebelum akhirnya menurun lagi pada 2024 menjadi 6,89%. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika investasi di daerah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan kebijakan. Capaian kinerja Urusan Penanaman Modal disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.37. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Penanaman Modal Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase peningkatan investasi di Kota	Persen	-61,85	154,35	-70,28	52,16	6,89

Sumber: LPPD Kota Salatiga series Tahun 2020-2024

19. Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemuda dan Olahraga

Peran strategis urusan pemuda dan olahraga mencakup pemberdayaan pemuda, pengembangan olahraga, peningkatan daya saing, serta penguatan karakter dan kepemimpinan. Fungsi utamanya meliputi perumusan kebijakan, pembinaan pemuda dan atlet, penyediaan sarana olahraga, pemberdayaan pemuda, serta pengembangan industri olahraga. Tujuannya adalah menciptakan

generasi unggul dan meningkatkan prestasi olahraga daerah. Pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam pengembangan pemuda dan olahraga melalui perumusan kebijakan, pemberdayaan pemuda, pembinaan atlet, penyediaan sarana olahraga, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Selain itu, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam memberikan dorongan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam olahraga dan kegiatan kepemudaan guna menciptakan generasi berkualitas dan meningkatkan prestasi daerah.

Capaian kinerja urusan pemuda dan olahraga pada 2020-2024 menunjukkan tren yang beragam, mencerminkan tantangan serta peluang dalam pemberdayaan pemuda dan pengembangan olahraga daerah. Partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri mengalami penurunan signifikan, dari 3,57% pada 2020 ke titik terendah 0,55% di 2023, namun kembali meningkat signifikan menjadi 4,38% pada 2024. Hal ini menunjukkan masih adanya kendala dalam akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan bagi pemuda yang ingin membangun usaha mandiri.

Sebaliknya, keterlibatan pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial menunjukkan tren positif, meningkat dari 10,47% di 2020 hingga mencapai puncaknya di 2022 dengan 47,23%. Namun pada tahun 2024 mengalami penurunan signifikan menjadi 36,39%, angka ini tetap mencerminkan penurunan minat pemuda dalam kegiatan sosial dan kepemimpinan. Peran aktif organisasi kepemudaan dalam mendorong kolaborasi serta program pemerintah yang memfasilitasi pengembangan karakter pemuda menjadi faktor pendorong utama.

Di sisi lain, prestasi olahraga daerah mengalami fluktuasi. Pada 2020, jumlah perolehan medali mencapai angka tertinggi, yaitu 69 medali, tetapi menurun drastis menjadi 23 medali pada 2021. Setelahnya, terjadi pemulihan bertahap dengan perolehan 39 medali pada 2023 sebelum sedikit turun kembali menjadi 32 medali di 2024. Tren ini menandakan perlunya peningkatan program pembinaan atlet, dukungan sarana dan prasarana olahraga, serta kompetisi yang lebih berkelanjutan guna menjaga prestasi daerah di tingkat nasional maupun internasional.

Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan dalam pemberdayaan ekonomi pemuda dan fluktuasi prestasi olahraga, peningkatan keterlibatan pemuda dalam organisasi menunjukkan potensi besar dalam menciptakan generasi muda yang aktif, inovatif, dan berdaya saing. Diperlukan strategi berkelanjutan dari pemerintah daerah, termasuk peningkatan akses pelatihan kewirausahaan, penguatan komunitas kepemudaan, serta optimalisasi pembinaan olahraga untuk memastikan pertumbuhan yang lebih stabil dan berdampak jangka panjang. Capaian kinerja pada Urusan Pemuda dan Olahraga tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.38. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	3,57	2,45	2,35	0,55	4,376
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	10,47	38,72	47,23	45,99	36,39
3	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	69	23	34	39	32

Sumber: LPPD Kota Salatiga series Tahun 2020-2024

20. Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik

Urusan statistik dalam pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam menyediakan data yang akurat dan relevan guna mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Statistik berperan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan daerah. Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data statistik guna mendukung pembangunan di berbagai sektor. ntuk mengukur efektivitas pengelolaan data statistik, terdapat beberapa indikator kinerja kunci (IKK) yang menjadi tolak ukur pencapaian di antaranya adalah persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan serta evaluasi pembangunan daerah

Capaian indikator kinerja kunci Urusan Statistik di Kota Salatiga menunjukkan hasil yang konstan dan optimal, dengan 100% capaian pada dua indikator utama dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan penggunaan data statistik dalam berbagai aspek perencanaan dan evaluasi pembangunan. Seluruh perangkat daerah telah menggunakan data statistik sebagai dasar utama dalam penyusunan kebijakan dan pengukuran efektivitas program-program pembangunan. Dengan data yang akurat dan terstruktur, proses pengambilan keputusan menjadi lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran. Keberlanjutan capaian ini juga menegaskan bahwa Kota Salatiga telah membangun sistem tata kelola statistik yang kuat, memungkinkan penyajian data yang lebih berkualitas dan dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan. Ke depan, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan statistik akan semakin penting untuk meningkatkan akurasi, kecepatan, dan keterbukaan informasi, guna mendukung pembangunan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Capaian kinerja Urusan Statistik tahun 2020-2024 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.39. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase (%)	100	100	100	100	100
2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Salatiga series Tahun 2020-2024

21. Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Persandian

Capaian indikator kinerja kunci pada Urusan Persandian meliputi satu indikator yaitu Tingkat keamanan informasi pemerintah. Tingkat keamanan informasi pemerintah merupakan indikator utama dalam menilai keandalan sistem perlindungan data dan informasi di lingkungan pemerintahan daerah. Indikator ini mengukur sejauh mana pemerintah mampu menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi, serta mencegah ancaman siber yang dapat mengganggu pelayanan publik. Keamanan informasi dalam pemerintahan daerah mengalami peningkatan signifikan dari 10,59% pada 2020 menjadi 38,13% pada 2021, dengan lonjakan tertinggi 70,85% pada 2022, yang berhasil dipertahankan hingga 2024. Keberhasilan ini mencerminkan penguatan sistem keamanan digital, yang meminimalisir risiko kebocoran data, meningkatkan efisiensi layanan publik, dan membangun kepercayaan masyarakat.

Capaian kinerja Urusan Persandian tahun 2020-2024 ditampilkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.40. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Persandian Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	10,59	38,13	70,85	70,85	70,85

Sumber: LPPD Kota Salatiga series Tahun 2020-2024

22. Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Kebudayaan

Capaian kinerja dalam pelestarian cagar budaya menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2020, capaian masih rendah di angka 11,35%, menjadi yang terendah dalam periode tersebut. Namun, sejak 2021

hingga 2024, terjadi peningkatan bertahap, dengan lonjakan tertinggi pada 2024 sebesar 100%, yang merupakan perolehan tertinggi selama periode 2020-2024. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya semakin efektif. Capaian kinerja Urusan Kebudayaan tahun 2020-2024 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.41. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Kebudayaan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	11,35	16,42	22,85	28,57	100

Sumber: LPPD Kota Salatiga series Tahun 2020-2024

23. Kinerja Urusan Perpustakaan

Capaian kinerja urusan perpustakaan dapat diukur melalui dua indikator utama, yaitu nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Indikator nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat mengukur seberapa aktif masyarakat dalam membaca, baik melalui akses terhadap buku fisik maupun sumber digital. Nilai kegemaran membaca cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, diperoleh capaian kinerja sebesar 71,8 dan meningkat ke 79,83 pada 2021, tetapi turun ke 64,08 pada 2022 sebelum naik kembali ke 75,23 pada 2024.

Sementara itu, IPLM yang awalnya 0 pada 2020 melonjak ke 84,42 pada 2022 dan mencapai 100 pada 2024, menunjukkan keberhasilan program literasi. IPLM menjadi indikator penting dalam mengukur perkembangan literasi di daerah, mencakup akses terhadap bahan bacaan, pemanfaatan perpustakaan, serta keterlibatan masyarakat dalam aktivitas literasi. Capaian ini mencerminkan keberhasilan program literasi dan pengelolaan perpustakaan di tingkat daerah. Dengan meningkatnya kegemaran membaca dan pembangunan literasi, diharapkan masyarakat semakin memiliki akses luas terhadap informasi, sehingga menciptakan generasi yang lebih berpengetahuan, inovatif, dan berdaya saing di era digital. Pemerintah daerah diharapkan terus mengembangkan kebijakan yang mendukung literasi, seperti perluasan akses perpustakaan digital, peningkatan fasilitas baca, serta penyelenggaraan program literasi berbasis komunitas. Capaian kinerja Urusan Perpustakaan tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.42. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persen	71,8	79,83	64,08	64,53	75,23

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Persen	0	5,45	89,87	94,48	100

Sumber: LPPD Kota Salatiga series Tahun 2020-2024

24. Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Kearsipan

Capaian kinerja urusan kearsipan dinilai melalui dua indikator utama. Pada indikator Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban nasional, capaian kinerja menunjukkan tren meningkat. Dari tahun 2020 hingga 2022, capaian stabil di angka 75, meskipun sempat menurun menjadi 68,7 pada 2023. Namun, pada 2024, capaian melonjak ke angka tertinggi 88,67. Arsip yang terkelola dengan baik memastikan transparansi pemerintahan, mendukung akuntabilitas kebijakan, serta menjadi alat bukti yang sah dalam berbagai proses hukum dan administrasi.

Sementara itu, indikator Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami fluktuasi signifikan. Tahun 2021 mencatat capaian tertinggi sebesar 144,33, tetapi mengalami penurunan tajam di tahun-tahun berikutnya, dengan angka terendah pada 2023 sebesar 16,67. Keutuhan arsip sangat krusial dalam menjaga memori kolektif bangsa, mendukung perumusan kebijakan berbasis data, serta melindungi hak-hak masyarakat. Pada 2024, capaian indikator ini stagnan tanpa peningkatan maupun penurunan. Capaian kinerja pada Urusan Kearsipan tahun 2020-2024 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.43. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Kearsipan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Ps40 dan 59 U 43/2009)		75	75	75	68,7	88,67
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		87,5	144,33	91,67	16,67	16,67

Sumber: LPPD Kota Salatiga series Tahun 2020-2024

25. Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Kelautan dan Perikanan

Capaian urusan kelautan dan perikanan di tingkat kabupaten/kota dapat diukur melalui beberapa indikator utama, salah satunya adalah Tingkat produksi perikanan tangkap dan budidaya. Indikator ini mencerminkan ketersediaan sumber daya ikan dan keberhasilan program peningkatan hasil perikanan. Capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.44. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kota di wilayah kota (sumber data: one data KKP)	Ton	717,38	715,58	711,69	717,38	677,706

Sumber: LPPD Kota Salatiga series Tahun 2020-2024

26. Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Pariwisata

Pertumbuhan sektor pariwisata suatu daerah dapat diukur melalui dua indikator utama, yaitu Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan dan Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara. Kedua indikator ini mencerminkan daya tarik destinasi wisata, efektivitas promosi, serta kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah. Capaian pertumbuhan wisatawan mancanegara berfluktuasi dengan tren meningkat. Setelah turun drastis pada 2021 menjadi -37,06%, terjadi lonjakan signifikan di 2022 menjadi 183,73%, lalu menurun di 2023 sebelum kembali naik ke 117,23% pada 2024. Sementara itu, perjalanan wisatawan nusantara menunjukkan tren positif. Dari capaian terendah 15,32% pada 2020, meningkat pesat di 2021 yaitu sebesar 106,07%, kemudian sempat turun di 2022, lalu terus naik hingga mencapai puncaknya di 2024 dengan 113,00%. Capaian ini menandakan semakin tingginya minat masyarakat dalam berwisata di dalam negeri. Hal ini didukung oleh promosi wisata daerah, peningkatan infrastruktur, serta berbagai event dan program wisata yang menarik lebih banyak kunjungan.

Indikator tingkat hunian akomodasi mengukur persentase keterisian kamar hotel atau penginapan di suatu wilayah. Tingkat hunian yang tinggi menunjukkan meningkatnya permintaan akomodasi, yang berarti wisatawan lebih lama tinggal dan menghabiskan lebih banyak biaya di daerah tersebut. Tingkat hunian akomodasi mengalami naik turun signifikan. Capaian terendah terjadi pada 2021 sebesar 17,42%, setelah sebelumnya 24,62% di 2020. Pemulihan terjadi pada 2022 (38,56%) dan melonjak di 2023 mencapai 153,08%, sebelum akhirnya menurun tajam ke 51,42% pada 2024. Perubahan ini mencerminkan dinamika

sektor pariwisata, sehingga diperlukan strategi promosi yang lebih efektif dan peningkatan kualitas layanan untuk menjaga stabilitas hunian akomodasi.

Indikator Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku menunjukkan seberapa besar sektor pariwisata menyumbang terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indikator ini mencerminkan dampak ekonomi pariwisata terhadap pertumbuhan daerah dan penciptaan lapangan kerja. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB mengalami fluktuasi dengan tren meningkat. Tahun 2021 mencatat capaian terendah 0%, sebelum melonjak ke 8,728% pada 2022 sebagai capaian tertinggi dalam periode ini. Secara keseluruhan, peningkatan dari awal hingga akhir periode mencapai 0,33%, mencerminkan pertumbuhan bertahap sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah. Capaian kinerja Urusan Pariwisata tahun 2020-2024 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.45. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Pariwisata Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	14,76	-37,06	183,72	55,32	117,73
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kota	Persen	15,32	106,06	69,14	86,16	113,003
3	Tingkat hunian akomodasi	Persen	24,62	17,53	55,98	153,08	51,42
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	n/a	8,08	7,76	7,85	7,91
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	0,02	0,06	5,84	0,15	0,16

Sumber: LPPD Kota Salatiga series Tahun 2020-2024

27. Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanian

Indikator utama urusan pertanian di kabupaten/kota mencerminkan keberhasilan sektor ini dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Salah satu indikator terpenting adalah produktivitas pertanian, yang mengukur hasil produksi per hektar untuk komoditas utama seperti padi, jagung, dan hortikultura. Semakin tinggi produktivitas, semakin efisien pengelolaan pertanian di daerah. Produktivitas pertanian 2020-2024 fluktuatif dengan tren meningkat. Capaian terendah adalah 655,3 ton/ha pada tahun 2020, lalu naik signifikan ke 758,314 ton/ha pada tahun 2021, menurun sedikit di tahun 2022, lalu mencapai puncak 759,653 ton/ha pada tahun 2023, sebelum menurun ke 758,25

ton/ha pada tahun 2024. Capaian kinerja Urusan Pertanian tahun 2020-2024 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.46. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanian Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	655,3	758,31	718,63	759,65	758,25
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	0	0	148	487,16	-70,35

Sumber: LPPD Kota Salatiga series Tahun 2020-2024

28. Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Perdagangan

Urusan perdagangan memiliki peranan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, stabilisasi harga, serta mendorong kesejahteraan masyarakat. Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab memastikan kelancaran distribusi barang, pengembangan pasar, serta perlindungan konsumen dan pelaku usaha. Fungsi utama urusan perdagangan meliputi pengawasan dan pengendalian harga, fasilitasi perdagangan dalam negeri dan ekspor-impor, serta pengembangan infrastruktur perdagangan seperti pasar rakyat dan pusat distribusi. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui kebijakan yang mendukung UMKM, pemberdayaan pedagang, serta pengawasan standar mutu barang dan jasa.

Capaian kinerja Urusan Perdagangan di Kota Salatiga mencakup tiga indikator utama. Pada indikator Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin meningkat dari 97,17% pada 2020 menjadi 100% pada 2021 dan bertahan hingga 2024. Hal ini mencerminkan efektivitas regulasi serta kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan perizinan, yang berkontribusi pada tertib administrasi dan kepastian hukum dalam sektor perdagangan. Capaian kinerja indikator Persentase kinerja realisasi pupuk menunjukkan tren menurun, dari 93,54% pada 2020 ke titik terendah 21,61% di 2021, lalu kembali meningkat hingga 48,27% pada 2024. Capaian kinerja indikator Persentase alat UTTP bertanda tera sah sempat mencapai 100% pada 2021-2023, tetapi turun menjadi 70,32% pada 2024. Capaian kinerja Urusan Perdagangan tahun 2020-2024 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.47. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persentase (%)	97,17	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	(IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)						
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persentase (%)	93,54	21,61	40,05	62,22	48,27
3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persentase (%)	92,77	100	100	100	70,32

Sumber: LPPD Kota Salatiga series Tahun 2020-2024

29. Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Perindustrian

Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) menjadi indikator utama kinerja perindustrian di kota, mencerminkan kontribusi sektor ini terhadap ekonomi daerah. Pemerintah daerah mendukung pertumbuhan IKM melalui regulasi, pelatihan, akses permodalan, dan fasilitasi pasar. Capaian kinerja indikator ini berfluktuasi sepanjang 2020-2024, dengan angka 0% pada 2020 dan 2022, serta penurunan ke -18,18% pada 2021. Tren positif mulai terlihat pada 2023 dengan capaian 0,062% dan meningkat menjadi 0,43% pada 2024. Pertumbuhan IKM berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri mengukur efektivitas daerah dalam menerapkan kebijakan industri sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK). Indikator ini mencerminkan keberhasilan perencanaan, pelaksanaan program, serta koordinasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan industri. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengawasan, penyediaan infrastruktur, serta pemberian insentif guna mendukung pencapaian target industri. Selama periode 2020-2024, capaian kinerja mengalami fluktuasi. Pada 2020 dan 2021, capaian mencapai 100%, kemudian meningkat tiga kali lipat menjadi 300% di 2022. Namun, pada 2023 terjadi penurunan signifikan hingga 99,28%, sebelum kembali meningkat ke 99,71% di 2024. Secara keseluruhan, penurunan di awal dan akhir periode tercatat sebesar 0,29%. Tingginya capaian kinerja menunjukkan bahwa pembangunan industri tetap berjalan sesuai target, menciptakan ekosistem industri yang kondusif, menarik investasi, serta mendorong pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan sektor strategis lainnya.

Indikator Persentase Hasil Pemantauan dan Pengawasan terhadap IUI Kecil dan Menengah mengukur efektivitas pengawasan pemerintah terhadap industri kecil dan menengah (IKM) yang telah memperoleh izin usaha. Indikator ini

mencerminkan sejauh mana IKM mematuhi regulasi dan standar operasional. Pengawasan yang baik memastikan keberlanjutan usaha, meningkatkan daya saing, serta melindungi konsumen. Pada 2020, capaian indikator tersebut tercatat 0%, yang kemudian mengalami penurunan drastis pada 2021 menjadi -17,33%. Kinerja kembali meningkat pada 2023 meski hanya menjadi 0,062% dan peningkatan tersebut berhasil dipertahankan hingga 2024 dengan capaian sebesar 0,43%. Fluktuasi ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih stabil dalam pengelolaan dan pengawasan untuk menjaga konsistensi pencapaian kinerja.

Indikator Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait mengukur efektivitas pengawasan terhadap Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang memiliki Izin Perluasan Industri (IPI). Pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan kepatuhan IKM terhadap regulasi, standar produksi, dan dampak lingkungan melalui pembinaan dan penyediaan fasilitas pendukung. Selama 2020-2024, capaian kinerja fluktuatif, dengan 0% pada 2020-2021, meningkat ke 100% pada 2023, lalu turun kembali ke 0% pada 2024. Tingginya capaian mencerminkan pengawasan yang efektif, sementara capaian rendah menunjukkan perlunya strategi yang lebih kuat untuk menjaga kepatuhan dan pertumbuhan industri. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, digitalisasi pemantauan, peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta optimalisasi kebijakan insentif dapat diterapkan guna memastikan ekspansi industri berjalan berkelanjutan. Capaian kinerja Urusan Perindustrian tahun 2020-2024 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.48. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Perindustrian Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di Kota	Persen	0	-17,33	0	0,062	0,43
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kota	Persen	100	100	98,73	99,28	99,76
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	33,33	6,84	0	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	0	0	100	100	0
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota	Persen	0	0	TDI	Salatiga Tidak Ada Kawasan Industri	0
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Ada/tidak	100	1	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Salatiga series Tahun 2020-2024

30. Kinerja Indikator Kinerja Kunci Penunjang Perencanaan dan Keuangan

Dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi hal yang krusial. Keduanya berperan dalam memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan pengelolaan keuangan pemerintah berjalan sesuai dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Pada indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), capaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2020 hingga 2024 telah mencapai level tertinggi yaitu level 3. Penilaian dan pemberian level indikator Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan pada Laporan Evaluasi Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh BPKP. SPIP merupakan sistem yang dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi dalam aspek keandalan pelaporan keuangan, efektivitas operasional, kepatuhan terhadap peraturan, serta pengamanan aset negara.

Sebagai unsur utama dalam pelaksanaan pengawasan internal, APIP dituntut untuk memiliki kapabilitas yang tinggi guna mendukung efektivitas pengawasan di lingkungan pemerintah. Penilaian dilakukan berdasarkan pada Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Daerah yang dikeluarkan oleh BPKP. Melalui penerapan SPIP yang efektif dan kapabilitas APIP yang semakin meningkat, pengelolaan pemerintahan dapat lebih transparan, akuntabel, serta mampu meminimalisir penyimpangan, sehingga mendukung terwujudnya

pemerintahan yang bersih dan berkinerja tinggi. Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pengawasan tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.49. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Penunjang Urusan Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persen	27,1	20,21	20,74	19,08	18,96
2	Rasio PAD	Persen	2,44	2,115	26,73	28,8	30,24
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3,034	3,04	3	3	3
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	3
5	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	47,08	84,81	89,38	91,02	86,35
6	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: LPPD Kota Salatiga series Tahun 2020-2024

31. Kinerja Indikator Kinerja Kunci Penunjang Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan merupakan salah satu fungsi penunjang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten/kota. Urusan ini berperan dalam memastikan tersedianya barang, jasa, serta infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintahan dan pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, serta akuntabel. Di tingkat kabupaten/kota, pengadaan berperan dalam mendukung berbagai sektor strategis, seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan layanan umum lainnya.

Salah satu indikator utama yang menjadi perhatian adalah persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif. Capaian kinerja indikator ini mengalami peningkatan signifikan dari 47,63% pada tahun 2020 ke angka tertinggi sebesar 71,251% pada tahun 2021, menunjukkan upaya dalam mendorong transparansi dan persaingan sehat dalam pengadaan. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 18,871%, yang kemungkinan disebabkan oleh faktor regulasi atau dinamika pasar. Meskipun demikian, pada tahun 2024 capaian kembali meningkat hingga 63,61%, mencerminkan adanya pemulihan dalam pelaksanaan tender kompetitif.

Pada indikator persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan 83,13%, menandakan pengelolaan anggaran yang optimal pada awal periode. Namun, tren ini mengalami

penurunan signifikan sebesar 27,09% pada tahun 2021 dan terus menurun hingga 54,056% pada tahun 2022, yang menjadi capaian terendah selama periode ini. Kendati demikian, pada tahun 2023 hingga 2024, kinerja kembali menunjukkan perbaikan dengan peningkatan capaian hingga 58,99%, yang mencerminkan upaya pemulihan dan optimalisasi penggunaan anggaran dalam pengadaan.

Indikator lainnya yang menjadi fokus adalah Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK/Koperasi) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah daerah. Meskipun capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan angka 198,807%, tren ini mengalami penurunan tajam pada tahun berikutnya. Tahun 2023 mencatat penurunan sebesar 157,407%, sehingga hanya mencapai 41,4001%, dan kondisi semakin memburuk pada 2024 dengan capaian -0,7%, yang menjadi angka terendah dalam periode ini. Penurunan ini menunjukkan perlunya langkah konkret dalam mendukung produk dalam negeri serta memperkuat keterlibatan UMK dan koperasi dalam proses pengadaan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja fungsi penunjang urusan pengadaan barang dan jasa mengalami fluktuasi signifikan selama periode 2020-2024. Meskipun terdapat peningkatan pada aspek transparansi dan efisiensi pengadaan, tantangan dalam optimalisasi belanja serta pemberdayaan UMK dan produk dalam negeri masih perlu mendapatkan perhatian serius. Ke depan, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan sistem pengadaan yang lebih adil, kompetitif, serta berdampak langsung pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Capaian kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Pengadaan tahun 2020-2024 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.50. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Penunjang Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persentase (%)	0	0	0	0	0
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persentase (%)	47,63	71,25	52,38	63,36	63,61
3	Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persentase (%)	83,13	56,04	54,056	57,13	58,99
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro,	-	NA	NA	198,8	41,4	-0,7

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah						

Sumber: LPPD Kota Salatiga series Tahun 2020-2024

32. Kinerja Indikator Kinerja Kunci Penunjang Urusan Kepegawaian

Capaian kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian meliputi satu indikator kinerja kunci. Selama periode 2020-2024, capaian kinerja fungsi penunjang kepegawaian dengan indikator rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi mengalami tren positif, naik dari 85,02% pada tahun 2020 ke 99,45% di tahun 2024, menunjukkan peningkatan profesionalisme ASN. Capaian kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian tahun 2020-2024 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.51. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Penunjang Urusan Kepegawaian

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persentase (%)	85,02	90,83	89,71	94,65	99,45

Sumber: LPPD Kota Salatiga series Tahun 2020-2024

33. Kinerja Indikator Kinerja Kunci Penunjang Urusan Keuangan

Pengelolaan keuangan dalam fungsi penunjang pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas pembangunan dan pelayanan publik. Indikator kinerja utama yang paling penting mencerminkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi penggunaan anggaran. Persentase realisasi anggaran terhadap APBD menjadi tolak ukur utama dalam memastikan optimalisasi belanja daerah. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan juga menjadi indikator penting dalam menilai kemandirian fiskal daerah. Dengan optimalisasi seluruh indikator ini, pemerintah daerah dapat memastikan pengelolaan keuangan yang efisien, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Capaian kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Manajemen Keuangan tahun 2020-2024 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.52. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Penunjang Urusan Keuangan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persentase (%)	93,14	97,79	1,47	2,86	4,37
2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persentase (%)	96,29	118,25	2,033	25,32	22,43
3	Assets management	Jumlah	4	4	4	4	4
	Apakah ada daftar aset tetap?	ada/tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap?	ada/tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan?	ada/tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran?	ada/tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Cash Management: Persentase anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persentase (%)	13,36	15,08	11,59	10,15	8,72
5	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>Information on resources available to frontline service delivery units</i>)	Persentase (%)	100,69	104,69	81,97	103,81	96,09
6	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Salatiga series Tahun 2020-2024

2.4.5 Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah

Evaluasi pembangunan daerah dilakukan terhadap Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2023-2024 berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga tahun 2023-2026. Evaluasi membantu mengukur sejauh mana target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan berhasil dicapai. Indikator kinerja yang dievaluasi sebanyak 118 indikator dengan kategori penilaian indikator meliputi tercapai, akan tercapai dan perlu upaya keras. Hasil evaluasi sampai dengan tahun 2024 menunjukkan sebanyak 74 indikator atau 62,71% dalam kategori tercapai, sebanyak 30 indikator atau 25,42% termasuk dalam kategori akan tercapai, dan sebanyak 14 indikator atau 11,86% termasuk perlu upaya keras.

Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2023-2024 pada setiap indikator berdasarkan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 2.53. Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2023-2024
Berdasarkan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (RPD 2023- 2024)	Satuan	Target		Target Akhir RPD 2026	Realisasi		Capaian		Tingkat Capaian Terhadap RPD s.d 2024	Status
			2023	2024		2023	2024	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat										
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84,75	84,75	85	85,55	86,32	100,94	101,85	101,55	Tercapai
2	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	37	46	65	80,99	51,56	218,89	112,09	79,32	Upaya Keras
3	Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan	%	1,42	1,49	1,64	1,42	1,49	100	100,00	90,85	Akan Tercapai
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	84,5	84,98	85,87	84,99	85,72	100,57 988	100,87	99,83	Akan Tercapai
5	Angka Kemiskinan	%	4,67- 4,59	4,67- 4,59	4,67- 4,59	4,66	4,57	100,21	95,90	100	Tercapai
6	Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	0,09	0,08	0,06	0,04	0,01	155,56	187,50	183,33	Tercapai
B	Aspek Daya Saing Daerah										
1	Indeks SPBE	Nilai	2,4	2,5	2,7	3,26	3,26	135,83	130,40	120,74	Tercapai
2	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	%	96,5	97	98	80,99	89,79	83,93	92,57	91,62	Akan Tercapai
C	Aspek Pelayanan Umum										
	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar										
	Pendidikan										
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD	%	84,82	84,83	84,85	86,61	97,88	102,11	115,38	115,36	Tercapai
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	%	99,23	99,24	99,26	99,3	99,34	100,07	100,10	100,08	Tercapai
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	%	96,73	96,74	96,76	96,8	96,82	100,07	100,08	100,06	Tercapai
4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Kesetaraan	%	61,96	61,97	61,99	63,92	71,05	103,16	114,65	114,62	Tercapai
	Kesehatan										
5	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	172	172	129	89,05	99,9	148,23	141,92	122,56	Tercapai
6	Angka Kematian Bayi	/1.000 KH	12,89	12,03	10,31	12,47	11,49	103,26	104,5	88,55	Akan Tercapai
7	Prevalensi balita gizi buruk	%	0,09	0,08	0,06	0,04	0,01	155,56	187,5	183,33	Tercapai
8	Success Rate TB	%	92	93	95	89,65	91,29	97,45	98,16	96,095	Akan Tercapai
9	Prevalensi hipertensi penduduk usia diatas >15 tahun	%	37,76	36,97	35,40	38,42	38,58	98,25	95,56	91,02	Akan Tercapai



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (RPD 2023- 2024)	Satuan	Target		Target Akhir RPD 2026	Realisasi		Capaian		Tingkat Capaian Terhadap RPD s.d 2024	Status
			2023	2024		2023	2024	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Persentase Akreditasi Puskesmas Strata Utama	%	66	66	82	100	100	151,52	151,52	121,95	Tercapai
11	Peringkat Kelulusan Akreditasi RSUD	Predikat	Pari purna	Pari purna	Pari purna	Pari purna	Pari purna	Pari purna	100	100	Tercapai
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
12	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	%	96,5	97	98	80,99	89,79	83,93	92,57	91,62	Akan Tercapai
13	Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	97	97	98	85,41	96,46	88,05	99,44	98,43	Akan Tercapai
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
14	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	2,23	2,15	2,02	2,19	2,13	101,34	100,93	94,55	Akan Tercapai
15	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	37	46	65	80,99	51,56	218,89	112,09	79,32	Upaya Keras
	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat										
16	Persentase Penegakkan Perda dan Gangguan Trantibum yang diselesaikan	%	100	100	100	95	100	95,00	100	100	Tercapai
17	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100,00	100	100	Tercapai
18	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	%	1,72	1,71	1,69	1,14	1,65	133,72	103,51	102,37	Tercapai
19	Terselesaikannya kasus konflik horisontal secara damai dan adil baik terkait sosial, budaya maupun politik	%	100	100	100	100	100	100,00	100	100	Tercapai
20	Kelurahan Tangguh Bencana	%	17	19	26	17	17,39	100,00	91,53	66,88	Upaya Keras
21	Indeks Risiko Bencana	%	90,8	90,45	90,00	90,89	76,52	100,10	115,40	114,98	Tercapai
	Sosial										
22	Cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani	%	70	75	85	82,48	95,72	117,83	127,63	87,39	Akan Tercapai
	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar										
	Tenaga Kerja										
23	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki izin	%	70	80	100	63,64	68	90,91	85,00	68,00	Upaya Keras



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (RPD 2023- 2024)	Satuan	Target		Target Akhir RPD 2026	Realisasi		Capaian		Tingkat Capaian Terhadap RPD s.d 2024	Status
			2023	2024		2023	2024	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	50	50	50	75,15	68,59	150,30	137,18	137,18	Tercapai
25	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	95,76	97,8	99,72	100,95	106,18	105,42	108,57	106,48	Tercapai
26	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	53,8	61,5	76,9	100	100	185,87	162,60	130,04	Tercapai
	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak										
27	Persentase kelembagaan forum anak tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan	%	28,57	32,14	39,29	100	100	350,02	311,14	254,52	Tercapai
28	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	%	40	40	41	40	41,65	100,00	104,13	101,59	Tercapai
	Pangan										
29	Ketersediaan beras	%	70	70	70	70	267,67	100,00	382,39	382,39	Tercapai
30	Ketersediaan energi per kapita	%	2,487	2,487	2,487	2,736	2,79	110,01	112,18	112,18	Tercapai
31	Ketersediaan protein per kapita	kcal/kapita	108	109	111	77	77,84	71,30	71,41	70,13	Upaya Keras
32	Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan	gram/kapita	1,42	1,49	1,64	1,42	1,49	100,00	100,00	90,85	Akan Tercapai
	Pertanahan										
33	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	25	50	75	13,50	100	146,00	200,00	133,33	Tercapai
34	Persentase luas lahan bersertifikat	%	20	60	100	32,27	99,06	161,35	165,10	99,06	Akan Tercapai
	Lingkungan Hidup										
35	Indeks Kualitas Air	Nilai	41,20	41,40	41,80	44,29	48,67	107,50	117,56	116,44	Tercapai
36	Indeks Kualitas Udara	Nilai	79,80	80,00	80,40	84,84	87,8	106,32	109,75	109,20	Tercapai
37	Indeks Kualitas Lahan	Nilai	47	47	47	33,62	34,67	71,53	73,77	73,77	Upaya Keras
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
38	Persentase cakupan akta kelahiran (0-18th)	%	98,70	98,80	99,00	99,08	99,44	100,39	100,65	100,44	Tercapai
39	Persentase penduduk ber KTP elektronik	%	95,60	95,90	96,50	99,20	98,2	103,77	102,40	101,76	Tercapai
40	Persentase anak 0-17th kurang 1 jari yang memiliki KIA	%	79,2	79,5	80	83,84	87,4	105,86	109,94	109,25	Tercapai
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
41	TFR (Total Fertility Rate)	%	2,40	2,30	2,10	1,84	1,71	123,33	125,65	118,57	Tercapai



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (RPD 2023- 2024)	Satuan	Target		Target Akhir RPD 2026	Realisasi		Capaian		Tingkat Capaian Terhadap RPD s.d 2024	Status
			2023	2024		2023	2024	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif	%	24	24	24	24	8	100,00	33,33	33,33	Upaya Keras
	Perhubungan										
43	Rasio Izin Trayek	%	24,37	24,37	21,87	23,30	23,59	95,61	96,80	107,86	Tercapai
44	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	%	24,79	24,79	22,79	21,41	19,49	86,37	78,62	85,52	Akan Tercapai
45	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	82	82	83	92,23	75,44	112,48	92,00	90,89	Akan Tercapai
	Komunikasi dan Informatika										
46	Tingkat keterbukaan informasi publik	%	96	97	100	100	100	104,17	103,09	100,00	Tercapai
47	Indeks SPBE	Nilai	2,4	2,5	2,7	2,84	3,26	118,33	130,40	120,74	Tercapai
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
48	Persentasi koperasi aktif	%	70,56	71,11	72,22	52,57	53,07	74,50	74,63	73,48	Upaya Keras
49	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	96	96	96	99,93	99,77	104,09	103,93	103,93	Tercapai
	Penanaman Modal										
50	Persentase Kenaikan Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN)	%	3,00	3,50	5,00	166,22	41,02	5.540,67	1.172,00	820,40	Tercapai
51	Persentase Kenaikan nilai investasi PMDN	%	10,00	10,20	10,35	40,59	63,86	405,90	626,08	617,00	Tercapai
52	Persentase Kenaikan nilai investasi PMA	%	10,00	10,25	10,75	43,61	-17,42	436,10	-169,95	-162,05	Upaya Keras
	Kepemudaan dan Olahraga										
53	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	2,45	2,45	2,5	2,49	1,96	101,63	80,00	78,40	Upaya Keras
54	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	38,73	38,73	39,5	43,61	43,95	112,60	113,48	111,27	Tercapai
55	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai
	Statistik										
56	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	94	94	95	94	100	100,00	106,38	105,26	Tercapai
	Persandian										
57	Tingkat pengamanan informasi daerah	%	80	82	89	80	80	100,00	97,56	89,89	Akan Tercapai
	Kebudayaan										
58	Persentase objek pemajuan yang dilindungi,	%	14,71	29,41	58,82	41,18	57,97	279,95	197,11	98,55	Akan Tercapai



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (RPD 2023- 2024)	Satuan	Target		Target Akhir RPD 2026	Realisasi		Capaian		Tingkat Capaian Terhadap RPD s.d 2024	Status
			2023	2024		2023	2024	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dikembangkan dan dimanfaatkan										
59	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	24	31	45	28,57	38,57	119,04	124,42	85,71	Akan Tercapai
	Perpustakaan										
60	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	5,95	6,45	7,45	17,06	21,01	286,72	325,74	282,01	Tercapai
	Kearsipan										
61	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	75,5	76	77	57,76	88,67	76,50	116,67	115,16	Tercapai
	Urusan Pemerintahan Pilihan										
	Kelautan dan Perikanan										
62	Peningkatan produksi perikanan (ikan konsumsi)	%	6	6	6	6	6,34	100,00	105,67	105,67	Tercapai
63	Peningkatan produksi perikanan (benih)	%	5	5	5	5	6	100,00	120,00	120,00	Tercapai
	Pariwisata										
64	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara	%	107,31	108,08	110,13	86,61	113	80,71	104,55	102,61	Tercapai
65	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	45	65	79	55,32	117,74	122,93	181,14	149,04	Tercapai
66	Tingkat hunian akomodasi		20	22	28	153,08	51	765,40	231,82	182,14	Tercapai
67	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	8,5	9,00	10	7,76	7,92	91,29	88,00	79,20	Upaya Keras
68	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,11	0,12	0,16	0,15	0,16	136,36	133,33	100,00	Tercapai
	Pertanian										
69	Produktivitas padi	%	6,1	6,15	6,15	6,28	6,28	102,95	102,11	102,11	Tercapai
70	Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura	%	10	10	10	10	-0,6	100,00	-6,00	-6,00	Upaya Keras
71	Peningkatan produktivitas peternakan daging sapi	%	0,02	0,03	0,04	0,03	0,04	150,00	133,33	100,00	Tercapai
72	Produktivitas Sapi Perah	%	0,72	0,75	0,82	-0,21	1,09	-29,17	145,33	132,93	Tercapai
73	Penurunan kejadian kematian hewan akibat penyakit zoonosis	%	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai
	Perdagangan										



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (RPD 2023- 2024)	Satuan	Target		Target Akhir RPD 2026	Realisasi		Capaian		Tingkat Capaian Terhadap RPD s.d 2024	Status
			2023	2024		2023	2024	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	4,77	4,81	4,89	4,05	4,48	84,91	93,14	91,62	Akan Tercapai
	Perindustrian										
75	Persentase Pertumbuhan IKM (Industri Kecil Menengah)	%	0,31	0,37	0,49	0,06	0,43	19,35	116,22	87,76	Akan Tercapai
76	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	31,00	31,05	31,15	33,10	33,14	105,58	106,60	106,26	Tercapai
	Transmigrasi										
77	Persentase Peningkatan Peminat Transmigrasi	%	3,30	3,70	4,60	0,33	0	10,00	0,00	0,00	Upaya Keras
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan										
	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan										
78	Indeks Inovasi	%	46,3	46,32	46,36	44,55	51,1	96,22	110,32	110,22	Tercapai
79	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	%	20	33,33	46,67	20	58,33	100,00	175,01	124,98	Tercapai
80	Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD	%	75	80	90	98,84	98,84	131,79	123,55	109,82	Tercapai
	Keuangan										
81	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	Tercapai
82	Persentase Peningkatan PAD terhadap Pendapatan	%	2,50	5,00	10,00	2,57	1,42	102,80	28,40	14,20	Upaya Keras
	Kepegawaian										
83	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	55	57	61	74,01	78,84	134,56	138,32	129,25	Tercapai
84	Nilai Sistem Merit	Nilai	275	285	326	274,5	274,5	99,82	96,32	84,20	Akan Tercapai
	Fungsi Penunjang Lainnya										
	Pengawasan										
85	Kapasitas APiP	Level	3	3	3	3	3,04	100,00	101,33	101,33	Tercapai
86	QA SPIP	Nilai	3,04	3,06	3,10	3	3,00	98,68	98,04	96,77	Akan Tercapai
87	QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)	Nilai	2,94	2,96	3	2,80	2,80	95,24	94,59	93,33	Akan Tercapai
88	QA MRI (Manajemen Risiko Indeks)	Nilai	2,78	2,86	3	2,87	2,90	103,24	101,40	96,67	Akan Tercapai
	Sekretariat DPRD										
89	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100	100	100	97,86	94,54	97,86	94,54	94,54	Akan Tercapai



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (RPD 2023- 2024)	Satuan	Target		Target Akhir RPD 2026	Realisasi		Capaian		Tingkat Capaian Terhadap RPD s.d 2024	Status
			2023	2024		2023	2024	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sekretariat Daerah										
90	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	81,00	81,25	81,75	90,09	95,78	111,22	117,88	117,16	Tercapai
91	Indeks Kematangan Organisasi Daerah	Nilai	34,47	34,67	35,00	32,93	36,16	95,53	104,30	103,31	Tercapai
92	Indeks PMPRB	Nilai	71	72	74	74,98	-	-	-	-	Tercapai
93	Nilai SAKIP	Angka	65,00	66,00	70,00	65,81	66,54	101,25	100,82	95,06	Akan Tercapai
94	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84,75	84,75	85	85,55	85,67	100,94	101,09	100,79	Tercapai
	Kecamatan										
	Kecamatan Sidomukti										
95	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	89,20	89,25	89,50	89,19	90,28	99,99	101,15	100,87	Tercapai
96	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	60	61	63	59	63,41	98,33	103,95	100,65	Tercapai
97	Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	79,75	79,8	79,9	97,94	97,01	122,81	121,57	121,41	Tercapai
98	Persentase PKK aktif	%	50	55	65	76,24	100	152,48	181,82	153,85	Tercapai
	Kecamatan Sidorejo										
99	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	86	87	89	88,68	88,67	103,12	101,92	99,63	Akan Tercapai
100	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	93,52	93,53	93,55	91,84	88,97	98,20	95,12	95,10	Akan Tercapai
101	Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	38	59	60	53,49	64,96	140,76	110,10	108,27	Tercapai
102	Persentase PKK aktif	%	50	55	65	72,46	84,06	144,92	152,84	129,32	Tercapai
	Kecamatan Tingkir										
103	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	92,05	92,1	92,2	89,40	91,45	97,12	99,29	99,19	Akan Tercapai
104	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	71	72	74	65,33	68,82	92,01	95,58	93,00	Akan Tercapai
105	Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	60	60,05	60,15	65,59	68,18	109,32	113,54	113,35	Tercapai
106	Persentase PKK aktif	%	72	72,5	73,5	100	100	138,89	137,93	136,05	Tercapai
	Kecamatan Argomulyo										
107	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	82	84	88	84,02	85,26	102,46	101,50	96,89	Akan Tercapai
108	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	60,05	61	62	60	63,55	99,92	104,18	102,50	Tercapai
109	Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	62	64	68	90,28	90,60	145,61	141,56	133,24	Tercapai
110	Persentase PKK aktif	%	50	55	65	100	100	200,00	181,82	153,85	Tercapai

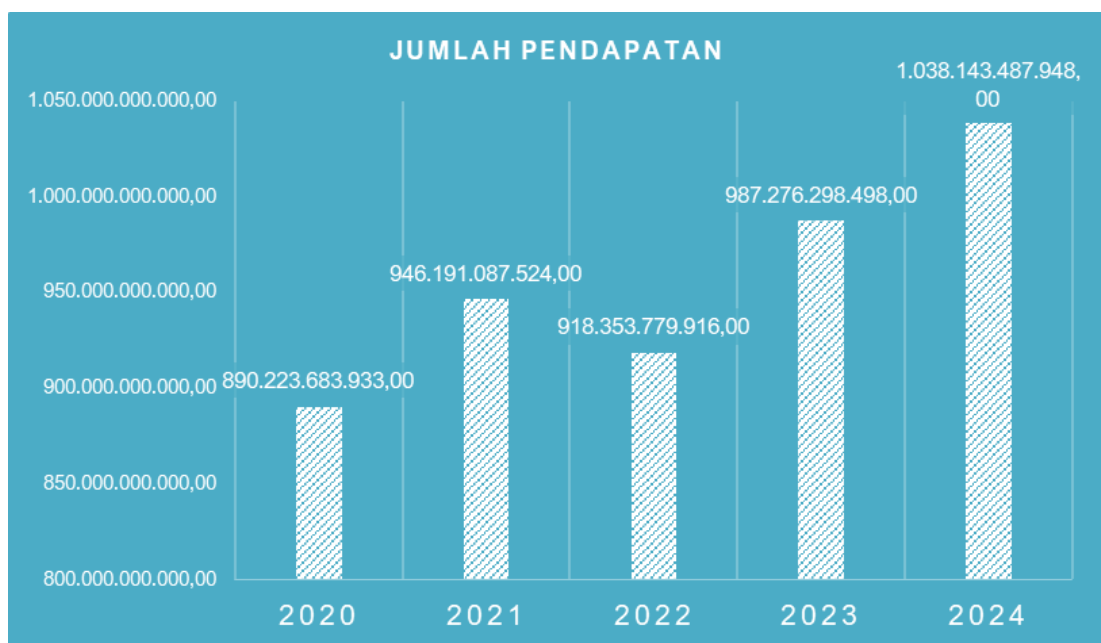
Sumber: Bappeda Kota Salatiga.2025

2.5 Gambaran Keuangan Daerah

2.5.1. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024

1. Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah Kota Salatiga menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024, mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan kapasitas fiskal yang semakin kuat. Pada tahun 2020, pendapatan tercatat sebesar Rp.890.223.683.933,00. Angka ini kemudian mengalami lonjakan yang cukup besar di tahun 2021 menjadi Rp.946.191.087.524,00, menunjukkan pemulihan atau akselerasi penerimaan daerah yang membaik. Meskipun demikian, terdapat sedikit koreksi pada tahun 2022 di mana pendapatan turun menjadi Rp.918.353.779.916,00. Namun, penurunan di tahun 2022 bersifat sementara karena pendapatan kembali meningkat tajam pada tahun 2023 mencapai Rp.987.276.298.498,00. Pendapatan daerah Kota Salatiga pada tahun 2024 berhasil menembus angka satu triliun rupiah, tepatnya Rp.1.038.143.487.948,00. Kenaikan yang konsisten, terutama pencapaian di atas satu triliun pada tahun terakhir, mengindikasikan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan potensi pertumbuhan ekonomi yang positif di Kota Salatiga selama periode tersebut. Perkembangan pendapatan daerah selama kurun waktu tahun 2020-2024 tercantum pada gambar berikut.



Sumber: BPKPD Kota Salatiga.2025

Gambar 2.73. Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (Rupiah)

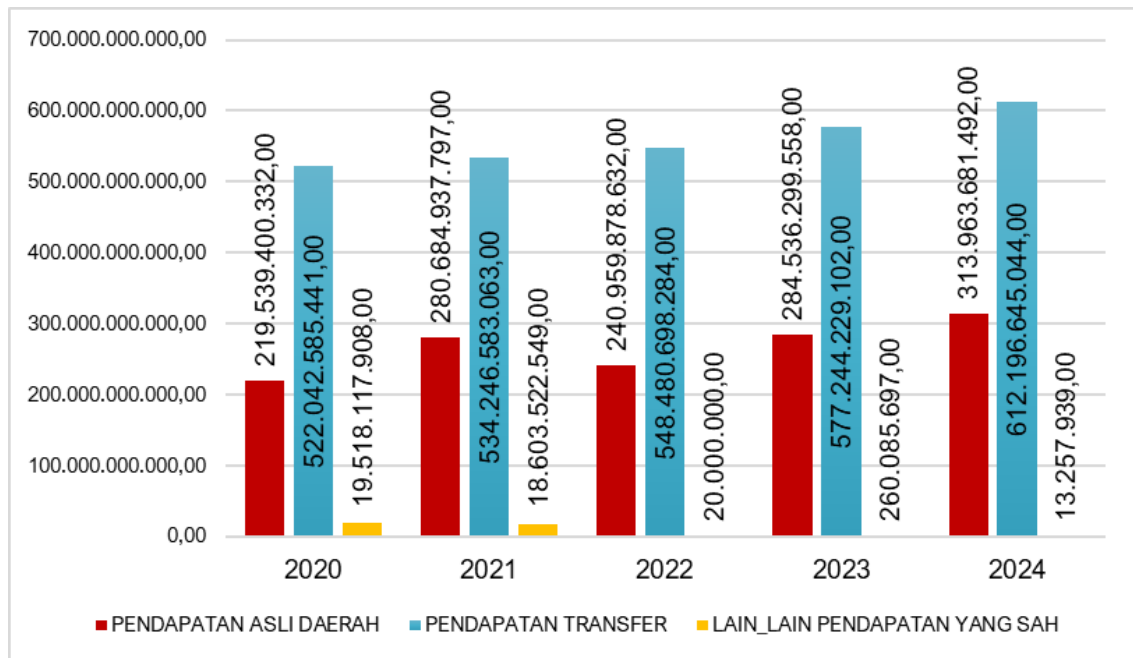
Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren peningkatan yang positif dan konsisten sepanjang periode 2020-2024. PAD Kota Salatiga pada tahun 2020 berada diangka Rp.219.539.400.332,00, mengalami lonjakan signifikan di tahun 2021 mencapai Rp.280.684.937.797,00. Sedikit terjadi penurunan di tahun 2022 menjadi Rp.240.959.878.632,00, dan dua tahun berikutnya mengalami kenaikan cukup besar, terutama ditahun mencapai sebesar Rp313.963.681.492,00. Peningkatan PAD ini menandakan kapasitas daerah dalam mengoptimalkan sumber daya internal dan mengurangi ketergantungan pada sumber eksternal.

Pendapatan Transfer secara konsisten menjadi kontributor terbesar dan tulang punggung pendapatan daerah Kota Salatiga. Dimulai dari Rp522.042.585.441,00 pada tahun 2020, komponen ini terus menunjukkan pertumbuhan yang stabil setiap tahunnya, dengan angka tertinggi ditahun 2024 mencapai sebesar Rp.612.196.645.044,00 pada tahun 2024. Dominasi Pendapatan Transfer menggarisbawahi pentingnya alokasi dana dari pemerintah pusat atau provinsi dalam menopang keuangan Kota Salatiga.

Lain-Lain Pendapatan yang Sah menunjukkan fluktuasi yang paling ekstrem di antara ketiga komponen. Pada tahun 2020, tercatat sebesar R.19.518.117.908,00 dan sedikit menurun di tahun 2021 menjadi Rp18.603.522.549,00. Angka ini sedikit naik di tahun 2022 menjadi Rp20.000.000.000,00. Namun, terjadi lonjakan luar biasa pada tahun 2023, melonjak hingga Rp260.085.697,00, yang merupakan peningkatan drastis dan perlu dikaji lebih lanjut penyebabnya. Kontrasnya, pada tahun 2024, nilai ini anjlok sangat signifikan menjadi hanya Rp13.257.939,00, kembali ke tingkat yang sangat rendah bahkan di bawah angka awal periode. Fluktuasi dramatis pada kategori ini menunjukkan sifatnya yang cenderung insidental dan sangat bergantung pada peristiwa atau kebijakan tertentu.

Secara keseluruhan, analisis ini menggambarkan bahwa Kota Salatiga sangat mengandalkan Pendapatan Transfer sebagai sumber utama, namun juga menunjukkan upaya yang berhasil dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Fluktuasi tajam pada Lain-Lain Pendapatan yang Sah menjadi catatan penting untuk pemahaman lebih lanjut mengenai stabilitas dan keberlanjutan sumber pendapatan tersebut.

Pendapatan daerah Kota Salatiga terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dengan perkembangan selama kurun waktu tahun 2020-2024 selengkapnya dapat dilihat pada grafik sebagai berikut.

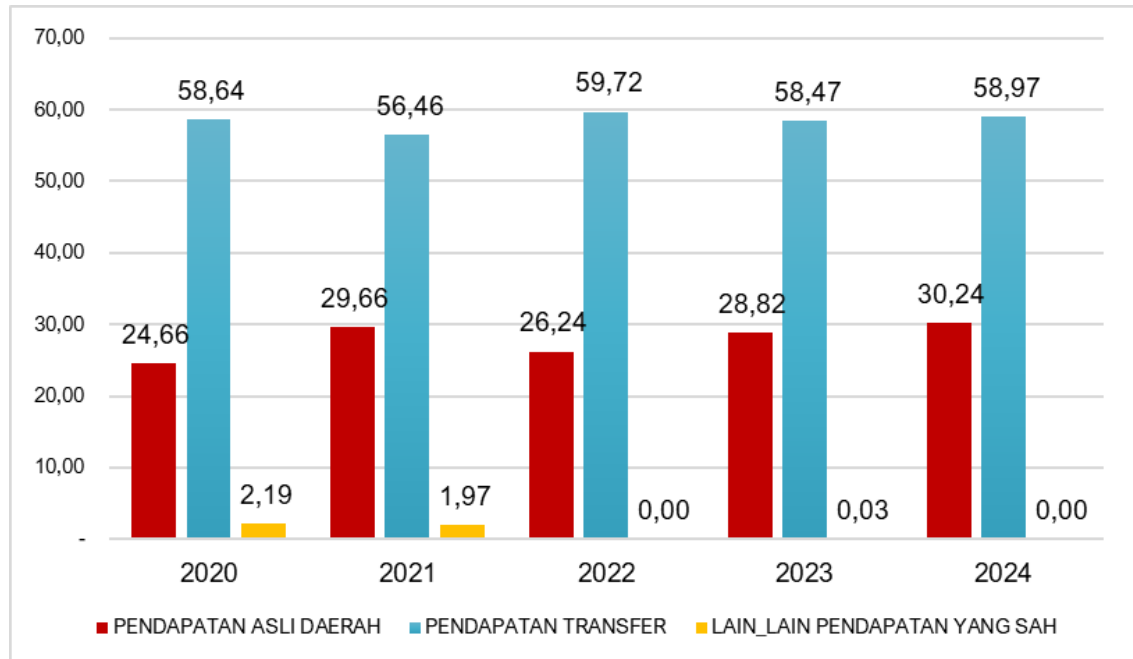


Sumber: BPKPD Kota Salatiga.2025

Gambar 2.74. Perkembangan Masing-Masing Unsur Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024 (Rupiah)

Proporsi unsur pendapatan daerah Kota Salatiga terhadap total pendapatan daerah menunjukkan kecenderungan yang stabil namun dengan variasi antara tahun-tahun yang berbeda. Sepanjang periode tersebut, Pendapatan Transfer secara konsisten menjadi kontributor utama dan dominan terhadap total pendapatan daerah, selalu berada di atas 50%. Pada tahun 2020, Pendapatan Transfer menyumbang 58,64% dari total pendapatan, kontribusinya sedikit meningkat ditahun 2024 menjadi di angka 58,97%. Tingginya proporsi Pendapatan Transfer menunjukkan ketergantungan yang signifikan Kota Salatiga pada alokasi dana dari pemerintah pusat atau provinsi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren peningkatan proporsi, mengindikasikan upaya peningkatan kemandirian fiskal. Pada tahun 2020, PAD menyumbang 24,66% dari total pendapatan, kemudian pada tahun 2024 mengalami kenaikan mencapai 30,24%. Peningkatan kontribusi PAD menunjukkan keberhasilan dalam mengoptimalkan potensi pendapatan lokal. Sementara itu, proporsi Lain-Lain Pendapatan yang Sah sangat kecil dan menunjukkan fluktuasi ekstrem. Pada tahun 2020, kontribusinya sebesar 2,19%, kemudian turun menjadi 1,97% di tahun 2021. Menariknya, pada tahun 2022 dan 2024, proporsi Lain-Lain Pendapatan yang Sah tercatat 0,00%, yang mengindikasikan bahwa pada tahun tersebut tidak ada atau sangat minim pendapatan dari sumber tersebut yang signifikan. Ada sedikit kontribusi pada tahun 2023 sebesar 0,03%. Minimnya dan tidak stabilnya kontribusi dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah menunjukkan bahwa sumber ini bukan merupakan komponen utama atau stabil dalam struktur pendapatan daerah Kota Salatiga.

Secara keseluruhan, struktur pendapatan Kota Salatiga didominasi oleh Pendapatan Transfer, namun terdapat tren positif dalam peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang mengarah pada kemandirian fiskal yang lebih baik. Proporsi Lain-Lain Pendapatan yang Sah cenderung sangat rendah dan fluktuatif, sehingga tidak menjadi penopang utama pendapatan daerah. Perkembangan proporsi unsur-unsur pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPKPD Kota Salatiga.2025

Gambar 2.75. Proporsi Unsur Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (Persen)

Pendapatan asli daerah mencakup pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan transfer mencakup pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan pendapatan lainnya.

Pendapatan daerah Kota Salatiga secara keseluruhan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, menembus angka 1 triliun Rupiah pada tahun terakhir. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan/atau efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan tren peningkatan, meskipun dengan fluktuasi, yang mengindikasikan ke arah peningkatan kemandirian fiskal. Secara spesifik, Pendapatan Pajak Daerah menunjukkan peningkatan stabil dan menjadi kontributor terbesar di sebagian besar tahun. Namun, pada tahun 2024, Pendapatan Retribusi Daerah mengalami lonjakan luar biasa, menjadikannya



komponen PAD terbesar, sedangkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami penurunan drastis. Secara rinci perkembangan masing-masing unsur-unsur pendapatan daerah selama tahun 2020-2024 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.54. Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (Rupiah)

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
I	PENDAPATAN	890.223.683.933,00	946.191.087.524,00	918.353.779.916,00	987.276.298.498,00	1.038.143.487.948,00
I.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
I.1.	Pendapatan Pajak Daerah	54.374.473.089,00	65.041.971.971,00	75.518.553.026,00	82.607.886.150,00	96.219.165.860,00
I.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	9.296.946.836,00	14.978.515.080,00	11.326.093.045,00	16.855.722.636,00	181.486.329.234,00
I.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.096.550.195,00	18.824.426.644,00	20.463.337.373,00	21.280.725.694,00	23.424.606.758,00
I.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	138.771.430.212,00	181.840.024.102,00	133.651.895.188,00	163.791.965.078,00	12.833.579.640,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	219.539.400.332,00	280.684.937.797,00	240.959.878.632,00	284.536.299.558,00	313.963.681.492,00
I.2	PENDAPATAN TRANSFER					
I.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	24.349.789.024,00	32.684.736.838,00	29.119.955.376,00	29.967.992.050,00	27.806.723.000,00
2.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	2.185.175.973,00	2.277.317.037,00	3.059.574.254,00	1.865.352.243,00	1.353.371.000,00
3.	Dana Alokasi umum	425.080.208.000,00	418.013.566.000,00	417.175.271.746,00	440.735.874.040,00	463.728.380.299,00
4.	Dana Alokasi Khusus	70.427.412.444,00	81.270.963.188,00	99.125.896.908,00	104.675.010.769,00	119.308.170.745,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	522.042.585.441,00	534.246.583.063,00	548.480.698.284,00	577.244.229.102,00	612.196.645.044,00
I.2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
1.	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dana Penyesuaian	68.096.041.000,00	47.151.521.000,00	52.018.907.000,00	49.138.845.000,00	33.500.801.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	68.096.041.000,00	47.151.521.000,00	52.018.907.000,00	49.138.845.000,00	33.500.801.000,00
I.2.3	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	53.450.784.252,00	64.918.523.115,00	64.841.765.000,00	69.602.560.141,00	68.809.586.628,00
2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	7.576.755.000,00	586.000.000,00	12.032.531.000,00	6.494.279.000,00	9.659.516.350,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	61.027.539.252,00	65.504.523.115,00	76.874.296.000,00	76.096.839.141,00	78.469.102.978,00
I.3	LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
1.	Pendapatan Hibah	19.518.117.908,00	438.500.000,00	20.000.000,00	260.000.000,00	10.000.000,00
2.	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-
3.	Pendapatan Lainnya	-	18.165.022.549,00	-	85.697,00	3.257.939,00
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah	19.518.117.908,00	18.603.522.549,00	20.000.000,00	260.085.697,00	13.257.939,00

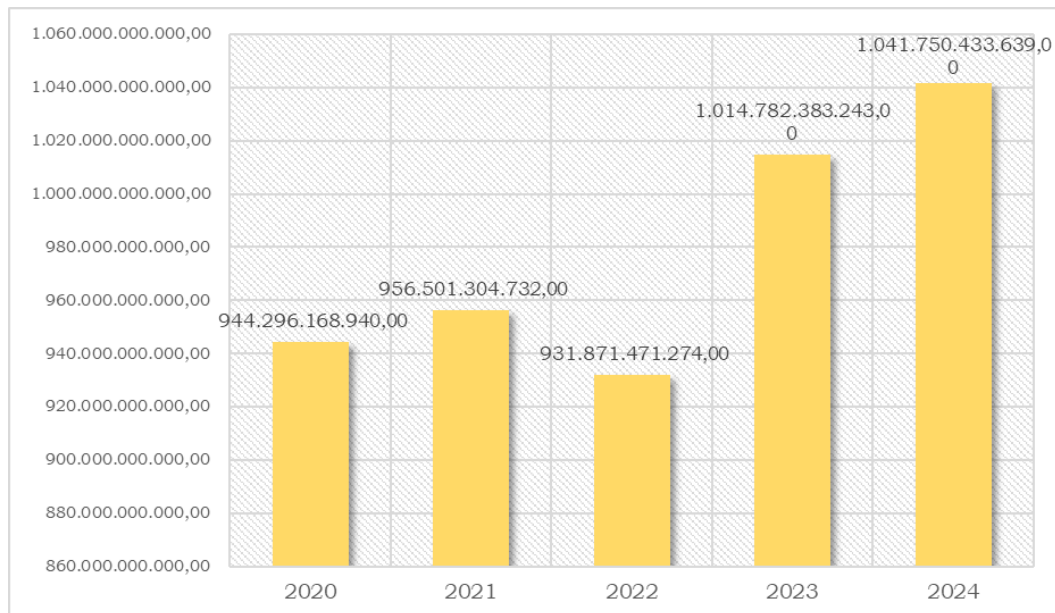
Sumber: BPKPD Kota Salatiga.2025

Kebijakan opsen pajak yang berlaku efektif mulai 5 Januari 2025 sesuai

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, membuka peluang besar bagi Pemerintah Kota Salatiga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui percepatan dan peningkatan porsi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Penerapan skema opsen ini, Kota Salatiga dapat secara langsung menerima 66% dari pokok pajak terutang, mempercepat aliran kas daerah dan memperkuat kapasitas fiskal lokal. Pemerintah Kota Salatiga perlu memanfaatkan peluang tersebut untuk mengoptimalkan pelayanan pajak melalui digitalisasi dan inovasi, memperbaiki akurasi data wajib pajak, serta memperkuat basis pajak. Namun, untuk memaksimalkan manfaat, daerah perlu mengatasi tantangan seperti potensi perpindahan kendaraan ke daerah lain, memastikan kapasitas SDM dan infrastruktur yang memadai, serta melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat agar kebijakan ini dapat berjalan optimal dan berkontribusi signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah.

2. Kinerja Belanja Daerah

Tren belanja daerah Kota Salatiga dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil dengan kecenderungan peningkatan. Pada tahun 2020, belanja daerah tercatat sebesar Rp. 944.296.168.940,00, yang kemudian sedikit meningkat menjadi Rp. 956.501.304.732,00 pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, belanja daerah mengalami penurunan menjadi Rp. 931.871.471.274,00. Meski demikian, pada tahun 2023 dan 2024, belanja daerah kembali meningkat signifikan, mencapai Rp. 1.014.782.383.243,00 pada 2023 dan diperkirakan naik menjadi Rp. 1.041.750.433.639,00 pada 2024. Peningkatan belanja daerah pada dua tahun terakhir mencerminkan adanya kebutuhan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan peningkatan layanan publik di Kota Salatiga. Perkembangan belanja daerah Kota Salatiga tahun 2020-2024 terlihat pada gambar berikut.



Sumber: BPKPD Kota Salatiga.2025

Gambar 2.76. Perkembangan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (Rupiah)

Belanja daerah mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Tren belanja operasi Kota Salatiga dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan pola peningkatan yang konsisten, mencerminkan upaya daerah dalam meningkatkan kualitas layanan dan kegiatan operasional pemerintahan. Pada tahun 2020, belanja operasi tercatat sebesar Rp. 740.768.469.745,00, dan mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2021 menjadi Rp. 826.013.079.878,00. Pada tahun 2022, belanja operasi kembali meningkat menjadi Rp. Rp. 853.696.161.143,00, diikuti dengan lonjakan yang lebih besar pada tahun 2023, mencapai Rp. 922.221.511.112,00. Pada tahun 2024, belanja operasi diperkirakan sedikit lebih tinggi lagi, mencapai Rp. . 935.877.484.420,00. Kenaikan yang berkelanjutan ini menunjukkan adanya prioritas untuk meningkatkan kapasitas operasional pemerintah daerah guna mendukung berbagai program pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Perkembangan belanja modal Kota Salatiga selama tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dengan penurunan yang tajam pada beberapa tahun dan pemulihan yang mulai terlihat pada tahun 2023. Pada tahun 2020, belanja modal tercatat sebesar Rp. 174.131.330.590,00, namun menurun drastis pada tahun 2021 dan pada tahun 2022, dengan belanja modal hanya mencapai Rp.75.192.210.131,00. Namun, sejak tahun 2023, belanja modal mulai mengalami pemulihan dengan angka Rp. 91.952.972.131,00, dan diperkirakan akan meningkat kembali menjadi Rp. 105.442.495.969,00 pada

tahun 2024. Penurunan belanja modal pada beberapa tahun tersebut kemungkinan disebabkan oleh faktor ekonomi dan prioritas anggaran, sementara peningkatan di dua tahun terakhir mencerminkan upaya untuk memperbaiki dan membangun infrastruktur serta mendukung pembangunan jangka panjang di Kota Salatiga.

Kondisi belanja tidak terduga Kota Salatiga selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, dengan penurunan tajam setelah tahun 2020. Pada tahun 2021, belanja tidak terduga meningkat signifikan, dan terus meningkat pada tahun 2022 hingga mencapai Rp, 2.983.100.000,00. Tahun 2023 dan 2024 menunjukkan angka yang lebih rendah lagi, masing-masing Rp. 607.900.000,00 dan Rp. 430.453.250,00, mencerminkan berkurangnya kebutuhan akan belanja tidak terduga. Penurunan ini mengindikasikan bahwa Kota Salatiga mungkin telah berhasil mengelola ketidakpastian dengan lebih baik, sehingga kebutuhan untuk belanja tidak terduga semakin menurun dalam beberapa tahun terakhir.

Secara rinci perkembangan masing-masing unsur-unsur belanja daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.55. Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (Rupiah)

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
II	BELANJA	944.296.168.940,00	956.501.304.732,00	931.871.471.274,00	1.014.782.383.243,00	1.041.750.433.639,00
II.1	BELANJA OPERASI					
1.	Belanja Pegawai	447.702.525.920,00	411.931.318.505,00	398.347.572.483,97	400.688.586.142,00	426.945.256.800,00
2.	Belanja Barang	271.830.957.825,00	399.357.950.409,00	431.031.608.280,03	486.763.958.738,00	472.770.420.733,00
3.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
4.	Belanja Subsidi	-	-	204.717.500,00	60.890.000,00	90.070.000,00
5.	Belanja Hibah	18.602.331.000,00	12.955.460.964,00	23.175.462.879,00	33.881.276.232,00	35.434.836.887,00
6.	Belanja Bantuan Sosial	2.632.655.000,00	1.768.350.000,00	936.800.000,00	826.800.000,00	636.900.000,00
	Jumlah Belanja Operasi	740.768.469.745,00	826.013.079.878,00	853.696.161.143,00	922.221.511.112,00	935.877.484.420,00
II.2	BELANJA MODAL					
1.	Belanja Tanah	3.610.880.337,00	409.818.620,00	-	1.082.183.240,00	2.359.523.920,00
2.	Belanja Perlatan dan Mesin	61.715.928.045,00	43.567.605.306,00	19.089.458.206,00	34.307.626.051,00	38.714.376.504,00
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	47.553.365.500,00	60.425.196.643,00	23.051.423.031,00	17.402.770.950,00	28.209.975.585,00
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	59.103.396.512,00	24.731.543.900,00	31.216.974.647,00	36.831.079.856,00	34.066.477.100,00
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.585.157.696,00	182.158.040,00	1.722.875.662,00	2.196.462.134,00	2.034.937.660,00
6.	Belanja Aset Lainnya	562.602.500,00	960.756.400,00	111.478.585,00	132.849.900,00	57.205.200,00
	Jumlah Belanja Modal	174.131.330.590,00	130.277.078.909,00	75.192.210.131,00	91.952.972.131,00	105.442.495.969,00
II.3	BELANJA TIDAK TERDUGA					
1	Belanja Tidak Terduga	29.396.368.605,00	211.145.945,00	2.983.100.000,00	607.900.000,00	430.453.250,00
	Jumlah belanja Tidak Terduga	29.396.368.605,00	211.145.945,00	2.983.100.000,00	607.900.000,00	430.453.250,00
II.2	TRANSFER					
	TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN LAINNYA					
1	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	658.043.964,00	-	200.000.000,00		-

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Transfer/ Bantuan Keuangan Lainnya	658.043.964,00	-	200.000.000,00	-	-
	SURPLUS/ DEFISIT	(54.730.528.971,00)	(10.310.217.208,00)	(13.717.691.358,00)	(27.506.084.745,00)	(3.606.945.186,00)

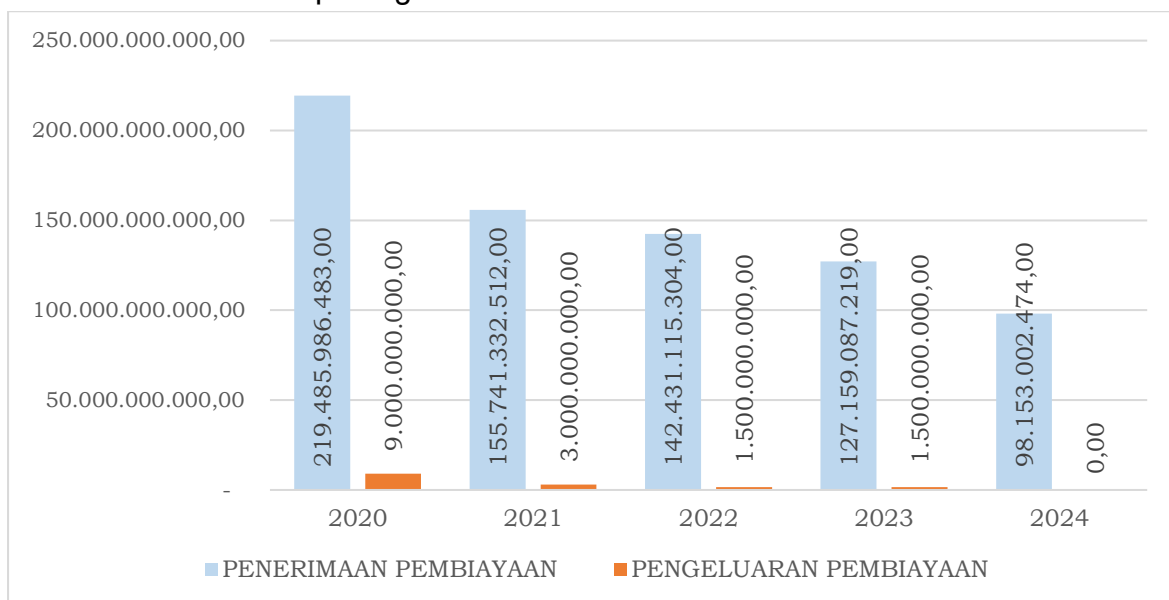
Sumber: BPKPD Kota Salatiga.2025

3. Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan daerah di Kota Salatiga berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya. Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah Kota Salatiga menunjukkan penurunan dari sebesar Rp. 219.485.986.483,00 ditahun 2020 menjadi Rp. 98.153.002.474,00 ditahun 2024. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Penggunaan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya.

Pengeluaran pembiayaan Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Dalam kurun waktu tahun 2020-2024 pengeluaran pembiayaan daerah Kota Salatiga menunjukkan penurunan dari sebesar Rp. 9.000.000.000,00 menjadi Rp.1.500.000.000,00 yang digunakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah.

Perkembangan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah terlihat pada gambar berikut.

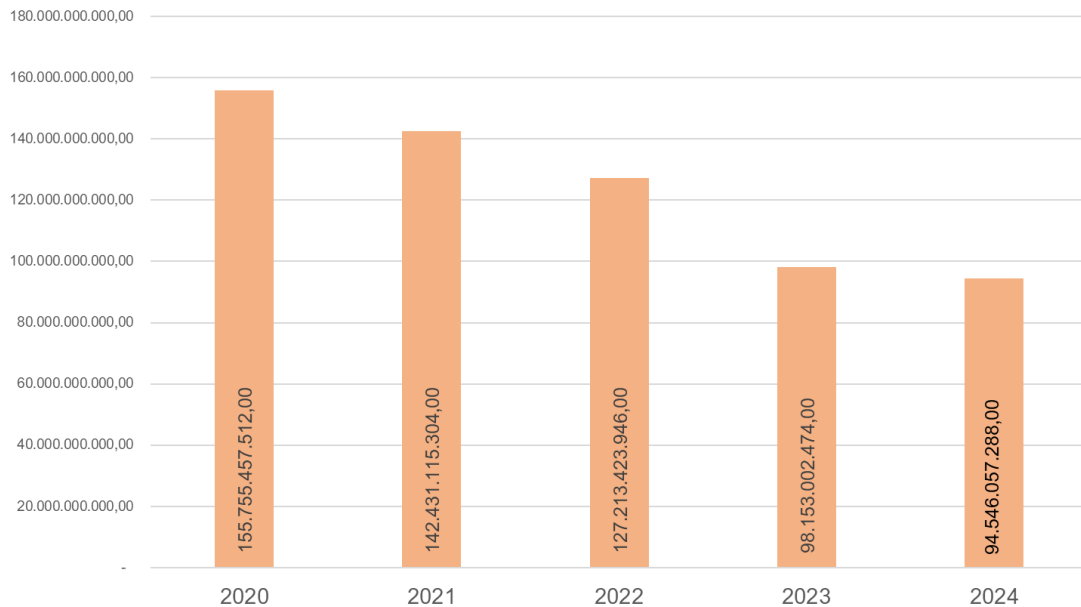


Sumber: BPKPD Kota Salatiga.2025

Gambar 2.77. Perkembangan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (Rupiah)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA

adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SILPA tahun berjalan di Kota Salatiga menunjukkan kecenderungan penurunan dari sebesar Rp.155.755.457.512,00 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 94.546.057.288,00 pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan semakin baik, yang dipengaruhi oleh penyerapan anggaran belanja daerah semakin baik.



Sumber: BPKPD Kota Salatiga.2025

Gambar 2.78. Perkembangan SILPA tahun Berjalan Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (Rupiah)

Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari tahun sebelumnya menjadi salah satu pembiayaan daerah diprioritaskan. Untuk penyertaan modal dalam rangka mendukung kinerja BUMD dilakukan selama tahun 2020-2023. Namun hasil pencermatan terhadap alokasi pembiayaan di Kota Salatiga menunjukkan bahwa pada tahun 2024, tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah, dengan nilai tercatat Rp 0,00. Hal ini menandai perubahan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya (2020-2023) yang konsisten menganggarkan penyertaan modal, meskipun dengan tren menurun. Tidak adanya alokasi ini dapat mengindikasikan pergeseran prioritas anggaran ke sektor lain yang lebih mendesak, hasil evaluasi terhadap kinerja investasi sebelumnya yang mungkin memerlukan jeda, atau bahkan pertimbangan efisiensi dan konsolidasi aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selain itu, kemungkinan adanya perubahan model pendanaan proyek yang tidak lagi bergantung pada penyertaan modal langsung dari APBD juga patut dipertimbangkan..

Perkembangan pembiayaan daerah secara rinci tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.56. Perkembangan Pembiayaan Daerah Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (Rupiah)

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
III	PEMBIAYAAN					
III.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
1.	Penggunaan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA)	219.471.861.483,00	155.741.332.512,00	142.431.115.304,00	127.159.087.219,00	98.153.002.474,00
2.	Pencairan Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	14.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan	219.485.986.483,00	155.741.332.512,00	142.431.115.304,00	127.159.087.219,00	98.153.002.474,00
III.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
1.	Pembentukan Desa Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.000.000.000,00	3.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
3.	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran	9.000.000.000,00	3.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
III.3	PEMBIAYAAN NETTO	210.485.986.483,00	152.741.332.512,00	140.931.115.304,00	125.659.087.219,00	98.153.002.474,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/ SILPA	155.755.457.512,00	142.431.115.304,00	127.213.423.946,00	98.153.002.474,00	94.546.056.783,00

Sumber: BPKPD Kota Salatiga.2025

Pertumbuhan APBD Kota Salatiga tahun 2020-2024 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.57. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	PERTUMBUHAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
I	PENDAPATAN					
I.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
1.	Pendapatan Pajak Daerah	(18,07)	19,62	16,11	9,39	16,48
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	(15,73)	61,11	(24,38)	48,82	976,71
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,31	10,11	8,71	3,99	10,07
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	(2,79)	31,04	(26,50)	22,55	(92,17)
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	(7,01)	27,85	(14,15)	18,08	10,34
I.2	PENDAPATAN TRANSFER					
1.3.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	38,66	34,23	(10,91)	2,91	(7,21)



NO	URAIAN	PERTUMBUHAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	67,47	4,22	34,35	(39,03)	(27,45)
3.	Dana Alokasi umum	(9,55)	(1,66)	(0,20)	5,65	5,22
4.	Dana Alokasi Khusus	(12,54)	15,40	21,97	5,60	13,98
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	(8,31)	2,34	2,66	5,24	6,06
I.3	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
1.	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dana Penyesuaian	81,38	(30,76)	10,32	(5,54)	(31,82)
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	81,38	(30,76)	10,32	(5,54)	(31,82)
I.4	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	(11,30)	21,45	(0,12)	7,34	(1,14)
2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	33,56	(92,27)	1.953,33	(46,03)	48,74
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	(7,44)	7,34	17,36	(1,01)	3,12
	Jumlah Pendapatan Transfer	(3,22)	(0,65)	4,71	3,71	3,09
I.5	LAIN_LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
1.	Pendapatan Hibah	2,17	(97,75)	(95,44)	1.200,00	(96,15)
2.	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	(100,00)	0,00	3.701,70
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah	2,17	(4,69)	(99,89)	1.200,43	(94,90)
	JUMLAH PENDAPATAN	(4,07)	6,29	(2,94)	7,51	5,15
II.	BELANJA					
II.1	BELANJA OPERASI					
1.	Belanja Pegawai	(0,56)	(7,99)	(3,30)	0,59	6,55
2.	Belanja Barang	(2,59)	46,91	7,93	12,93	(2,87)
3.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	(70,26)	47,92
5.	Belanja Hibah	(19,58)	(30,36)	78,89	46,19	4,59
6.	Belanja Bantuan Sosial	(55,12)	(32,83)	(47,02)	(11,74)	(22,97)
	Jumlah Belanja Operasi	(2,31)	11,51	3,35	8,03	1,48
II.2	BELANJA MODAL					
1.	Belanja Tanah	622,18	(88,65)	(100,00)	00,00	118,03
2.	Belanja Perlatan dan Mesin	0,30	(29,41)	(56,18)	79,72	12,84
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	(36,74)	27,07	(61,85)	(24,50)	62,10
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	33,83	(58,16)	26,22	17,98	(7,51)
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	(27,28)	(88,51)	845,81	27,49	(7,35)
6.	Belanja Aset Lainnya	209,54	70,77	(88,40)	19,17	(56,94)
	Jumlah Belanja Modal	(5,22)	(25,18)	(42,28)	22,29	14,67
II.3	BELANJA TIDAK TERDUGA					
1	Belanja Tidak Terduga	64.792,65	(99,28)	1.312,81	(79,62)	(29,19)
	Jumlah belanja Tidak Terduga	64.792,65	(99,28)	1.312,81	(79,62)	(29,19)
	JUMLAH BELANJA	0,24	1,29	(2,57)	8,90	2,66
II.2	TRANSFER					

NO	URAIAN	PERTUMBUHAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
	TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN LAINNYA					
1	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3,81	(100,00)	0,00	(100,00)	0,00
	JUMLAH TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN LAINNYA	3,81	(100,00)	0,00	(100,00)	0,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	0,24	1,22	(2,55)	8,87	2,66
	SURPUS/ DEFISIT	273,14	(81,16)	33,05	100,52	(86,89)
III	PEMBIAYAAN					
III.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
1.	Penggunaan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA)	(15,02)	(29,04)	(8,55)	(10,72)	(22,81)
2.	Pencairan Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	(74,49)	(100,00)	0,00	0,00	0,00
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan	(15,03)	(29,04)	(8,55)	(10,72)	(22,81)
III.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
1.	Pembentukan Desa Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	(62,79)	(66,67)	(50,00)	0,00	(100,00)
3.	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran	(62,79)	(66,67)	(50,00)	-	(100,00)
III.3	PEMBIAYAAN NETTO	(10,10)	(27,43)	(7,73)	(10,84)	(21,89)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/ SILPA	(29,03)	(8,55)	(10,68)	(22,84)	(3,67)

Sumber: BPKPD Kota Salatiga.2025

Kondisi perkembangan APBD Kota Salatiga selama tahun 2020-2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.58. Perkembangan APBD Kota Salatiga Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
I	PENDAPATAN	890.223.683.933,00	946.191.087.524,00	918.353.779.916,00	987.276.298.498,00	1.038.143.487.948,00
I.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
I.1.	Pendapatan Pajak Daerah	54.374.473.089,00	65.041.971.971,00	75.518.553.026,00	82.607.886.150,00	96.219.165.860,00
I.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	9.296.946.836,00	14.978.515.080,00	11.326.093.045,00	16.855.722.636,00	181.486.329.234,00
I.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.096.550.195,00	18.824.426.644,00	20.463.337.373,00	21.280.725.694,00	23.424.606.758,00
I.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	138.771.430.212,00	181.840.024.102,00	133.651.895.188,00	163.791.965.078,00	12.833.579.640,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	219.539.400.332,00	280.684.937.797,00	240.959.878.632,00	284.536.299.558,00	313.963.681.492,00
I.2	PENDAPATAN TRANSFER					



NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	24.349.789.024,00	32.684.736.838,00	29.119.955.376,00	29.967.992.050,00	27.806.723.000,00
2.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	2.185.175.973,00	2.277.317.037,00	3.059.574.254,00	1.865.352.243,00	1.353.371.000,00
3.	Dana Alokasi umum	425.080.208.000,00	418.013.566.000,00	417.175.271.746,00	440.735.874.040,00	463.728.380.299,00
4.	Dana Alokasi Khusus	70.427.412.444,00	81.270.963.188,00	99.125.896.908,00	104.675.010.769,00	119.308.170.745,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	522.042.585.441,00	534.246.583.063,00	548.480.698.284,00	577.244.229.102,00	612.196.645.044,00
1.2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
1.	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dana Penyesuaian	68.096.041.000,00	47.151.521.000,00	52.018.907.000,00	49.138.845.000,00	33.500.801.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	68.096.041.000,00	47.151.521.000,00	52.018.907.000,00	49.138.845.000,00	33.500.801.000,00
1.2.3	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	53.450.784.252,00	64.918.523.115,00	64.841.765.000,00	69.602.560.141,00	68.809.586.628,00
2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	7.576.755.000,00	586.000.000,00	12.032.531.000,00	6.494.279.000,00	9.659.516.350,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	61.027.539.252,00	65.504.523.115,00	76.874.296.000,00	76.096.839.141,00	78.469.102.978,00
1.3	LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
1.	Pendapatan Hibah	19.518.117.908,00	438.500.000,00	20.000.000,00	260.000.000,00	10.000.000,00
2.	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-
3.	Pendapatan Lainnya	-	18.165.022.549,00	-	85.697,00	3.257.939,00
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah	19.518.117.908,00	18.603.522.549,00	20.000.000,00	260.085.697,00	13.257.939,00
II	BELANJA	944.296.168.940,00	956.501.304.732,00	931.871.471.274,00	1.014.782.383.243,00	1.041.750.433.639,00
II.1	BELANJA OPERASI					
1.	Belanja Pegawai	447.702.525.920,00	411.931.318.505,00	398.347.572.483,97	400.688.586.142,00	426.945.256.800,00
2.	Belanja Barang	271.830.957.825,00	399.357.950.409,00	431.031.608.280,03	486.763.958.738,00	472.770.420.733,00
3.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
4.	Belanja Subsidi	-	-	204.717.500,00	60.890.000,00	90.070.000,00
5.	Belanja Hibah	18.602.331.000,00	12.955.460.964,00	23.175.462.879,00	33.881.276.232,00	35.434.836.887,00
6.	Belanja Bantuan Sosial	2.632.655.000,00	1.768.350.000,00	936.800.000,00	826.800.000,00	636.900.000,00
	Jumlah Belanja Operasi	740.768.469.745,00	826.013.079.878,00	853.696.161.143,00	922.221.511.112,00	935.877.484.420,00
II.2	BELANJA MODAL					
1.	Belanja Tanah	3.610.880.337,00	409.818.620,00	-	1.082.183.240,00	2.359.523.920,00
2.	Belanja Perlatan dan Mesin	61.715.928.045,00	43.567.605.306,00	19.089.458.206,00	34.307.626.051,00	38.714.376.504,00
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	47.553.365.500,00	60.425.196.643,00	23.051.423.031,00	17.402.770.950,00	28.209.975.585,00
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	59.103.396.512,00	24.731.543.900,00	31.216.974.647,00	36.831.079.856,00	34.066.477.100,00
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.585.157.696,00	182.158.040,00	1.722.875.662,00	2.196.462.134,00	2.034.937.660,00
6.	Belanja Aset Lainnya	562.602.500,00	960.756.400,00	111.478.585,00	132.849.900,00	57.205.200,00
	Jumlah Belanja Modal	174.131.330.590,00	130.277.078.909,00	75.192.210.131,00	91.952.972.131,00	105.442.495.969,00
II.3	BELANJA TIDAK TERDUGA					
1	Belanja Tidak Terduga	29.396.368.605,00	211.145.945,00	2.983.100.000,00	607.900.000,00	430.453.250,00



NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah belanja Tidak Terduga	29.396.368.605,00	211.145.945,00	2.983.100.000,00	607.900.000,00	430.453.250,00
II.2	TRANSFER					
	TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN LAINNYA					
1	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	658.043.964,00	-	200.000.000,00		-
	Jumlah Transfer/ Bantuan Keuangan Lainnya	658.043.964,00	-	200.000.000,00	-	-
	SURPLUS/ DEFISIT	(54.730.528.971,00)	(10.310.217.208,00)	(13.717.691.358,00)	(27.506.084.745,00)	(3.606.945.186,00)
III	PEMBIAYAAN					
III.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
1.	Penggunaan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA)	219.471.861.483,00	155.741.332.512,00	142.431.115.304,00	127.159.087.219,00	98.153.002.474,00
2.	Pencairan Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	14.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan	219.485.986.483,00	155.741.332.512,00	142.431.115.304,00	127.159.087.219,00	98.153.002.474,00
III.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
1.	Pembentukan Desa Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.000.000.000,00	3.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
3.	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran	9.000.000.000,00	3.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
III.3	PEMBIAYAAN NETTO	210.485.986.483,00	152.741.332.512,00	140.931.115.304,00	125.659.087.219,00	98.153.002.474,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/ SILPA	155.755.457.512,00	142.431.115.304,00	127.213.423.946,00	98.153.002.474,00	94.546.056.783,00

2.5.2. Neraca Daerah

Neraca daerah adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah pada suatu periode waktu. Neraca daerah memuat informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pasal 4 ayat (1) Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrua. SAP Berbasis Akrua adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrua, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Aset adalah sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah, dan dapat diukur dalam satuan uang. Sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya juga termasuk dalam pengertian aset. Kewajiban adalah utang yang timbul

dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban mencakup utang yang berasal dari pinjaman, utang biaya, dan utang lainnya yang masih harus dibayar. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Neraca daerah Kota Salatiga menunjukkan pertumbuhan yang stabil pada sisi aset, diikuti dengan pengelolaan kewajiban yang cenderung menurun, dan peningkatan ekuitas yang konsisten. Ini mencerminkan kondisi keuangan daerah yang sehat dan terus membaik sepanjang periode 2020-2024. Jumlah Aset secara keseluruhan mengalami peningkatan dari Rp.3.122.697.428.677 pada tahun 2020 menjadi Rp.3.199.521.124.994 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan ekspansi kepemilikan aset daerah. Jumlah Kewajiban menunjukkan tren penurunan yang positif, dari Rp.35.120.126.433 pada tahun 2020 menjadi Rp.19.679.858.499 pada tahun 2024. Penurunan kewajiban ini mengindikasikan kemampuan daerah dalam melunasi atau mengelola utang dengan baik. Jumlah Ekuitas mengalami pertumbuhan yang stabil dan signifikan, dari Rp3.087.577.302.243 pada tahun 2020 menjadi Rp.3.179.683.898.254 pada tahun 2024. Peningkatan ekuitas menunjukkan penguatan posisi keuangan bersih pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, neraca daerah Kota Salatiga dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan kondisi keuangan yang sehat dan stabil. Peningkatan total aset, dominasi aset tetap yang mencerminkan investasi pada infrastruktur, ketiadaan kewajiban jangka panjang, dan penurunan kewajiban jangka pendek, ditambah dengan pertumbuhan ekuitas yang solid, menggambarkan manajemen keuangan daerah yang prudent dan berkelanjutan. Penurunan aset lancar dan aset lainnya, serta fluktuasi pada properti investasi, mungkin memerlukan analisis lebih dalam untuk memahami strategi pengelolaan aset yang mendasarinya.

Gambaran kondisi neraca daerah Kota Salatiga selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.59. Neraca Daerah Kota Salatiga Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aset					
	a. Aset lancar	242.117.887.309	216.742.919.795	201.901.945.955	180.080.530.922	149.327.533.713
	b. Investasi Jangka Panjang	140.649.185.763	149.023.550.651	153.692.699.670	166.270.169.192	173.097.106.361
	c. Aset Tetap	2.656.541.260.533	2.750.897.875.514	2.803.687.805.902	2.728.367.520.988	2.812.970.732.084
	d. Aset Lainnya	83.389.095.073	83.727.427.263	50.932.793.461	28.449.503.410	25.302.329.281
	e. Properti Investasi	-	-	-	111.769.914.088	38.823.423.555
	Jumlah Aset	3.122.697.428.677	3.200.391.773.224	3.210.215.244.988	3.214.937.638.599	3.199.521.124.994
2	Kewajiban					
	a. Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
	b. Kewajiban Jangka Pendek	35.120.126.433	31.685.527.287	21.394.042.439	19.989.568.474	19.837.226.741
	Jumlah Kewajiban	35.120.126.433	31.685.527.287	21.394.042.439	19.989.568.474	19.679.858.499
3	Ekuitas					
	Ekutias	3.087.577.302.243	3.168.706.245.937	3.188.821.202.549	3.194.948.070.125	3.179.683.898.254
	Jumlah Ekuitas	3.087.577.302.243	3.168.706.245.937	3.188.821.202.549	3.194.948.070.125	3.179.683.898.254
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	3.122.697.428.677	3.200.391.773.224	3.210.215.244.988	3.214.937.638.599	3.199.521.124.994

Sumber: BPKPD Kota Salatiga.2025

Tabel di atas juga memberikan gambaran mengenai kondisi solvabilitas, likuiditas, rasio lancar (current ratio), rasio utang dan rasio perputaran aktiva. Solvabilitas adalah kemampuan suatu entitas untuk memenuhi semua kewajiban jangka panjangnya. Berdasarkan data yang tersedia, dapat dilihat bahwa Kota Salatiga memiliki solvabilitas yang sangat baik. Total aset daerah secara konsisten jauh lebih besar daripada total kewajiban, yang mana sebagian besar merupakan kewajiban jangka pendek. Hingga tahun 2024, total aset adalah Rp.3.199.521.124.994, sementara total kewajiban hanya Rp.19.679.858.499. Ini menunjukkan bahwa daerah memiliki kemampuan yang kuat untuk melunasi utang-utangnya. Tidak adanya kewajiban jangka panjang juga menjadi indikator positif.

Likuiditas adalah kemampuan suatu entitas untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar. Berdasarkan neraca, Kota Salatiga juga memiliki likuiditas yang sangat kuat. Aset lancar selalu jauh lebih besar dari total kewajiban (yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek). Aset lancar pada tahun 2024 adalah Rp.149.327.533.713, sedangkan kewajiban jangka pendek hanya Rp.19.679.858.499. Ini menunjukkan bahwa daerah memiliki banyak aset yang dapat dicairkan dengan cepat untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Rasio lancar mengukur kemampuan suatu entitas untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar. Rasio lancar Kota Salatiga menunjukkan posisi yang sangat sehat, dengan nilai di atas 1, bahkan jauh di atas 2, yang secara umum dianggap ideal. Ini mengindikasikan bahwa daerah memiliki aset lancar yang memadai untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya berkali-kali lipat. Rasio ini bervariasi, namun tetap berada pada level yang sangat aman.

Tabel 2.60. Current Ratio Kota Salatiga Tahun 2020-2024

Tahun	Aset Lancar	Kewajiban Lancar	Current Ratio
2020	242.117.887.309	35.120.126.433	6,89
2021	216.742.919.795	31.685.527.287	6,84
2022	201.901.945.955	21.394.042.439	9,44
2023	180.080.530.922	19.989.568.474	9,01
2024	149.327.533.713	19.679.858.499	7,59

Sumber: BPKPD Kota Salatiga.2025

Rasio utang mengukur persentase aset yang didanai oleh utang. Rasio utang Kota Salatiga sangat rendah, menunjukkan bahwa sebagian besar asetnya dibiayai oleh ekuitas daerah, bukan utang. Rasio ini terus menurun dari tahun ke tahun, menunjukkan pengelolaan keuangan yang semakin hati-hati terhadap utang.

Tabel 2.61. Rasio Utang Kota Salatiga Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Kewajiban	Jumlah Aset	Rasio
2020	35.120.126.433	3.122.697.428.677	1,12
2021	31.685.527.287	3.200.391.773.224	0,99

Tahun	Jumlah Kewajiban	Jumlah Aset	Rasio
2022	21.394.042.439	3.210.215.244.988	0,67
2023	19.989.568.474	3.214.937.638.599	0,62
2024	19.679.858.499	3.199.521.124.994	0,61

Sumber: BPKPD Kota Salatiga.2025

Rasio perputaran aktiva mengukur efisiensi suatu entitas dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Rasio ini menunjukkan bahwa setiap rupiah aset yang dimiliki Kota Salatiga menghasilkan sekitar Rp.0,28 hingga Rp.0,32 pendapatan. Rasio ini cenderung stabil dan mengalami sedikit peningkatan di tahun-tahun terakhir, mengindikasikan efisiensi yang konsisten dalam penggunaan aset untuk menghasilkan pendapatan.

Tabel 2.62. Rasio Perputaran Aktiva Kota Salatiga Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Kewajiban	Jumlah Aset	Rasio
2020	890.223.683.933	3.122.697.428.677	0,28
2021	946.191.087.524	3.200.391.773.224	0,30
2022	918.353.779.916	3.210.215.244.988	0,29
2023	987.276.298.498	3.214.937.638.599	0,31
2024	1.038.143.487.948	3.199.521.124.994	0,32

Sumber: BPKPD Kota Salatiga.2025

2.5.3. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan

Proyeksi keuangan daerah memegang peranan krusial sebagai fondasi dalam mendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029. RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah untuk periode lima tahun. Proyeksi keuangan daerah memastikan bahwa sasaran pembangunan dalam RPJMD memiliki dukungan finansial yang memadai. Dengan memahami potensi pendapatan daerah dari berbagai sumber (seperti PAD, dana transfer, dan lain-lain) serta estimasi belanja untuk program-program prioritas, pemerintah daerah dapat menetapkan target yang ambisius namun tetap dapat dicapai. Ini mencegah terjadinya perencanaan yang terlalu optimis namun tidak realistis secara finansial.

Kebijakan dan strategi tata kelola keuangan daerah Kota Salatiga Tahun 2025–2029 memiliki hubungan yang sangat erat dan saling ketergantungan dengan proyeksi keuangan ke depan. Keduanya merupakan pilar utama yang menentukan arah dan kemampuan finansial pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD. Kebijakan dan Strategi Tata Kelola Keuangan Daerah berfungsi sebagai kerangka panduan dan peta jalan bagaimana Pemerintah Kota Salatiga akan mengelola sumber daya keuangannya. Ini mencakup bagaimana pendapatan akan dihimpun, bagaimana belanja akan dialokasikan,

bagaimana utang akan dikelola, serta bagaimana aset daerah akan dimanfaatkan secara efisien. Strategi ini akan memuat prinsip-prinsip, prioritas, dan pendekatan yang akan diambil untuk memastikan keberlanjutan fiskal, efektivitas belanja, dan akuntabilitas.

Tata kelola keuangan daerah yang baik merupakan fondasi utama dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Dalam konteks RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025–2029, kebijakan dan strategi keuangan diarahkan untuk memperkuat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui lima arah kebijakan utama, yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kapasitas aparatur pengelola keuangan dan perencana daerah perlu ditingkatkan untuk menjawab tantangan tata kelola yang semakin kompleks. Oleh karena itu, fokus kebijakan Pemerintah Kota Salatiga diarahkan pada tiga hal:

a. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi

Seluruh pengelola keuangan, mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hingga Bendahara dan Perencana, akan difasilitasi untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Hal ini akan meningkatkan profesionalisme serta kesesuaian dengan regulasi nasional.

b. Digitalisasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Penguatan teknologi informasi melalui integrasi antara SIKD, SIPD, dan aplikasi pendukung lainnya akan mempercepat proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan. Aspek keamanan siber juga akan diperhatikan dalam proses ini.

c. Manajemen Kinerja ASN Keuangan

Kinerja ASN di bidang keuangan akan dinilai secara periodik dan berbasis indikator output dan outcome. Pemberian penghargaan dan sanksi akan diatur dalam sistem manajemen ASN berbasis merit.

2. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Monitoring dan evaluasi yang adaptif dan responsif terhadap data menjadi kunci efektivitas perencanaan dan penganggaran. Untuk itu, strategi diarahkan pada:

a. Pengembangan *Dashboard Real-Time*

Pemerintah Kota akan membangun dashboard terintegrasi yang menampilkan data realisasi anggaran, indikator kinerja OPD, serta indikator pembangunan makro secara real-time, sehingga pimpinan daerah dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat.

b. Evaluasi Internal yang Sistematis

Penjadwalan evaluasi triwulan untuk masing-masing OPD akan dilaksanakan sebagai bagian dari sistem pengendalian internal daerah (SPIP), dengan penguatan peran Inspektorat sebagai quality assurance utama.

c. Transparansi dan Partisipasi Publik

Capaian program dan kegiatan akan dipublikasikan secara berkala kepada publik melalui laman resmi, media sosial, dan forum warga. Keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi akan dikuatkan untuk menjaga akuntabilitas.

3. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam rangka memperkuat kemandirian fiskal, optimalisasi PAD dilakukan secara adil, efisien, dan tidak memberatkan masyarakat. Strategi yang diterapkan meliputi:

a. Digitalisasi Pajak dan Retribusi Daerah

Pengembangan sistem pembayaran pajak dan retribusi secara elektronik (e-Pajak, e-Retribusi, QRIS, dan aplikasi mobile) akan mempermudah wajib pajak sekaligus meningkatkan efisiensi pengumpulan PAD.

b. Pendataan Ulang Potensi Pajak Daerah

Pemerintah Kota akan melakukan pemetaan dan pemutakhiran basis data objek pajak dan retribusi melalui pendekatan teknologi seperti drone dan sistem informasi geografis (GIS).

c. Pengembangan Sektor Potensial

Potensi PAD dari sektor pariwisata, parkir, dan perizinan usaha mikro dan kecil akan dikembangkan dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial. Skema insentif pajak akan diberikan untuk pelaku usaha baru dan padat karya.

4. Kolaborasi dan Inovasi Pembiayaan Daerah

Keterbatasan fiskal daerah membutuhkan strategi pembiayaan inovatif dan kolaboratif untuk mendanai program prioritas jangka menengah dan panjang. Strategi ini mencakup:

a. Pengembangan Instrumen Keuangan Daerah

Pemerintah Kota akan mengkaji dan merancang instrumen pembiayaan seperti sukuk dan obligasi daerah dengan dukungan regulasi lokal, serta proyek underlier yang layak secara teknis dan finansial.

b. Penguatan Peran BUMD

BUMD akan direposisi sebagai mitra strategis dalam pembiayaan pembangunan, dengan peran sebagai Special Purpose Vehicle (SPV) dalam skema pembiayaan proyek. Transparansi dan efisiensi BUMD akan menjadi fokus utama.

c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), CSR dari dunia usaha, serta kolaborasi dengan lembaga filantropi akan dioptimalkan untuk sektor-sektor strategis seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan.

5. Konsistensi dan Keadilan Kebijakan Fiskal

Arah kebijakan fiskal Kota Salatiga akan diarahkan untuk selaras dengan semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), yang mengedepankan prinsip keadilan, kesederhanaan, dan kinerja.

a. Reformasi Regulasi Pajak dan Retribusi

Pemerintah Kota akan menyusun dan menyesuaikan peraturan daerah terkait pajak dan retribusi dengan prinsip-prinsip UU HKPD. Penentuan tarif akan mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi masyarakat.

b. Penganggaran Terintegrasi dan Berbasis Kinerja

Sinkronisasi dokumen perencanaan (RKPD), penganggaran (KUA-PPAS), dan pelaksanaan APBD akan diperkuat dengan pendekatan berbasis output dan outcome untuk memastikan efisiensi belanja publik.

c. Transparansi dan Akuntabilitas Fiskal

Laporan keuangan daerah akan disusun secara akrual dan dipublikasikan melalui mekanisme open data. Forum konsultasi publik akan menjadi ruang dialog terbuka dalam proses penyusunan APBD dan evaluasi kinerja anggaran.

Adapun proyeksi APBD Kota Salatiga dilakukan dengan menggunakan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Kondisi perekonomian nasional dan daerah berada pada pertumbuhan yang tinggi dengan laju inflasi pada angka yang stabil.
2. Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan seiring dengan perbaikan pengelolaan pajak, peningkatan kinerja pengelolaan BUMD dan peningkatan kinerja pengelolaan BLUD.
3. Pendapatan transfer pemerintah pusat tidak mengalami perubahan, sedangkan pendapatan transfer dari pemerintah provinsi terutama berasal dari bagi hasil pajak mengalami peningkatan.

Proyeksi APBD Kota Salatiga tahun 2025-2030 dengan menggunakan Metode proyeksi tren (*trend projection method*). Metode ini mengasumsikan bahwa pola historis dalam pendapatan dan belanja akan berlanjut di masa depan. Proyeksi antara lain dengan memperhatikan Rata-rata Pertumbuhan (*Average Growth*) dan Rata-rata Persentase Pertumbuhan (*Average Percentage Growth*). Hasil proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Salatiga tahun 2025-2029 selanjutnya tercantum pada tabel berikut ini.



Tabel 2.63. Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2030

NO	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	PENDAPATAN	1.011.082.764.640,00	1.042.341.063.915,54	1.080.599.363.191,08	1.111.857.662.466,61	1.136.115.961.742,15	1.166.700.055.567,69
I.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	321.906.883.640,00	335.935.785.890,54	349.964.688.141,08	363.993.590.391,61	378.022.492.642,15	392.051.394.892,69
1.	Pendapatan Pajak Daerah	109.263.327.376,00	116.649.528.306,62	124.035.729.237,24	131.421.930.167,85	138.808.131.098,47	146.194.332.029,09
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	176.728.889.664,00	182.030.756.353,92	187.332.623.043,84	192.634.489.733,76	197.936.356.423,68	203.238.223.113,60
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.744.935.000,00	23.427.283.050,00	24.109.631.100,00	24.791.979.150,00	25.474.327.200,00	26.156.675.250,00
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.169.731.600,00	13.828.218.180,00	14.486.704.760,00	15.145.191.340,00	15.803.677.920,00	16.462.164.500,00
I.2	PENDAPATAN TRANSFER	689.175.881.000,00	706.405.278.025,00	723.634.675.050,00	740.864.072.075,00	758.093.469.100,00	774.648.660.675,00
I.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	643.555.616.000,00	659.644.506.400,00	675.733.396.800,00	691.822.287.200,00	707.911.177.600,00	723.325.862.550,00
I.2.1.1	DANA PERIMBANGAN	45.620.265.000,00	659.644.506.400,00	675.733.396.800,00	691.822.287.200,00	707.911.177.600,00	723.325.862.550,00
1.	Dana Bagi Hasil	35.089.157.000,00	35.966.385.925,00	36.843.614.850,00	37.720.843.775,00	38.598.072.700,00	39.475.301.625,00
2.	Dana Alokasi umum	482.599.097.000,00	494.664.074.425,00	513.729.051.850,00	525.794.029.275,00	530.859.006.700,00	542.923.984.125,00
3.	Dana Alokasi Khusus Fisik	29.640.219.000,00	30.381.224.475,00	31.122.229.950,00	31.863.235.425,00	32.604.240.900,00	33.345.246.375,00
4.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	87.237.737.000,00	89.418.680.425,00	91.599.623.850,00	93.780.567.275,00	95.961.510.700,00	98.142.454.125,00
5.	Insentif Fiskal	8.989.406.000,00	9.214.141.150,00	9.438.876.300,00	9.663.611.450,00	9.888.346.600,00	9.438.876.300,00
I.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	45.620.265.000,00	46.760.771.625,00	47.901.278.250,00	49.041.784.875,00	50.182.291.500,00	51.322.798.125,00
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	45.620.265.000,00	46.760.771.625,00	47.901.278.250,00	49.041.784.875,00	50.182.291.500,00	51.322.798.125,00
2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-	-
I.3	LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-	-	-	-
1.	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-
2.	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
3.	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-

Sumber: BPKPD Kota Salatiga.2025

Proyeksi pendapatan daerah Kota Salatiga tahun 2025-2029 diharapkan seluruh komponen pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan laon-lain pendapatan yang sah secara keseluruhan memiliki tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Peningkatan ini utamanya didorong oleh pertumbuhan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencakup Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, di mana seluruh kategori PAD ini secara bertahap mengalami kenaikan dari tahun 2025 hingga 2029. Selain itu, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat, khususnya Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, juga memegang peranan besar dan terus bertumbuh, dilengkapi dengan kontribusi Insetif Fiskal.

Melihat proyeksi pendapatan daerah Kota Salatiga yang menunjukkan tren kenaikan, upaya konkret harus difokuskan pada optimalisasi sumber-sumber yang ada dan eksplorasi potensi baru, terutama pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai indikator kemandirian fiskal. Beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain:

1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah yang dapat dilakukan melalui:
 - Optimalisasi penarikan pajak yang sudah ada seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan melalui perbaikan basis data wajib pajak, pembaruan data objek pajak, dan penegakan regulasi yang lebih tegas. Selain itu melakukan identifikasi potensi yang bekum tergarap seperti pada sektor ekonomi kreatif atau pengembangan usaha baru di Salatiga.
 - Pemanfaatan Teknologi: Implementasi sistem pajak online, e-billing, atau aplikasi pembayaran digital untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, sekaligus meningkatkan efisiensi pengawasan dan penagihan.
2. Peningkatan pendapatan retribusi daerah, yang dapat dilakukan melalui:
 - Evaluasi tarif retribusi, yang dapat dilakukan dengan kajian ulang terhadap tarif retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu untuk memastikan kesesuaian dengan biaya pelayanan dan nilai ekonomis yang diberikan, namun tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat dan dunia usaha.
 - Meningkatkan kualitas layanan yang lebih baik dari unit pelaksana retribusi akan mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi.
 - Melakukan penyisiran objek retribusi dengan mengidentifikasi potensi objek retribusi baru yang muncul seiring dengan pertumbuhan kota dan layanan publik.
3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (BUMD) dan Aset Daerah Lainnya
 - Pengembangan dan Penyehatan BUMD: Fokus pada peningkatan kinerja dan

profitabilitas BUMD melalui tata kelola yang baik, inovasi bisnis, dan efisiensi operasional. Proyeksi penerimaan pembiayaan dari divestasi BUMD pada tahun 2022 menunjukkan potensi pemanfaatan aset, namun ke depan fokus harus pada penguatan kinerja inti BUMD yang dipertahankan.

- Optimalisasi Aset Non-Produktif: Mengidentifikasi dan memanfaatkan aset-aset daerah yang belum produktif melalui kerja sama dengan pihak ketiga, penyewaan, atau pengembangan untuk meningkatkan pendapatan daerah.
4. Meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana transfer.
- Meskipun Dana Transfer merupakan pendapatan yang cenderung fluktuatif karena kebijakan pusat, pemerintah daerah perlu memastikan penyerapan yang optimal dan akuntabel sesuai peruntukannya. Penyerapan yang baik akan mendukung evaluasi positif dari pemerintah pusat dan berpotensi menjaga alokasi dana transfer di masa mendatang.
 - Penguatan Kapasitas Perencanaan: Meningkatkan kapasitas perencanaan dalam pengajuan proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik agar sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah, sehingga alokasi dana dapat maksimal.
5. Optimalisasi opsen pajak daerah

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, termasuk Kota Salatiga, mendapatkan bagian dari opsen pajak (opsen Pajak Kendaraan Bermotor/PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/BBNKB) yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi. Dalam kerangka ini, Pemerintah Kota memiliki tanggung jawab untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak tersebut melalui berbagai kegiatan strategis dan penganggaran yang memadai

e. Pendataan objek dan subjek pajak

Strategi ini berfokus pada peningkatan akurasi dan kelengkapan data untuk mengidentifikasi potensi pajak secara optimal.

- Melakukan pemutakhiran data kepemilikan kendaraan bermotor di wilayah Kota Salatiga:
- Membangun database lokal hasil kolaborasi dengan UPPD/Dispenda Provinsi Jawa Tengah
- Integrasi data objek kendaraan bermotor dengan data kependudukan dan UMKM:

f. Sosialisasi Pajak dan Opsen

Menekankan pentingnya edukasi dan komunikasi persuasif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

- Kampanye tahunan kepatuhan pajak kendaraan dengan pendekatan edukatif dan partisipatif:

- Penyebarluasan informasi tentang pentingnya pembayaran pajak melalui media sosial, radio lokal, dan kegiatan kecamatan dan kelurahan
 - Pelibatan tokoh masyarakat dan komunitas motor untuk meningkatkan jangkauan pesan
- g. Penanganan Tunggakan Pajak
- Strategi ini berfokus pada penegakan dan insentif untuk mengatasi masalah wajib pajak yang menunggak.
- Penyusunan daftar penunggak PKB/BBNKB secara periodik bersama Bapenda Provinsi
 - Kegiatan penagihan bersama (joint operation) antara OPD teknis, kepolisian, dan provinsi
- h. Pengalokasian dana Opsen Pajak
- Poin ini menjelaskan komitmen pemerintah daerah dalam menginvestasikan kembali sebagian penerimaan pajak untuk mendukung peningkatan pendapatan itu sendiri. Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (4) UU HKPD, dana opsen pajak yang diterima Pemerintah Daerah harus digunakan untuk mendanai kegiatan yang mendukung peningkatan penerimaan PKB dan BBNKB. Pemerintah Kota Salatiga akan mengalokasikan anggaran secara khusus dalam APBD untuk pengadaan sistem dan perangkat pendukung pendataan pajak kendaraan, biaya operasional sosialisasi dan edukasi pajak, dukungan kegiatan razia kendaraan bermotor bekerja sama dengan kepolisian dan pengembangan aplikasi dashboard atau pelaporan berbasis wilayah.



Tabel 2.64. Proyeksi Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2030

NO	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
II.	BELANJA	1.047.089.121.157,00	1.078.347.420.432,54	1.109.605.719.708,08	1.140.864.018.983,61	1.186.122.318.259,15	1.202.706.412.084,69
II.1	BELANJA OPERASI	931.505.931.461,00	958.242.336.473,59	985.653.509.702,17	1.013.064.682.930,76	1.040.475.856.159,34	1.067.887.029.387,93
1.	Belanja Pegawai	427.366.748.499,00	438.050.917.211,48	448.735.085.923,95	459.419.254.636,43	470.103.423.348,90	480.787.592.061,38
2.	Belanja Barang dan Jasa	477.914.414.746,00	494.641.419.262,11	511.368.423.778,22	528.095.428.294,33	544.822.432.810,44	561.549.437.326,55
3.	Belanja Bunga						
4.	Belanja Subsidi	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
5.	Belanja Hibah	24.656.918.216,00	24.000.000.000,00	24.000.000.000,00	24.000.000.000,00	38.000.000.000,00	24.000.000.000,00
6.	Belanja Bantuan Sosial	1.417.850.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00
II.2	BELANJA MODAL	112.583.189.696,00	117.105.083.958,95	120.952.210.005,91	124.799.336.052,86	128.646.462.099,81	131.819.382.696,76
1.	Belanja Tanah	1.604.899.115,00	1.669.359.751,80	1.724.201.413,37	1.779.043.074,94	1.833.884.736,52	1.879.115.445,22
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	37.736.888.834,00	39.252.587.772,54	40.542.110.376,73	41.831.632.980,91	43.121.155.585,10	44.184.690.489,11
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	33.183.067.192,00	34.515.862.270,62	35.649.774.380,03	36.783.686.489,44	37.917.598.598,85	38.852.793.610,18
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	38.029.190.855,00	39.556.630.079,42	40.856.141.055,06	42.155.652.030,70	43.455.163.006,35	44.526.935.828,52
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.902.373.400,00	1.978.782.066,22	2.043.788.842,79	2.108.795.619,36	2.173.802.395,93	2.227.416.792,19
6.	Belanja Aset Lainnya	126.770.300,00	131.862.018,34	136.193.937,92	140.525.857,49	144.857.777,07	148.430.531,55
II.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
1	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00

Sumber: BPKPD Kota Salatiga.2025

Belanja daerah Kota Salatiga memegang peranan fundamental dan tak terpisahkan dari pencapaian tujuan, sasaran, serta prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029. Setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD pada dasarnya merupakan instrumen utama untuk menerjemahkan visi, misi, dan strategi pembangunan daerah menjadi aksi-aksi konkret. Alokasi belanja daerah secara langsung mencerminkan prioritas pemerintah Kota Salatiga. Struktur dan besaran anggaran belanja adalah merupakan cerminan nyata dari komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan program-program yang dirancang untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Belanja daerah Kota Salatiga tahun 2025-2030 utamanya diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan daerah yang antara lain difokuskan pada:

1. Pencapaian sasaran pembangunan daerah yang meliputi:
 - a. Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul
 - b. Terwujudnya transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan
 - c. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Digital
 - d. Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan
2. Antisipasi terhadap dampak tantangan dinamika geopolitik dan pengetatan kebijakan moneter global, serta kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun nonalam;
3. Usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD dan masukan masyarakat dari beragam forum musyawarah serta koordinasi perencanaan, akan diakomodasi dengan tetap mempertimbangkan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku
4. Sinergi terhadap dukungan program prioritas pembangunan provinsi maupun nasional yang dilaksanakan di Kota Salatiga.

Sebagaimana arah kebijakan belanja daerah tersebut diatas, maka struktur belanja daerah Kota Salatiga tahun 2026-2030 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja perangkat daerah bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; belanja pegawai termasuk belanja pegawai untuk PPPK dan CPNS, memperhitungkan jumlah pegawai yang pensiun serta penyesuaian tambahan penghasilan pegawai; Pemenuhan belanja pegawai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah

- Pusat dan Pemerintahan Daerah, maksimal 30% pada tahun 2027 melalui penguatan kinerja pegawai dengan memaksimalkan potensi SDM pegawai sesuai dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja. Selain itu akan dilakukan peninjauan kembali besaran tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan kinerja yang dicapai. Pada tabel proyeksi masih terlihat lebih dari 30% karena di dalamnya masih termuat belanja tunjangan guru.
- b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktivitas dengan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, manfaat; Belanja barang dan jasa diantaranya digunakan untuk operasional pelayanan rumah sakit, penyelenggaraan pendidikan sekolah, jaminan kesehatan masyarakat miskin, pemberian bibit/benih tanaman, asuransi petani/peternak dan dukungan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Belanja hibah antara lain digunakan untuk dukungan pelaksanaan pilkada serentak, partai politik, instansi vertikal dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah, pembinaan kepemudaan dan olahraga;
 - e. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset; Belanja Modal diantaranya untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana;
 3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi :

- 1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa) meliputi :
- a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan.

Proyeksi belanja daerah ke depan juga menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan belanja daerah. Oleh karena itu, belanja daerah bukan sekadar pengeluaran, melainkan investasi strategis yang menjadi mesin pendorong utama untuk mewujudkan Kota Salatiga yang Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga Mendunia menjadi kenyataan, dan keberhasilannya diukur dari sejauh mana sasaran RPJMD dapat tercapai secara optimal.

Sumber penerimaan pembiayaan Kota Salatiga sangat didominasi oleh Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Untuk sebagian besar periode (2025-2028 dan 2030), SILPA diproyeksikan konsisten berdasarkan pada perhitungan tren tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2029, terdapat lonjakan signifikan dalam total penerimaan pembiayaan, di mana sepenuhnya disebabkan oleh adanya Pencairan Dana Perimbangan yang digunakan untuk pelaksanaan Pilkada ditahun tersebut.

Proyeksi pengeluaran pembiayaan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah diproyeksikan stabil pada angka Rp 1.500.000.000 setiap tahun dari 2025 hingga 2030, mengacu pada realisasi tahun-tahun sebelumnya. Ini menunjukkan komitmen konsisten pemerintah daerah untuk berinvestasi pada entitas atau proyek yang diharapkan memberikan manfaat jangka panjang. Pada tahun 2027-2028, terjadi peningkatan signifikan dalam pengeluaran pembiayaan pada tahun 2027 dan 2028, yaitu menjadi Rp 8.500.000.000 dari yang sebelumnya Rp 1.500.000.000. Lonjakan ini sepenuhnya disebabkan oleh alokasi untuk Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp 7.000.000.000 pada kedua tahun tersebut. Pembentukan dana cadangan ini mengindikasikan upaya strategis pemerintah daerah untuk menyiapkan dana bagi kebutuhan persiapan pilkada ditahun 2029.



Tabel 2.65. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2030

NO	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
III	PEMBIAYAAN						
III.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	36.006.356.517,00	36.006.356.517,00	36.006.356.517,00	36.006.356.517,00	50.006.356.517,00	36.006.356.517,00
1.	Penggunaan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA)	36.006.356.517,00	36.006.356.517,00	36.006.356.517,00	36.006.356.517,00	36.006.356.517,00	36.006.356.517,00
2.	Pencairan Dana Perimbangan	-	-	-	-	14.000.000.000	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
III.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000	1.500.000.000	8.500.000.000	8.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
1.	Pembentukan Dasa Cadangan	-	-	7.000.000.000	7.000.000.000	-	-
2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
3.	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
III.3	PEMBIAYAAN NETTO	34.506.356.517,00	34.506.356.517,00	27.506.356.517,00	27.506.356.517,00	48.506.356.517,00	34.506.356.517,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/ SILPA	-	-	-	-	-	-

Keterbatasan APBD Kota Salatiga dalam melaksanakan pembangunan diperlukan alternatif lain dukungan sumber pendanaan, antara lain dengan memanfaatkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari berbagai perusahaan yang ada Salatiga. Potensinya cukup besar mengingat Kota Salatiga sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Pemanfaatan dana CSR dapat menjadi solusi kolaboratif dengan pemerintah daerah dalam menutupi kekurangan anggaran tersebut. Misalnya, CSR dapat diarahkan pada pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, sanitasi, serta infrastruktur publik sederhana. Dengan demikian, beban APBD dapat berkurang, sementara kualitas pelayanan publik tetap meningkat secara signifikan.

Agar pemanfaatan dana CSR lebih efektif, dibutuhkan sinergi yang kuat antara Pemerintah Kota Salatiga, perusahaan, dan masyarakat. Pemerintah daerah berperan dalam menyusun regulasi serta peta kebutuhan pembangunan, sementara perusahaan menyalurkan dana CSR sesuai dengan prioritas tersebut. Melalui pengelolaan yang transparan, terukur, dan berorientasi pada keberlanjutan, pemanfaatan CSR tidak hanya mendukung pembangunan daerah tetapi juga menciptakan iklim investasi yang sehat. Keberhasilan integrasi CSR dengan pembangunan daerah dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat dan memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan.

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan pembangunan daerah memberikan gambaran suatu kondisi atau keadaan yang memiliki perbedaan antara kondisi aktual dan kondisi yang diinginkan. Kondisi tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil evaluasi dan kajian terhadap capaian kinerja pembangunan daerah, sehingga dihasilkan gap atau perbedaan antara kinerja daerah atau kondisi masyarakat dengan kondisi ideal yang diharapkan. Isu strategis dalam RPJMD Kota Salatiga tahun 2025-2029 secara umum adalah masalah atau tantangan penting yang berdampak besar pada keberhasilan atau kegagalan tujuan jangka menengah daerah. Isu strategis pembangunan daerah bersifat kompleks, meliputi berbagai faktor, dan memerlukan perhatian serta tindakan dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam menetapkan kebijakan dan program upaya dalam penyelesaiannya.

2.6.1. Permasalahan

Permasalahan pembangunan daerah Kota Salatiga mengacu pada hasil analisis kondisi pembangunan daerah dan laporan KLHS RPJMD tahun 2025-2029. Permasalahan pembangunan daerah digambarkan berdasarkan masing-masing aspek sebagai berikut:

1. Permasalahan Pada Aspek Geografi dan Demografi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dari aspek geografi dan demografi Kota Salatiga, yaitu:

- a. Kota Salatiga belum mampu menarik arus investasi dan arus logistik regional secara maksimal meskipun berada di jalur strategis Semarang–Solo, yang ditunjukkan dengan pertumbuhan kontribusi sektor Industri Pengolahan mengalami penurunan sebesar 3,77% ditahun 2024, dibandingkan tiga tahun sebelumnya yang sudah berada di atas 4%.
- b. Masih kurangnya pemanfaatan sumberdaya alam terutama dalam pengembangan potensi wisata guna mendukung perkembangan ekonomi masyarakat Kota Salatiga, yang ditunjukkan dengan pertumbuhan pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum pada tahun 2024 menurun sebesar 6,45%, dibandingkan kondisi tahun 2023 sebesar 11,43%,
- c. Faktor risiko bencana longsor pada beberapa wilayah yang berada pada ketinggian dan kemiringan dengan tingkat kemiringan yang tinggi seperti di Kelurahan Blotongan, Bugel, dan Sidorejo Lor. Sementara itu, hampir diseluruh kelurahan memiliki potensi kekeringan sedang, sedangkan beberapa kelurahan dengan risiko bencana banjir sedang antara lain Kelurahan Kumpulrejo, Ledok, Randuacir, Dukuh, Blotongan, Bugel, Kauman Kidul, Sidorejo Lor, Pulutan dan hampir diseluruh kelurahan di Kecamatan Tingkir di luar Kelurahan Kalibening.
- d. Berdasarkan hasil perhitungan ketersediaan lahan (LS) dan kebutuhan lahan (DL) Status Daya Dukung Lahan : $SL (18.623 \text{ Ha}) < DL (46.251 \text{ Ha})$, dinyatakan defisit atau terlampaui. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa daya dukung lahan Kota Salatiga tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup layak penduduk.
- e. Penduduk lansia Kota Salatiga berada diangka 14,35% mengacu pada piramida penduduk menunjukkan kenaikan jumlah penduduk lansia, yang menimbulkan tekanan besar pada sistem jaminan sosial, pensiun, dan pelayanan kesehatan yang harus disediakan oleh Pemerintah Kota Salatiga.

2. Permasalahan Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada peningkatan aspek kesejahteraan masyarakat Kota Salatiga, yaitu:

- a. Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga menunjukkan tren fluktuatif, dengan kondisi melambat ditahun 2024 sebesar 5,37% dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,53%. Hal tersebut mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut untuk mencapai stabilitas dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih konsisten yang didukung dengan mempercepat laju pertumbuhan investasi agar berkontribusi lebih besar pada perekonomian daerah.
- b. Optimalisasi penurunan angka kemiskinan untuk mencapai target Kota Salatiga bebas kemiskinan ekstrem dalam mendukung target SDGs pada tahun 2030 nol persen dengan kondisi kemiskinan tahun 2024 berada di angka 4,57%.

- c. PDRB Per Kapita Kota Salatiga pada tahun 2024 sebesar 89,93 juta rupiah masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa kota lain di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kota Magelang, Kota Surakarta, dan Kota Semarang.
- d. Masih terdapat angkatan kerja yang belum terserap yang ditunjukkan dengan tingkat pengangguran terbuka Kota Salatiga berada diangka 3,86% ditahun 2024.
- e. Tingginya dan cenderung meningkatnya ketimpangan pendapatan penduduk di Kota Salatiga. Hal ini tercermin dari Indeks Gini Kota Salatiga (0,402) yang secara konsisten berada di atas Indeks Gini Nasional (0,379) dan Provinsi Jawa Tengah (0,367).
- f. Prevalensi stunting di Kota Salatiga pada tahun 2024 mencapai 5,92%, yang merepresentasikan sejumlah balita yang mengalami stunting, sehingga memastikan intervensi dilakukan efektif dan berkelanjutan untuk mencegah kenaikan kembali di masa mendatang.
- g. Masih terdapat penduduk belum mencapai jenjang pendidikan minimal pendidikan menengah dengan kondisi pada tahun 2024 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 11,48 tahun dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 15,46 tahun.
- h. Memastikan tidak ada lagi kesenjangan literasi dan numerasi di antara kelompok siswa yang berbeda, seperti berdasarkan latar belakang sosial-ekonomi atau wilayah tempat tinggal dengan kondisi Angka Literasi dan Numerasi siswa SD dan SMP di Kota Salatiga pada tahun 2024 sebesar 91,14.
- i. Masih terdapat lebih dari separuh (sekitar 56,4%) tenaga kerja di Kota Salatiga yang belum tercakup kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja.
- j. Implementasi kebijakan Universal Health Coverage (UHC) di Kota Salatiga masih belum tercapai 100% dengan masih terdapat penduduk Kota Salatiga yang belum memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan, dengan kondisi ditahun 2024 sebesar 99,73%.
- k. Masih terdapat potensi timbulnya kerentanan minor yang mengganggu kerukunan masyarakat di tengah dinamika masyarakat yang terus berkembang walaupun dengan kondisi Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kota Salatiga sebesar 78,98 di tahun 2024.
- l. Meningkatnya ketimpangan gender dalam pembangunan yang ditunjukkan dengan kenaikan Indeks Kesenjangan Gender pada tahun 2024 sebesar 0,22 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 0,143.

3. Permasalahan Pada Aspek Daya Saing Daerah

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada aspek daya saing daerah Kota Salatiga, yaitu:

- a. Peningkatan angka ketergantungan penduduk dengan kondisi angka ketergantungan sebesar 42,76 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung antara 42-43 penduduk usia tidak produktif.
- b. Terjadinya penurunan Rasio PDRB Industri Pengolahan Kota Salatiga sebesar 0,54% dalam lima tahun terakhir mengindikasikan adanya potensi stagnasi atau bahkan kontraksi dalam kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah.
- c. Melambatnya kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kota Salatiga dengan kenaikan sebesar 0,8% selama lima tahun terakhir.
- d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Salatiga terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2024, kembali ke 70,72% setelah mencapai puncaknya di 72,09% pada tahun 2023.
- e. Upaya inovasi di Kota Salatiga belum sepenuhnya stabil atau menghadapi hambatan periodik, dengan kondisi inovasi pada tahun 2024 berada diangka 51,1 tahun 2024,
- f. Melemahnya aktivitas investasi fisik di sektor-sektor produktif dalam perekonomian Kota Salatiga, yang terlihat dari penurunan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,92 dalam lima tahun terakhir yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
- g. Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik belum mencapai kondisi maksimal ditahun 2024 (89,79%) dibandingkan kondisi lima tahun sebelumnya (2020: 96,21%) yang menggambarkan penurunan drastis menunjukkan adanya kerentanan dalam pemeliharaan atau perluasan infrastruktur yang tidak seimbang.
- h. Belum semua lapisan masyarakat dapat menikmati hunian yang memenuhi standar kelayakan kondisi ditahun 2024 masih berada diangka 94,80%.

4. Permasalahan Pada Aspek Pelayanan Umum

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada aspek pelayanan umum Kota Salatiga, yaitu:

- a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Salatiga belum sepenuhnya stabil dan konsisten di setiap periode, dengan melihat fluktuasi data dalam lima tahun terakhir.
- b. Belum optimalnya upaya memastikan implementasi reformasi hukum merata dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan kondisi Indeks Reformasi Hukum Kota Salatiga pada tahun 2024 yang sudah tinggi mencapai 98,36.
- c. Belum optimalnya upaya memastikan bahwa seluruh layanan pemerintahan benar-benar terdigitalisasi secara optimal dan diakses secara merata oleh semua warga, dengan kondisi indeks SPBE ditahun 2024 sebesar 3,64.

- d. Pemerintah belum bisa memastikan kualitas pelayanan publik belum sepenuhnya stabil dan konsisten dengan kondisi ditahun 2024 sebesar 4,64.
- e. Belum optimalnya daya saing daerah yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Salatiga sebesar 3,77 lebih rendah dari IDSD Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,89 dan berada di posisi tiga terendah bersama Kota Tegal dan Kota Pekalongan.

2.6.2. Isu Strategis

1. Isu Strategis Global

Terdapat beberapa isu global yang menjadi perhatian dalam merumuskan isu strategis pembangunan daerah, yaitu:

a. Demografi Global

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Menurut data *World Population Prospects (2022)*, populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan (*life-span*) yang semakin panjang.

Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, namun laju pertumbuhannya terus melambat. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045 masing-masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan.

Dalam demografi skala mikro, perubahan struktur dan bentuk keluarga, perkembangan teknologi digital, serta penetrasi global memengaruhi kualitas keluarga. Mobilitas penduduk dan pergeseran ideologi berisiko memunculkan struktur dan bentuk keluarga yang berbeda. Semakin maraknya fenomena tidak memiliki anak (*childfree*), menunda pernikahan, dan perilaku kehidupan sesama jenis telah menyebabkan turunnya angka kelahiran. Sementara itu, perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di negara berkembang. Akses terhadap

media digital yang tidak terkendali berisiko meningkatkan kekerasan, perdagangan manusia, adiksi terhadap pornografi, perilaku menyimpang, dan perilaku berisiko anggota keluarga. Hal-hal tersebut menjadi tantangan bagi keluarga dalam memaknai dan menjalankan fungsinya secara optimal.

Kecenderungan penduduk dunia akan terkonsentrasi di kawasan Asia dan Afrika yang disertai dengan munculnya kelompok negara yang memainkan perekonomian global. Populasi penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan ekonomi stabil, menjadi daya tarik investor di kawasan tersebut. Pada saat bersamaan, beberapa negara berkembang di kawasan Asia berpotensi menjadi pemimpin teknologi dan inovasi serta perekonomian dunia di masa mendatang.

b. Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan antarnegara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan.

Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia, telah menarik perhatian banyak pihak. Hal ini kemudian berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antarnegara, baik yang berada di kawasan maupun di luar kawasan.

Indonesia menyikapi kontestasi geopolitik kawasan Indo-Pasifik tersebut dengan mengedepankan ASEAN *Outlook on the Indo-Pacific* untuk memperkuat kerja sama dan meredam friksi di kawasan. Indo-Pasifik memiliki arti strategis sebagai ekosistem perdamaian, stabilitas dan kemakmuran untuk menciptakan peluang ekonomi baru yang inklusif di kawasan melalui perluasan dan peningkatan kerja sama antarnegara.

Krisis di berbagai sektor memiliki risiko ancaman kestabilan geopolitik ke depan. Risiko lingkungan, risiko sosial, dan ancaman siber berpotensi mendisrupsi stabilitas geopolitik. Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Tantangan- tantangan yang bersifat tanpa batas (*borderless*) membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor baik di dalam negeri maupun internasional.

Terkait Geoekonomi, Nilai output dunia negara berkembang semakin dominan. Pada tahun 2015, negara berkembang menyumbang 55 persen dari nilai output dunia, meningkat dari 34 persen pada tahun 1980. Pada tahun 2050, nilai output negara-negara berkembang diperkirakan meningkat mencapai 71 persen dari total nilai output dunia dengan negara Asia sebagai pendorong utama mencapai 54 persen dari total nilai output global. Peranan negara maju (G7) akan mengecil dengan kontribusi terhadap nilai output yang menurun dari 32 persen pada tahun 2015 menjadi 20 persen pada tahun 2050. Secara umum, pendapatan per kapita negara-negara maju tetap lebih tinggi dari negara berkembang. Meskipun demikian, 84 negara berkembang pada tahun 2050 diperkirakan akan memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi daripada negara-negara Eropa Selatan pada tahun 2015.

Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Sebagian besar negara berkembang selama 60 puluh tahun terakhir mengandalkan ekspor komoditas sebagai sumber pertumbuhan ekonomi 54 persen ekspor negara di kawasan Amerika Latin berbasis pada produk komoditas, 81 persen di Afrika, dan 75 persen di negara kawasan Timur Tengah. Perubahan struktur perekonomian, utamanya di negara pengimpor komoditas menurunkan permintaan atas komoditas. Kesiapan menghadapi perubahan atas komoditas akan menentukan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di masa mendatang.

Institusi ekonomi sebagai sumber pertumbuhan negara berkembang. Kebijakan makroekonomi yang kredibel dan berdasarkan prinsip kehati-hatian telah menjadi penopang pertumbuhan ekonomi negara berkembang selama ini dan menjadi salah satu pilar utama di masa

mendatang. Investasi jangka panjang dalam memperbaiki sumber daya manusia dan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Reformasi dan perbaikan iklim usaha akan mendukung terbangunnya struktur perekonomian yang berdaya saing dan berkualitas.

Dengan kebijakan yang tepat, negara berkembang mempunyai peluang mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari negara maju. Negara berkembang memiliki struktur demografi yang menguntungkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum, pertumbuhan sektor industri manufaktur akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja di negara berkembang. Kawasan Asia akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari tingkat tabungan yang tinggi dan peningkatan produktivitas. Perbaikan investasi dan perkembangan sektor jasa bernilai tambah tinggi akan menjadi sumber pertumbuhan di negara-negara di kawasan Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Kebijakan perdagangan internasional yang terbuka, iklim usaha dan investasi yang mendukung inovasi, serta kapasitas sumber daya manusia yang meningkat menjadi faktor penentu bagi negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan teknologi percepatan pertumbuhan ekonominya.

Perekonomian global pada tahun 2050 pada tahun 2050 akan meningkat sebanyak 3 kali lipat dibanding tahun 2015. Pada tahun 2015 perekonomian global adalah sebesar USD 74,0 triliun, dengan kontribusi Amerika Serikat sebesar USD 17,9 triliun, Tiongkok sejumlah USD 11,0 triliun, dan India senilai USD 2,1 triliun (IMF, *World Economic Outlook*, Oktober 2016). Pada tahun 2050, nilai perekonomian dunia diperkirakan meningkat sebanyak 3 kali lipat dengan kontribusi dari 5 negara terbesar (Tiongkok, India, AS, Jepang, & Indonesia) mencapai kurang lebih 55 persen dari nilai output dunia.

c. Disrupsi Teknologi

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti *Internet of Things* (IoT), *blockchain*, *Hyper Connection*, *Artificial Intelligence* (AI), *Distributed Ledger Technology* (DLT), *Production Lifecycle Management*, *Robotic Process Automation* (RPA), *Edge Computing*, *Auto Robotic System*, 3D, dan *Future Technologies*.

Disrupsi teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan berbagai bentuk disrupsi teknologi perlu ditopang dengan kemampuan

literasi dan pola pikir yang baik. Hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan secara optimal disrupsi teknologi yang diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi.

Pandemi COVID-19 telah mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor. Selama pandemi, banyak pelaku usaha seperti UMKM dan koperasi mengembangkan digitalisasi usaha untuk menjaga keberlangsungan proses bisnis. Digitalisasi usaha dapat mendorong peningkatan produktivitas serta pasar usaha. Meskipun demikian, tingkat pemanfaatan teknologi digital dalam operasional usaha masih terbatas dan belum merata karena faktor sumber daya manusia, permodalan, dan infrastruktur penunjang. Faktor penghambat pemanfaatan teknologi dan digital perlu diatasi karena penggunaan teknologi dan digital dapat mendorong efektivitas dan efisiensi usaha sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

Disrupsi teknologi yang berkembang di masa depan akan memengaruhi sektor manufaktur. Perubahan teknologi mencakup percepatan otomasi di sebagian besar aktivitas industri seperti: nanotechnology; *blockchain*; robotika cerdas, IoT, AI dan teknologi imersif; digitalisasi yang mendukung konektivitas; material maju; rekayasa genetik dan bioteknologi; teknologi lanjutan dari *additive manufacturing* (3D printing, rapid prototyping, powder bed system, dan lainnya); inovasi mesin multifungsi yang mengintegrasikan proses produksi komponen dan produk akhir untuk rantai pasok terlokalisasi; serta teknologi hijau, termasuk untuk penyediaan energi baru terbarukan.

Disrupsi teknologi di masa depan juga akan memengaruhi sektor pendidikan. Inovasi pengajaran dan pembelajaran yang berbasis *artificial intelligence* (AI) menjadi sebuah keniscayaan sehingga transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan kompetensi dapat berlangsung kontinu, tanpa terbatas ruang dan waktu. Melalui pemanfaatan AI, penyelenggaraan pendidikan akan menjadi lebih efisien, efektif, transparan, dan ekonomis.

Disrupsi teknologi menyebabkan jenis pekerjaan tergantikan oleh teknologi. Saat ini, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Industri media termasuk yang paling terdampak dan hanya meninggalkan sedikit pelaku usaha yang mampu bertahan di tengah gempuran disrupsi. Bahkan, pekerjaan yang membutuhkan aspek kreatif (seni dan hiburan) dalam jangka panjang juga berisiko tergantikan atau setidaknya tersaingi oleh kemajuan teknologi dengan perkembangan pesat kecerdasan buatan.

Selain itu, disrupsi teknologi juga berdampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi. Pekerjaan jarak jauh (*remote working*) menciptakan peluang di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan mendorong perkembangan sektor lain yang mendukung pola *work from anywhere* (WFA). Akan tetapi, di sisi lain hal tersebut akan memukul sektor yang selama ini bertumpu pada pola kerja konvensional, seperti properti perkantoran dan *real estate*. Pola kerja jarak jauh mengasumsikan terbangunnya kepercayaan antara pekerja dan pemberi kerja sehingga kualitas hasil pekerjaan terjaga.

Di sisi lain, disrupsi teknologi dapat berdampak besar terhadap cara kerja pemerintah. Disrupsi teknologi membuka peluang baru dalam pembangunan ekonomi, mendorong inovasi dan transformasi tata kelola melalui peningkatan kinerja pelayanan publik, pembuatan kebijakan berbasis bukti, serta efisiensi sumber daya. Peralihan menuju era digital dalam konteks tata kelola akan mendorong pemerintah untuk mendesain ulang proses bisnis pelayanan publik dan mengubah pola interaksi di antara masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah.

Disrupsi teknologi dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan proses perumusan kebijakan, termasuk dalam penyusunan regulasi. Pemanfaatan teknologi dapat membantu mewujudkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih terencana, terpadu, dan sistematis serta penataan kelembagaan negara. Teknologi dan informasi membantu adanya interkoneksi di setiap tahapan/proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mendorong penataan regulasi, memetakan berbagai regulasi yang berpotensi tumpang tindih secara vertikal maupun horizontal, mengkaji regulasi yang inkonsisten, meningkatkan partisipasi publik dalam semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta membantu menganalisis dan evaluasi pelaksanaan regulasi.

d. Urbanisasi Dunia

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Menurut UN DESA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara *emerging economies*. Di Asia sendiri, dalam empat dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan ukuran kota. Berdasarkan data UN, pada tahun 2020 terdapat 23 *megacities*, yaitu kota dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa di dunia (di mana lebih separuhnya berada di negara

emerging economies). Jumlah ini meningkat pesat sejak tahun 1970, di mana pada saat itu dunia hanya memiliki dua *megacities*.

Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara *emerging economies* yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Pada banyak kota Asia dan Afrika, sekitar 25–30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai. Urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyerak ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa. Dari sisi ekonomi, terjadi perubahan aktivitas penduduk ke arah dominasi sektor industri, jasa, dan perdagangan. Tren ini mendorong perubahan paradigma pengelolaan perkotaan ke arah kompak (*compact*) melalui efisiensi layanan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat memacu inovasi di kawasan perkotaan, khususnya dalam mengatasi masalah yang timbul sehari-hari. Pendekatan teknologi pintar dan pengelolaan informasi berbasis maha data ke depan akan menjadi kunci bagi upaya kawasan perkotaan untuk menjadi yang terdepan. Di sisi lain, dampak pandemi COVID-19, di samping menimbulkan kerugian jiwa dan material, juga menjadi pemicu perkembangan teknologi yang memudahkan proses kolaborasi lintas ruang dan waktu. Tantangan terhadap pengarusutamaan pendekatan hijau juga menjadi peluang bagi penerapan kebijakan yang bukan hanya humanis, melainkan juga ramah lingkungan. Kota yang mampu beradaptasi terhadap transformasi pasca pandemi dan pengarusutamaan pendekatan hijau tersebut akan mampu menarik SDM kompetitif untuk menetap dan berkarya.

e. Perdagangan Internasional

Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang mendorong berpusat di kawasan Asia-Afrika. Perekonomian Negara berkembang terutama negara E7 diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi dari negara maju yang tergabung dalam G7. Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan intra-Asia yang menunjukkan tren yang berlanjut terutama dari Tiongkok, India dan negara-negara ASEAN. Selain itu, peningkatan pendapatan serta proyeksi peningkatan demografi penduduk di Kawasan Afrika, Nigeria dan beberapa negara di Afrika

Selatan, mendorong perdagangan internasional bergerak ke kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi.

Kolaborasi produksi bersama internasional (*global production networks/GPN*) dan rantai pasok global (*global value chain/GVC*) semakin menguat dan terdiversifikasi. Skema GPN dan GVC menjadi salah satu pilihan utama bagi industri dalam melakukan produksi. Manfaat ekonomi yang diperoleh dari GPN dan GVC tidak hanya mendapatkan keuntungan dari biaya produksi yang lebih murah, tetapi juga meningkatkan penerimaan investasi asing dan perdagangan internasional bagi suatu negara. Sementara itu, Kawasan Asia Timur dan ASEAN akan berkembang sebagai pusat GVC dunia seiring dengan infrastruktur yang memadai, pangsa pasar yang substansial, dan kompetensi SDM industri yang berkualitas, khususnya dalam memproduksi barang manufaktur berorientasi ekspor.

Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecepatan perubahan teknologi dan digital, dan keberlanjutan yang terus berkembang. Perkembangan teknologi digital mendorong kompleksitas dan diversifikasi produksi. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengurangi biaya transaksi dan mempercepat perubahan dalam struktur perdagangan. Negara yang dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan digital, memanfaatkan hilirisasi sumber daya alam dan mineral untuk memproduksi produk yang lebih kompleks dan berkelanjutan, berpeluang semakin memiliki peran penting dalam rantai nilai perdagangan global.

Kerja sama Kawasan menciptakan hub perdagangan strategis. Kerja sama Kawasan seperti *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dan *Indo-Pacific Economic Framework* (IPEF) yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang signifikan, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geografis yang strategis, akan menciptakan peluang perdagangan yang lebih besar di kawasan Asia Pasifik yang mendorong ketersediaan rantai pasok global, investasi, serta inovasi dan teknologi. Dengan demikian, perdagangan internasional akan berpusat di Asia terutama Kawasan Indo-Pasifik.

f. Keuangan Internasional

Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dari sisi belanja negara, pergeseran komposisi demografi yang menuju *aging society* pada

tahun 2045 akan menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun. Dari sisi pembiayaan anggaran, tren ke depan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal.

Tren penggunaan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara. CBDC juga merupakan terobosan untuk mengatasi risiko stabilitas aset kripto yang berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi makro, moneter, dan sistem keuangan di masa depan.

Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupti dalam industri jasa keuangan. Berkembangnya berbagai inovasi teknologi seperti *Internet of Things* (IoT), *Cloud Computing*, *Artificial Intelligence* (AI), dan *Machine Learning* telah membawa perubahan yang signifikan pada industri jasa keuangan. Kedepannya puluhan juta pekerjaan pada jasa keuangan akan menghilang, tetapi akan tergantikan dengan pekerjaan baru dengan kemampuan (*skill*) yang baru. Sementara itu, munculnya perusahaan teknologi finansial (*financial technology*) seperti bank digital, dan keuangan terdesentralisasi telah meningkatkan efisiensi dan perluasan akses ke layanan keuangan, sekaligus sebagai pesaing industri keuangan. Namun, pertumbuhan pesat perusahaan teknologi finansial banyak mengandung risiko terlebih regulasi yang belum memadai dapat menimbulkan implikasi stabilitas keuangan.

g. Kelas Menengah

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia. Setiap tahunnya sekitar 140 juta orang masuk ke dalam status kelas menengah, lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Komposisi kelas menengah akan mengalami pergeseran dari sebelumnya yang didominasi oleh kawasan Eropa dan Amerika Serikat, bergeser ke kawasan Asia terutama Tiongkok dan India. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik.

Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru (*new life style*). Jenis pekerjaan baru yang diperkirakan berkembang di masa mendatang antara lain, pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, pekerjaan melalui *virtual- metaverse*, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan

mobilitas tinggi. Pekerjaan baru ini akan mempercepat dan mempermudah proses bisnis, tetapi di sisi lain berpotensi meningkatkan mobilitas pekerja antar sektor dan antar jenis pekerjaan.

h. Persaingan Sumber Daya Alam

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan, dan energi, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

i. Perubahan Iklim

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global - *The Triple Planetary Crisis*) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. *Triple planetary crisis* akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara *business-as-usual* (BaU) menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian serta limbah dan penerapan ekonomi sirkular.

Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global. Beberapa negara maju dan berkembang berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK secara ambisius, seperti Norwegia dengan target *net zero emission* pada tahun 2030, Spanyol dan Selandia Baru pada tahun 2050, serta Tiongkok dan Indonesia sendiri mendeklarasikan pada tahun 2060. Pelaksanaan jalur pembangunan yang lebih hijau melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon merupakan arah pembangunan global di masa mendatang.

Stimulus hijau dan paket-paket stimulus lainnya menjadi tren kebijakan global ke depan.

Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia. Kelangkaan sumber energi fosil dan isu perubahan iklim mendorong seluruh negara menggunakan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi utama. Teknologi energi terbarukan akan menjadi sangat kompetitif di masa mendatang. Skala keekonomian tenaga surya dan bayu akan semakin menurun dan murah ke depannya. Penggunaan teknologi nuklir pun akan turut memperhatikan aspek keselamatan melalui adopsi teknologi generasi IV yang dinamakan *Innovative Designs* termasuk skala lebih kecil atau *Small Modular Reactor* (SMR). Teknologi *elektrolisis Green Hydrogen* (GH2) dan fuel cell menunjukkan perkembangan yang positif, terutama untuk transportasi berat, seperti kendaraan truk, kereta api, kapal tanker, dan transportasi udara sebagai pengganti avtur, serta pemanfaatan GH2 sebagai feedstock industri petrokimia dan *green ammonia* untuk pupuk.

j. Pemanfaatan Luar Angkasa

Tren eksplorasi antariksa semakin meningkat selama satu dekade terakhir. Antariksa dipandang sebagai warisan bersama umat manusia (*common heritage of humankind*), yaitu suatu ruang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Ketetapan bahwa antariksa tidak tunduk pada kepemilikan suatu negara tertentu, telah mendorong banyak negara mengembangkan industri antariksa. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia di bumi. Proses menghubungkan bumi dengan luar angkasa kemudian memunculkan tiga isu utama, yaitu ekonomi antariksa (*space economy*), kelestarian antariksa (*space sustainability*), dan keamanan antariksa (*space security*).

Perekonomian antariksa secara global akan tumbuh secara signifikan untuk jangka waktu yang panjang. Ekonomi antariksa diperkirakan mencapai US\$469,0 miliar pada tahun 2021 dan diprediksi akan terus meningkat mencapai US\$1,0 triliun hingga tahun 2040. Nilai pasar ekonomi antariksa bahkan tumbuh sebesar 6,0 persen saat krisis COVID-19. Oleh karena itu, negara-negara diharapkan dapat meningkatkan kapasitas untuk mengeksplorasi luar angkasa secara khusus dalam hal pengembangan teknologi mutakhir dan kompetensi SDM.

2. Isu Strategis Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029,

terdapat 7 (tujuh) tantangan pembangunan lima tahun ke depan yang menjadi perhatian utama, yaitu:

(1) Rendahnya Produktivitas

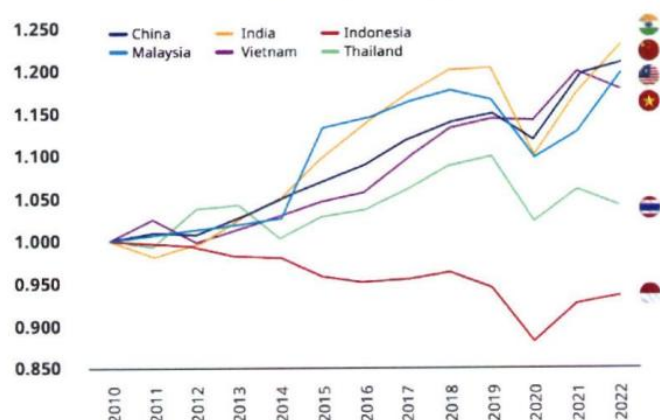
Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Mengacu pada rilis laporan *Asian Productivity Organization* (2024), rata-rata produktivitas Indonesia yang tecermin dari *Local Factor Productivity* selama tahun 2015-2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin dari periode sebelumnya tahun 2010-2015 (-0,9 persen ke -0,3 persen). Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,78 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode 1971-1995 dan Tiongkok sebesar 2,12 selama kurun waktu 2005-2022. Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya Produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan *daycare* berkualitas yang terjangkau.

Produktivitas yang rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat. Selama tahun 2005-2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2010-2015. Pertumbuhan ekonomi meningkat kembali mencapai rata-rata 5,0 persen selama tahun 2015-2019 dan 5,05 persen pada tahun 2023.

Rata-rata Pertumbuhan TFP
Index Antar negara



Total Factor Productivity Index
2010-2022 (2010=1,0)



Sumber: Asian Productivity Organization (2024), diolah

Selain itu, produktivitas yang rendah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat dan stagnan dalam rentang 5,0 persen.

(2) Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan *Asian Productivity Organization* (2024), produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto per tenaga kerja tahun 2022 relatif rendah, yaitu sebesar US\$ 28.600 per pekerja. Angka tersebut masih tertinggal jauh di bawah Amerika Serikat US\$149.100 per pekerja dan di bawah rata-rata kawasan *Association of Southeast Asian Nations* sebesar US\$ 0,200 per pekerja. Tantangan peningkatan Produktivitas tenaga kerja di antaranya disumbang oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dari capaian rata-rata nilai *Programme for International Student Assessment* siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahun 2022. Angka tersebut menurun dibanding tahun 2018 dengan nilai rata-rata 382 serta masih tertinggal dibandingkan siswa dari negara-negara *The Organization for Economic Cooperation and Development* sebesar 488,33.

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukkan sebesar 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiyah sederajat ke bawah), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (sekolah menengah atas/ sekolah menengah kejuruan sederajat) sebesar 34,82 persen, dan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86 persen. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

(3) Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019-2024, jumlahnya meningkat sebesar 8,65 juta orang sehingga mencapai 137,5 juta orang atau sekitar 49,2

persen dari total populasi. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat sebanyak 12,72 juta orang dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, angka ini mencapai 67,69 juta atau 24,33 persen dari total populasi (Badan Pusat statistik, 2024). Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, populasi kelas menengah justru mengalami penurunan. Risiko pergeseran status ini, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Pada Agustus 2024, tercatat 46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (Kementerian Ketenagakerjaan, 2024) dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat.

Salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari deflasi yang terjadi pada komponen harga yang diatur pemerintah dan harga bergejolak. Menurut laporan lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2024), komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi dari 1,68 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,40 persen pada September 2024. Sementara itu, komponen harga bergejolak mengalami deflasi yang signifikan, dari 3,04 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,43 persen pada September 2024. Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha.

(4) Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

(5) Krisis Lingkungan

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (*triple planetary crisis*) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan sekitar 50-75 persen dari populasi

global berpotensi terdampak kondisi iklim yang mengancam jiwa pada tahun 2100 (*Intergovernmental Panel on Climate Change*, 2022). Kerusakan ekonomi akibat risiko bencana diperkirakan sebesar Rp.22,8 triliun per tahun (Kementerian Keuangan, 2023), sementara jumlah kematian selama 10 tahun terakhir mencapai 9.176 orang (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024).

Sekitar satu juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman kepunahan (*Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*, 2019). Sementara itu, risiko polusi udara merupakan penyebab penyakit dan kematian dini terbesar di dunia, serta menyebabkan hingga 4,2 juta kematian setiap tahun (*United Nations Framework Convention on Climate Change*, 2022). Indonesia merupakan negara dengan tingkat polusi tertinggi di Asia Tenggara dengan konsentrasi *particulate* mater 2,5 (*World Health organization*, 2021). Sekitar 70 persen dari 20 ribu sumber air minum rumah tangga yang diuji tercemar (Badan Pusat Statistik, 2022). Pada tahun 2020, sebanyak 40,3 persen timbulan sampah merupakan sampah makanan dan diproyeksikan akan menghasilkan 344 kg/kapita/tahun pada tahun 2045 (*Proyeksi Business-As-Usual, Report Food and Loss Waste in Indonesia*, 2021). Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi udara juga secara langsung akan menyebabkan krisis sumber daya alam.

Ekstraksi sumber daya alam di dunia meningkat tiga kali lipat dalam lima dekade terakhir dengan pertumbuhan lebih dari 2,3 persen per tahun. Indonesia sebagai negara dengan tingkat ekstraksi pertambangan terbesar ke-8 di dunia (*United Nations Environment Programme*, 2023), turut berkontribusi dalam krisis tersebut. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2022 menunjukkan masih terdapat 2.741 lokasi tambang ilegal yang berpotensi merusak lingkungan. Pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi serta kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) di tingkat global berpotensi mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah.

Risiko *Triple Planetary Crisis* berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler. Untuk itu, penyelarasan aspek pertumbuhan ekonomi dan lingkungan menjadi hal yang perlu diprioritaskan.

(6) Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai seluruh kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antar negara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan antar negara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan. Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia telah menarik perhatian banyak pihak. Tentu saja hal tersebut berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antarnegara, baik yang berada di dalam maupun luar kawasan.

Selanjutnya, ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Ekonomi dunia diproyeksikan tumbuh pada 3,2 persen selama 2024 dan 2025 (*International Monetary Fund*, 2024). Sementara itu, inovasi global diperkirakan menurun secara bertahap dari 6,8 persen pada 2023 menjadi 5,9 persen pada 2024 dan 4,5 persen pada 2025 (*International Monetary Fund*, 2024). Di sisi lain, prospek perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan jalur perdagangan, tecermin dari tingginya tingkat suku bunga global serta ketidakpastian akibat gejolak geopolitik.

Dalam jangka menengah, situasi suku bunga global yang relatif tinggi diperkirakan akan tetap berlanjut terlepas dari pemangkasan yang dilakukan oleh The Federal Reserve. Peningkatan laju inflasi mendorong bank sentral di seluruh dunia untuk menaikkan suku bunga acuan secara bersamaan sejak semester kedua tahun 2023, seperti *Bank of England* dan

The Federal Reserve. Kenaikan suku bunga acuan tersebut juga dilakukan di negara-negara anggota G20, seperti Brasil, India, dan Indonesia. Kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan secara bersamaan oleh bank-bank sentral di seluruh dunia akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpotensi memicu resesi ekonomi global.

Faktor gejolak geopolitik, tekanan inflasi, suku bunga yang tinggi, penguatan dolar Amerika Serikat, pergeseran belanja konsumen dari barang ke jasa, penurunan harga komoditas, serta tekanan harga pangan akibat kenaikan biaya input pertanian dan pertumbuhan populasi global, serta perubahan iklim juga menyebabkan perlambatan aktivitas perdagangan global pada tahun 2023 dan menjadi tantangan berikutnya. Hal ini tercermin dari penurunan *Battic Dry Index Level* menjadi rata-rata indeks sebesar 1.393,56 dibandingkan rata-rata indeks 1.930,86 di tahun 2022. Adapun perlambatan aktivitas perdagangan pada tahun 2023 utamanya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perlambatan volume perdagangan pada tahun setelah mengalami pertumbuhan pada tahun 2021 dan 2022. Dengan gambaran tersebut, tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, baik di dalam negeri maupun internasional serta membutuhkan arah kebijakan yang solid untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

(7) Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan Pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi.

Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi/ *Corruption Perception Index* Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2023 (peringkat 115 dari 180 negara). Adapun pada indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia, meski mengalami tren Perbaikan pada periode 2019-2022, namun capaian tersebut sedikit mengalami tantangan pada tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan risiko dalam pencapaian pemberantasan korupsi. Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko

peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

3. Isu Strategis Regional

a. Provinsi Jawa Tengah

Isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang belum optimal salah satunya disebabkan oleh tingkat produktivitas sektor-sektor ekonomi yang belum optimal, serta belum memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam sebagai sumber produksi ekonomi daerah. Oleh karena itu, isu ke depan adalah bagaimana mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan melakukan transformasi ekonomi untuk memperkuat perekonomian daerah Jawa Tengah. Transformasi ekonomi dilakukan dengan mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi, terutama dengan menggerakkan sektor-sektor unggulan daerah antara lain sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Transformasi ekonomi juga dilakukan dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar mampu menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar global.

Transformasi ekonomi tersebut dilakukan dengan menerapkan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ekonomi hijau adalah model pembangunan ekonomi yang menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi dan akumulasi modal yang lebih hijau (green investment), infrastruktur hijau, dan pekerjaan yang ramah lingkungan (green jobs) untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan.

Ekonomi biru menjadi strategi yang menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian ekosistem. Transformasi ekonomi akan tercapai juga apabila didukung dengan kondisi lingkungan wilayah yang kondusif yang akan menjamin lancar dan amannya semua pihak dalam proses pembangunan ekonomi Jawa Tengah. Di samping itu, belum optimalnya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah salah satunya juga disebabkan oleh belum optimalnya pembangunan desa dan

perdesaan yang dapat dioptimalkan melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur, pemberdayaan ekonomi masyarakat termasuk masyarakat miskin, pengembangan ekonomi desa, kualitas lingkungan dan pelayanan dasar, serta penguatan peran supra desa.

2) Penurunan tingkat kemiskinan

Tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang masih di atas nasional menjadi salah satu isu dan tantangan yang harus diselesaikan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensi, dari permasalahan aspek layanan dasar, kualitas sumber daya manusia hingga ketidakberdayaan ekonomi. Isu ke depan bagaimana menurunkan angka kemiskinan secara efektif dan efisien. Berdasarkan kondisi tersebut, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara utuh mempertimbangkan empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, yaitu perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan pembangunan yang inklusif. Mengacu kepada prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi meliputi: 1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; 2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; 3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil; dan 4) membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Program dan kegiatan utama harus di desain secara sinergi dan terintegrasi dengan satu data base yang akurat, sehingga berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Prinsip utama dan strategi tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan pada dasarnya bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan, sehingga sangat dipengaruhi kualitas perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan dan program di dalamnya.

3) Ketahanan pangan yang berkelanjutan

Jawa Tengah yang selama ini menjadi salah satu lumbung pangan nasional memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi semua orang dan daerah/wilayah yang tercermin dari ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Ketersediaan pangan yang bersumber dari pertanian, peternakan, dan perikanan harus dapat memenuhi kebutuhan penduduk di suatu wilayah dalam jangka panjang dan lintas generasi. Ketersediaan

pangan akan dapat dicapai dan dijamin keberlanjutannya jika pembangunan memperhatikan sarana prasarana pertanian, konversi lahan/alih fungsi lahan yang terkendali, peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan, dan up-skilling SDM pertanian. Faktor penting lainnya adalah memastikan keterjangkauan pangan oleh masyarakat yang dicerminkan oleh distribusi yang lancar dari produsen ke konsumen antar waktu antarwilayah, stok pangan dan harga yang selalu terjaga. Selain itu perlu upaya yang lebih konkret bahwa pangan yang tersedia dan dapat dijangkau oleh setiap penduduk memiliki manfaat bagi tubuhnya. Hal ini dapat didukung dengan pola konsumsi yang seimbang dan beraneka ragam, kecukupan gizi, keamanan dan mutu pangan serta pengembangan pengolahan pangan lokal. Selain itu diperlukan pengembangan pertanian dalam arti luas sesuai dengan karakteristik dan potensi unggulan masing-masing daerah dalam provinsi yang terintegrasi dalam pengembangan kewilayahan di Jawa Tengah

4) Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Isu strategis lainnya berkaitan dengan upaya memperkuat perekonomian daerah dan mendukung perwujudan kualitas hidup masyarakat adalah penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Pembangunan prasarana dan sarana menjadi salah satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah dalam hal kelancaran dan keselamatan perjalanan, distribusi barang dan jasa (logistik daerah), serta dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah. Penyediaan prasarana transportasi dan fasilitas publik yang ramah bagi seluruh kelompok masyarakat khususnya kelompok rentan (utamanya anak, pelajar, perempuan dan lansia) dan kelompok berkebutuhan khusus (aksesibilitas disabilitas di simpul dan jaringan transportasi) perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan pembangunan inklusif. Pembangunan prasarana dan sarana tetap berprinsip lebih ramah lingkungan guna menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi risiko kerusakan lingkungan, kerugian akibat bencana, serta berpedoman pada rencana tata ruang. Selain dari sisi penyediaan prasarana dan sarana, penggunaan kendaraan pribadi juga menjadi isu yang cukup penting untuk dikendalikan diantara melalui peralihan menggunakan angkutan umum. Selain itu penyediaan prasarana dan sarana bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin adalah suatu kebutuhan yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Salah satunya yaitu akses terhadap infrastruktur dasar yang

memastikan bahwa masyarakat miskin memiliki akses yang memadai terhadap infrastruktur dasar seperti perumahan, air bersih, sanitasi layak, energi listrik, dan transportasi.

- 5) Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana

Keberlanjutan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan bencana menjadi salah satu isu strategis pembangunan Jawa Tengah lima tahun ke depan. Isu ini menjadi strategi yang menitikberatkan pada: 1) penanganan dan pengelolaan terhadap kerusakan lingkungan hidup seperti alih fungsi lahan, perubahan iklim, pencemaran lingkungan, kerusakan pesisir, DAS kritis, kawasan lindung/karst, pertambangan, 2) penanggulangan bencana terkait meningkatnya jumlah kejadian banjir, tanah longsor dan kekeringan akibat perubahan iklim, serta 3) isu sampah/limbah yang terus berkembang seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di Jawa Tengah. Keberlangsungan proses pembangunan dapat terwujud apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dimanfaatkan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung untuk peningkatan kualitas fungsi lingkungan sehingga mampu mengurangi potensi terjadinya bencana alam.

- 6) Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia

Isu berikutnya adalah bagaimana mewujudkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang semakin baik dengan menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat agar terwujud manusia Jawa Tengah yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera. Perwujudan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Jawa Tengah dilakukan dengan mendorong akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial untuk seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin.

- 7) Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat

Isu strategis daerah Jawa Tengah yang juga penting adalah kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat. Membangun kekuatan budaya ini adalah dalam upaya mitigasi dan adaptasi dampak modernisasi dan globalisasi yang masif saat ini. Modernisasi dan globalisasi memiliki dua sisi implikasi terhadap kehidupan masyarakat. Di satu sisi, kehidupan modern dan maju perlu direspons agar tidak terjadi ketertinggalan. Di sisi lain, modernisasi dan globalisasi juga memberikan implikasi negatif pada pola pikir dan perilaku masyarakat yang kehilangan identitas dan jati dirinya, sehingga muncul karakter baru yang tidak sejalan dengan budaya asli

Jawa Tengah, mengabaikan aspek moral, serta menganggap bahwa nilai spiritual menjadi tidak penting.

Pembangunan kualitas keluarga sebagai komunitas terkecil dalam masyarakat juga masih menjadi isu yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Perubahan tren gaya hidup dan arus informasi yang semakin luas berpotensi mempengaruhi pola hubungan dan struktur keluarga. Perilaku salah seperti kekerasan, perundungan, dan eksploitasi kelompok perempuan dan anak, ketidaksetaraan gender, serta pergeseran norma dan nilai dalam lingkungan keluarga masih menjadi isu yang dapat mengancam karakter dan jati diri masyarakat.

Untuk itu budaya menjadi hal penting untuk kemudian akan mampu mengembalikan karakter masyarakat Jawa Tengah pada identitas dan jati diri yang sesuai dengan budaya luhur Jawa. Selain itu, budaya yang kuat diharapkan akan mampu menangkal segala bentuk ancaman yang sifatnya tindak kriminal, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme, sehingga akan tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

8) Tata kelola pemerintahan yang dinamis

Isu strategis yang tidak bisa diabaikan adalah isu transformasi tata kelola pemerintahan dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal. Transformasi tata kelola pemerintahan ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang dinamis dengan memperkuat pemerintahan yang semakin adaptif dengan tetap taat pada asas yang berlaku dan mekanisme korelasi antaraktor dapat dioptimalkan (kolaboratif). Hal tersebut perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi dan sumber daya aparatur yang semakin berintegritas, serta adanya proses untuk mencapai pembangunan demokrasi yang lebih substantif guna peningkatan kualitas kebijakan publik. Transformasi tata kelola pemerintahan akan menjadi kerangka pengarusutamaan transformasi di Jawa Tengah dalam pembangunan dua puluh tahun ke depan.

b. Tela'ah RTRW Kota Salatiga 2023-2043

Penataan ruang wilayah Kota Salatiga bertujuan untuk mewujudkan Kota Salatiga sebagai kota perdagangan, jasa, dan destinasi wisata yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan yang didukung oleh sektor pendidikan, olahraga, serta industri. Adapun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) tahun 2023-2043 terdapat kebijakan penataan ruang Kota Salatiga yang meliputi:

- 1) Pengembangan kawasan perdagangan, jasa, dan destinasi wisata;
- 2) Pengembangan sistem jaringan transportasi untuk memperlancar pergerakan antar pusat kegiatan;
- 3) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana;
- 4) Perwujudan RTH kota sebesar 20% (dua puluh persen) untuk RTH publik dan 10% (sepuluh persen) untuk RTH privat dari luas wilayah kota;
- 5) Peningkatan pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung;
- 6) Pengelolaan dan pengembangan kawasan budi daya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan;
- 7) Peningkatan kualitas pemanfaatan ruang;
- 8) Pengembangan kegiatan dan kawasan pendidikan;
- 9) Penataan kawasan olahraga dan pariwisata;
- 10) Pengembangan industri yang mempertimbangkan risiko lingkungan; dan
- 11) Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang.

c. Isu Strategis RPJPD Kota Salatiga 2025-2045

Berdasarkan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045, isu pembangunan daerah 20 tahun ke depan adalah:

1) Kesejahteraan yang Adil dan Merata

Kesejahteraan sering menjadi fokus kebijakan sosial dan pembangunan di seluruh dunia. Kesejahteraan memiliki beberapa cakupan aspek, yakni aspek fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan kekayaan materi, tetapi juga tentang kualitas hidup dan kebahagiaan. Dalam rangka peningkatan pemerataan kesejahteraan, maka terdapat beberapa isu yang masih perlu ditangani di Kota Salatiga, yakni berkaitan dengan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan Masyarakat.

2) Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing

Daya saing daerah merupakan kemampuan suatu daerah dibandingkan daerah lain dalam menetapkan strategi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya peningkatan daya saing daerah, isu yang dihadapi oleh pemerintah Kota Salatiga yaitu perkembangan ekonomi lokal merupakan proses pembangunan ekonomi yang menitik beratkan pada kerja sama antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Sehingga hubungan yang terbentuk antara pihak-pihak tersebut akan sangat menentukan

keberhasilan dan keberlanjutan dari pengembangan ekonomi lokal. Isu daya saing daerah ini juga berkaitan dengan nilai investasi dan Industri kecil menengah (IKM) di Kota Salatiga.

Penyediaan infrastruktur dasar sebagai bentuk dukungan untuk Daya Saing Daerah juga menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam mencapai perekonomian yang berdaya saing. Kehidupan yang layak dimulai dengan perumahan yang layak, dan tindakan untuk meningkatkan kualitas perumahan dapat memberikan dampak positif yang besar pada kesejahteraan masyarakat Kota Salatiga. Selain itu, belum terintegrasinya pembangunan infrastruktur antar bidang sehingga upaya untuk mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan menjadi terhambat, termasuk belum tersedianya Dokumen Tata Bangunan dan Lingkungan yang berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.

3) Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Tantangan Perubahan Iklim

Kondisi dan ketersediaan ruang terbuka hijau masih belum memadai sesuai dengan ketentuan, di mana salah satu tolok ukur pengaplikasian konsep Kota Hijau adalah keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan. Ruang Terbuka Hijau pada suatu kota harus memenuhi luasan minimal yakni sebesar 30 persen dari keseluruhan luas lahan dengan komposisi 20 persen ruang terbuka hijau publik dan 10 persen ruang terbuka hijau privat (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007).

Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya menunjukkan bahwa data ketersediaan RTH di Kota Salatiga mengalami penurunan persentase yang selanjutnya berkontribusi besar terhadap indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kota Salatiga yang belum mencapai target (ketercapaian 61,3%). Persentase RTH setiap kelurahan di Kota Salatiga ditargetkan memenuhi persentase luasan RTH publik 20% dan persentase luasan RTH privat 10%, demikian pula perlu upaya untuk memenuhi kebutuhan RTH untuk skala yang lebih kecil, seperti taman RT dan taman RW.

Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang salah satunya terjadi pada kasus pembangunan rumah pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan berpotensi bahaya/Rawan Bencana. Rendahnya ketaatan pada RTRW Kota Salatiga serta di Kota Salatiga disebabkan oleh terbatasnya lahan dan harga tanah tinggi guna pengadaan tanah untuk kepentingan umum sehingga pengembangan penggunaan lahan akan mengarah pada

penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan RTRW Kota Salatiga.

Isu penanganan persampahan di Kota Salatiga yang masih belum optimal juga menjadi salah satu isu lingkungan yang perlu diperhatikan dua puluh tahun ke depan. Volume sampah yang meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk menjadi permasalahan yang harus di atasi. Mengacu pada hasil proyeksi produksi sampah di Kota Salatiga tahun 2025-2045 terus mengalami peningkatan, maka hal ini perlu menjadi fokus pemerintah Kota Salatiga untuk meningkatkan strategi atau teknologi pengelolaan sampah dan sarana prasarana persampahan di masa sekarang agar pada waktu yang akan datang volume sampah di Kota Salatiga tidak mengalami *over capacity*. Harapannya ke depan dapat menciptakan TPA dengan Sistem *Sanitary Landfill*. Oleh karena adanya bahaya pencemaran air tanah oleh air lindi TPA sampah maka pengelolaan TPA sampah yang baik sangat diperlukan. Hal ini mengingat Kota Salatiga tidak memiliki sumber mata air yang mencukupi, dan beberapa tempat mengambil air tanah sebagai sumber air bersih masyarakat sehingga kualitas air tanah yang baik sangat penting untuk mensuplai kebutuhan air Masyarakat. Dengan demikian, perlunya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan upaya untuk menjawab tantangan perubahan iklim.

4) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berkarakter

Isu strategis yang perlu diperhatikan untuk kota Salatiga dua puluh tahun ke depan adalah pendidikan untuk seluruh jenjang dan lapisan masyarakat, Kesehatan untuk semua dan perlindungan sosial. Pendidikan usia dini yang masih rendah serta belum tercapainya zero angka putus sekolah menjadi permasalahan utama yang menjadi isu strategis pembentuk kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah karena kondisi ini juga dapat dikaitkan dengan adanya permasalahan kenakalan remaja yang belum tertangani dengan baik. Di mana terjadi kasus pernikahan dini pada remaja yang disebabkan karena kurangnya kontrol pergaulan oleh keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Masih terdapat balita dengan kondisi gizi buruk (*stunting*) berpengaruh nyata pada kualitas Sumber Daya manusia Kota Salatiga pada tahun-tahun mendatang. Kasus *stunting* yang terjadi di Kota Salatiga menjadi salah satu isu kesehatan pada anak yang harus diperhatikan. Permasalahan *stunting* merupakan isu yang faktor penyebabnya datang dari berbagai dimensi juga diakibatkan oleh banyak dimensi. Selain kasus *stunting*, upaya pemenuhan pelayanan

Kesehatan bagi Masyarakat menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan Sumber Daya manusia yang unggul dan berkarakter

5) Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Adaptif

Pelaksanaan tata Kelola pemerintahan yang dinamis dan adaptif mejadi isu penting untuk mengoptimalkan Tata Kelola pemerintahan yang baik. Penggunaan Data dan penerapan manajemen data yang berkualitas dan terbaharui dalam pelayanan masyarakat dan pengembangan program pembangunan menjadi upaya strategis dalam peningkatan tata kelola pemerintahan. Selain itu, pemanfaatan sistem berbasis digital dalam pemerintahan, yang dikenal sebagai e-government atau pemerintahan elektronik, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, transparansi, dan partisipasi dalam layanan pemerintah.

Koordinasi antar instansi dan perangkat daerah dengan peningkatan komunikasi, kerja sama, dan kolaborasi yang efektif antara berbagai lembaga yang bertanggung jawab atas berbagai aspek kebijakan atau tugas dalam sebuah entitas akan berdampak pada peningkatan efisiensi, efektivitas, dan ketepatan dalam pengambilan Keputusan.

6) Bonus Demografi

Isu Bonus Demografi berupa peningkatan jumlah dan porsi penduduk usia tua serta angka ketergantungan meningkat memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat, ekonomi, dan sistem kesejahteraan. tantangan kesehatan dan perawatan, ketidakpastian keuangan, pertumbuhan ekonomi yang melambat, tantangan pendidikan, perubahan dalam pasar tenaga kerja, penurunan mobilitas tenaga kerja, perubahan dalam struktur keluarga, dan penyediaan perumahan yang sesuai dengan lansia yang dapat mengakibatkan perubahan dalam permintaan perumahan.

Berdasarkan hasil proyeksi 20 tahun ke depan menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia tua (65-75+) mengalami peningkatan. Walaupun proyeksi jumlah penduduk usia produktif di Kota Salatiga juga meningkat, tetapi porsinya terus berkurang. Sedangkan proyeksi jumlah penduduk usia tua berbanding lurus dengan porsinya, yakni sama-sama meningkat. Hal ini juga ditunjukan pada angka ketergantungan yang terus meningkat. Walaupun angka ketergantungan tersebut masih berada di bawah 50, tetapi hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar pada tahun 2045 tetap bisa mendapatkan bonus demografi. Selain itu, kondisi ini juga memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan

perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir.

d. Isu Strategis KLHS Kota Salatiga 2025-2029

Kesimpulan atas hasil analisis KLHS RPJMD tahun 2025-2029 digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2.66. Pengelompokan Isu Strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Salatiga

No	Karakteristik Kesamaan Isu	Keterkaitan dengan dokumen lain dan Konsultasi Publik	Kelompok Isu Strategis TPB
1	TPB 6, 13, 15 dan 11 15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan 15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis 15.9.1.(a) Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati 11.6.1.(b) Persentase Ruang Terbuka Hijau 11.7.1.(a) Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau 13.2.1.(a) Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Evaluasi RPJPD - Indeks tutupan lahan - Indeks Kualitas Air Isu RPJMD Lama (2017-2022) - Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan serta Belum Optimalnya Penegakan Hukum Pelanggaran Tata Ruang Isu Strategis RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 - Indeks Kualitas Tutupan Lahan masuk kategori "sangat kurang baik" - Indeks Kualitas Air masih rendah RTRW - Masih perlunya peningkatan pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung (mempertahankan dan meningkatkan luasan ruang terbuka hijau) Isu KLHS RTRW - Ketersediaan RTH Isu IKPLHD - Pencemaran Air - Alih fungsi lahan Isu RPPLH - Ancaman penurunan kualitas sumber daya air - Peningkatan laju perubahan tata guna lahan Isu Nasional (RPJMN, KLHS RPJMN) - Hilangnya keanekaragaman hayati - Polusi dan kerusakan lingkungan - Pembangunan belum terbarukan Hasil KP I KLHS RPJMD - Pencemaran sungai - Berkurangnya Ruang Terbuka Hijau	Perlunya peningkatan daya dukung lahan
2	TPB 1, TPB 6, TPB 11, TPB 12, TPB 17 1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin sumber penerangan utamanya listrik 6.4.1.(b) Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri 6.5.1.(a) RPDAST yang diinternalisasi ke dalam RTRW 6.5.1.(c) jaringan informasi sumber daya air 6.5.1.(f) wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau 11.1.1.(a) Akses hunian yang layak dan terjangkau 11.2.1.(a) pengguna moda transportasi umum 17.6.2.(b) akses tetap pitalebar 6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku 6.5.1.(g) penataan kelembagaan sumber daya air	Evaluasi RPJPD - Cakupan ketersediaan rumah layak huni - Persentase kendaraan angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan Isu RPJMD Lama (2017-2022) - Masih Tingginya Angka Pengangguran dan Banyaknya Penduduk Miskin - Belum Optimalnya Pemenuhan Pelayanan Infrastruktur RTRW - Masih perlunya pengembangan sistem jaringan transportasi untuk memperlancar pergerakan antarpusat kegiatan - Masih perlunya peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana Isu Nasional (RPJMN, KLHS RPJMN) - Kesejahteraan Menurun - Tingkat Kemiskinan Meningkat Di Kawasan Perkotaan - Infrastruktur dan literasi digital rendah	Perlunya peningkatan dan pemerataan infrastruktur wilayah

No	Karakteristik Kesamaan Isu	Keterkaitan dengan dokumen lain dan Konsultasi Publik	Kelompok Isu Strategis TPB
3	11.6.1.(a) Sampah yang tertangani 12.5.1.(a) Sampah yang didaur ulang	Evaluasi RPJPD - Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengelolaan limbah padat, limbah cair dan sampah Isu RPJMD Lama (2017-2022) - Belum Optimalnya Pemenuhan Pelayanan Infrastruktur Isu Strategis RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 - Perlunya peningkatan penanganan sampah domestik - Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan masih belum optimal RTRW - Masih perlunya peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana Isu IKPLHD - Persampahan Isu RPPLH - Belum optimalnya penanganan dan pengurangan sampah Isu Nasional (RPJMN, KLHS RPJMN) - Timbulan Sampah menjadi permasalahan utama Hasil KP I KLHS RPJMD - Permasalahan sampah	Belum optimalnya pengurangan dan penanganan sampah
4	1.4.1.(d) Akses air minum layak 1.4.1.(e) akses layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. 6.1.1.(a) Akses air minum layak 6.1.1.(c) Akses air minum aman dan berkelanjutan 6.3.2.(b) Kualitas air sungai 6.2.1.(e) infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal. 6.2.1.(f) rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat 6.3.1.(a) pengelolaan lumpur tinja dan pembangunan IPLT 6.3.1.(b) rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja 6.2.1.(b) akses layanan sanitasi layak 6.2.1.(c) kelurahan yang melaksanakan STBM 6.2.1.(d) kelurahan ODF/SBS 12.4.2.(a) limbah B3	Evaluasi RPJPD - Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengelolaan limbah padat, limbah cair dan sampah Isu RPJMD Lama (2017-2022) - Belum Optimalnya Pemenuhan Pelayanan Infrastruktur Isu Strategis RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 - Penyediaan layanan air bersih dan sanitasi di permukiman RTRW - Masih perlunya peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana Isu KLHS RTRW - Peningkatan Risiko Krisis Air Bersih Isu IKPLHD - Pencemaran Air Isu Nasional (RPJMN, KLHS RPJMN) - Permasalahan Air Bersih Dan Sanitasi Yang Buruk - Polusi dan kerusakan lingkungan - Infrastruktur dan literasi digital rendah Hasil KP I KLHS RPJMD - Berkurangnya debit mata air	Penurunan kualitas dan kuantitas air
5	TPB 5, TPB 16 5.2.1* perempuan dewasa dan anak perempuan mengalami kekerasan 5.2.1.(a) kekerasan terhadap anak perempuan 5.2.2* perempuan dewasa dan anak perempuan mengalami kekerasan seksual 5.3.1* perempuan yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 dan 18 tahun 5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun 5.5.1* kursi yang diduduki perempuan di parlemen 5.5.2* perempuan yang berada di posisi managerial 16.7.1.(a) keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD 16.1.3.(a) penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan 16.2.1.(b) kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	Evaluasi RPJPD Persentase perempuan dalam Parlemen	Perlunya peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan



No	Karakteristik Kesamaan Isu	Keterkaitan dengan dokumen lain dan Konsultasi Publik	Kelompok Isu Strategis TPB
6	TPB 2 2.1.1* Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan 2.1.2* kerawanan pangan 2.3.1* Nilai Tambah Pertanian 2.1.2.(a) asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari 2.2.2.(c) skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Evaluasi RPJPD - Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari - Skor Pola Pangan Harapan - Isu Strategis RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 - Belum optimalnya penyediaan infrastruktur yang mendukung kemandirian pangan dan penanggulangan bencana Isu IKPLHD - Alih fungsi lahan Isu Nasional (RPJMN, KLHS RPJMN) - Produktivitas rendah Isu RPPLH - Peningkatan laju perubahan tata guna lahan	Menurunnya luasan lahan pertanian
7	TPB 1, TPB 2, TPB 3, TPB 4, TPB 5, TPB 8 1.4.1.(c) penggunaan metode kontrasepsi (CPR) 1.4.1.(g) APM SD/MI/ sederajat 1.4.1.(h) APM SMP/MTs/ sederajat 1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. 2.1.1.(a) Kekurangan gizi 2.2.2* Malnutrisi 2.2.2.(a) Anemia pada ibu hamil 2.2.2.(b) ASI eksklusif 2.2.1* Ketidacukupan Konsumsi Pangan 2.2.1.(a) Stunting pada baduta 3.1.1* AKI 3.2.1* AKBa 3.2.2* AKN 3.2.2.(a) AKB 3.3.3* Kejadian Malaria 3.4.1.(a) merokok pada umur ≤ 18 tahun 3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun. 3.5.1.(e) penyalahgunaan narkoba 3.5.2* Konsumsi alkohol oleh penduduk umur ≥ 15 3.7.1* perempuan usia reproduksi yang KB dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern 3.7.1.(a) penggunaan metode kontrasepsi (CPR) 3.7.1.(b) penggunaan MKJP 3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR). 3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan. 3.a.1* merokok pada umur ≥ 15 tahun 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan 4.1.1* anak-anak dan remaja yang mencapai standar kemampuan minimum 4.1.1.(a) SD/MI berakreditasi minimal B 4.2.2.(a) APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4.4.1* remaja dan dewasa dengan keterampilan TIK 4.5.1* Rasio APM di SD, SMP, SMA dan APK di Perguruan Tinggi. 4.a.1* sekolah dengan akses fasilitas 5.6.1.(a) Unmet need KB 5.6.1.(b) Pengetahuan tentang	Evaluasi RPJPD - Prevalensi balita Gizi Buruk - Menurunnya AKABA (Angka Kematian Balita) per 1000 kelahiran hidup - Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba - TFR (Total Fertility Rate) - persentase Tenaga Kesehatan yg terlatih dan terbina - Angka Partisipasi Sekolah PAUD - Tingkat pengangguran terbuka Isu RPJMD Lama (2017-2022) - Masih Tingginya Angka Pengangguran dan Banyaknya Penduduk Miskin Isu Strategis RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 - Masih terdapat balita dengan kondisi gizi buruk - Kecenderungan terjadi penurunan APK PAUD Isu Nasional (RPJMN, KLHS RPJMN) - Penurunan Derajat Kesehatan Masyarakat - Kualitas SDM yang semakin rendah	Perlunya peningkatan kualitas SDM

No	Karakteristik Kesamaan Isu	Keterkaitan dengan dokumen lain dan Konsultasi Publik	Kelompok Isu Strategis TPB
	- metode kontrasepsi modern 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka 8.6.1* Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). 16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang lahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. 16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah. 16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.		
8	TPB 1, TPB 11, TPB 13 1.5.1.(a) Lokasi pengurangan risiko bencana 1.5.1.(b) Kebutuhan dasar korban bencana 1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana 1.5.1.(d) Pendidikan layanan khusus bencana 1.5.1.(e) Indeks risiko bencana 1.5.1* Korban bencana 1.5.3* Dokumen strategi PRB 1.5.2.(a) Kerugian akibat bencana 11.5.1.(a) IRBI 11.5.1.(b) Kota tangguh bencana 11.5.1.(c) Sistem peringatan dini 11.5.2.(a) Kerugian akibat bencana 11.5.1* Korban bencana 11.b.1* Dokumen strategi PRB 11.b.2* Dokumen strategi PRB 13.1.1* Dokumen strategi PRB 13.1.2* Korban bencana per orang bekerja per tahun. 8.3.1.(b) Tenaga kerja informal sektor pertanian 8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja. 8.9.1* Kontribusi pariwisata terhadap PDB 8.9.1.(a) Wisatawan mancanegara 8.9.2* pekerja pada industri pariwisata 8.10.1* Kantor bank dan ATM 8.10.1.(a) Jarak lembaga keuangan 9.3.1* nilai tambah industri kecil 9.5.1* anggaran riset pemerintah terhadap PDB 10.2.1* Penduduk hidup di bawah 50% median pendapatan 11.4.1.(a) Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan 12.6.1.(a) perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 12.7.1.(a) produk ramah lingkungan	Evaluasi RPJPD - Indeks Risiko Bencana - Kelurahan Tangguh Bencana Isu RPPLH - Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta potensi kejadian bencana Isu Nasional (RPJMN, KLHS RPJMN) Perubahan Iklim - Belum Optimalnya Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Belum Optimalnya Penanganan Terhadap Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial - Masih Tingginya Angka Pengangguran dan Banyaknya Penduduk Miskin Isu Strategis RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 - Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan rehabilitasi sosial dan Belum optimalnya penanganan rehabilitasi sosial PMKS Isu KLHS RTRW - Kemiskinan Isu Nasional (RPJMN, KLHS RPJMN) - Pembangunan belum terbarukan - Pariwisata di bawah potensinya - Deindustrialisasi dini - IPTEKIN dan riset rendah	Perlu upaya peningkatan Mitigasi bencana
9	TPB 1, TPB, TPB 8, TPB 10, TPB 11, TPB 12, TPB 16 1.3.1.(d) Bantuan/PKH 1.a.1* Alokasi untuk pemberantasan kemiskinan 1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok 7.2.1* Energi terbarukan	Evaluasi RPJPD - Jumlah KK PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang mendapat santunan - Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku - Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Perlunya peningkatan pertumbuhan ekonomi Daerah

No	Karakteristik Kesamaan Isu	Keterkaitan dengan dokumen lain dan Konsultasi Publik	Kelompok Isu Strategis TPB
	8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil	Isu RPJMD Lama (2017-2022)	
10	TPB 10, TPB 11, TPB 15, TPB 16, TPB 17 11.3.2.(a) institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan 15.6.1* Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian yang adil dan merata. 16.6.2.(a) Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik 16.10.2.(c) sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 17.17.1.(a) proyek dengan skema KPBU 17.17.1.(b) alokasi pemerintah dalam KPBU 17.18.1.(b) Konsumen yang menjadikan data BPS sebagai rujukan utama 17.18.1.(d) indikator SDGs terpilih yang relevan 17.19.2.(c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data melalui website	Evaluasi RPJPD - Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Isu Nasional (RPJMN, KLHS RPJMN) - IPTEKIN dan riset rendah - Tata kelola pemerintahan belum optimal	Perlunya peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Berdasarkan tabel kesimpulan analisis KLHS Kota Salatiga Tahun 2025-2029, isu pembangunan daerah 5 tahun ke depan adalah:

- 1) Perlunya peningkatan daya dukung lahan
- 2) Perlunya peningkatan dan pemerataan infrastruktur wilayah
- 3) Perlunya peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan
- 4) Belum optimalnya pengurangan dan penanganan sampah
- 5) Penurunan kualitas dan kuantitas air
- 6) Menurunnya luasan lahan pertanian
- 7) Perlunya peningkatan kualitas SDM
- 8) Perlunya upaya peningkatan mitigasi bencana
- 9) Perlunya peningkatan pertumbuhan ekonomi Daerah
- 10) Perlunya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

e. Isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pada berbagai aspek, telaah terhadap isu global, nasional dan regional, isu strategis jangka menengah Kota Salatiga dirumuskan melalui pengelompokan isu sebagai berikut.



Tabel 2.67. Rumusan Kesimpulan Isu Strategis Kota Salatiga Tahun 2025-2029

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Kota Salatiga Tahun 2025-2029
			Global	Nasional	Regional	
- Potensi wisata dan pengembangan ekonomi kreatif - Potensi pengembangan industri - Potensi pengembangan teknologi pertanian pangan - Potensi pengembangan peternakan	- Belum optimalnya penurunan angka kemiskinan untuk mencapai target SDGs pada tahun 2030 nol persen - Tingginya tingkat ketimpangan pendapatan penduduk - Belum optimalnya Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka - Meningkatnya jumlah penduduk lansia	Belum meratanya peningkatan kualitas SDM	Demografi Global	Rendahnya Produktivitas	Penurunan tingkat kemiskinan	Kemiskinan dan kesenjangan
- Kualitas pembangunan manusia yang tinggi - Sarana dan prasarana kesehatan yang terjangkau - Sarana dan prasarana pendidikan yang terjangkau	- Belum optimalnya penurunan Angka Kematian Balita, Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB) - Belum optimalnya pencapaian tingkat kesehatan keluarga - Masih adanya kasus gizi buruk dan stunting pada anak - Belum optimalnya pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/Paket		Urbanisasi dunia	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia



Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Kota Salatiga Tahun 2025-2029
			Global	Nasional	Regional	
	- Belum optimalnya peran pemuda dalam mendukung kegiatan ekonomi dan prestasi olahraga - Peningkatan angka ketergantungan penduduk					
- Potensi pengembangan pariwisata - Sebagai Kota Pusaka	Masih kurangnya dukungan pengembangan dan pelestarian nilai seni dan budaya daerah dan peningkatan pelestarian kota pusaka				Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat	Pengelolaan dan pelestarian budaya daerah
Meningkatnya keterlibatan perempuan pada bidang politik	- Belum optimalnya peningkatan keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif - Belum optimalnya pencapaian perlindungan perempuan dan anak	Masih kurangnya peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan				Kesenjangan gender, belum optimalnya perlindungan anak dan perempuan serta pelayanan lansia
- Potensi wisata dan pengembangan ekonomi kreatif - Potensi pengembangan industri - Potensi pengembangan teknologi pertanian pangan	- Kota Salatiga yang berada di persimpangan jalur utama Semarang–Solo, belum optimal dalam memanfaatkan peranannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional dengan kondisi sumberdaya yang dimiliki saat ini - Belum optimalnya pemanfaatan	Belum optimalnya peningkatan pertumbuhan ekonomi Daerah	- Geopolitik dan Geoekonomi - Perdagangan internasional - Keuangan Internasional - Pemanfaatan Luar Angkasa - Kelas menengah	- Geopolitik dan Geoekonomi - Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat - Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif	- Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan - Ketahanan pangan yang berkelanjutan	Pertumbuhan ekonomi yang merata didukung investasi dan produk unggulan yang berdaya saing



Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Kota Salatiga Tahun 2025-2029
			Global	Nasional	Regional	
- Potensi pengembangan peternakan - Potensi perikanan budidaya	sumberdaya alam terutama dalam pengembangan teknologi pertanian dan pengelolaan potensi wisata dalam mendukung perkembangan ekonomi masyarakat Kota Salatiga - Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menciptakan pemerataan kesejahteraan dengan masih didominasi oleh sektor industri pengolahan dan konsumsi rumah tangga - Keterbatasan investasi dan belum optimalnya pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah					
- Luas wilayah - Kondisi geografi - Potensi SDA	- Faktor risiko bencana banjir dan tanah longsor - Daya dukung lahan tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup layak penduduk	- Belum optimalnya pengurangan dan penanganan sampah - Terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas air - Menurunnya luasan lahan pertanian - Upaya peningkatan mitigasi bencana	Persaingan Sumber Daya Alam Perubahan Iklim	Krisis Lingkungan	Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	Pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan



Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Kota Salatiga Tahun 2025-2029
			Global	Nasional	Regional	
		belum berjalan maksimal				
- Luas wilayah - Kondisi geografi - Keterjangkauan	- Belum optimalnya peningkatan dan pemerataan infrastruktur daerah dalam menunjang pelayanan - Belum semua masyarakat mendapatkan akses terhadap pemenuhan rumah layak huni	Belum optimalnya peningkatan dan pemerataan infrastruktur wilayah			Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Pemenuhan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur
- Kualitas SDM aparatur - Ketersediaan jaringan teknologi dan informasi yang merata	- Belum optimalnya dukungan infrastruktur, SDM, dan pendanaan dalam mendukung kegiatan riset yang berkelanjutan dan inovatif - Belum optimalnya peningkatan infrastruktur digital yang merata, literasi digital aparatur, serta sistem informasi antar-perangkat daerah. - Belum optimalnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan, penerpan standar pelayanan yang jelas dan terukur,	Perlunya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Disrupsi Teknologi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Kolaboratif



Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Kota Salatiga Tahun 2025-2029
			Global	Nasional	Regional	
	pengembangan birokrasi dan penguatan sistem pengawasan dalam pelayanan publik. ▪ Belum optimalnya peningkatan koordinasi antar instansi, penegak hukum, peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi daerah. ▪ Belum optimalnya daya saing daerah					

Berdasarkan tabel di atas, penjelasan atas masing-masing isu strategis jangka menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029 adalah berikut.

a. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Kesenjangan

Isu kemiskinan dan kesenjangan masih menjadi persoalan yang harus ditangani lima tahun ke depan di Kota Salatiga. Meskipun angka kemiskinan relatif kecil, penurunannya semakin menantang. Persoalan utama kemiskinan di Kota Salatiga adalah tingginya tingkat kesenjangan pendapatan penduduk yang cenderung tidak kembali menurun sejak tahun 2020. Ini menunjukkan tingginya kesenjangan distribusi pendapatan antar penduduk. Selain itu, tingkat pengangguran juga masih relatif tinggi jika melihat total jumlah penduduk Kota Salatiga, yang memiliki dampak luas pada berbagai aspek kehidupan, termasuk penurunan daya beli dan potensi peningkatan tingkat kejahatan.

Indikator atau Fakta Pendukung Beberapa faktor penyebab kesenjangan pendapatan meliputi kualitas pendidikan dan kepemilikan keterampilan penduduk yang tidak merata, serta kemampuan mengakses sumber daya ekonomi seperti tanah, modal, dan teknologi yang belum merata. Dari sisi pengangguran, dampaknya secara ekonomi adalah penurunan daya beli masyarakat yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan secara sosial, pengangguran yang ekstrem dapat berdampak pada peningkatan tingkat kejahatan.

Tantangan utama adalah mengoptimalkan penurunan angka kemiskinan untuk mencapai target SDGs nol persen pada tahun 2030. Tingginya tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menjadi tantangan lain yang perlu diatasi. Tantangan berikutnya adalah peningkatan angka ketergantungan penduduk, di mana setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 42-43 penduduk usia tidak produktif. Hal ini memerlukan perhatian serius terkait pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Selain itu, validasi data kemiskinan yang update secara berkala masih sering menjadi persoalan mendasar untuk menjamin ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan, serta perlunya pendekatan menyeluruh yang melibatkan berbagai kelembagaan, tidak hanya bertumpu pada perangkat daerah.

b. Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia di Kota Salatiga merupakan isu strategis yang berfokus pada peningkatan kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup yang layak bagi penduduk. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Salatiga menunjukkan peningkatan yang konsisten dan berada dalam kategori sangat tinggi, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian

untuk meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh dan daya saing SDM di masa depan. Isu ini juga berkaitan dengan peningkatan kualitas keluarga dan kesetaraan gender, serta optimalisasi peran pemuda dalam mendukung kegiatan ekonomi dan prestasi olahraga. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM ini secara khusus berfokus pada peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan dan pendidikan dasar di Kota Salatiga.

Pembangunan kesehatan dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, peningkatan kapasitas ketahanan kesehatan, serta pemerataan kapasitas dan responsivitas sistem kesehatan di seluruh wilayah. Sementara itu, pembangunan pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas guna mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang.

Secara lebih rinci, pada Bidang Kesehatan, permasalahan difokuskan pada penurunan kasus kematian ibu, bayi, dan balita, pengelolaan kesehatan lingkungan, peningkatan pelayanan di fasilitas kesehatan pertama, peningkatan cakupan Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat higiene sanitasi, peningkatan pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD), optimalisasi upaya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dari berbagai pihak (WPA, LSM, KDS, dan stakeholder), peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta peningkatan jaminan kesehatan pangan yang dimiliki oleh pelaku usaha/industri makanan.

Pada Bidang Pendidikan, fokus penyelesaian masalah meliputi penanganan anak putus sekolah pada satuan pendidikan dasar, peningkatan partisipasi pendidikan anak usia dini, peningkatan ketersediaan pendidik bersertifikat pada semua jenjang pendidikan, pengembangan kurikulum muatan lokal, peningkatan kapasitas kelembagaan PAUD dan pendidikan non-formal, serta pemerataan sarana prasarana pada satuan pendidikan. Selain itu, perlu diperhatikan terkait pengembangan literasi masyarakat, yang mencakup tidak hanya kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga pemahaman dan kemampuan menggunakan informasi dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Implikasi strategis dari isu kualitas hidup dan daya saing SDM mencakup kebutuhan untuk terus berinovasi dalam penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan yang merata dan berkualitas. Tantangannya adalah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat didukung oleh

SDM yang memiliki daya saing tinggi, mampu beradaptasi dengan perubahan, dan memiliki akses yang setara terhadap peluang.

c. Peningkatan Pengelolaan dan Pelestarian Budaya Daerah Dalam Kehidupan Masyarakat

Pengelolaan dan pelestarian budaya daerah, serta pengembangan budaya dan pariwisata di Kota Salatiga, menjadi isu strategis penting untuk lima tahun ke depan. Hal ini disebabkan masih banyak potensi budaya yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan daya tarik kunjungan ke Kota Salatiga. Pencapaian pengelolaan kebudayaan saat ini masih belum optimal, terutama dalam pengembangan objek pemajuan kebudayaan, pelestarian cagar budaya, peningkatan daya tarik museum, serta pembinaan SDM, lembaga, dan pranata kebudayaan. Semua aspek ini sangat berpeluang untuk ditingkatkan mengingat kekayaan potensi budaya yang dimiliki Kota Salatiga.

Pengembangan sepuluh objek pemajuan kebudayaan, khususnya pada generasi muda, merupakan hal krusial karena budaya adalah bagian penting dari identitas daerah dan memperkuat rasa kebanggaan lokal. Upaya pemajuan kebudayaan, seperti pengenalan tradisi lisan, pengetahuan tradisional, kesenian, dan permainan tradisional, tidak hanya terbatas pada acara-acara khusus, tetapi dapat diintegrasikan dengan berbagai event lain yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Salatiga. Pengembangan kegiatan pemajuan kebudayaan dapat lebih difokuskan pada berbagai aktivitas di kelompok satuan pendidikan untuk mendidik generasi muda tentang sejarah dan tradisi, sehingga meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang akar budaya daerah.

Peningkatan daya tarik museum menjadi isu strategis karena kondisi sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar, termasuk jumlah koleksi museum. Perbaikan kedua permasalahan ini, didukung dengan program edukasi yang menarik untuk berbagai kelompok usia seperti kunjungan sekolah, lokakarya, dan kuliah umum, diharapkan dapat meningkatkan daya tarik kunjungan ke museum. Kolaborasi pengembangan kebudayaan daerah dengan penyelenggaraan kepariwisataan daerah juga menjadi fakta pendukung. Kolaborasi ini bertujuan untuk mempromosikan kekayaan budaya sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan jumlah kunjungan wisata, yang dapat dilakukan melalui festival budaya dan kesenian, pengembangan desa wisata, pengembangan produk wisata berbasis budaya, dan kerja sama dengan seniman lokal.

Implikasi strategis dari isu ini adalah perlunya upaya berkelanjutan untuk mengoptimalkan potensi budaya daerah yang belum sepenuhnya

terekplorasi. Tantangan implisitnya adalah bagaimana meningkatkan pengelolaan kebudayaan yang belum optimal, terutama dalam hal pengembangan objek pemajuan kebudayaan, pelestarian cagar budaya, dan peningkatan daya tarik museum. Selain itu, pembinaan SDM, lembaga, dan pranata kebudayaan juga menjadi tantangan untuk memastikan keberlanjutan pelestarian dan pengembangan budaya. Implikasi strategis lainnya adalah kebutuhan untuk terus mengintegrasikan budaya dengan sektor pariwisata secara lebih efektif guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kunjungan wisatawan, sambil tetap menjaga nilai-nilai budaya daerah.

d. Penurunan Kesenjangan gender, dan Peningkatan Perlindungan Anak dan Perempuan Serta Pelayanan Lansia

Isu gender di Kota Salatiga menjadi bagian penting dalam Pembangunan lima tahu ke depan. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Salatiga menunjukkan dinamika yang patut menjadi perhatian serius dengan kondisi yang meningkat ditahun 2024. Peningkatan IKG ini mengisyaratkan adanya kemunduran dalam upaya kesetaraan gender di Salatiga. Hal ini kontras dengan tren positif di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang justru menunjukkan penurunan IKG secara konsisten. Perlindungan terhadap anak juga menjadi perhatian seirus, mengingat masih adanya kasus kekerasan atau eksploitasi anak yang belum tertangani secara optimal, kurangnya akses anak terhadap layanan kesehatan atau pendidikan yang memadai, atau kelemahan dalam sistem pengasuhan alternatif. Sementara itu, disisi lain, Kota Salatiga dihadapkan pada meningkatnya penduduk lansia, yang akan menjadi tekanan besar pada sistem jaminan sosial, pensiun, dan pelayanan kesehatan yang harus disediakan oleh Pemerintah Kota salatiga.

Tantangan terhadap isu kesetaraan di Kota Salatiga bagaimana ke depan mampu meningkatkan partisipasi Perempuan pada bidang ekonomi, politik dan pengambilan Keputusan seta bagaimana Perempuan memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, di mana masih Perempuan masih dihadapkan pada tantangan dalam akses terhadap modal usaha, teknologi, atau informasi yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Selanjutnya, terhadap perlindungan anak, yang menjadi tantangan terkait keberanian dalam pelaporan, pemahaman akan hukum dan ketersediaan akses dan kualitas layanan pendampingan dan pemulihan. Dimungkinkan kasus kekerasan, terutama dalam ranah domestik atau yang melibatkan anak, tidak dilaporkan karena rasa malu, takut, atau ketidaktahuan korban dan keluarga tentang prosedur pelaporan. Sementara itu, tantangan semakin meningkatnya jumlah lansia

di Kota Salatiga memiliki tantangan besar dalam peningkatan beban pelayanan kesehatan, peningkatan ekonomi dan jaminan kesejahteraan menjadi krusial; pemerintah dan masyarakat perlu memastikan kemandirian ekonomi lansia melalui jaminan pensiun yang memadai atau peluang kerja paruh waktu, serta mengelola potensi tekanan pada anggaran daerah Kota Salatiga.

e. Pertumbuhan Ekonomi yang Merata Didukung Investasi dan Produk Unggulan Yang Berdaya Saing

Pertumbuhan ekonomi yang merata berarti peningkatan aktivitas ekonomi terjadi secara adil dan seimbang di seluruh wilayah, tidak hanya terpusat pada wilayah tertentu. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan antar daerah dan memastikan bahwa seluruh masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan. Investasi, baik dari sektor publik maupun swasta, merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, karena menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya beli, serta membantu diversifikasi ekonomi daerah. Selain itu, meningkatnya aktivitas ekonomi akan meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi yang dapat digunakan untuk pembangunan dan layanan publik. Daya saing ekonomi Kota Salatiga perlu difokuskan pada pemanfaatan potensi lokal dengan mendorong peningkatan Usaha Kecil Menengah (UKM), industri, dan pusat-pusat perdagangan.

Fakta pendukung isu ini meliputi peran investasi dalam menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya beli, serta merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Investasi juga membantu dalam diversifikasi ekonomi daerah, mengurangi ketergantungan pada satu atau dua sektor ekonomi, sehingga membuat ekonomi daerah lebih tahan terhadap guncangan. Peningkatan aktivitas ekonomi yang didorong investasi juga akan meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi, yang kemudian dapat digunakan untuk pembangunan lebih lanjut dan penyediaan layanan publik yang lebih baik.

Untuk meningkatkan daya saing ekonomi, fokus diarahkan pada pemanfaatan potensi lokal melalui peningkatan UKM, industri, dan pusat-pusat perdagangan. Akses permodalan UKM dipermudah melalui pinjaman dengan bunga rendah, program hibah, dan inisiatif lainnya. Untuk mendukung pengembangan UKM, pelatihan dan pendidikan bagi pemilik UKM diperluas guna meningkatkan keterampilan manajemen, pemasaran, dan teknologi. Pusat-pusat perdagangan seperti pasar rakyat perlu ditingkatkan standarnya agar memenuhi peraturan yang ada.

Pembinaan terhadap pedagang kaki lima juga perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pendampingan dalam manajemen bisnis, pemasaran, dan inovasi produk, mengingat peran signifikan mereka dalam menyediakan barang dan jasa terjangkau bagi masyarakat. Penataan lokasi pedagang kaki lima juga masih perlu terus dilakukan guna memberikan kenyamanan bagi pembeli maupun masyarakat sekitar.

Implikasi strategis dari isu ini adalah bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi yang terjadi benar-benar merata dan adil di seluruh wilayah, bukan hanya terpusat. Tantangan lainnya adalah bagaimana menarik investasi yang berkelanjutan dan tepat sasaran agar dapat secara efektif menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, terdapat tantangan dalam mempermudah akses permodalan dan meningkatkan keterampilan bagi pelaku UKM agar mereka dapat bersaing. Peningkatan standar dan penataan pusat-pusat perdagangan serta pembinaan pedagang kaki lima juga merupakan implikasi strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif. Secara keseluruhan, tantangan utamanya adalah mencapai diversifikasi ekonomi yang kuat dan memastikan pendapatan daerah yang meningkat dapat dialokasikan secara optimal untuk pembangunan dan layanan publik yang lebih baik.

f. Pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan

Pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya menjadi isu strategis di Kota Salatiga, tetapi juga isu nasional dalam rangka menghadapi tantangan perubahan iklim. Tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk memastikan keberlanjutan dan keseimbangan antara kegiatan manusia dengan ekosistem alam. Tujuan yang ingin dicapai dari pengelolaan lingkungan hidup ditandai dengan meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, penanganan persampahan di Kota Salatiga juga menjadi salah satu isu lingkungan yang perlu diperhatikan, mengingat volume sampah yang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan tingkat pengurangan sampah perkotaan yang masih rendah.

Kualitas pengelolaan lingkungan hidup dilihat berdasarkan tiga komponen utama, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Untuk menjaga kualitas air di Kota Salatiga dalam lima tahun ke depan, masih diperlukan peningkatan konservasi sumber mata air dan pemantauan kualitas air sungai. Terhadap

pengelolaan Kualitas Udara, perlu dilakukan pemantauan kualitas udara ambien yang mewakili area transportasi, pemukiman, perkantoran, dan industri. Sementara itu, untuk mendukung kualitas tutupan lahan, fokus diarahkan pada ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) untuk mencapai pemenuhan luasan minimal sebesar 30 persen dari keseluruhan luas lahan, dengan komposisi 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH privat.

Fakta pendukung lainnya adalah rendahnya tingkat pengurangan sampah perkotaan di Kota Salatiga, yang menjadikan penanganan persampahan sebagai isu lingkungan penting. Volume sampah yang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk menjadi permasalahan utama yang harus diatasi. Sementara itu, tantangan atau implikasi strategis dari isu pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan ini adalah bagaimana menjaga dan meningkatkan IKLH melalui peningkatan IKA, IKU, dan IKL. Ini berarti perlunya upaya serius dalam konservasi sumber mata air dan pemantauan kualitas air sungai, serta pemantauan kualitas udara ambien di berbagai area. Tantangan signifikan lainnya adalah memenuhi target luasan RTH sebesar 30 persen dari total luas lahan, dengan proporsi RTH publik dan privat yang sesuai.

Tingkat pengurangan sampah yang rendah dan volume sampah yang terus meningkat, tantangannya adalah mengembangkan strategi atau teknologi pengelolaan sampah yang lebih efektif dan menyediakan sarana prasarana persampahan yang memadai untuk pengelolaan yang lebih baik dalam lima tahun ke depan. Semua tantangan ini memerlukan komitmen kuat dan implementasi kebijakan yang berkelanjutan untuk memastikan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.

g. Pemenuhan Kualitas dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur

Isu peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur di Kota Salatiga berfokus pada optimalisasi kondisi jalan dan jembatan, infrastruktur transportasi, pemenuhan sarana dan prasarana dasar, penyediaan fasilitas umum, serta dukungan terhadap peningkatan aktivitas ekonomi. Ini berarti memastikan bahwa seluruh wilayah memiliki akses terhadap infrastruktur yang berkualitas untuk menunjang kehidupan masyarakat dan kegiatan ekonomi.

Optimalisasi jalan dan jembatan dalam kondisi mantap masih perlu diupayakan lebih lanjut agar tercapai 100% dalam lima tahun mendatang, termasuk peningkatan fasilitas pendukung seperti trotoar dan drainase. Infrastruktur pendukung transportasi masyarakat meliputi penyediaan halte atau tempat pemberhentian sementara yang aman dan nyaman, peningkatan sarana dan prasarana pendukung terminal C, serta

pemerataan kualitas rambu lalu lintas. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar difokuskan pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk air minum dan sanitasi, rehabilitasi rumah tidak layak huni, dan penurunan luasan kawasan kumuh. Sementara itu, dukungan terhadap penyediaan fasilitas umum dapat difokuskan pada penyediaan fasilitas kreatif dan rekreatif, antara lain dengan meningkatkan jumlah sarana dan prasarana olahraga masyarakat dan taman bermain. Sementara itu, pengembangan infrastruktur guna mendukung perekonomian masyarakat fokus pada peningkatan sarana dan prasarana perdagangan, serta peningkatan infrastruktur pertanian, perikanan, dan peternakan.

Implikasi strategis dari isu ini adalah bagaimana mencapai 100% kondisi mantap untuk jalan dan jembatan dalam lima tahun ke depan, termasuk dengan pembangunan trotoar dan drainase. Tantangan lainnya adalah memastikan pemerataan dan kualitas infrastruktur transportasi, seperti halte, terminal C, dan rambu lalu lintas. Pencapaian SPM untuk air minum dan sanitasi, rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta penurunan kawasan kumuh juga menjadi implikasi strategis yang memerlukan komitmen dan sumber daya. Selain itu, implikasi strategis mencakup bagaimana meningkatkan ketersediaan fasilitas kreatif dan rekreatif, serta bagaimana mengembangkan infrastruktur yang secara langsung mendukung sektor perdagangan, pertanian, perikanan, dan peternakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

h. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Kolaboratif

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang dinamis dan kolaboratif sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan. Isu ini berfokus pada penerapan sistem pemerintahan berbasis digital, penguatan basis data pemerintahan, peningkatan kapasitas dan pembelajaran berkelanjutan bagi pegawai, inovasi dalam pelayanan publik, serta peningkatan pengawasan internal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, transparansi, dan partisipasi dalam layanan pemerintah, serta memastikan pengambilan keputusan yang akurat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Fokus terhadap isu tata kelola pemerintahan yang dinamis dan adaptif lima tahun ke depan mencakup beberapa indikator dan fakta pendukung. Pertama, penerapan sistem pemerintahan berbasis digital, yaitu *e-government* secara menyeluruh, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, transparansi, dan partisipasi dalam layanan pemerintah. Kedua, penguatan basis data pemerintahan yang kuat memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data secara efektif, sehingga membantu dalam pengambilan

keputusan yang didasarkan pada bukti-bukti dan data yang akurat. Ketiga, peningkatan kapasitas dan pembelajaran berkelanjutan dilakukan dengan menyediakan pelatihan dan pengembangan bagi para pegawai pemerintah Kota Salatiga untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi perubahan dan kompleksitas yang terus berkembang. Keempat, inovasi dalam Pelayanan Publik dilakukan dengan mengadopsi teknologi dan praktik terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik, serta merespons kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan efektif. Kelima, peningkatan pengawasan internal dengan memperkuat audit dan evaluasi, pengelolaan risiko, dan menjaga kepatuhan serta integritas.

Tantangan atau Implikasi Strategis dari isu ini adalah bagaimana memastikan implementasi *e-government* secara menyeluruh dan efektif di seluruh lini pemerintahan. Tantangan lainnya adalah bagaimana membangun dan memelihara basis data pemerintahan yang kuat dan selalu *up-to-date* untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Peningkatan kapasitas dan pembelajaran berkelanjutan bagi pegawai juga merupakan tantangan yang membutuhkan komitmen jangka panjang. Selain itu, implikasi strategis mencakup bagaimana mendorong inovasi yang konsisten dalam pelayanan publik agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, serta bagaimana memperkuat sistem pengawasan internal untuk menjaga akuntabilitas dan integritas pemerintahan.

--o0o--

BAB **3** **VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota, ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pencapaian visi dan misi diterjemahkan dalam indikator tujuan dan sasaran pembangunan di Kota Salatiga dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah dan target pencapaian yang telah dimuat dalam dokumen RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045 (Perda No. 7 Tahun 2024).

3.1. Visi dan Misi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029 adalah:

**“Terwujudnya Kota Salatiga Sebagai
Kota **BEDA**: Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif
menuju Salatiga yang Mendunia”**

Makna dari visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Bergerak

Kata "Bergerak" dalam rumusan visi pembangunan Kota Salatiga bermakna bahwa pembangunan Kota Salatiga bertujuan untuk mewujudkan transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif, mewujudkan kota yang produktif, sejahtera, harmonis dan berkemajuan, bergeraknya pembangunan Kota Salatiga secara adil dan merata

2. Energik

"Energik" dalam rumusan visi pembangunan Kota Salatiga bermakna Kota Salatiga dapat mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dalam menggerakkan kemajuan daerah, meningkatkan kesejahteraan, karakter kerja, dan mewujudkan indeks pembangunan manusia yang tinggi, seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada paradigma pembangunan yang inklusif - adil dan merata dengan optimalisasi sektor potensial perdagangan dan jasa, serta didukung sektor strategis ekonomi kreatif, koperasi, Usaha Mikro dan pariwisata.

3. Dinamis

"Dinamis" dalam rumusan visi pembangunan Kota Salatiga bermakna untuk mewujudkan keberadaan pemerintah kota yang mampu mengurus dan memecahkan setiap masalah yang timbul, dengan mengoptimalkan segala sumber daya pemerintahan yang dimiliki, dengan trus aktif

mendayagunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk memaksimalkan pelayanan publik serta berjalannya prinsip kolaborasi pemerintahan Pentahelix (pemerintah, masyarakat, akademisi, swasta dan media), dalam mewujudkan pemerintahan kota yang partisipatif, akuntabel, transparan dan berkelanjutan.

4. Adaptif

"Adaptif" dalam rumusan visi pembangunan Kota Salatiga bermakna untuk mewujudkan Pemerintah dan masyarakat Kota Salatiga yang selalu mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang berbeda, khususnya di tengah arus perubahan sosial, lingkungan dan distrupsi teknologi. Kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan upaya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan yang didukung dengan masyarakat yang adaptif dan inovatif.

Perwujudan Kapasitas inovasi yang tinggi sebagai upaya memperkuat daya saing Kota Salatiga dalam interaksi sosial dan ekonomi di Tingkat nasional bahkan internasional Lingkungan hidup Kota Salatiga harus dibangun untuk mampu menjadi lahan bertumbuhnya insan-insan berkualitas, agile terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karakteristik adaptif karenanya juga ditanamkan khususnya pada pemuda, utamanya Generasi Z dan generasi millenial agar dapat mengembangkan diri serta berkontribusi optimal dalam pembangunan daerah secara produktif dan berkelanjutan

5. Salatiga yang Mendunia

Salatiga Kota "mendunia" berarti dikenal luas di seluruh dunia, atau menjadi salah satu kota yang berperan dalam interaksi hubungan internasional. Salatiga kota "mendunia" juga bisa merujuk pada sikap mental, perilaku, dan cara pandang pemerintah dan warga Kota Salatiga yang mencerminkan semakin luasnya pergaulan dan persaingan dunia. Pada saat yang sama, Kota Salatiga juga memiliki strategi pembangunan dan pemerintahan yang selaras dengan kondisi globalisasi di mana jarak ruang dan batas waktu antara satu komunitas dengan komunitas dunia lainnya juga semakin tidak terbatas (*borderless*).

Pencapaian Visi Kota Salatiga “Terwujudnya Kota Salatiga Sebagai Kota BEDA: Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia” lima tahun ke depan ditetapkan dengan 13 (tiga belas) indikator sasaran utama visi daerah. Ketiga belas Sasaran Visi dirumuskan sebagai alat untuk mengukur tingkat ketercapaian Visi RPJMD Kota Salatiga tahun 2025-2029, yang dituangkan melalui tabel berikut:

POKOK VISI	INDIKATOR SASARAN VISI	BASELINE (2024)	TARGET AKHIR SASARAN VISI (2030)
BERGERAK Transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif	1. Persentase Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	3,86%	3,76-3,37%
	2. Indeks Gini	0,402	0,312
	3. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	78	80
	4. PDRB Perkapita	89,83	140,28-145,28

POKOK VISI	INDIKATOR SASARAN VISI	BASELINE (2024)	TARGET AKHIR SASARAN VISI (2030)
ENERGIK Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul	5. Pertumbuhan Ekonomi	5,34%	7,80%-8,30%
	6. Angka Kemiskinan	4,57%	3,44%-2,54%
	7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	85,72	87,67
DINAMIS Tata Kelola pemerintahan yang baik dan berbasis digital	8. Indeks SPBE/ Pemerintahan Digital	3,64 NA	4,00 1,5
	9. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	80,67	84,00
ADAPTIF Masyarakat yang maju dan berkelanjutan	10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,45	70,16
	11. Indeks Daya Saing Daerah	4,16	6,00
	12. Indeks Inovasi Daerah	51,10	56,00
	13. Penurunan emisi GRK kumulatif	17.696,43	631,314,00
MENUJU SALATIGA YANG MENDUNIA - Berperan dalam interaksi hubungan internasional - Sikap Mental, perilaku dan cara pandang yang mencerminkan luasnya pergaulan dan persaingan dunia - Strategi Pembangunan yang selaras dengan kondisi globalisasi	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	85,72	87,67
	2. Indeks Daya Saing Daerah	4,16	6,00
	3. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	78	80

Dalam rangka menuju pencapaian Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029, ditetapkan melalui 5 (lima) misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing melalui peningkatan Pendidikan, keterampilan dan kesehatan.

Fondasi pembangunan Kota Salatiga adalah sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi dengan didukung pemenuhan aksesibilitas sarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, berstandar internasional. Idealitas tersebut didukung dengan pembentukan profil Kota Salatiga sebagai pusat keunggulan pelayanan pendidikan dan Kesehatan. Kota yang mampu menyediakan ekosistem bagi warganya untuk mengaktualisasikan pengetahuan, keterampilan, dan keahliannya untuk mencapai kualitas hidup yang dicita-citakan.

2. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis sektor unggulan daerah melalui kolaborasi investasi daerah dan permodalan UMKM.

Bonus demografi yang telah terjadi di Kota Salatiga menjadi peluang dan tantangan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun demikian, inklusivitas laju pertumbuhan ekonomi akan dijaga melalui titik berat kebijakan ekonomi daerah yang lebih memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Diharapkan melalui kolaborasi bersama investasi sektor swasta dan perluasan akses layanan

permodalan UMKM akan menurunkan angka pengangguran dan angka penduduk miskin.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap pelayanan publik yang berkualitas melalui peningkatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya aparatur.

Upaya mendorong pemerataan pelayanan publik yang berkualitas memerlukan kompetensi Sumber Daya Aparatur (*supply side*) dan adopsi atau pemanfaatan teknologi informasi. Seiring itu, Upaya peningkatan partisipasi masyarakat Kota Salatiga (*demand side*) dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dapat ditempuh melalui keterbukaan informasi pemerintah yang lebih besar ke data dan dokumen pemerintah. Sinergi kedua sisi (*side*) pelayanan publik tersebut diharapkan memperkuat akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah, koordinasi antar sektor/instansi dalam meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

4. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berorientasi pemanfaatan tata ruang yang inklusif dan berkualitas melalui peningkatan kesadaran Masyarakat, pemanfaatan teknologi dan penegakan hukum.

Upaya mewujudkan profil Kota Salatiga sebagai Kota inklusif, kota yang mampu yang menjamin hak — hak warganya secara setara, khususnya dalam dimensi ketersediaan layanan publik yang nyaman untuk semua. Hal ini memerlukan kualitas tata ruang lingkungan kota sesuai RTRW yang telah disepakati bersama, pengelolaan persampahan, akses air bersih dan sanitasi rumah tangga merata.

5. Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui pemerataan dan peningkatan kualitas.

Pembangunan infrastruktur pelayanan publik dasar di Kota Salatiga diarahkan untuk meningkatkan akses rumah tangga pada kawasan hunian yang sehat, air bersih dan akses sanitasi. Sekaligus dalam misi ke 5 ini adalah kebijakan revitalisasi sarana-sarana publik, termasuk rehabilitasi jalan lingkungan kelurahan dan jalan antar kecamatan untuk mobilisasi orang dan barang.



Gambar 3.1 Visi Misi Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 - 2029

Keterkaitan antara frase yang ada dalam visi terhadap penjabaran misi digambarkan melalui bagan berikut:



Gambar 3.2 Struktur Frase Visi Terhadap Misi RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025–2029

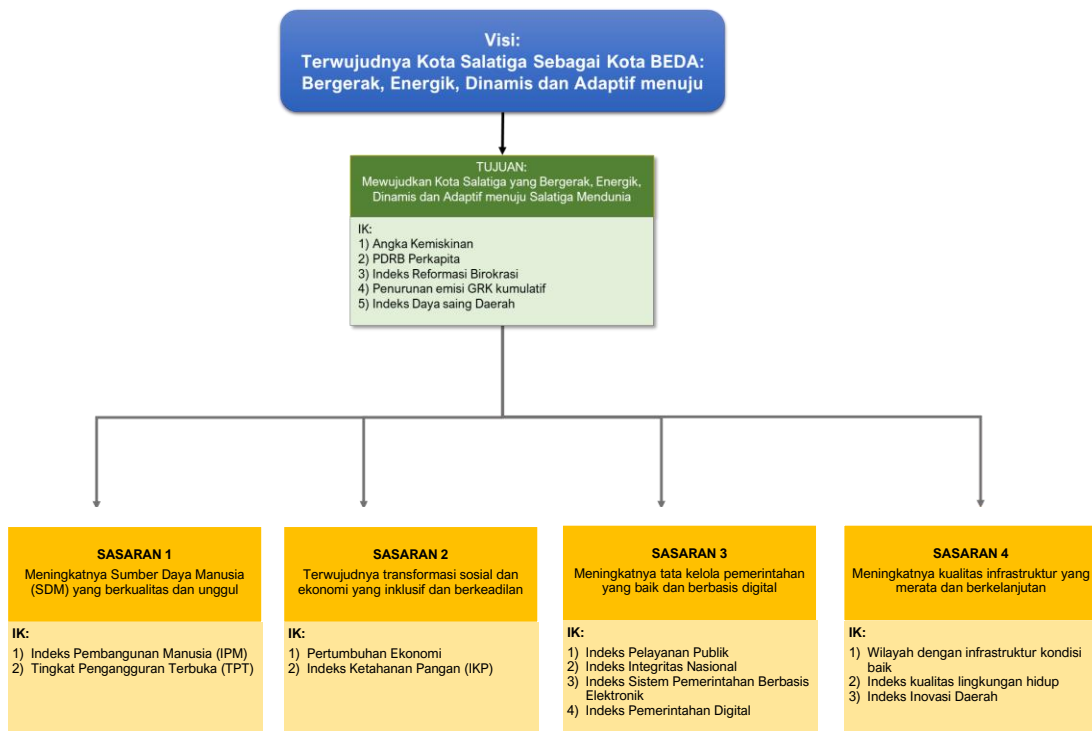
3.2. Tujuan dan Sasaran

Implementasi pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029, dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator kinerjanya sebagai ukuran kinerja bersifat operasional. Pencapaian visi dan misi ditetapkan melalui tujuan *Mewujudkan Kota Salatiga yang Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga Mendunia*, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul
2. Terwujudnya transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan

3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Digital
4. Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.

Gambaran cascading tujuan dan sasaran pembangunan daerah beserta indikator kinerja Kota Salatiga tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.



Gambar 3.3 Cascading Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 – 2029

Penjabaran masing-masing tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pada pencapaian setiap misi di atas ditunjukkan melalui tabel 3.1 berikut ini.



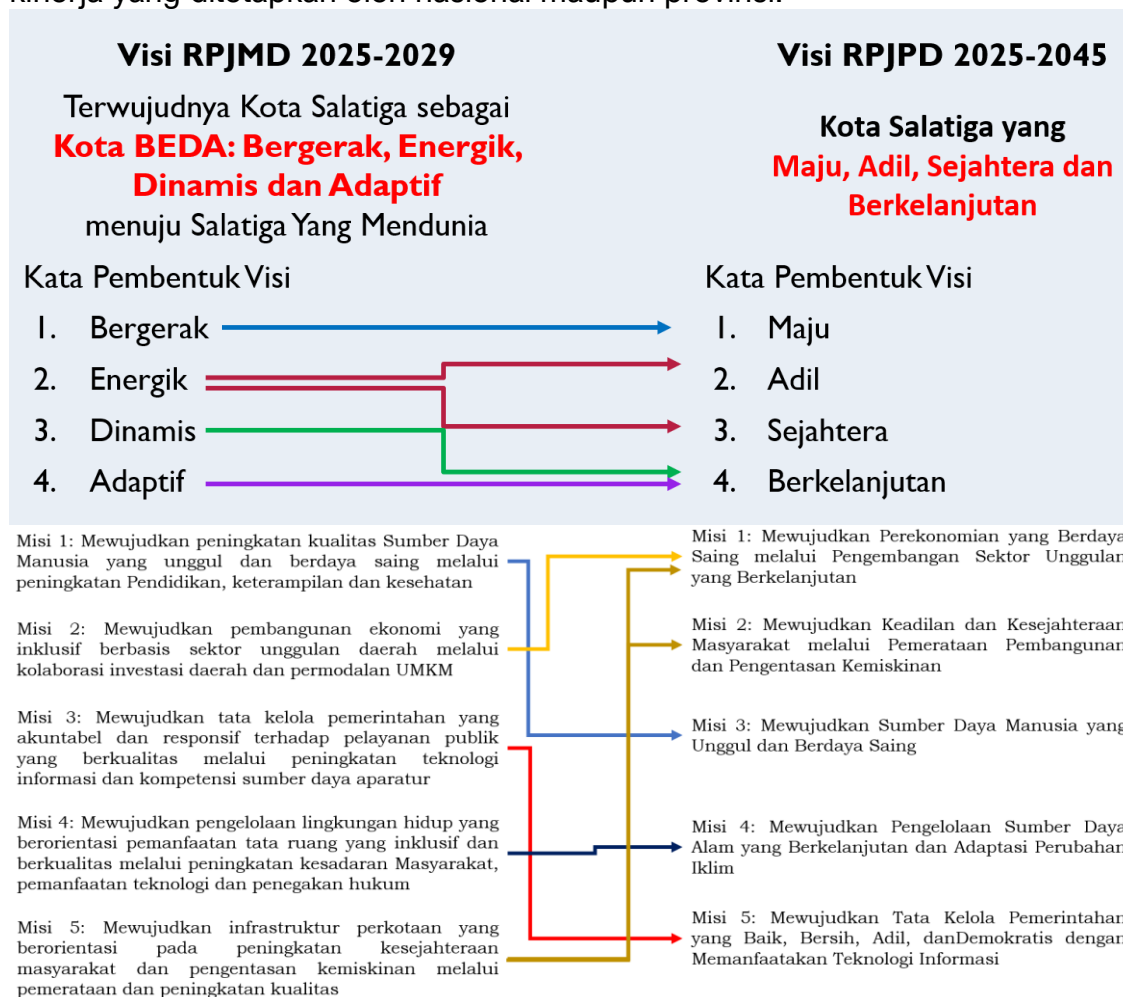
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun		Target Tahun					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mewujudkan Kota Salatiga yang Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga Mendunia		Angka Kemiskinan	Persen	4,66	4,57	4,52-4,24	4,34-4,20	4,30-3,39	4,26-3,00	4,24-2,74	3,44-2,54
		PDRB Perkapita	Juta Rp	84,31	89,83	94,93-98,48	103,48-108,48	112,68-117,68	121,88-126,88	131,08-136,08	140,28-145,28
		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	64,93	80,67	81,35	82,15	82,66	83,15	83,46	84
		Penurunan emisi GRK kumulatif	TonCO2eq	13.289,09	17.696,43	71.295,00	183.298,80	295.302,60	407.306,40	519.310,20	631.314,00
		Indeks Daya saing Daerah		3,77	4,16	4,5	4,84	5,15	5,5	5,75	6,00
	Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	84,99	85,72	85,87	86,43	86,85	87,19	87,48	87,67
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,57	3,86	3,84-3,54	3,84-3,54	3,82-3,52	3,80-3,50	3,78-3,47	3,76-3,37
	Terwujudnya transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	Pertumbuhan ekonomi	Persen	5,34	5,37	5,40-6,10	5,56 – 6,56	6,60-7,60	7,00-7,80	7,40-8,00	7,80-8,30
		Indeks Ketahanan Pangan Daerah (IKP)	Nilai	94,2	91,35	94,34	94,4	94,54	94,61	94,68	94,85
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,33	4,62	4,65	4,68	4,7	4,72	4,74	4,76



Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun		Target Tahun					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Baik dan Berbasis Digital	Indeks Integritas Nasional	Nilai	72,62	78,94	79,49	80,06	80,65	81,27	81,91	82,56
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2,84	3,64	3,69	3,75	3,81	3,87	3,94	4,00
		Indeks Pemerintahan Digital	Nilai	NA	NA	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Wilayah dg Infrastruktur kondisi baik	%	NA	47,48	62,93	64,70	66,04	67,43	68,83	70,29
		Indeks kualitas lingkungan Hidup	Nilai	58,37	61,45	69,93	69,98	70,03	70,07	70,12	70,16
		Indeks Inovasi Daerah	Nilai	44,55	51,10	51,50	52	53	54	55	56

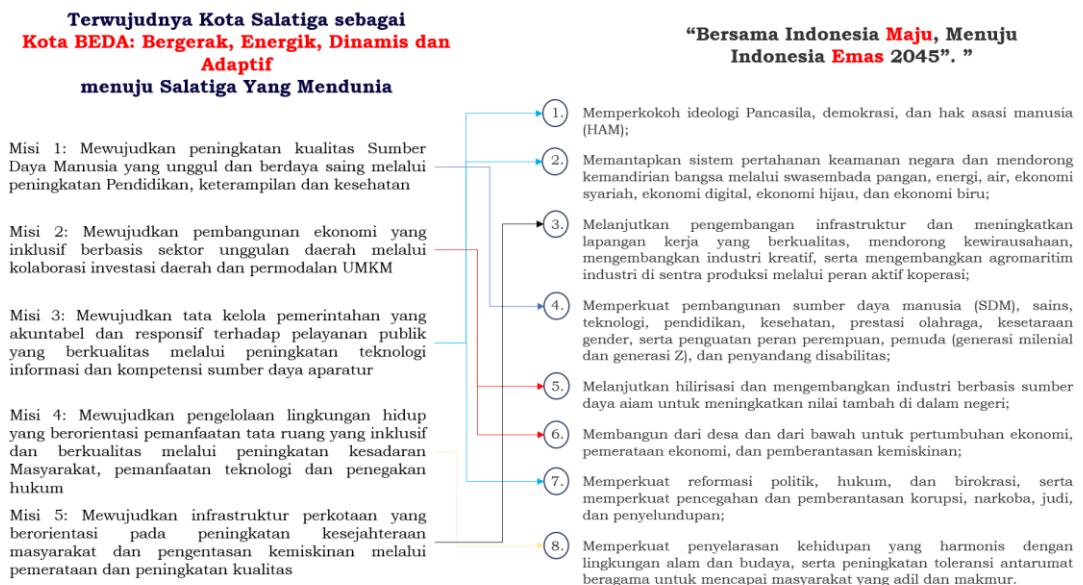
Perencanaan pembangunan daerah tidak hanya mengacu pada perencanaan pembangunan jangka panjang daerah itu sendiri, tetapi merupakan bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari perencanaan pembangunan provinsi maupun nasional. Ini merupakan salah satu implikasi dari asas desentralisasi yang mana diperlukan adanya pola hubungan pusat-daerah dalam mewujudkan pembangunan, oleh karena itu dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kota Salatiga dalam penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan target kinerja yang ditetapkan oleh nasional maupun provinsi.



Gambar 3.4 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD 2025–2029 dengan Visi dan Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045



Gambar 3.5 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025–2029 dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029



Gambar 3.6 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025–2029 dengan Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025–2029

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029, Kota Salatiga menjadi bagian dari lokasi priortas atas kebijakan pengembangan wilayah nasional dan proyek strategis nasional di wilayah Kedungsepur. Kota Salatiga terhadap prioritas pembangunan Jawa Tengah/WP Kedungsepur diprioritaskan untuk pengembangan kawasan Perkotaan Salatiga (tematik kota pendidikan) sebagai Kota Satelit dari WM Semarang, antara lain melalui:

1. Penyusunan masterplan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu.
2. Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau.
3. Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/ pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan.
4. Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan.

3.3. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.3.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Merumuskan strategi pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029 sangat penting karena menjadi landasan arah pembangunan yang terukur, terstruktur, dan sesuai dengan potensi serta kebutuhan lokal. Strategi dalam RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah ataupun upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Sementara itu arah kebijakan merupakan kerangka strategis yang menunjukkan tujuan, prioritas, dan fokus utama pembangunan berdasarkan pada target yang ingin dicapai dalam misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kota Salatiga tahun 2025-2029.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Salatiga tahun 2025-2029 dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang dijabarkan berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut.

1. **Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul,** dengan strategi dan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan kualitas pendidikan dan literasi masyarakat secara merata, dengan arah kebijakan difokuskan pada:
 - 1) Meningkatkan kualitas dan pemerataan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan kurikulum berbasis digital pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah menuju Pendidikan Salatiga Standar Internasional
 - 2) Meningkatkan dukungan kelembagaan dan operasional pada pendidikan kesetaraan dan lembaga keterampilan dalam pembelajaran kewirausahaan berorientasi global
 - 3) Mengembangkan komunitas pembelajaran bahasa dan keterampilan komunikasi internasional (Bahasa Inggris, Bahasa Arab dan Bahasa Cina)
 - 4) Mengembangkan pembelajaran inklusif pada setiap sekolah untuk menjamin pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan memberikan kesetaraan.
 - 5) Pemetaan dan pendataan anak-anak dari keluarga miskin yang membutuhkan akses pendidikan, didukung dengan penyediaan lokasi

- dan SDM dalam mendukung implementasi sekolah rakyat di Kota Salatiga
- 6) Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan dan naskah kuno serta pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan di Kota Salatiga.
- b. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, dengan arah kebijakan difokuskan pada:
- 1) Meningkatkan kualitas SDM dan fasilitas puskesmas, rumah sakit daerah berstandar internasional, dan klinik kesehatan daerah yang berkualitas dan modern didukung dengan sistem layanan terintegrasi
 - 2) Meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat untuk mendukung promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya hidup sehat, kesehatan mental, pencegahan penyakit menular dan tidak menular
 - 3) Meningkatkan jaminan pemerliharaan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan
- c. Peningkatan kebugaran masyarakat dan Daya Saing Olahraga, dengan arah kebijakan difokuskan pada:
- 1) Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat
 - 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga dan pengembangan potensi atlet lokal
 - 3) Mengembangkan kerjasama pemerintah kota dan sektor swasta dengan berbagai kemitraan dalam penyediaan fasilitas dan jejaring penyaluran atlet berprestasi.
- d. Peningkatan apresiasi, pengembangan dan pelestarian seni dan budaya daerah, dengan arah kebijakan difokuskan pada:
- 1) Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, pemberdayaan pelaku seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi dan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat identitas dan keberlangsungan budaya daerah
 - 2) Meningkatkan fasilitas, koleksi dan aksesibilitas museum, serta pembinaan sejarah daerah
- e. Peningkatan kualitas perlindungan perempuan dan anak serta kesejahteraan keluarga, dengan arah kebijakan difokuskan pada:
- 1) Penguatan regulasi dan kebijakan perlindungan perempuan dan anak serta kesejahteraan keluarga
 - 2) Meningkatkan pembangunan berbasis gender dan anak
 - 3) Penguatan pencegahan dan sistem layanan perlindungan terhadap pencegahan kekerasan dan diskriminasi
 - 4) Meningkatkan kualitas pengendalian penduduk dan keluarga berkualitas

2. Terwujudnya transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, dengan strategi dan arah kebijakan:

- a. Pengembangan potensi sektor unggulan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan arah kebijakan difokuskan pada:
 - 1) Meningkatkan investasi dalam mendukung kapasitas produksi daerah didukung peningkatan kondisi iklim investasi yang kondusif dengan pengembangan SDM, teknologi dan promosi potensi daerah secara masif
 - 2) Pemberdayaan dan penguatan kapasitas UMKM untuk mendukung kualitas produk dan jejaring usaha
 - 3) Meningkatkan kualitas manajerial dan keuangan bagi pengurus koperasi dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi
 - 4) Menumbuhkembangkan kewirausahaan pemuda dalam mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal
 - 5) Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan perdagangan dalam perekonomian daerah
 - 6) Meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja
 - 7) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan mendorong digitalisasi serta kemitraan/kolaborasi antara pedagang dan UMKM untuk menghasilkan produk kualitas ekspor
 - 8) Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi.
 - 9) Memastikan pelaku usaha melakukan analisis kajian dampak lingkungan pada kegiatan usaha dan mendorong inovasi teknologi ramah lingkungan dalam mendukung penerapan ekonomi hijau di daerah
- b. Peningkatan pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif, dengan arah kebijakan difokuskan pada:
 - 1) Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS
 - 2) Mengembangkan ketahanan pangan berbasis komunitas, pengembangan urban farming, memperluas kerjasama antara petani, pedagang, dan konsumen untuk menciptakan sistem pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan
 - 3) Meningkatkan infrastruktur dan teknologi pertanian guna mempercepat hilirisasi produk pertanian yang didukung dengan pemberdayaan kelompok dalam meningkatkan produksi pertanian
 - 4) Meningkatkan produksi peternakan dan perikanan budidaya lokal didukung pelatihan, teknologi, dan akses terhadap bibit unggul dan akses pasar.
- c. Pengembangan program upaya lintas sektor dalam pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat serta sinergitas

program dalam mengurangi kantong kemiskinan, dengan arah kebijakan difokuskan pada:

- 1) Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat
 - 2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penguatan aktivitas usaha dalam mendukung peningkatan pendapatan
 - 3) Melakukan sinergitas kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin
- d. Peningkatan kondusivitas wilayah dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi, dengan arah kebijakan difokuskan pada:
- 1) Penguatan kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat melalui peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dalam berbagai kegiatan guna meningkatkan cinta tanah air, nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari
 - 2) Meningkatkan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, memastikan pendekatan yang humanis dan berbasis pada keadilan sosial

3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Digital, dengan strategi dan arah kebijakan:

- a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital, dengan arah kebijakan difokuskan pada:
- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dan selaras dengan perencanaan nasional.
 - 2) Meningkatkan kualitas dan budaya kerja ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan masyarakat
 - 3) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengembangan aset produktif dan mengembangkan sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi jangka panjang
 - 4) Mengembangkan satu data Salatiga sebagai data center terintegrasi yang aman dan efisien.
 - 5) Meningkatkan sistem pengelolaan kemananan informasi daerah
 - 6) Meningkatkan sistem pengawasan internal, penegakan kode etik bagi ASN, penguatan whistleblowing system, penguatan saluran pengaduan masyarakat yang responsif dan pengembangan zona integritas.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima, dengan arah kebijakan difokuskan pada:
- 1) Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat
 - 2) Memastikan bahwa seluruh pelayanan publik di setiap sektor memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat atau

daerah, serta melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- 3) Perluasan jaringan internet broadband dan penyediaan akses WiFi publik di fasilitas layanan umum
- 4) Pengembangan aplikasi layanan publik berbasis web dan mobile serta pengembangan konten.
- 5) Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan serta jangkauan layanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan, dan memperkuat koordinasi dan kerjasama dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan perangkat daerah ditingkat kecamatan dan kelurahan
- 7) Meningkatkan peran kelembagaan ditingkat kecamatan dan kelurahan (PKK, LPMK dll) dalam pelaksanaan pemberdayaan, monitoring dan evaluasi pembangunan terutama dalam mendukung tercapainya kecamatan berdaya.
- 8) Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip daerah yang didukung pemanfaatan teknologi informasi
- 9) Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang efektif dan efisien

4. Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, dengan strategi dan arah kebijakan:

- a. Peningkatan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, dengan arah kebijakan difokuskan pada:
 - 1) Meningkatkan kualitas penataan ruang, pengelolaan pertanahan dan penyediaan infrastruktur perkotaan pada berbagai bidang secara merata
 - 2) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar (air minum, sanitasi dan rumah layak) bagi masyarakat.
 - 3) Mengembangkan sistem manajemen transportasi cerdas guna meningkatkan efisiensi, keselamatan dan kenyamanan sistem transportasi
- b. Peningkatan kualitas lingkungan perkotaan yang didukung dengan masyarakat yang adaptif dan inovatif, dengan arah kebijakan difokuskan pada:
 - 1) Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan secara konsisten yang didukung dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat
 - 2) Meningkatkan sistem peringatan dini dan koordinasi antar instansi terkait dalam pencegahan dan penanggulangan bencana maupun peristiwa kebakaran
 - 3) Mengembangkan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

- 4) Melakukan fasilitasi kemitraan untuk pemanfaatan sumber potensi energi lokal terbarukan pada skala kecil dan mengidentifikasi potensi investasi hijau di wilayah kelurahan

Strategi dan arah kebijakan Kota Salatiga dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan dalam Rangka Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Kota Salatiga yang Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga Mendunia	Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul	Peningkatan kualitas pendidikan dan literasi masyarakat secara merata	Meningkatkan kualitas dan pemerataan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan kurikulum berbasis digital pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah menuju Pendidikan Salatiga Standar Internasional
			Meningkatkan dukungan kelembagaan dan operasional pada pendidikan kesetaraan dan lembaga keterampilan dalam pembelajaran kewirausahaan berorientasi global
			Mengembangkan komunitas pembelajaran bahasa dan keterampilan komunikasi internasional (Bahasa Inggris, Bahasa Arab dan Bahasa Cina)
			Mengembangkan pembelajaran inklusif pada setiap sekolah untuk menjamin pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan memberikan kesetaraan.
			Pemetaan dan pendataan anak-anak dari keluarga miskin yang membutuhkan akses pendidikan, didukung dengan penyediaan lokasi dan SDM dalam mendukung implementasi sekolah rakyat di Kota Salatiga
			Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan dan naskah kuno serta pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan di Kota Salatiga.
		Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas SDM dan fasilitas puskesmas, rumah sakit daerah berstandar internasional, dan klinik kesehatan daerah yang berkualitas dan modern didukung dengan sistem layanan terintegrasi
			Meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat untuk mendukung promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			hidup sehat, kesehatan mental, pencegahan penyakit menular dan tidak menular
			Meningkatkan jaminan pemerliiharaan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan
		Peningkatan kebugaran masyarakat dan Daya Saing Olahraga	Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga dan pengembangan potensi atlet lokal
			Mengembangkan kerjasama pemerintah kota dan sektor swasta dengan berbagai kemitraan dalam penyediaan fasilitas dan jejaring penyaluran atlet berprestasi
		Peningkatan apresiasi, pengembangan dan pelestarian seni dan budaya daerah	Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, pemberdayaan pelaku seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi dan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat identitas dan keberlangsungan budaya daerah
			Meningkatkan fasilitas, koleksi dan aksesibilitas museum, serta pembinaan sejarah daerah
		Peningkatan kualitas perlindungan perempuan dan anak serta kesejahteraan keluarga	Penguatan regulasi dan kebijakan perlindungan perempuan dan anak serta kesejahteraan keluarga
			Meningkatkan pembangunan berbasis gender dan anak
			Penguatan pencegahan dan sistem layanan perlindungan terhadap pencegahan kekerasan dan diskriminasi
			Meningkatkan kualitas pengendalian penduduk dan keluarga berkualitas
	Terwujudnya transformasi sosial dan	Pengembangan potensi sektor unggulan daerah	Meningkatkan investasi dalam mendukung kapasitas produksi daerah didukung peningkatan kondisi iklim investasi yang kondusif



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	terhadap pertumbuhan ekonomi	dengan pengembangan SDM, teknologi dan promosi potensi daerah secara masif
			Pemberdayaan dan penguatan kapasitas UMKM untuk mendukung kualitas produk dan jejaring usaha
			Meningkatkan kualitas manajerial dan keuangan bagi pengurus koperasi dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi
			Menumbuhkembangkan kewirausahaan pemuda dalam mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal
			Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan perdagangan dalam perekonomian daerah
			Meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja
			Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan mendorong digitalisasi serta kemitraan/kolaborasi antara pedagang dan UMKM untuk menghasilkan produk kualitas ekspor
			Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi.
			Memastikan pelaku usaha melakukan analisis kajian dampak lingkungan pada kegiatan usaha dan mendorong inovasi teknologi ramah lingkungan dalam mendukung penerapan ekonomi hijau di daerah
		Peningkatkan pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk	Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		hidup sehat, aktif dan produktif	
			Mengembangkan ketahanan pangan berbasis komunitas, pengembangan urban farming, memperluas kerjasama antara petani, pedagang, dan konsumen untuk menciptakan sistem pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan
			Meningkatkan infrastruktur dan teknologi pertanian guna mempercepat hilirisasi produk pertanian yang didukung dengan pemberdayaan kelompok dalam meningkatkan produksi pertanian
			Meningkatkan produksi peternakan dan perikanan budidaya lokal didukung pelatihan, teknologi, dan akses terhadap bibit unggul dan akses pasar.
		Pengembangan program upaya lintas sektor dalam pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat serta sinergitas program dalam mengurangi kantong kemiskinan	Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat
			Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penguatan aktivitas usaha dalam mendukung peningkatan pendapatan
			Melakukan sinergitas kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin
		Peningkatan kondusivitas wilayah dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi	Penguatan kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat melalui peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dalam berbagai kegiatan guna meningkatkan cinta



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			tanah air, nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari
			Meningkatkan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, memastikan pendekatan yang humanis dan berbasis pada keadilan sosial
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Digital	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital	Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dan selaras dengan perencanaan nasional.
			Meningkatkan kualitas dan budaya kerja ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan masyarakat
			Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengembangan aset produktif dan mengembangkan sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi jangka panjang
			Mengembangkan satu data Salatiga sebagai data center terintegrasi yang aman dan efisien.
			Meningkatkan sistem pengelolaan kemananan informasi daerah
			Meningkatkan sistem pengawasan internal, penegakan kode etik bagi ASN, penguatan whistleblowing system, penguatan saluran pengaduan masyarakat yang responsif dan pengembangan zona integritas.
		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat
			Memastikan bahwa seluruh pelayanan publik di setiap sektor memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah, serta melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
			Perluasan jaringan internet broadband dan penyediaan akses WiFi publik di fasilitas layanan umum



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Pengembangan aplikasi layanan publik berbasis web dan mobile serta pengembangan konten.
			Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan serta jangkauan layanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat
			Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan, dan memperkuat koordinasi dan kerjasama dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan perangkat daerah ditingkat kecamatan dan kelurahan
			Meningkatkan peran kelembagaan ditingkat kecamatan dan kelurahan (PKK, LPMK dll) dalam pelaksanaan pemberdayaan, monitoring dan evaluasi pembangunan terutama dalam mendukung tercapainya kecamatan berdaya.
			Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip daerah yang didukung pemanfaatan teknologi informasi
			Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang efektif dan efisien
	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Peningkatan pembangunan infrastruktur daerah yang merata	Meningkatkan kualitas penataan ruang, pengelolaan pertanahan dan penyediaan infrastruktur perkotaan pada berbagai bidang secara merata
			Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar (air minum, sanitasi dan rumah layak) bagi masyarakat.
			Mengembangkan sistem manajemen transportasi cerdas guna meningkatkan efisiensi, keselamatan dan kenyamanan sistem transportasi
		Peningkatan kualitas lingkungan perkotaan yang didukung dengan	Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan secara konsisten yang didukung dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		masyarakat yang adaptif dan inovatif	
			Meningkatkan sistem peringatan dini dan koordinasi antar instansi terkait dalam pencegahan dan penanggulangan bencana maupun peristiwa kebakaran
			Mengembangkan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.
			Melakukan fasilitasi kemitraan untuk pemanfaatan sumber potensi energi lokal terbarukan pada skala kecil dan mengidentifikasi potensi investasi hijau di wilayah kelurahan

Sejalan dengan beberapa strategi yang sudah ditetapkan, maka perlu kebijakan yang memberikan arahan secara fokus dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada masing-masing misi. Arah kebijakan ditetapkan selama lima tahun perencanaan dengan model target pentahapan setiap tahunnya. Arah kebijakan akan menjadi acuan dan pedoman penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya selama periode tahun 2025-2029. Gambaran arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan fokus prioritas setiap tahunnya ditunjukkan melalui bagan di bawah ini.



Gambar 3.7 Penahapan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025 - 2029

Penjabaran atas pentahapan kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Tahun 2026

Arah kebijakan tahun 2026 yaitu Pengembangan Kota Salatiga sebagai jaringan distribusi pangan lokal untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan yang didukung oleh infrastruktur berkualitas yang mempermudah akses pasar, dengan difokuskan pada:

- Mengembangkan ketahanan pangan berbasis komunitas, pengembangan urban farming, memperluas kerjasama antara petani, pedagang, dan konsumen untuk menciptakan sistem pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan
- Meningkatkan infrastruktur dan teknologi pertanian guna mempercepat hilirisasi produk pertanian yang didukung dengan pemberdayaan kelompok dalam meningkatkan produksi pertanian
- Meningkatkan produksi peternakan dan perikanan budidaya lokal didukung pelatihan, teknologi, dan akses terhadap bibit unggul dan akses pasar.

Pembangunan tahap pertama selain difokuskan pada peningkatan ketahanan pangan daerah, juga diarahkan pada **Peningkatan Pembangunan SDM dan pengelolaan potensi perekonomian daerah didukung**

pemerintahan berintegritas dan infrastruktur berkualitas, yang diprioritaskan pada:

- a. Meningkatkan kualitas dan pemerataan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan kurikulum berbasis digital pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah menuju Pendidikan Salatiga Standar Internasional
- b. Pemetaan dan pendataan anak-anak dari keluarga miskin yang membutuhkan akses pendidikan, didukung dengan penyediaan lokasi dan SDM dalam mendukung implementasi sekolah rakyat di Kota Salatiga
- c. Meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat untuk mendukung promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya hidup sehat, kesehatan mental, pencegahan penyakit menular dan tidak menular
- d. Meningkatkan jaminan pemerliiharaan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga dan pengembangan potensi atlet lokal
- f. Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, pemberdayaan pelaku seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi dan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat identitas dan keberlangsungan budaya daerah
- g. Penguatan regulasi dan kebijakan perlindungan perempuan dan anak serta kesejahteraan keluarga
- h. Pemberdayaan dan penguatan kapasitas UMKM untuk mendukung kualitas produk dan jejaring usaha
- i. Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat
- j. Penguatan kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat melalui peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dalam berbagai kegiatan guna meningkatkan cinta tanah air, nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari
- k. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dan selaras dengan perencanaan nasional.
- l. Meningkatkan sistem pengelolaan kemananan informasi daerah
- m. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat
- n. Perluasan jaringan internet broadband dan penyediaan akses WiFi publik di fasilitas layanan umum
- o. Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan, dan memperkuat koordinasi dan kerjasama dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan perangkat daerah ditingkat kecamatan dan kelurahan
- p. Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip daerah yang didukung pemanfaatan teknologi informasi
- q. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang efektif dan efisien
- r. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar (air minum, sanitasi dan rumah layak) bagi masyarakat.

- s. Mengembangkan sistem manajemen transportasi cerdas guna meningkatkan efisiensi, keselamatan dan kenyamanan sistem transportasi
- t. Meningkatkan sistem peringatan dini dan koordinasi antar instansi terkait dalam pencegahan dan penanggulangan bencana maupun peristiwa kebakaran
- u. Mengembangkan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

2. Arah Kebijakan Tahun 2027

Arah kebijakan tahun 2027 yaitu pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul, yang difokuskan pada:

- a. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan perdagangan dalam perekonomian daerah
- b. Mengembangkan komunitas pembelajaran bahasa dan keterampilan komunikasi internasional (Bahasa Inggris, Bahasa Arab dan Bahasa Cina)
- c. Meningkatkan dukungan kelembagaan dan operasional pada pendidikan kesetaraan dan lembaga keterampilan dalam pembelajaran kewirausahaan berorientasi global
- d. Meningkatkan kualitas SDM dan fasilitas puskesmas, rumah sakit daerah berstandar internasional, dan klinik kesehatan daerah yang berkualitas dan modern didukung dengan sistem layanan terintegrasi
- e. Meningkatkan kualitas dan pemerataan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan kurikulum berbasis digital pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah menuju Pendidikan Salatiga Standar Internasional

Pembangunan tahap kedua selain difokuskan pada pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul, juga diarahkan pada **Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup**, yang diprioritaskan pada:

- a. Mengembangkan pembelajaran inklusif pada setiap sekolah untuk menjamin pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan memberikan kesetaraan.
- b. Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan dan naskah kuno serta pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan di Kota Salatiga.
- c. Meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat untuk mendukung promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya hidup sehat, kesehatan mental, pencegahan penyakit menular dan tidak menular
- d. Meningkatkan jaminan pemerliharan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan

- e. Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat
- f. Meningkatkan investasi dalam mendukung kapasitas produksi daerah didukung peningkatan kondisi iklim investasi yang kondusif dengan pengembangan SDM, teknologi dan promosi potensi daerah secara masif
- g. Meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja
- h. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan mendorong digitalisasi serta kemitraan/kolaborasi antara pedagang dan UMKM untuk menghasilkan produk kualitas ekspor
- i. Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi.
- j. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS
- k. Mengembangkan ketahanan pangan berbasis komunitas, pengembangan urban farming, memperluas kerjasama antara petani, pedagang, dan konsumen untuk menciptakan sistem pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan
- l. Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat
- m. Penguatan kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat melalui peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dalam berbagai kegiatan guna meningkatkan cinta tanah air, nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari
- n. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengembangan aset produktif dan mengembangkan sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi jangka panjang
- o. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat
- p. Perluasan jaringan internet broadband dan penyediaan akses WiFi publik di fasilitas layanan umum
- q. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan serta jangkauan layanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat
- r. Meningkatkan peran kelembagaan ditingkat kecamatan dan kelurahan (PKK, LPMK dll) dalam pelaksanaan pemberdayaan, monitoring dan evaluasi pembangunan terutama dalam mendukung tercapainya kecamatan berdaya.
- s. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang efektif dan efisien
- t. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan secara konsisten yang didukung dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat
- u. Mengembangkan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

3. Arah Kebijakan Tahun 2028

Arah kebijakan tahun 2028 yaitu pemerataan perekonomian daerah yang maju dan inklusif dengan infrastruktur kota yang terintegrasi dan ramah lingkungan, yang difokuskan pada:

- a. Meningkatkan investasi dalam mendukung kapasitas produksi daerah didukung peningkatan kondisi iklim investasi yang kondusif dengan pengembangan SDM, teknologi dan promosi potensi daerah secara masif
- b. Pemberdayaan dan penguatan kapasitas UMKM untuk mendukung kualitas produk dan jejaring usaha
- c. Menumbuhkembangkan kewirausahaan pemuda dalam mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal
- d. Meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja
- e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan mendorong digitalisasi serta kemitraan/kolaborasi antara pedagang dan UMKM untuk menghasilkan produk kualitas ekspor
- f. Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi.
- g. Memastikan pelaku usaha melakukan analisis kajian dampak lingkungan pada kegiatan usaha dan mendorong inovasi teknologi ramah lingkungan dalam mendukung penerapan ekonomi hijau di daerah

Pembangunan tahap ketiga selain difokuskan pada pemerataan perekonomian daerah yang maju dan inklusif dengan infrastruktur kota yang terintegrasi dan ramah lingkungan, juga diarahkan pada **penguatan daya saing sumber daya manusia dan perekonomian daerah didukung pemerintahan yang akuntabel berbasis digital, dan Infrastruktur berkualitas sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan**, yang diprioritaskan pada:

- a. Meningkatkan kualitas dan pemerataan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan kurikulum berbasis digital pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah menuju Pendidikan Salatiga Standar Internasional
- b. Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan dan naskah kuno serta pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan di Kota Salatiga.
- c. Meningkatkan kualitas SDM dan fasilitas puskesmas, rumah sakit daerah berstandar internasional, dan klinik kesehatan daerah yang berkualitas dan modern didukung dengan sistem layanan terintegrasi
- d. Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat
- e. Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, pemberdayaan pelaku seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi dan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat identitas dan keberlangsungan budaya daerah
- f. Penguatan pencegahan dan sistem layanan perlindungan terhadap pencegahan kekerasan dan diskriminasi

- g. Meningkatkan kualitas pengendalian penduduk dan keluarga berkualitas
 - h. Meningkatkan kualitas manajerial dan keuangan bagi pengurus koperasi dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi
 - i. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan perdagangan dalam perekonomian daerah
 - j. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan mendorong digitalisasi serta kemitraan/kolaborasi antara pedagang dan UMKM untuk menghasilkan produk kualitas ekspor
 - k. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS
 - l. Meningkatkan infrastruktur dan teknologi pertanian guna mempercepat hilirisasi produk pertanian yang didukung dengan pemberdayaan kelompok dalam meningkatkan produksi pertanian
 - m. Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat
 - n. Penguatan kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat melalui peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dalam berbagai kegiatan guna meningkatkan cinta tanah air, nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari
 - o. Meningkatkan kualitas dan budaya kerja ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan masyarakat
 - p. Mengembangkan satu data Salatiga sebagai data center terintegrasi yang aman dan efisien.
 - q. Meningkatkan sistem pengelolaan kemananan informasi daerah
 - r. Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan, dan memperkuat koordinasi dan kerjasama dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan perangkat daerah ditingkat kecamatan dan kelurahan
 - s. Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip daerah yang didukung pemanfaatan teknologi informasi
 - t. Meningkatkan kualitas penataan ruang, pengelolaan pertanahan dan penyediaan infrastruktur perkotaan pada berbagai bidang secara merata
 - u. Mengembangkan sistem manajemen transportasi cerdas guna meningkatkan efisiensi, keselamatan dan kenyamanan sistem transportasi
 - v. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan secara konsisten yang didukung dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat
 - w. Mengembangkan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.
4. Arah Kebijakan Tahun 2029
- Arah kebijakan tahun 2029 yaitu Menumbuhkan Daya Saing Daerah melalui Inovasi menuju Salatiga sebagai Kota yang Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif, yang difokuskan pada:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dan selaras dengan perencanaan nasional.
- b. Meningkatkan sistem pengawasan internal, penegakan kode etik bagi ASN, penguatan whistleblowing system, penguatan saluran pengaduan masyarakat yang responsif dan pengembangan zona integritas.
- c. Memastikan bahwa seluruh pelayanan publik di setiap sektor memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah, serta melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Mengembangkan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.
- e. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengembangan aset produktif dan mengembangkan sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi jangka panjang
- f. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan secara konsisten yang didukung dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat

Pembangunan tahap keempat selain difokuskan pada Menumbuhkan Daya Saing Daerah, juga diarahkan pada **Pemantapan sumber daya manusia yang unggul dan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi didukung pemerintahan yang dinamis, adaptif dan modern, infrastruktur yang merata, dan lingkungan hidup berkualitas**, yang diprioritaskan pada:

- a. Meningkatkan dukungan kelembagaan dan operasional pada pendidikan kesetaraan dan lembaga keterampilan dalam pembelajaran kewirausahaan berorientasi global
- b. Meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat untuk mendukung promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya hidup sehat, kesehatan mental, pencegahan penyakit menular dan tidak menular
- c. Meningkatkan jaminan pemerliharan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga dan pengembangan potensi atlet lokal
- e. Mengembangkan kerjasama pemerintah kota dan sektor swasta dengan berbagai kemitraan dalam penyediaan fasilitas dan jejaring penyaluran atlet berprestasi
- f. Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, pemberdayaan pelaku seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi dan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat identitas dan keberlangsungan budaya daerah
- g. Meningkatkan fasilitas, koleksi dan aksesibilitas museum, serta pembinaan sejarah daerah
- h. Penguatan regulasi dan kebijakan perlindungan perempuan dan anak serta kesejahteraan keluarga
- i. Penguatan pencegahan dan sistem layanan perlindungan terhadap pencegahan kekerasan dan diskriminasi
- j. Meningkatkan kualitas pengendalian penduduk dan keluarga berkualitas

- k. Pemberdayaan dan penguatan kapasitas UMKM untuk mendukung kualitas produk dan jejaring usaha
 - l. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan perdagangan dalam perekonomian daerah
 - m. Meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja
 - n. Meningkatkan produksi peternakan dan perikanan budidaya lokal didukung pelatihan, teknologi, dan akses terhadap bibit unggul dan akses pasar.
 - o. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penguatan aktivitas usaha dalam mendukung peningkatan pendapatan
 - p. Melakukan sinergitas kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin
 - q. Mengembangkan satu data Salatiga sebagai data center terintegrasi yang aman dan efisien.
 - r. Pengembangan aplikasi layanan publik berbasis web dan mobile serta pengembangan konten.
 - s. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan serta jangkauan layanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat
 - t. Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip daerah yang didukung pemanfaatan teknologi informasi
 - u. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang efektif dan efisien
5. Arah Kebijakan Tahun 2030
- Arah kebijakan tahun 2030 yaitu Perwujudan Kota Salatiga sebagai Kota Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia, yang difokuskan pada:
- a. Mengembangkan pembelajaran inklusif pada setiap sekolah untuk menjamin pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan memberikan kesetaraan.
 - b. Meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat untuk mendukung promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya hidup sehat, kesehatan mental, pencegahan penyakit menular dan tidak menular
 - c. Meningkatkan jaminan pemerliharan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan
 - d. Penguatan pencegahan dan sistem layanan perlindungan terhadap pencegahan kekerasan dan diskriminasi
 - e. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS
 - f. Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, pemberdayaan pelaku seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi dan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat identitas dan keberlangsungan budaya daerah
 - g. Meningkatkan kualitas penataan ruang, pengelolaan pertanahan dan penyediaan infrastruktur perkotaan pada berbagai bidang secara merata

- h. Mengembangkan sistem manajemen transportasi cerdas guna meningkatkan efisiensi, keselamatan dan kenyamanan sistem transportasi.

Pembangunan tahap kelima selain difokuskan pada Perwujudan Kota Salatiga sebagai Kota BEDA, juga diarahkan pada **Pemerataan SDM yang unggul dan produktif, perekonomian daerah yang maju dan inklusif, pelayanan publik berkualitas, dan Infrastruktur Kewilayahan yang terintegrasi dan ramah lingkungan**, yang diprioritaskan pada:

- a. Mengembangkan pembelajaran inklusif pada setiap sekolah untuk menjamin pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan memberikan kesetaraan.
- b. Meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat untuk mendukung promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya hidup sehat, kesehatan mental, pencegahan penyakit menular dan tidak menular
- c. Meningkatkan jaminan pemerlihaaran kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga dan pengembangan potensi atlet lokal
- e. Mengembangkan kerjasama pemerintah kota dan sektor swasta dengan berbagai kemitraan dalam penyediaan fasilitas dan jejaring penyaluran atlet berprestasi
- f. Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, pemberdayaan pelaku seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi dan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat identitas dan keberlangsungan budaya daerah
- g. Penguatan pencegahan dan sistem layanan perlindungan terhadap pencegahan kekerasan dan diskriminasi
- h. Meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja
- i. Meningkatkan kualitas dan budaya kerja ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan masyarakat
- j. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat
- k. Memastikan bahwa seluruh pelayanan publik di setiap sektor memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah, serta melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- l. Meningkatkan kualitas penataan ruang, pengelolaan pertanahan dan penyediaan infrastruktur perkotaan pada berbagai bidang secara merata
- m. Mengembangkan sistem manajemen transportasi cerdas guna meningkatkan efisiensi, keselamatan dan kenyamanan sistem transportasi
- n. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan secara konsisten yang didukung dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat
- o. Mengembangkan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

- p. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dan selaras dengan perencanaan nasional.

Sementara itu, arah kebijakan tahunan yang fokus pada target pencapaian sasaran pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Pentahapan Arah Kebijakan Dalam Mencapai Sasaran Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2025-2029

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
		2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul	Peningkatan kualitas pendidikan dan literasi masyarakat secara merata	Meningkatkan kualitas dan pemerataan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan kurikulum berbasis digital pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah menuju Pendidikan Salatiga Standar Internasional	Mengembangkan komunitas pembelajaran bahasa dan keterampilan komunikasi internasional (Bahasa Inggris, Bahasa Arab dan Bahasa Cina)	Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan dan naskah kuno serta pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan di Kota Salatiga.	Meningkatkan kualitas dan pemerataan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan kurikulum berbasis digital pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah menuju Pendidikan Salatiga Standar Internasional	Mengembangkan pembelajaran inklusif pada setiap sekolah untuk menjamin pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan memberikan kesetaraan.
		Pemetaan dan pendataan anak-anak dari keluarga miskin yang membutuhkan akses pendidikan, didukung dengan penyediaan lokasi dan SDM dalam mendukung implementasi sekolah rakyat di Kota Salatiga	Meningkatkan dukungan kelembagaan dan operasional pada pendidikan kesetaraan dan lembaga keterampilan dalam pembelajaran kewirausahaan berorientasi global	Meningkatkan dukungan kelembagaan dan operasional pada pendidikan kesetaraan dan lembaga keterampilan dalam pembelajaran kewirausahaan berorientasi global	Mengembangkan komunitas pembelajaran bahasa dan keterampilan komunikasi internasional (Bahasa Inggris, Bahasa Arab dan Bahasa Cina)	Mengembangkan komunitas pembelajaran bahasa dan keterampilan komunikasi internasional (Bahasa Inggris, Bahasa Arab dan Bahasa Cina)
			Meningkatkan kualitas dan pemerataan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan kurikulum berbasis digital pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah menuju Pendidikan Salatiga Standar Internasional	Mengembangkan komunitas pembelajaran bahasa dan keterampilan komunikasi internasional (Bahasa Inggris, Bahasa Arab dan Bahasa Cina)		
	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat untuk mendukung promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya hidup sehat, kesehatan mental, pencegahan penyakit menular dan tidak menular	Meningkatkan kualitas SDM dan fasilitas puskesmas, rumah sakit daerah berstandar internasional, dan klinik kesehatan daerah yang berkualitas dan modern didukung dengan sistem layanan terintegrasi	Meningkatkan kualitas SDM dan fasilitas puskesmas, rumah sakit daerah berstandar internasional, dan klinik kesehatan daerah yang berkualitas dan modern didukung dengan sistem layanan terintegrasi	Meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan	Meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat untuk mendukung promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya hidup sehat, kesehatan mental, pencegahan penyakit menular dan tidak menular
		Meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan	Meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan	Meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan	Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat	Meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan
				Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat		
	Peningkatan kebugaran masyarakat dan Daya Saing Olahraga	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga dan pengembangan potensi atlet lokal	Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat	Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat	Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga dan pengembangan potensi atlet lokal



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
		2026	2027	2028	2029	2030
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga dan pengembangan potensi atlet lokal			Mengembangkan kerjasama pemerintah kota dan sektor swasta dengan berbagai kemitraan dalam penyediaan fasilitas dan jejaring penyaluran atlet berprestasi
	Peningkatan apresiasi, pengembangan dan pelestarian seni dan budaya daerah	Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, pemberdayaan pelaku seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi dan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat identitas dan keberlangsungan budaya daerah	Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, pemberdayaan pelaku seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi dan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat identitas dan keberlangsungan budaya daerah	Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, pemberdayaan pelaku seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi dan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat identitas dan keberlangsungan budaya daerah	Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, pemberdayaan pelaku seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi dan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat identitas dan keberlangsungan budaya daerah	Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, pemberdayaan pelaku seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi dan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat identitas dan keberlangsungan budaya daerah
			Meningkatkan fasilitas, koleksi dan aksesibilitas museum, serta pembinaan sejarah daerah	Meningkatkan fasilitas, koleksi dan aksesibilitas museum, serta pembinaan sejarah daerah		
	Peningkatan kualitas perlindungan perempuan dan anak serta kesejahteraan keluarga	Penguatan regulasi dan kebijakan perlindungan perempuan dan anak serta kesejahteraan keluarga	Penguatan regulasi dan kebijakan perlindungan perempuan dan anak serta kesejahteraan keluarga	Meningkatkan pembangunan berbasis gender dan anak	Meningkatkan pembangunan berbasis gender dan anak	Penguatan pencegahan dan sistem layanan perlindungan terhadap pencegahan kekerasan dan diskriminasi
		Meningkatkan pembangunan berbasis gender dan anak	Penguatan pencegahan dan sistem layanan perlindungan terhadap pencegahan kekerasan dan diskriminasi	Penguatan pencegahan dan sistem layanan perlindungan terhadap pencegahan kekerasan dan diskriminasi	Meningkatkan kualitas pengendalian penduduk dan keluarga berkualitas	Meningkatkan kualitas pengendalian penduduk dan keluarga berkualitas
			Meningkatkan kualitas pengendalian penduduk dan keluarga berkualitas	Meningkatkan kualitas pengendalian penduduk dan keluarga berkualitas		
Terwujudnya transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	Pengembangan potensi sektor unggulan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi	Pemberdayaan dan penguatan kapasitas UMKM untuk mendukung kualitas produk dan jejaring usaha	Meningkatkan investasi dalam mendukung kapasitas produksi daerah didukung peningkatan kondisi iklim investasi yang kondusif dengan pengembangan SDM, teknologi dan promosi potensi daerah secara masif	Meningkatkan investasi dalam mendukung kapasitas produksi daerah didukung peningkatan kondisi iklim investasi yang kondusif dengan pengembangan SDM, teknologi dan promosi potensi daerah secara masif	Meningkatkan investasi dalam mendukung kapasitas produksi daerah didukung peningkatan kondisi iklim investasi yang kondusif dengan pengembangan SDM, teknologi dan promosi potensi daerah secara masif	Pemberdayaan dan penguatan kapasitas UMKM untuk mendukung kualitas produk dan jejaring usaha
		Meningkatkan kualitas manajerial dan keuangan bagi pengurus koperasi dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan perdagangan dalam perekonomian daerah	Pemberdayaan dan penguatan kapasitas UMKM untuk mendukung kualitas produk dan jejaring usaha	Menumbuhkembangkan kewirausahaan pemuda dalam mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan perdagangan dalam perekonomian daerah
		Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan perdagangan dalam perekonomian daerah	Meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja	Menumbuhkembangkan kewirausahaan pemuda dalam mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal	Memastikan pelaku usaha melakukan analisis kajian dampak lingkungan pada kegiatan usaha dan mendorong inovasi teknologi ramah lingkungan dalam mendukung penerapan ekonomi hijau di daerah	Meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja
			Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan	Meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan mendorong digitalisasi serta kemitraan/kolaborasi antara pedagang dan UMKM untuk	



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
		2026	2027	2028	2029	2030
			insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi.		menghasilkan produk kualitas ekspor	
			Memastikan pelaku usaha melakukan analisis kajian dampak lingkungan pada kegiatan usaha dan mendorong inovasi teknologi ramah lingkungan dalam mendukung penerapan ekonomi hijau di daerah	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan mendorong digitalisasi serta kemitraan/kolaborasi antara pedagang dan UMKM untuk menghasilkan produk kualitas ekspor		
				Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi.		
				Memastikan pelaku usaha melakukan analisis kajian dampak lingkungan pada kegiatan usaha dan mendorong inovasi teknologi ramah lingkungan dalam mendukung penerapan ekonomi hijau di daerah		
	Peningkatkan pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif	Mengembangkan ketahanan pangan berbasis komunitas, pengembangan urban farming, memperluas kerjasama antara petani, pedagang, dan konsumen untuk menciptakan sistem pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan	Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS	Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS	Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS	Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS
		Meningkatkan infrastruktur dan teknologi pertanian guna mempercepat hilirisasi produk pertanian yang didukung dengan pemberdayaan kelompok dalam meningkatkan produksi pertanian	Meningkatkan infrastruktur dan teknologi pertanian guna mempercepat hilirisasi produk pertanian yang didukung dengan pemberdayaan kelompok dalam meningkatkan produksi pertanian	Meningkatkan infrastruktur dan teknologi pertanian guna mempercepat hilirisasi produk pertanian yang didukung dengan pemberdayaan kelompok dalam meningkatkan produksi pertanian	Meningkatkan infrastruktur dan teknologi pertanian guna mempercepat hilirisasi produk pertanian yang didukung dengan pemberdayaan kelompok dalam meningkatkan produksi pertanian	Meningkatkan produksi peternakan dan perikanan budidaya lokal didukung pelatihan, teknologi, dan akses terhadap bibit unggul dan akses pasar.
		Meningkatkan produksi peternakan dan perikanan budidaya lokal didukung pelatihan, teknologi, dan akses terhadap bibit unggul dan akses pasar.	Meningkatkan produksi peternakan dan perikanan budidaya lokal didukung pelatihan, teknologi, dan akses terhadap bibit unggul dan akses pasar.	Meningkatkan produksi peternakan dan perikanan budidaya lokal didukung pelatihan, teknologi, dan akses terhadap bibit unggul dan akses pasar.		
	Pengembangan program upaya lintas sektor dalam pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat serta sinergitas program dalam mengurangi kantong kemiskinan	Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penguatan aktivitas usaha dalam mendukung peningkatan pendapatan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penguatan aktivitas usaha dalam mendukung peningkatan pendapatan	Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat	Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
		2026	2027	2028	2029	2030
		Melakukan sinergitas kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin	Melakukan sinergitas kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin	Melakukan sinergitas kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin	Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat	Melakukan sinergitas kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin
					Melakukan sinergitas kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin	
	Peningkatan kondusivitas wilayah dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi	Penguatan kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat melalui peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dalam berbagai kegiatan guna meningkatkan cinta tanah air, nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari	Penguatan kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat melalui peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dalam berbagai kegiatan guna meningkatkan cinta tanah air, nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari	Meningkatkan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, memastikan pendekatan yang humanis dan berbasis pada keadilan sosial	Meningkatkan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, memastikan pendekatan yang humanis dan berbasis pada keadilan sosial	
				Penguatan kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat melalui peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dalam berbagai kegiatan guna meningkatkan cinta tanah air, nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari	Penguatan kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat melalui peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dalam berbagai kegiatan guna meningkatkan cinta tanah air, nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Digital	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital	Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dan selaras dengan perencanaan nasional.	Meningkatkan kualitas dan budaya kerja ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan masyarakat	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengembangan aset produktif dan mengembangkan sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi jangka panjang	Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dan selaras dengan perencanaan nasional.	Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dan selaras dengan perencanaan nasional.
		Meningkatkan sistem pengelolaan kemananan informasi daerah	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengembangan aset produktif dan mengembangkan sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi jangka panjang	Meningkatkan sistem pengelolaan kemananan informasi daerah	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengembangan aset produktif dan mengembangkan sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi jangka panjang	Meningkatkan kualitas dan budaya kerja ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan masyarakat
		Meningkatkan sistem pengawasan internal, penegakan kode etik bagi ASN, penguatan whistleblowing system, penguatan saluran pengaduan masyarakat yang responsif dan pengembangan zona integritas.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengembangan aset produktif dan mengembangkan sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi jangka panjang		Meningkatkan sistem pengelolaan kemananan informasi daerah	Meningkatkan sistem pengelolaan kemananan informasi daerah
			Meningkatkan sistem pengelolaan kemananan informasi daerah		Meningkatkan sistem pengawasan internal, penegakan kode etik bagi ASN, penguatan whistleblowing system, penguatan saluran	



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
		2026	2027	2028	2029	2030
					pengaduan masyarakat yang responsif dan pengembangan zona integritas.	
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat
		Perluasan jaringan internet broadband dan penyediaan akses WiFi publik di fasilitas layanan umum	Perluasan jaringan internet broadband dan penyediaan akses WiFi publik di fasilitas layanan umum	Perluasan jaringan internet broadband dan penyediaan akses WiFi publik di fasilitas layanan umum	Memastikan bahwa seluruh pelayanan publik di setiap sektor memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah, serta melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	Memastikan bahwa seluruh pelayanan publik di setiap sektor memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah, serta melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
		Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan, dan memperkuat koordinasi dan kerjasama dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan perangkat daerah ditingkat kecamatan dan kelurahan	Pengembangan aplikasi layanan publik berbasis web dan mobile serta pengembangan konten.	Pengembangan aplikasi layanan publik berbasis web dan mobile serta pengembangan konten.	Pengembangan aplikasi layanan publik berbasis web dan mobile serta pengembangan konten.	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan, dan memperkuat koordinasi dan kerjasama dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan perangkat daerah ditingkat kecamatan dan kelurahan
		Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip daerah yang didukung pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan serta jangkauan layanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat	Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan serta jangkauan layanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan, dan memperkuat koordinasi dan kerjasama dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan perangkat daerah ditingkat kecamatan dan kelurahan	Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang efektif dan efisien
		Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang efektif dan efisien	Meningkatkan peran kelembagaan ditingkat kecamatan dan kelurahan (PKK, LPMK dll) dalam pelaksanaan pemberdayaan, monitoring dan evaluasi pembangunan terutama dalam mendukung tercapainya kecamatan berdaya.	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan, dan memperkuat koordinasi dan kerjasama dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan perangkat daerah ditingkat kecamatan dan kelurahan	Meningkatkan peran kelembagaan ditingkat kecamatan dan kelurahan (PKK, LPMK dll) dalam pelaksanaan pemberdayaan, monitoring dan evaluasi pembangunan terutama dalam mendukung tercapainya kecamatan berdaya.	
			Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip daerah yang didukung pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatkan peran kelembagaan ditingkat kecamatan dan kelurahan (PKK, LPMK dll) dalam pelaksanaan pemberdayaan, monitoring dan evaluasi pembangunan terutama dalam mendukung tercapainya kecamatan berdaya.	Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang efektif dan efisien	
			Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang efektif dan efisien	Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip daerah yang didukung pemanfaatan teknologi informasi		
				Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang efektif dan efisien		
Meningkatnya kualitas	Meningkatnya pembangunan	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan	Meningkatkan kualitas penataan ruang,	Meningkatkan kualitas penataan ruang,	Meningkatkan kualitas penataan ruang,

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
		2026	2027	2028	2029	2030
infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	infrastruktur daerah yang merata	infrastruktur dasar (air minum, sanitasi dan rumah layak) bagi masyarakat.	infrastruktur dasar (air minum, sanitasi dan rumah layak) bagi masyarakat.	pengelolaan pertanahan dan penyediaan infrastruktur perkotaan pada berbagai bidang secara merata	pengelolaan pertanahan dan penyediaan infrastruktur perkotaan pada berbagai bidang secara merata	pengelolaan pertanahan dan penyediaan infrastruktur perkotaan pada berbagai bidang secara merata
		Mengembangkan sistem manajemen transportasi cerdas guna meningkatkan efisiensi, keselamatan dan kenyamanan sistem transportasi	Mengembangkan sistem manajemen transportasi cerdas guna meningkatkan efisiensi, keselamatan dan kenyamanan sistem transportasi	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar (air minum, sanitasi dan rumah layak) bagi masyarakat.	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar (air minum, sanitasi dan rumah layak) bagi masyarakat.	Mengembangkan sistem manajemen transportasi cerdas guna meningkatkan efisiensi, keselamatan dan kenyamanan sistem transportasi
				Mengembangkan sistem manajemen transportasi cerdas guna meningkatkan efisiensi, keselamatan dan kenyamanan sistem transportasi	Mengembangkan sistem manajemen transportasi cerdas guna meningkatkan efisiensi, keselamatan dan kenyamanan sistem transportasi	
	Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan yang didukung dengan masyarakat yang adaptif dan inovatif	Meningkatkan sistem peringatan dini dan koordinasi antar instansi terkait dalam pencegahan dan penanggulangan bencana maupun peristiwa kebakaran	Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan secara konsisten yang didukung dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan secara konsisten yang didukung dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan secara konsisten yang didukung dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan secara konsisten yang didukung dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat
		Mengembangkan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.	Meningkatkan sistem peringatan dini dan koordinasi antar instansi terkait dalam pencegahan dan penanggulangan bencana maupun peristiwa kebakaran	Meningkatkan sistem peringatan dini dan koordinasi antar instansi terkait dalam pencegahan dan penanggulangan bencana maupun peristiwa kebakaran	Mengembangkan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.	Mengembangkan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.
			Mengembangkan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.	Melakukan fasilitasi kemitraan untuk pemanfaatan sumber potensi energi lokal terbarukan pada skala kecil dan mengidentifikasi potensi investasi hijau di wilayah kelurahan	Melakukan fasilitasi kemitraan untuk pemanfaatan sumber potensi energi lokal terbarukan pada skala kecil dan mengidentifikasi potensi investasi hijau di wilayah kelurahan	

3.3.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Salatiga

Prioritas program pembanguna daerah dalam pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029 dengan memperhatikan program-program prioritas yang dicanangkan oleh Walikota dan Wakil Walikota. Jenis program yang menjadi prioritas Walikota dan Wakil Walikota pada RPJMD Kota Salatiga tahun 2025-2029 yang disinkronkan dengan program nomenklatur perangkat daerah adalah sebagai berikut:



Tabel 3.4. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Satuan	Program Prioritas	Urusan Pemerintahan
Mewujudkan Kota Salatiga yang Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga Mendunia			Angka Kemiskinan	Persen		
			PDRB Perkapita	Juta Rp		
			Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai		
			Penurunan emisi GRK kumulatif	TonCO2eq		
			Indeks Daya saing Daerah			
	Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul	Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat serta pendapatan penduduk	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan
					1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
					2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Perpustakaan
					1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan
					1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
					2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kebudayaan
					2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	
					2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
		Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta kesejahteraan keluarga	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGGAM KEPEMUDAAN	Kepemudaan dan Olahraga
					2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	



Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Satuan	Program Prioritas	Urusan Pemerintahan
					2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
					PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
					2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
					2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
					2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tenaga Kerja
					2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
	Terwujudnya transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	Meningkatnya pengembangan potensi sektor unggulan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	Persen	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
					2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
					2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal
					2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
					3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Perindustrian
					3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IJIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN /KOTA	
					3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Perdagangan
					3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
					3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pariwisata



Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Satuan	Program Prioritas	Urusan Pemerintahan
					3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
					3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
		Meningkatnya pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif	Indeks Ketahanan Pangan Daerah (IKP)	Nilai	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pangan
					2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
					3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertanian
					3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
					3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
					1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Sosial
					1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
		Meningkatnya kondusivitas wilayah dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi			8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kesatuan Bangsa dan Politik
					1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
					1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	



Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Satuan	Program Prioritas	Urusan Pemerintahan
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Digital	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah
					4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Indeks Integritas Nasional	Nilai	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Daerah
					5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kepegawaian
					5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Keuangan
					5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
					5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan
					2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Statistik
					2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persandian
					2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Komunikasi dan Informatika
					2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
					2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Kearsipan
					2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah yang merata	Wilayah dengan Infrastruktur kondisi baik	%	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
					1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	



Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Satuan	Program Prioritas	Urusan Pemerintahan
					1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
					1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
					1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
					2.10.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Pertanahan
					1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Perumahan dan Kawasan Permukiman
					1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
					2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Perhubungan
		Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan yang didukung dengan masyarakat yang adaptif dan inovatif	Indeks kualitas lingkungan Hidup	Nilai	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup
					2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
					2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
					2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
					2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
			Indeks Inovasi Daerah	Nilai	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan

Sementara itu, prioritas program pembangunan daerah yang dicanangkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga selama tahun 2025-2029 yang disinkronkan dengan program nomenklatur perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Misi 1: Mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing melalui peningkatan Pendidikan, keterampilan dan kesehatan, dengan prioritas program sebagai berikut:

No	Program Kerja Prioritas	Program Nomenklatur	OPD Penanggungjawab
1	PROGRAM SEHATI: Salatiga Sehat Terlindungi		
a	Layanan pendampingan tenaga medis di saat kehamilan, kelahiran dan nifas.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
b	Layanan Kesehatan Ibu bebas Anemia dan Terpenuhi Nutrisi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
c	Layanan Jaminan Kesehatan bayi periode 1000 HPK menuju Salatiga Zerro stunting.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
d	Pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
e	Meningkatkan fasilitas Kesehatan dan Menyiapkan Tenaga Medis Profesional untuk RSUD berstandar Internasional.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	PROGRAM SALATIGA CERDAS		
a	Meningkatkan kualitas sarana prasarana, tenaga pendidik, dan bahan ajar pendidikan dasar dan menengah menuju Pendidikan Salatiga Standar Internasional.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
b	Mengembangkan komunitas pembelajaran bahasa dan keterampilan komunikasi internasional (Bahasa	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan

No	Program Kerja Prioritas	Program Nomenklatur	OPD Penanggungjawab
	Inggris, Bahasa Arab dan Bahasa Cina).		
c	Menyediakan bantuan pembiayaan pada lembaga Pendidikan non formal (kursus, Bimbingan belajar, BLK, PKBM) untuk menyediakan pembelajaran kewirausahaan berorientasi global.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
3	PROGRAM KOMIK : Kolaborasi Milenial Kreatif		
	Komik (Kolaborasi Milenial Kreatif), mengembangkan sentra-sentra keterampilan Creative Hub dan Co-working space, serta ruang ruang ekspresi gaya hidup positif, seni dan budaya bagi Gen-Z, pemuda dan pelaku seni.	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

2. Misi 2: Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis sektor unggulan daerah melalui kolaborasi investasi daerah dan permodalan UMKM, dengan prioritas program sebagai berikut:

No	Program Kerja Prioritas	Program Nomenklatur	OPD Penanggungjawab
4	PROGRAM SEKAR (Salatiga Berkarya)		
a	Optimalisasi aset Pemerintah Kota Salatiga dan revitalisasi BUMD	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan



No	Program Kerja Prioritas	Program Nomenklatur	OPD Penanggungjawab
	menjadi lebih produktif berkolaborasi dengan investasi swasta.		Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
b	Pengembangan ekonomi kreatif dengan mengutamakan komoditas unggulan lokal melalui pendampingan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		Program Pengembangan Umkm	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Program Kerja Prioritas	Program Nomenklatur	OPD Penanggungjawab
c	Mengembangkan potensi wisata kota Salatiga melalui Insentif pajak bagi pelaku usaha sektor pariwisata.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	PROGRAM JARKOM MABAR: Jaringan Komunitas Mahasiswa dan Anak Muda Berwirausaha		
	JARKOM MABAR singkatan dari Jaringan Komunitas Mahasiswa dan Anak Muda Berwirausaha adalah penyaluran bantuan Insentif Penambahan Modal Kerja sebesar Rp. 10 Juta untuk 1.000 usaha rintisan/startup, yang sudah melalui fase inkubator bisnis.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

3. Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap pelayanan publik yang berkualitas melalui peningkatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya aparatur, dengan prioritas program sebagai berikut:

No	Program Kerja Prioritas	Program Nomenklatur	OPD Penanggungjawab
6	PROGRAM SI AKAS (Salatiga Akuntabel, Kolaboratif, Adaptif, dan Sigap)		
a	Memperkuat Satu Data Salatiga sebagai rujukan terpadu dalam satu portal	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program Kerja Prioritas	Program Nomenklatur	OPD Penanggungjawab
	dan dapat diakses oleh semua, untuk menciptakan transparansi tata kelola pemerintahan Kota Salatiga.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Dinas Komunikasi dan Informatika
b	Memperkuat digitalisasi pelayanan kependudukan, catatan sipil dan Perijinan UMKM agar tuntas di tingkat kecamatan.	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
c	Membangun sistem pengaduan pelayanan publik terpadu sampai tingkat RT (Rukun Tetangga), Melalui Aplikasi Android dan memberikan jaminan respon cepat dalam hari yang sama.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

4. Misi 4: Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berorientasi pemanfaatan tata ruang yang inklusif dan berkualitas melalui peningkatan kesadaran Masyarakat, pemanfaatan teknologi dan penegakan hukum, dengan prioritas program sebagai berikut:

No	Program Kerja Prioritas	Program Nomenklatur	OPD Penanggungjawab
7	PROGRAM SARI (Salatiga lestari):		
a	Revitalisasi Taman Kota dan Ekowisata yang mengedepankan keunggulan kompetitif tiap wilayah (kelurahan/kecamatan).	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
b	Penataan sarana prasarana publik, khususnya Gedung pemerintah, pedestrian, jalan sehingga berstandar pelayanan inklusif.	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program Kerja Prioritas	Program Nomenklatur	OPD Penanggungjawab
c	Penegakan regulasi daerah untuk pencegahan/penindakan pencemaran lingkungan dan pelanggaran RTRW.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
d	Membangun sistem pengelolaan sampah terpadu ditingkat kelurahan/kecamatan.	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
e	Mendorong terciptanya kawasan industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

5. Misi 5: Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui pemerataan dan peningkatan kualitas, dengan prioritas program sebagai berikut:

No	Program Kerja Prioritas	Program Nomenklatur	OPD Penanggungjawab
8	PROGRAM BIRULAH (Bangun Rumah Layak Huni)		
	Program bantuan sosial untuk pemugaran rumah tangga miskin untuk mendapatkan rumah yang sehat.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
9	PROGRAM STBM (Sanitasi total Berbasis Masyarakat)		

No	Program Kerja Prioritas	Program Nomenklatur	OPD Penanggungjawab
	Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pemberian bantuan keuangan kelurahan/RW untuk merubah perilaku higiene dan membangun sarana sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
10	PROGRAM SOS (Salatiga Online System)		
	Program SOS bertujuan membangun infrastruktur jaringan online terpadu untuk pengawasan infrastruktur, lingkungan hidup, dan mobilitas masyarakat, yang berpusat pada Command Center tingkat kecamatan dan Kota.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

3.3.3. Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Salatiga Terhadap RPJMN 2025-2029 dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

Pada Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 terdapat 8 Prioritas Nasional yang terdiri dari 83 Kegiatan Prioritas Utama yang merupakan langkah konkret pencapaian sasaran jangka menengah terutama untuk pencapaian sasaran penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan. Dalam Asta Cita, terdapat 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang perlu didukung oleh pemerintah daerah. Adapun dukungan Kota Salatiga terhadap PHTC RPJMN 2025-2029 ditunjukkan melalui tabel berikut.

Tabel 3.5. Dukungan Terhadap 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) RPJMN 2025-2029

No.	PHTC	Program Jawa Tengah	Program Salatiga
1	Memberikan makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil	Percepatan penanganan stunting melalui pemberian suplemen dan pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil	PROGRAM SEHATI: Salatiga Sehat Terlindungi - Layanan pendampingan tenaga medis di saat kehamilan, kelahiran dan nifas. - Layanan Kesehatan Ibu bebas Anemia dan Terpenuhi Nutrisi

No.	PHTC	Program Jawa Tengah	Program Salatiga
			Layanan Jaminan Kesehatan bayi periode 1000 HPK menuju Salatiga Zero stunting.
2	Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten	Pap Smear gratis Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa Mendorong penyediaan 1 Desa/Kelurahan 1 setiap Puskesmas Pembantu;	PROGRAM SEHATI: Salatiga Sehat Terlindungi - Pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) - Meningkatkan fasilitas Kesehatan dan Menyiapkan Tenaga Medis Profesional untuk RSUD berstandar Internasional
3	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional	Mendorong Pembangunan desa berdaya (lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional dan Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana) Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi	- Meningkatkan infrastruktur distribusi pangan untuk memastikan kelancaran aliran pangan dari produsen ke konsumen. - Pengembangan jaringan pasar daerah sebagai pusat distribusi pangan lokal
4	Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap Kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi	Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta	PROGRAM SALATIGA CERDAS Meningkatkan kualitas sarana prasarana, tenaga pendidik, dan bahan ajar pendidikan dasar dan menengah menuju Pendidikan Salatiga Standar Internasional.
5	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilennial untuk membuka lapangan kerja	JARKOM MABAR Penyaluran bantuan Insentif Penambahan Modal Kerja sebesar Rp. 10 Juta untuk 1.000 usaha rintisan/startup, yang sudah melalui fase inkubator bisnis. PROGRAM SEKAR: (Salatiga Berkarya) Pengembangan ekonomi kreatif dengan mengutamakan komoditas unggulan lokal melalui pendampingan UMKM

No.	PHTC	Program Jawa Tengah	Program Salatiga
6	Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh) TNI/POLRI, dan pejabat negara	Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, ASN, program agama dan beasiswa untuk siswa miskin, Guru, Santri, penghafal quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi	Peningkatan dukungan kelembagaan dan operasional pada pendidikan kesetaraan dan lembaga keterampilan dalam pembelajaran kewirausahaan berorientasi global
7	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersubsidi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Infrastruktur dan Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni; Subsidi Pangan Murah Fasilitas rumah susun untuk MBR bekerjasama dengan BUMN, BUMD, dan swasta Taruna karya mandiri melalui program kartu zilennial untuk membuka lapangan kerja	PROGRAM BIRULAH (Bangun Rumah Layak Huni) Program bantuan sosial untuk pemugaran rumah tangga miskin untuk mendapatkan rumah yang sehat PROGRAM STBM Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pemberian bantuan keuangan kelurahan/RW untuk merubah perilaku higiene dan membangun sarana sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat
8	Mendirikan Badan Penerimaan negara daerah untuk memaksimalkan penerimaan negara terhadap pendapatan bruto (PDB) ke 23%	Membentuk Biro Pembinaan BUMD dan Pemanfaatan Aset Daerah, Membentuk UPTD Pengelolaan Aset, Riset Potensi Probis dan BUMD, Riset Potensi Daerah serta Sumber Daya; Transparansi Tata Kelola Tambang Galian C; Transparansi Tata Kelola CSR untuk Meningkatkan PAD Daerah	PROGRAM SEKAR: (Salatiga Berkarya) Optimalisasi aset Pemerintah Kota Salatiga dan revitalisasi BUMD menjadi lebih produktif berkolaborasi dengan investasi swasta.

Kota Salatiga dalam mendukung prioritas pembangunan Jawa Tengah/WP Kedungsepur diprioritaskan untuk pengembangan kawasan Perkotaan Salatiga (tematik kota pendidikan) sebagai Kota Satelit dari WM Semarang. Dukungan Pemerintah Kota Salatiga atas Program lokasi prirotas atas kebijakan pengembangan wilayah nasional dan proyek strategis nasional di wilayah Kedungsepur adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6. Program Lokasi Prioritas Atas Kebijakan Pengembangan Wilayah Nasional Dan Proyek Strategis Nasional Di Wilayah Kedungsepur

No	Program Prioritas WP Kedungsepur	Arah Kebijakan dan Dukungan Program Prioritas Salatiga	
		Arah Kebijakan	Program
1	Penyusunan masterplan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu.	Penegakan aturan penataan ruang, pemanfaatan teknologi dalam penataan ruang dan peningkatan partisipasi masyarakat	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
2	Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau.	▪ Peningkatan kualitas sanitasi masyarakat dengan fokus pada pemukiman kumuh dan padat penduduk serta wilayah dengan sanitasi baik belum terpenuhi. ▪ Peningkatan ketersediaan air minum layak dengan perluasan jaringan perpipaan dan kapasitas air ▪ Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, serta Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
3	Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/ pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan.	Peningkatan keterampilan dan pendidikan penduduk usia kerja melalui pelatihan keterampilan spesifik dan sertifikasi, penyuluhan dan job matcing serta kolaborasi dengan lembaga pendidikan pendidikan dan pelatihan kerja dengan dukungan operasional yang baik	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
4	Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan.	Meningkatkan penataan kualitas kawasan permukiman kumuh	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

No	Program Prioritas WP Kedungsepur	Arah Kebijakan dan Dukungan Program Prioritas Salatiga	
		Arah Kebijakan	Program
		dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.	

Rencana pembangunan jangka menengah daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 atau RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan pengejawantahan dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2025-2030. Dengan landasan filosofis tersebut, maka ditetapkan visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 adalah:

**“JAWA TENGAH SEBAGAI PROVINSI MAJU YANG BERKELANJUTAN UNTUK
MENUJU INDONESIA EMAS 2045”**

Pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui enam misi pembangunan daerah yaitu:

1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas;
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
6. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;
7. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi

Terhadap pencapaian visi dan misi tersebut, Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan program prioritas yang didelegasikan kepada kabupaten/kota. Pendelegasian program prioritas yang akan dilaksanakan di Kabupaten/Kota seyogyanya perlu didukung dengan program-program prioritas di daerah, termasuk di Kota Salatiga. Dukungan program prioritas Kota Salatiga terhadap program prioritas Provinsi Jawa Tengah sangat penting untuk menciptakan sinergi dan kesinambungan pembangunan antar tingkat pemerintahan. Ketika Pemerintah Kota Salatiga menyelaraskan program prioritasnya dengan arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah, maka akan tercipta harmonisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih terarah dan efisien. Hal ini mempermudah koordinasi antar wilayah, menghindari duplikasi program, dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan pembangunan bersama yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

Keselarasan dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan melalui arah kebijakan, program prioritas dan program unggulan Wali Kota dan Wakil Walikota yang ditunjukkan melalui tabel berikut:

Tabel 3.7. Dukungan Pemerintah Kota Salatiga Terhadap Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah yang Didelegasikan ke Kabupaten/Kota

No	Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah ke Kabupaten/ Kota		Dukungan Proram Pemerintah Kota Salatiga		
	Program	Intervensi Kota Salatiga	Program Nomenklatur	Rencana Aktivitas	Perangkat Daerah
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	Pemberdayaan ekonomi bagi Perempuan	Program Pemberdayaan Sosial	Pelatihan Keterampilan Bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Dinas Sosial
		Pemberdayaan ekonomi bagi pelaku ekonomi kreatif	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penumbuhan wirausaha muda pemula	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Peningkatan Ekonomi Kreatif Kecamatan Tingkir	Kecamatan Tingkir
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Ekonomi Kreatif Kecamatan Argomulyo	Kecamatan Argomulyo
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan ekonomi	Kecamatan Sidomukti
			Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Peningkatan Ekonomi Kreatif Kecamatan Sidorejo	Kecamatan Sidorejo
		Pengembangan sport center di setiap kecamatan	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Pemeliharaan lapangan yang menjadi kewenangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional	Verifikasi dan Validasi RTLH	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Melaksanakan update basis data perumahan melalui pendataan rumah swadaya dengan tujuan mendapatkan data rumah baik Rumah Layak Huni, Rumah Tidak Layak Huni, dan Backlog Rumah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK & KPK	Pendidikan Anti Korupsi untuk ASN	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Melaksanakan Penyuluhan anti korupsi bagi ASN	Inspektorat Daerah
4	Puskesmas keliling, puskesmas pembantu	Pelayanan kesehatan keliling	Program Pemenuhan Upaya	Pelayanan kesehatan keliling	Dinas Kesehatan



No	Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah ke Kabupaten/ Kota		Dukungan Proram Pemerintah Kota Salatiga		
	Program	Intervensi Kota Salatiga	Program Nomenklatur	Rencana Aktivitas	Perangkat Daerah
	dan pelayanan kesehatan di setiap desa		Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
5	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila	-	-	-	-
6	Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta	-	-	-	-
7	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan	Pembentukan Rumah Perlindungan Anak dan Perempuan	Program Rehabilitasi Sosial	Pengelolaan Rumah Singgah	Dinas Sosial
			Program Perlindungan Perempuan	Rumah Aman	DP3APPKB
		Pembentukan Rumah Perlindungan Disabilitas	Program Rehabilitasi Sosial	Pengelolaan Rumah Singgah	Dinas Sosial
8	Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru				
9	BUMDES Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng)	-	-	-	-
10	Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat	Pelatihan dan sertifikasi Penanganan Bencana	Penanggulangan Bencana	Melaksanakan pelatihan Mitigasi bagi Relawan dan TRC per jenis bencana	BPBD
		- Tagana	Program Penanganan Bencana	Penanganan Bencana (Pengerahan Tagana ketika terjadi Bencana)	Dinas Sosial
		- Masyarakat	Penanggulangan Bencana	Melaksanakan sosialisasi, pelatihan dan simulasi Keluarga Tanggap Bencana	BPBD
			Penanggulangan Bencana	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana dalam bentuk sosialisasi	BPBD
		Penguatan kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat Kabupaten/Kota	Penanggulangan Bencana	Penguatan kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat Kabupaten/Kota	BPBD
11	Cek Kesehatan Gratis				
12	Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1				



No	Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah ke Kabupaten/ Kota		Dukungan Proram Pemerintah Kota Salatiga		
	Program	Intervensi Kota Salatiga	Program Nomenklatur	Rencana Aktivitas	Perangkat Daerah
	Bidan setiap Puskesmas Pembantu				
13	Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	Pendidikan dan Pelatihan ASN	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Diklat Teknis, Manajerial, Fungsional bagi ASN	BKPSDM
14	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Bantuan Hukum	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
15	Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru	Dukungan transportasi terpadu kawasan aglomerasi kedungsapur dan kawasan sekitarnya	Program Penyelenggaraan Lau Lintas dan Angkutan jalan	Optimalisasi infrastruktur transportasi pendukung Trans Jateng di Kota Salatiga seperti halte atau tempat pemberhentian sementara yang aman dan nyaman, penyediaan dan pemerataan kualitas rambu lalu lintas; Mengembangkan sistem manajemen transportasi cerdas guna meningkatkan efisiensi, keselamatan dan kenyamanan sistem transportasi	Dinas Perhubungan
16	Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	Kolaborasi Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	Program Rehabilitasi Sosial	Pelatihan Kemandirian Bagi Anak terlantar	Dinas Sosial
		Penambahan Identitas bagi kaum marginal	Program Rehabilitasi Sosial	Pelatihan Ketrampilan Bagi tuna sosial	Dinas Sosial
17	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	Mengembangkan wisata ramah muslim	Program Pemasaran Pariwisata	Optimalisasi Pariwisata Ramah Muslim	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
18	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Fasilitasi sertifikasi halal bagi IKM	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Identifikasi IKM yang akan mendapatkan sosialisasi; mengadakan sosialisasi dan fasilitasi.	Dinas Perinnaker



No	Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah ke Kabupaten/ Kota		Dukungan Proram Pemerintah Kota Salatiga		
	Program	Intervensi Kota Salatiga	Program Nomenklatur	Rencana Aktivitas	Perangkat Daerah
		Pendampingan sertifikasi HAKI bagi UMKM	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Identifikasi IKM yang akan mendapatkan sosialisasi; mengadakan sosialisasi dan fasilitasi.	Dinas Perinnaker
19	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	-	-	-	-
20	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana	Penguatan Tim tanggap bencana	Penguatan kelurahan tangguh bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
21	Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan bio gas, hydro, maupun tenaga surya	-	-	-	-
22	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan	-	-	-	-
23	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	-	-	-	-
24	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM	-	-	-	-
25	Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau	-	-	-	-
26	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa	RTH Perkotaan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Revitalisasi taman kota dan ekowisata, Anggrekisasi	DLH
27	Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	Peningkatan toleransi beragama kepada Masyarakat	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Audiensi Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, ormas dengan Forkopimda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama u/ Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



No	Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah ke Kabupaten/ Kota		Dukungan Proram Pemerintah Kota Salatiga		
	Program	Intervensi Kota Salatiga	Program Nomenklatur	Rencana Aktivitas	Perangkat Daerah
		Sosialisasi Wawasan kebangsaan kepada Masyarakat	Program penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan untuk Masyarakat /Peningkatan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pembentukan Paskibraka dan Pembangunan Karakter dan Penguatan Ideologi Pancasila Bagi Purna Paskibraka Jateng	Program penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pembentukan Paskibraka	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.Pembentukan Purna Paskibraka duta Pancasila 2.Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
28	Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Penghayat Kepercayaan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama pada penghayat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Sekretarat Daerah
		Rembug Jagong Tokoh Agama dan Penghayat Kepercayaan	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Audiensi Ormas, Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat dengan forkopimda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Hibah FKUB	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Hibah Ormas (terdiri dari beberapa ormas)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penguatan Kontra Radikalisme Ekstrimisme Bagi Masyarakat	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Orientasi Kewaspadaan nasional Pencegahan Extrimisme dan Radikalisme	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Kemah Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kemah Kebangsaan bagi Pemuda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Hibah FPK	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Hibah Ormas (terdiri dari beberapa ormas)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
29	Peningkatan operasional kader Posyandu				



No	Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah ke Kabupaten/ Kota		Dukungan Proram Pemerintah Kota Salatiga		
	Program	Intervensi Kota Salatiga	Program Nomenklatur	Rencana Aktivitas	Perangkat Daerah
30	Peningkatan kualitas hidup lansia	Peningkatan fasilitas Posyandu lansia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Dinas Kesehatan
		Pemeriksaan kesehatan			
		Pemberian suplemen dan pemenuhan gizi			
31	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	Pendataan Pemuda (16 - 30 tahun)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pendataan yang dilakukan untuk memenuhi data indikator IPP dengan melibatkan personel dari setiap kelurahan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Koordinasi dengan Dispendukcapil Kabupaten/Kota (terkait dengan data pemuda)	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengolahan Data Kependudukan dan meninformasikan ke pengguna data	Disdukcapil
32	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	Penguatan koperasi desa	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pelatihan bagi pengurus dan pengawas Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP)	Dinas Koperasi UKM
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Inkubator koperasi bagi KKMP	Dinas Koperasi UKM
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Promosi produk Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) melalui pameran dan bazar	Dinas Koperasi UKM
33	Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga				
34	Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan	Peningkatan kuantitas dan kualitas pendamping disabilitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan PSU Regrouping/baru (km/wc, pagar, paving, taan, UKS, sanitasi, Aula, ruang inklusi, laboratorium, musholla) - SD ; Pemeliharaan PSU (km/wc, pagar, paving, taman, UKS, sanitasi, Aula, ruang inklusi, laboratorium, musholla) - SMP	Dinas Pendidikan
			Program Pengelolaan Pendidikan	Pelatihan GPK dan Shadow Teacher SD; Pelatihan GPK Inklusif SMP/MTs; Layanan Konseling Pendidikan Inklusif SMP/MTs; Psikotest Siswa Inklusif SMP/MTs; Parenting Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan Pendidikan Pola Asuh dengan Sekolah Orang Tua Hebat (SOHT); Rapat	Dinas Pendidikan



No	Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah ke Kabupaten/ Kota		Dukungan Proram Pemerintah Kota Salatiga		
	Program	Intervensi Kota Salatiga	Program Nomenklatur	Rencana Aktivitas	Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Sarasehan GPK; Gebyar Inklusi / Pekan Anak Inspiratif; Psikotest Inklusi SD; Parenting ABK dan Pendidikan Pola Asuh dengan Sekolah Orang Tua Hebat (SOHT) SD; Sosialisasi Hasil Asesmen ABK SD; Skrining ABK "SRI KRISNA SIAGA " (Skrining Awal Anak Istimewa Salatiga); Layanan Konseling Pendidikan Inklusi SD; Saresehan GPK	
35	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana	Identifikasi wilayah rawan bencana di Jawa Tengah	Program Penanggulangan Bencana	Kajian Risiko Bencana	BPBD
		Monitoring sistem peringatan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	BPBD

--oOo--

BAB

4

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Rencana program Perangkat Daerah disusun dalam rangka mencapai target kinerja pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dari tahun 2025 hingga 2030. Program pada tahun 2030 secara khusus akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2030, yang merupakan bagian dari kesinambungan perencanaan pembangunan dan akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034. Program Perangkat Daerah mencakup semua program yang diuraikan dalam Bab IV Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dikelola oleh Sekretariat Perangkat Daerah. Adapun rencana program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah berdasarkan masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Dinas Pendidikan

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Urusan pemerintahan bidang pendidikan dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 6 program yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan sasaran meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah ditandai dengan 3 indikator, yaitu persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

2) Program Pengelolaan Pendidikan

Program Pengelolaan Pendidikan dengan sasaran meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ditandai dengan 21 indikator, yaitu:

- Angka Partisipasi Sekolah PAUD (Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD), dengan target pada tahun 2026 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar), dengan target pada tahun 2026 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

- Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs (Tingkat partisipasi warga negara usia 13–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama), dengan target pada tahun 2026 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Kesetaraan (Tingkat partisipasi warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan), dengan target pada tahun 2026 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Angka Putus Sekolah SD/MI, dengan target pada tahun 2025 sebesar 0,003% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 0,0%.
- Angka Putus Sekolah SMP/MTs, dengan target pada tahun 2025 sebesar 0,41% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 0,053%.
- Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI, dengan target pada tahun 2025 sebesar 87,31% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 88,49%.
- Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs, , dengan target pada tahun 2025 sebesar 97,73% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 87,82%.
- Persentase sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang, dengan target pada tahun 2025 sebesar 0,24% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 78,12%.
- Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik, dengan target pada tahun 2025 sebesar 87,36 % dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 87,48%.
- Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik, dengan target pada tahun 2025 sebesar 50% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 95,5%.
- Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional, dengan target pada tahun 2025 sebesar 1,98% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 93,83%.
- Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional, dengan target pada tahun 2025 sebesar 1,8% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 85,11%.
- Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional, dengan target pada tahun 2025 sebesar 2,06% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 94,8%.
- Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional, dengan target pada tahun 2025 sebesar 1,87% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 90,97%.
- Iklim Kebhinekaan SD, dengan target pada tahun 2026 sebesar 69,05% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 69,09%.

- Iklim Kebhinekaan SMP, dengan target pada tahun 2026 sebesar 74,58% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 74,62%.
- Iklim Keamanan SD, dengan target pada tahun 2026 sebesar 73,70% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 73,74%.
- Iklim Keamanan SMP, dengan target pada tahun 2026 sebesar 74,40% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 74,44%.
- Iklim Inklusivitas SD, dengan target pada tahun 2026 sebesar 691,44% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 61,48%.
- Iklim Inklusivitas SMP, dengan target pada tahun 2026 sebesar 64,1% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 64,14%.

3) Program Pengembangan Kurikulum

Program Pengembangan Kurikulum dengan sasaran meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan ditandai dengan 3 indikator. Pertama, persentase sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SD/MI dengan target pada tahun 2025 sebesar 20,2% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 74,24%. Kedua, persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SMP/MTs dengan target pada tahun 2025 sebesar 18% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 63,94%. Ketiga, persentase sekolah yang menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang PKBM dengan target pada tahun 2025 sebesar 66,67% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 63,75,05%.

4) Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan dengan sasaran meningkatnya mutu dan distribusi institusi pendidikan ditandai dengan 6 indikator, yaitu:

- Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang TK/RA, dengan target pada tahun 2025 sebesar 32% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 36,89%.
- Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang SD, dengan target pada tahun 2025 sebesar 42% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 49,36%.
- Persentase Guru bersertifikat pendidik jenjang SMP, dengan target pada tahun 2025 sebesar 52% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 58,7%.
- Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang PAUD, dengan target pada tahun 2025 sebesar 84,98% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 87,85%.
- Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SD, dengan target pada tahun 2025 sebesar 97,33% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 97,2%.

- Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SMP, dengan target pada tahun 2025 sebesar 96,46% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 99,15%.

5) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program Pengendalian Perizinan Pendidikan dengan sasaran meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan ditandai dengan 5 indikator, yaitu:

- Persentase TK/RA yang terakreditasi, dengan target pada tahun 2025 sebesar 86,12% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 90,4%.
- Persentase Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat (PKBM) yang Terakreditasi, dengan target pada tahun 2025 sebesar 58,36% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 83,34%.
- Persentase lembaga Kursus dan Pelatihan yang berijin, dengan target pada tahun 2025 sebesar 32% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 92,87%.
- Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SD/MI, dengan target pada tahun 2025 sebesar 99% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SMP/MTs, dengan target pada tahun 2025 sebesar 99% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

6) Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra

Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra dengan sasaran terlestariannya bahasa dan sastra daerah ditandai dengan 3 indikator. Pertama, persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SD/MI, dengan target pada tahun 2025 sebesar 12% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 20,44%. Kedua, persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SMP/MTs, dengan target pada tahun 2025 sebesar 12% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 42,87%. Ketiga, persentase PKBM yang sudah memasukkan pembelajaran Bahasa Jawa pada mata pelajaran yang diberikan ke siswa, dengan target pada tahun 2025 sebesar 35% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 66,68%.

2. Dinas Kesehatan

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Urusan pemerintahan bidang kesehatan dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 6 program yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ditandai dengan 11 indikator, yaitu:

- Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Nilai SAKIP Perangkat Daerah, dengan target pada tahun 2026 sebesar 73,3 dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 73,7.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit, dengan target pada tahun 2025 sebesar 86 dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 88,5.
- Cost Recovery Rumah Sakit, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100 dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Klinik Paru Masyarakat, dengan target pada tahun 2026 sebesar 85 dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 90.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Tegalrejo, dengan target pada tahun 2026 sebesar 86,5 dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 90.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Cebongan, dengan target pada tahun 2026 sebesar 88,75 dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 90.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Kalicacing, dengan target pada tahun 2026 sebesar 88,75 dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 90.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Mangunsari, dengan target pada tahun 2026 sebesar 86,5 dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 90.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Sidorejo Lor, dengan target pada tahun 2026 sebesar 86,5 dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 90.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Sidorejo Kidul, dengan target pada tahun 2026 sebesar 88,75 dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 90.

2) **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan sasaran meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ditandai dengan 58 indikator, yaitu:

- Angka Kematian balita (AKABA), dengan target pada tahun 2025 sebesar 11 per 1000KH dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 11,49 per 1000KH.

- Capaian penemuan kasus TB (Notifikasi kasus TB), dengan target pada tahun 2025 sebesar 140% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 136,5%.
- Prosentase pasien TBC yang memulai pengobatan (Enrollment TBC), dengan target pada tahun 2026 sebesar 91% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 95%.
- Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah, dengan target pada tahun 2026 sebesar 30% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 50%.
- Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk, dengan target pada tahun 2026 sebesar <1 1000 penduduk dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar <1 1000 penduduk.
- Persentase KK dengan akses fasilitas sanitasi layak, dengan target pada tahun 2026 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Persentasi KK melaksanakan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), dengan target pada tahun 2026 sebesar 75% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 79%.
- Persentasi KK melaksanakan Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMMRT), dengan target pada tahun 2026 sebesar 75% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 79%.
- Persentasi KK melaksanakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PSRT), dengan target pada tahun 2026 sebesar 75% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 79%.
- Persentasi KK melaksanakan Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga (PLCRT), dengan target pada tahun 2026 sebesar 40% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 44%.
- Kelurahan sehat iklim, dengan target pada tahun 2026 sebesar 3% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 11%.
- Persentase rumah tangga dengan kualitas air minum memenuhi syarat, dengan target pada tahun 2026 sebesar 30% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 34%.
- Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat, dengan target pada tahun 2026 sebesar 70% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 74%.
- Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD), dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 89%.

- Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 87%.
- Cakupan imunisasi di usia sekolah dasar, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 97,5%.
- Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 0 Tablet Selama Masa Kehamilan, dengan target pada tahun 2025 sebesar 99% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Cakupan kepesertaan JKN, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Cakupan pelayanan kesehatan balita, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3) , dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

- Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Cakupan pembinaan remaja di sekolah, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) , dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 99,76%.
- Cakupan Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat higiene sanitasi, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 75%.
- Deteksi Dini Triple Eliminasi Ibu Hamil, dengan target pada tahun 2026 sebesar 75,8% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 76%.
- Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), dengan target pada tahun 2025 sebesar 95% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 97,5%.
- Incident Rate DBD per 100.000 penduduk, dengan target pada tahun 2026 sebesar <8 per 100.000 penduduk dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 8,95 per 100.000 penduduk.
- Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV, dengan target pada tahun 2025 sebesar 75% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 65%.

- Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan, dengan target pada tahun 2025 sebesar 84% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 85%.
- Pelayanan Kesehatan Olahraga, dengan target pada tahun 2025 sebesar 80% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 80%.
- Persentase tempat kerja formal yang melaksanakan kesehatan kerja, dengan target pada tahun 2026 sebesar 50% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 70%.
- Persentase tempat kerja informal yang melaksanakan kesehatan kerja, dengan target pada tahun 2026 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis), dengan target pada tahun 2026 sebesar 6 kasus dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 6 kasus.
- Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram) , dengan target pada tahun 2026 sebesar 7,1% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 6,7%.
- Persentase Ibu hamil KEK, dengan target pada tahun 2025 sebesar 7% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 11,5%.
- Persentase Ibu Hamil yang Anemia, dengan target pada tahun 2025 sebesar 10% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 7%.
- Persentase Puskesmas yang melaksanakan RME, dengan target pada tahun 2026 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Presentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Presentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM, dengan target pada tahun 2025 sebesar 86% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 87%.
- Presentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM, dengan target pada tahun 2025 sebesar 84% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 85%.
- Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk, dengan target pada tahun 2025 sebesar 0,401 per 1000 penduduk dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 4,2 per 1000 penduduk.

- Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- 3) **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (RSUD)**
Pelaksanaan program dengan indikator persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- 4) **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan sasaran meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah persentase tenaga kesehatan yang sudah mengikuti pelatihan sesuai kompetensinya dengan target pada tahun 2025 sebesar 73,04% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 75%.
- 5) **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (RSUD)**
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (RSUD) ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah persentase karyawan RSUD yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi minimal 20 jam per tahun dengan target pada tahun 2026 sebesar 60% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 70%.
- 6) **Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman**
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman dengan sasaran meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi alat kesehatan, dan makanan minuman, ditandai dengan 5 indikator, yaitu:
 - Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan, dengan target pada tahun 2025 sebesar 58% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 58,65%.
 - Persentase pangan Industri Rumah Tangga aman dan bermutu, dengan target pada tahun 2025 sebesar 86% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 82,95%.
 - Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar, dengan target akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 55,00%.
 - Persentase apotek dan toko obat yg mampu memelihara persyaratan perijinan, dengan target pada tahun 2025 sebesar 66% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
 - Cakupan TPM yang memenuhi syarat higiene sanitasi, dengan target pada tahun 2025 sebesar 89% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 92%.

7) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan sasaran meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, ditandai dengan 7 indikator, yaitu:

- Cakupan desa siaga strata mandiri, dengan target pada tahun 2025 sebesar 95,6% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna, dengan target pada tahun 2025 sebesar 96,61% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 98%.
- Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna, dengan target pada tahun 2025 sebesar 96,8% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 96,15%.
- Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat, dengan target pada tahun 2025 sebesar 96,62% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 90,89%.
- Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat, dengan target pada tahun 2025 sebesar 93,56% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 94,89%.
- Cakupan sosialisasi dan edukasi Kawasan Tanpa Rokok, dengan target pada tahun 2026 sebesar 50% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

8) Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)

Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan) dengan sasaran meningkatnya akreditasi pelayanan kesehatan, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi dengan target pada tahun 2026 sebesar 76,73% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

3. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 10 program yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah, ditandai dengan 3 indikator, yaitu persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan, Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

2) **Program Penyelenggaraan Jalan**

Program Penyelenggaraan Jalan dengan sasaran Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Rasio kemantapan jalan, dengan target pada tahun 2025 sebesar 95,52% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 95,57%.

3) **Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan sasaran meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan target pada tahun 2025 sebesar 65,5% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 68%.

4) **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan sasaran meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman, dengan target pada tahun 2025 sebesar 15% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 36,9%.

5) **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase dengan sasaran meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah persentase jaringan drainase kondisi baik, dengan target pada tahun 2025 sebesar 96,5% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 97,8%.

6) **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan sasaran meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan, dengan target pada tahun 2025 sebesar 65% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 75,13%.

7) **Program Penataan Bangunan Gedung**

Program Penataan Bangunan Gedung dengan sasaran meningkatnya kualitas bangunan gedung, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Persentase Bangunan Gedung Negara milik Pemerintah Kota dalam Kondisi Baik, dengan target pada tahun 2025 sebesar 74,5% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 79,25%.

8) **Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya**

Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya dengan sasaran meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Persentase penataan bangunan dan lingkungan, dengan target pada tahun 2025 sebesar 28,5% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 39,36%.

9) **Program Pengembangan Jasa Konstruksi**

Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan sasaran Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi, dengan target pada tahun 2025 sebanyak 75 orang dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebanyak 75 orang.

10) **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Jumlah KKPR yang diterbitkan, dengan target pada tahun 2025 sebanyak 400 dokumen dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebanyak 400 dokumen.

4. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

a. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 5 program yaitu:

1) **Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**

Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan sasaran meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah ditandai dengan 3 indikator, yaitu persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

2) **Program Pengembangan Perumahan**

Program Pengembangan Perumahan kota dengan sasaran Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat pemerintah, ditandai dengan 2 indikator. Pertama, indikator Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana atau relokasi kabupaten/kota dengan target pada tahun 2025 sebesar 66,67% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%. Kedua, indikator Persentase fasilitasi penyediaan rumah

layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota dengan target pada tahun 2025 sebesar 75% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

3) **Program Kawasan Permukiman**

Program Kawasan Permukiman dengan sasaran Meningkatnya kualitas kawasan permukiman, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/ kota yang ditangani, dengan target pada tahun 2025 sebesar 11,27% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 69,21%.

4) **Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh**

Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki, dengan target pada tahun 2026 sebesar 5,20% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 5,4%.

5) **Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)**

Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dengan sasaran meningkatnya penyediaan PSU Permukiman, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum), dengan target pada tahun 2025 sebesar 65% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 85%.

6) **Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman**

Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan sasaran Persentase Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Persentase terfasilitasinya registrasi pengembang perumahan dengan target pada tahun 2029 sebesar 25% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 25%.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 4 program yaitu:

1) **Program Penanganan Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanian**

Program Penanganan Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanian, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi, dengan target

pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

2) **Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah**

Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Persentase luas lahan bersertifikat, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

3) **Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan**

Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan dengan sasaran meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Persentase peningkatan penggunaan dan pemanfaatan tanah, dengan target pada tahun 2026 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

4) **Program Retribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee**

Program Retribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee dengan sasaran Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Persentase bidang tanah yang diretribusi, dengan target pada tahun 2026 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

5. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 3 program yaitu:

1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan sasaran meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah, ditandai dengan 3 indikator, yaitu persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

2) **Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**

Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan sasaran meningkatnya kapasitas SDM PPNS, ditandai dengan 2 indikator. Pertama, indikator Persentase Penegakan Perda dan Per Ka Da (Prosentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari

penegakan hukum Perda dan Perkada) dengan target pada tahun 2025 sebesar 97% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%. Kedua, indikator Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (prosentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran) dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

3) **Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran**

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan sasaran Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, ditandai dengan 3 indikator. Pertama, indikator Persentase ketersediaan Sarana Prasarana Damkar yang memadai dengan target pada tahun 2025 sebesar 67% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 80%. Kedua, indikator Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Kebakaran (Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran) dengan target pada tahun 2026 sebesar <15 menit dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar <15 menit. Ketiga, indikator Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 2 program yaitu:

1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan sasaran meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah, ditandai dengan 3 indikator, yaitu persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

2) **Program Penanggulangan Bencana**

Program Penanggulangan Bencana dengan sasaran 2 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat, ditandai dengan indikator Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Jumlah warga negara yang

memperoleh layanan informasi rawan bencana), dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

2. Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana, ditandai dengan 2 indikator. Pertama, indikator Persentase Cakupan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana (Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana), dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%. Kedua, indikator Persentase Cakupan Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana), dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

7. Dinas Sosial

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan pemerintahan bidang sosial dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 6 program yaitu:

- 1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan sasaran meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah, ditandai dengan 3 indikator, yaitu persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
- 2) **Program Pemberdayaan Sosial**
Program Pemberdayaan Sosial dengan sasaran meningkatnya pemberdayaan sosial, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam pelayanan sosial, dengan target pada tahun 2025 sebesar 40% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- 3) **Program Rehabilitasi Sosial**
Program Rehabilitasi Sosial dengan sasaran meningkatnya rehabilitasi sosial, ditandai dengan 4 indikator, yaitu Presentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti , indikator persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti, indikator persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti, dan indikator persentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar

panti, dengan target dari ketiga indikator tersebut 100% di akhir perencanaan tahun 2030.

4) **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial dengan sasaran meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi, dengan target pada tahun 2025 sebesar 96% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 98,5%.

5) **Program Penanganan Bencana**

Program Penanganan Bencana dengan sasaran meningkatnya perlindungan sosial korban dan bencana, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

6) **Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan sasaran meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Persentase TMP yang terkelola dengan baik, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

8. Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

a. **Urusan Tenaga Kerja**

Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 4 program yaitu:

1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan sasaran meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah, ditandai dengan 3 indikator. Pertama, indikator Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan dengan target pada tahun 2026 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%. Kedua, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah dengan target pada tahun 2025 sebesar 88,98 dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 90,03. Ketiga, indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target pada tahun 2026 sebesar 74,9 dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 76,1.

2) **Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**

Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan sasaran Meningkatnya produktivitas tenaga kerja, ditandai dengan 1

indikator. Indikator tersebut adalah Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi, dengan target pada tahun 2025 sebesar 0,04% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 0,42%.

3) **Program Penempatan Tenaga Kerja**

Program Penempatan Tenaga Kerja dengan sasaran meningkatnya penempatan tenaga kerja, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah, dengan target pada tahun 2025 sebesar 74,92% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 94,27%.

4) **Program Hubungan Industrial**

Program Hubungan Industrial dengan sasaran meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan), dengan target pada tahun 2025 sebesar 93,66% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 95,24%.

b. **Urusan Perindustrian**

Urusan pemerintahan bidang perindustrian dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 3 program yaitu:

1) **Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri**

Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri dengan sasaran meningkatnya realisasi pembangunan industri, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Persentase industri Kota Salatiga yang berkembang, dengan target pada tahun 2025 sebesar 0,56% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 2,2%.

2) **Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten /Kota**

Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten /Kota dengan sasaran meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian, ditandai dengan 2 indikator. Pertama, indikator Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait, dengan target pada tahun 2025 sebesar 75% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 28,13%. Kedua, indikator Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait, dengan target pada tahun 2025 sebesar 0,9% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 6,71%.

3) **Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan sasaran meningkatnya pemanfaatan informasi industri, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

c. Urusan Transmigrasi

Urusan pemerintahan bidang transmigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 1 program yaitu:

1) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan sasaran meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Persentase pelaksanaan proses transmigrasi, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 60%.

9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 7 program yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan sasaran meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah, ditandai dengan 3 indikator, yaitu persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

2) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan dengan sasaran meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan, ditandai dengan 2 indikator. Pertama, indikator Persentase Kelembagaan PUG Aktif, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%. Kedua, indikator Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

3) **Program Perlindungan Perempuan**

Program Perlindungan Perempuan dengan sasaran Menurunnya kekerasan terhadap perempuan, ditandai dengan 2 indikator. Pertama, indikator Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani sesuai standar, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%. Kedua, indikator Persentase UPTD PPA sesuai standar layanan, dengan target pada tahun 2026 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

4) **Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

Program Peningkatan Kualitas Keluarga, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Persentase PKK aktif, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

5) **Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak**

Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak dengan sasaran meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Persentase Perangkat Daerah yang berkontribusi dalam sistem data gender dan anak, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

6) **Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan sasaran Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Persentase kelembagaan forum anak yang aktif, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

7) **Program Perlindungan Khusus Anak**

Program Perlindungan Khusus Anak dengan sasaran terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Persentase korban kekerasan anak yang mendapat layanan komprehensif, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 3 program yaitu:

1) **Program Pengendalian Penduduk**

Program Pengendalian Penduduk dengan sasaran meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak, ditandai dengan 4 indikator, yaitu:

1. Persentase OPD yang mengintegrasikan dokumen GDPK 5 pilar ke dalam dokumen Perencanaan daerah, dengan target pada tahun 2026 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
2. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
3. Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun, dengan target pada tahun 2025 sebesar 2,1% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 0,04%.
4. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP), dengan target pada tahun 2025 sebesar 22 tahun dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 23 tahun.

2) **Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan sasaran meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB), ditandai dengan 7 indikator, yaitu:

- Rasio akseptor KB baru, dengan target pada tahun 2025 sebesar 72% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 15,13%.
- Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49, dengan target pada tahun 2025 sebesar 78,2% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 72,98%.
- Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed), dengan target pada tahun 2025 sebesar 13% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 8,38%.
- Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), dengan target pada tahun 2025 sebesar 26,75% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 26,71%.
- Persentase Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR), dengan target pada tahun 2026 sebesar 69,75% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 70,6%.
- Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), dengan target pada tahun 2026 sebesar 11,7% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 10%.
- Demand Satisfied (Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi), dengan target pada tahun 2026 sebesar 82,7% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 85,7%.

3) **Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan sasaran Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera, ditandai dengan 7 indikator, yaitu:

- Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), dengan target pada tahun 2025 sebesar 01:02 rasio dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 01:02 rasio.
- Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA), dengan target pada tahun 2025 sebesar 90% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Cakupan Kader BKB yang Terlatih, dengan target pada tahun 2025 sebesar 85% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 80,62%.
- Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB, dengan target pada tahun 2025 sebesar 80% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri, dengan target pada tahun 2026 sebesar 57,3% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 58,9%.
- Indeks Lansia Berdaya, dengan target pada tahun 2026 sebesar 56,6 dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 58,5.
- Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja, dengan target pada tahun 2026 sebesar 93,1 dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 94,8.

10. Dinas Pangan Dan Pertanian

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Urusan pemerintahan bidang pangan dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 5 program yaitu:

- 1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan sasaran meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah, ditandai dengan 3 indikator. Ketiga indikator tersebut meliputi indikator persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah dan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
- 2) **Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan**
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan dengan sasaran meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Jumlah

Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia, dengan target pada tahun 2025 sebanyak 30 unit dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebanyak 1 unit.

3) **Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat**

Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan sasaran meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023, dengan target pada tahun 2026 sebesar 1,63 dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 2,2.

4) **Program Penanganan Kerawanan Pangan**

Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan sasaran meningkatnya penanganan kerawanan pangan, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan, dengan target pada tahun 2026 sebesar 87,74% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 88,94%.

5) **Program Pengawasan Keamanan Pangan**

Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan sasaran meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan, dengan target pada tahun 2025 sebesar 98% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 93,8%.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Urusan pemerintahan bidang pertanian dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 5 program yaitu:

1) **Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**

Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan sasaran meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian, dengan target pada tahun 2025 sebanyak 75% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebanyak 78,82%.

2) **Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan sasaran meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian, dengan target pada tahun 2025 sebanyak 75% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebanyak 78,82%.

3) **Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan sasaran meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Mortalitas hewan/ternak akibat penyakit zoonosis, dengan target pada tahun 2025 sebanyak 0% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebanyak 0%.

4) **Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan sasaran meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Persentase kejadian bencana pertanian, dengan target pada tahun 2025 sebanyak 0% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebanyak 0%.

5) **Program Penyuluhan Pertanian**

Program Penyuluhan Pertanian dengan sasaran meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani untuk:

- Pemula, dengan target pada tahun 2025 sebanyak 53,24% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebanyak 63,05%.
- Lanjut, dengan target pada tahun 2025 sebanyak 53,24% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebanyak 77,77%.
- Madya, dengan target pada tahun 2025 sebanyak 13,92% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebanyak 23,12%.
- Utama, dengan target pada tahun 2025 sebanyak 2,36% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebanyak 2,73%.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 2 program yaitu:

1) **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan sasaran meningkatnya produksi perikanan budidaya, ditandai dengan 2 indikator. Pertama, indikator Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan, dengan target pada tahun 2025 sebanyak 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebanyak 100%. Kedua, indikator Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya

Ikan yang Baik (CBIB), dengan target pada tahun 2025 sebanyak 35% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebanyak 36,78%.

2) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan sasaran meningkatnya produksi perikanan budidaya, ditandai dengan 2 indikator. Pertama, indikator Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan, dengan target pada tahun 2025 sebanyak 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebanyak 100%. Kedua, indikator Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), dengan target pada tahun 2025 sebanyak 35% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebanyak 36,78%.

11. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

a. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan pemerintahan bidang perpustakaan dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 3 program yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan sasaran meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah, ditandai dengan 3 indikator, yaitu persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

2) Program Pembinaan Perpustakaan

Program Pembinaan Perpustakaan dengan sasaran meningkatnya layanan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Nilai tingkat kegemaran membaca, dengan target pada tahun 2025 sebesar 85,83 dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 77,73.

3) Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno dengan sasaran meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Persentase koleksi nasional dan kuno yang dimiliki, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Urusan pemerintahan bidang kearsipan dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 3 program yaitu:

1) Program Pengelolaan Arsip

Program Pengelolaan Arsip dengan sasaran meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Tingkat ketersediaan Arsip, dengan target pada tahun 2026 sebesar 88,67% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 89,67%.

2) Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip dengan sasaran meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat, dengan target pada tahun 2026 sebesar 50% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 75%.

3) Program Perizinan Penggunaan Arsip

Program Perizinan Penggunaan Arsip dengan sasaran meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup, dengan target pada tahun 2026 sebesar 25% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 45%.

12. Dinas Lingkungan Hidup

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 10 program yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan sasaran meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah, ditandai dengan 3 indikator, yaitu persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

2) Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan sasaran meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan LH, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

3) **Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan sasaran menurunkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, ditandai dengan 2 indikator. Pertama, indikator Persentase pemantauan status mutu air, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%. Kedua, indikator Persentase pemeliharaan sarana prasarana laboratorium, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

4) **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dengan sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Persentase Ruang Terbuka Hijau Tingkat Kota, dengan target pada tahun 2025 sebesar 17,4% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 20%.

5) **Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)**

Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) dengan sasaran Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), ditandai dengan 2 indikator. Pertama, indikator Persentase kelompok masyarakat yang memahami rencana aksi pengurangan dan penghapusan peralatan bermerkuri, dengan target pada tahun 2026 sebesar 10% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 50%. Kedua, indikator Persentase sampah spesifik yang mengandung bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya beracun (limbah B3) yang terkumpul, dengan target pada tahun 2026 sebesar 30% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 70%.

6) **Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan sasaran meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Persentase kegiatan penegakan hukum lingkungan, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 37,78%.

7) **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan sasaran meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh penyuluhan, kampanye dan pelatihan lingkungan hidup, dengan target pada tahun 2026 sebesar 60% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 70%.

8) **Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan sasaran meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Persentase penghargaan lingkungan hidup yang terfasilitasi, dengan target pada tahun 2026 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

9) **Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan sasaran meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti, dengan target pada tahun 2026 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

10) **Program Pengelolaan Persampahan**

Program Pengelolaan Persampahan dengan sasaran meningkatnya tata kelola persampahan, ditandai dengan 2 indikator. Pertama, indikator Persentase penanganan sampah, dengan target pada tahun 2025 sebesar 70% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 70%. Kedua, indikator Persentase pengurangan sampah perkotaan, dengan target pada tahun 2025 sebesar 30% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 30%.

13. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 4 program yaitu:

1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan sasaran meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah, ditandai dengan 3 indikator, yaitu persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

2) **Program Pendaftaran Penduduk**

Program Pendaftaran Penduduk dengan sasaran meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk, ditandai dengan 2 indikator. Pertama, indikator Perekaman KTP-Elektronik, dengan target pada tahun 2026 sebesar 96,2% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 99%. Kedua, indikator Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA, dengan target pada tahun 2026 sebesar 85,95% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 86,5%.

3) **Program Pencatatan Sipil**

Program Pencatatan Sipil dengan sasaran meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun yang mempunyai Akte Kelahiran, dengan target pada tahun 2026 sebesar 99,47% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 99,51%.

4) **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan sasaran Meningkatkan pemanfaatan informasi kependudukan, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

14. Dinas Perhubungan

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Urusan pemerintahan bidang perhubungan dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 2 program yaitu:

1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan sasaran meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah, ditandai dengan 3 indikator, yaitu persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

2) **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan sasaran meningkatnya kualitas layanan transportasi darat, ditandai dengan 3 indikator. Pertama, indikator Rasio konektivitas kabupaten/kota, dengan target pada tahun 2026 sebesar 45 dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 0,65. Kedua, indikator Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota, dengan target pada tahun 2026 sebesar 8,05% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 14,08%. Ketiga, indikator Kinerja Lalu Lintas, dengan target pada tahun 2026 sebesar 45 V/C dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 43 V/C.

15. Dinas Komunikasi Dan Informatika

a. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 3 program yaitu:

- 1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan sasaran meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah, ditandai dengan 3 indikator, yaitu persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
- 2) **Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik**
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik dengan sasaran meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah, dengan target pada tahun 2025 sebesar 96% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- 3) **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika, ditandai dengan 2 indikator. Pertama, indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%. Kedua, indikator Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi, dengan target pada tahun 2025 sebesar 98% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 85%.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan pemerintahan bidang statistik dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 1 program yaitu:

1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan sasaran tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN), ditandai dengan 2 indikator. Pertama, indikator Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, dengan target pada tahun 2025 sebesar 85% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%. Kedua, indikator Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah, dengan target pada tahun 2025 sebesar 85% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Urusan pemerintahan bidang persandian dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 1 program yaitu:

1) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan sasaran meningkatnya keamanan siber dan sandi di lingkungan pemerintah daerah, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Persentase tingkat kematangan daerah dalam penyelenggaraan keamanan informasi, dengan target pada tahun 2025 sebesar 73% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 71,2%.

16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 7 program yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah, ditandai dengan 3 indikator, yaitu persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan sasaran meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi, ditandai dengan 1

indikator. Indikator tersebut adalah prosentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi, dengan target di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 78,75%.

3) Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi

Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi dengan sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah meningkatnya koperasi yang berkualitas, dengan target di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 73,27%.

4) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan sasaran meningkatnya kualitas SDM perkoperasian, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan, dengan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 54,46%.

5) Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan sasaran meningkatnya produktivitas koperasi, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah persentase koperasi aktif, dengan target di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 63,13%.

6) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dengan sasaran meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah prosentase usaha mikro yang mendapatkan legalitas usaha, dengan target di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 49,96%.

7) Program Pengembangan UMKM

Program Pengembangan UMKM dengan sasaran meningkatnya daya saing UMKM, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah prosentase UMKM yang mengakses pembiayaan, dengan target pada tahun 2025 sebesar 23% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 27,06%.

**17. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**

Urusan pemerintahan bidang penanaman modal dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 6 program yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan

perangkat daerah, ditandai dengan 3 indikator, yaitu persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan sasaran meningkatnya kemudahan berinvestasi, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah nilai realisasi PMA dan PMDN, dengan target pada tahun 2025 sebesar 586,84 miliar rupiah dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 642,83 miliar rupiah.

3) Program Promosi Penanaman Modal

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan sasaran meningkatnya kemudahan berinvestasi, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah nilai realisasi PMA dan PMDN, dengan target pada tahun 2025 sebesar 586,84 miliar rupiah dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 642,83 miliar rupiah.

4) Program Pelayanan Penanaman Modal

Program Pelayanan Penanaman Modal dengan sasaran meningkatnya kemudahan berinvestasi, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan, dengan target di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 98,5%.

5) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan sasaran terkendalinya pelaksanaan penanaman modal, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha, dengan target di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 75%.

6) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan sasaran meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data, dengan target di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 80%.

18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Urusan pemerintahan bidang kebudayaan dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 6 program yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah, ditandai dengan 3 indikator, yaitu:

1. Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, dengan target pada tahun 2025 sebesar 85 dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 91.
3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah, dengan target di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 72.

2) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan sasaran meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah persentase warisan budaya yang dilestarikan, dengan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 51%.

3) Program Pengelolaan Permuseuman

Program Pengelolaan Permuseuman dengan sasaran meningkatnya tata kelola museum, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah persentase penambahan jumlah koleksi museum, dengan target pada tahun 2025 sebesar 4,8% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 40,68%.

4) Program Pengembangan Kebudayaan

Program Pengembangan Kebudayaan dengan sasaran meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan, dengan target pada tahun 2025 sebesar 30% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 62%.

5) Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program Pengembangan Kesenian Tradisional dengan sasaran meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan, dengan target di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 62%.

6) Program Pembinaan Sejarah

Program Pembinaan Sejarah dengan sasaran meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah persentase sejarah yang dilestarikan dan dikembangkan, dengan target di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 45%.

b. Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata

Urusan pemerintahan bidang pariwisata dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 4 program yaitu:

1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan sasaran meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata, ditandai dengan 3 indikator, yaitu:

1. Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara, dengan target di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 5%.
2. Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten / Kota, dengan target pada tahun 2025 sebesar 85 dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 5%.
3. Tingkat Hunian Akomodasi, dengan target di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 66,42%.

2) Program Pemasaran Pariwisata

Program Pemasaran Pariwisata dengan sasaran meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah persentase fasilitasi pemasaran pariwisata, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan sasaran meningkatnya kualitas ekosistem kreatif, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual, dengan target di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 11%.

4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif dengan sasaran meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi, dengan target di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

19. Dinas Perdagangan

Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan

Urusan pemerintahan bidang perdagangan dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 6 program yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah, ditandai dengan 3 indikator, yaitu persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

2) Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan dengan sasaran meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi, dengan target di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

3) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan sasaran meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah prosentase fasilitasi pedagang pasar rakyat yang menggunakan platform digital, dengan target di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

4) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dengan sasaran meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, dengan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

5) Program Pengembangan Ekspor

Program Pengembangan Ekspor dengan sasaran meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Fasilitasi Pelaku Usaha Ekspor Barang dan Jasa, dengan target pada tahun 2025 sebesar 0% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 4,3%.

6) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen dengan sasaran meningkatnya tertib niaga dan mutu produk, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku, dengan target pada tahun 2025 sebesar 90% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 68%.

20. Sekretariat Daerah

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah, ditandai dengan 3 indikator, yaitu persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

2) Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat dengan sasaran meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, ditandai dengan 7 indikator, yaitu:

- Cakupan Koordinasi Administrasi Pemerintahan, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Cakupan Koordinasi Bidang Administrasi Kewilayahan, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Cakupan Fasilitasi Kerjasama Daerah, dengan target pada tahun 2025 sebesar 95% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Skor LPPD, dengan target pada tahun 2025 sebesar 3,1 dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 3,77.
- Ketepatan waktu penyampaian LKPJ (30 maret), dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Hukum, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

3) Program Perekonomian dan Pembangunan

Program Perekonomian dan Pembangunan dengan sasaran meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan, ditandai dengan 6 indikator, yaitu:

- Cakupan Koordinasi Program Perekonomian dan Pembangunan, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

- Cakupan Koordinasi OPD Pengampu DBHCHT, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Cakupan Koordinasi dan Pembinaan BUMD/BLUD, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Cakupan Koordinasi bidang Lingkungan Hidup dan SDA, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Ketepatan waktu penyampaian LKPJ (30 maret Cakupan Koordinasi POK, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
- Persentase Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan, dengan target pada tahun 2025 sebesar 84,00% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 72,93%.

21. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 2 program yaitu:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah, ditandai dengan 3 indikator, yaitu persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD dengan sasaran meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan dan meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Tingkat capaian kinerja dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

22. Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

a. Perencanaan

Perencanaan dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 3 program yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah, ditandai dengan 3 indikator, yaitu persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

2) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah, dengan target pada tahun 2025 sebesar 85% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

3) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan, dan meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan SDA ditandai dengan 2 indikator, yaitu:

1. Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Kesra, dengan target pada tahun 2025 sebesar 87% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.
2. Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Ekbang, dengan target pada tahun 2025 sebesar 87% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 91,85%

b. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 1 program yaitu:

1) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan sasaran sebagai berikut :

- Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbang dalam perencanaan pembangunan
- Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan
- Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah

- Meningkatnya fasilitasi pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah

Dengan 4 sasaran di atas ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah persentase terfasilitasinya inovasi masyarakat daerah, dengan target di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 45,21%.

23. Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 4 program yaitu :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah, ditandai dengan 3 indikator, yaitu persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sasaran meningkatnya tata kelola anggaran, meningkatnya tata kelola perbendaharaan, dan meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan, ditandai dengan 3 indikator, yaitu:

1. Persentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan, dengan target pada tahun 2025 sebesar 20,2% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 20,62%.
2. Cash managenent (Persentase anggaran), dengan target pada tahun 2025 sebesar 15,07 dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 4,59%.
3. Persentase laporan keuangan tepat waktu, dengan target di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%

3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan sasaran meningkatnya tata kelola aset daerah, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah persentase penambahan nilai aset tetap, dengan target di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 4,1%.

4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan sasaran meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan, meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan, dan meningkatnya penerapan sistem

informasi keuangan berbasis digital ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital, dengan target di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

24. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Kepegawaian

Kepegawaian dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 2 program yaitu :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah, ditandai dengan 3 indikator, yaitu persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

2) Program Kepegawaian Daerah

Program Kepegawaian Daerah dengan sasaran meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian, meningkatnya pengembangan kompetensi ASN, meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN dan meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah nilai indeks NSPK manajemen ASN, dengan target pada tahun 2025 sebesar 75,3 dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 80.

b. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 1 program yaitu :

1) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatkan layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional
- Meningkatkan kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi
- Meningkatkan layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi
- Meningkatkan layanan pengembangan kompetensi teknis

Dengan 4 sasaran diatas ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah persentase PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi, dengan target pada tahun 2025 NA dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 19%.

25. Inspektorat

Inspektorat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 3 program yaitu:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah, ditandai dengan 3 indikator, yaitu persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah..

b. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan sasaran menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan, ditandai dengan 2 indikator, yaitu:

- Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal tahun anggaran N-1, dengan target pada tahun 2025 90% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 90,3%.
- Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1, dengan target pada tahun 2025 sebesar 94% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 94,3%.

c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan sasaran meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi, ditandai dengan 2 indikator, yaitu:

- Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal tahun anggaran N-1 Nilai *Monitoring Controlling Surveillance For Prevention* (MCSP), dengan target pada tahun 2025 94,6 dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 95.
- Prosentase Penyelesaian Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat (DUMAS), dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

26. Kecamatan

a. Kecamatan Argromulyo

Kecamatan Argromulyo dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 5 program yaitu :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan

urusan perangkat daerah, ditandai dengan 3 indikator, yaitu: persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan sasaran meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah tingkat pencapaian pembangunan kelurahan dalam 1 tahun, dengan target di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 95%.

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel, dengan target pada tahun 2025 sebesar 50% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan sasaran meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah prosentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sasaran meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah persentase penyampaian SPPT PBB pada WP, dengan target pada tahun 2025 sebesar 73,37% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 79%.

b. Kecamatan Sidomukti

Kecamatan Sidomukti dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 5 program yaitu :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah, ditandai dengan 3 indikator, yaitu: persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan sasaran meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah tingkat pencapaian pembangunan kelurahan dalam 1 tahun, dengan target di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 95%.

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel, dengan target pada tahun 2025 sebesar 64% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan sasaran meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah prosentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sasaran meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah persentase penyampaian SPPT PBB pada WP, dengan target pada tahun 2025 sebesar 85,1% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 89,9%.

c. Kecamatan Sidorejo

Kecamatan Sidorejo dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 5 program yaitu :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah, ditandai dengan 3 indikator, yaitu: persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan sasaran meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah tingkat pencapaian pembangunan kelurahan dalam 1 tahun, dengan target di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 95%.

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel, dengan target pada tahun 2025 sebesar 50% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan sasaran meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah prosentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sasaran meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah persentase penyampaian SPPT PBB pada WP, dengan target pada tahun 2025 sebesar 93,54% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 85%.

d. Kecamatan Tingkir

Kecamatan Tingkir dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 5 program yaitu :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah, ditandai dengan 3 indikator, yaitu: persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan sasaran meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah tingkat pencapaian pembangunan kelurahan dalam 1 tahun, dengan target pada tahun 2025 sebesar 80% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 95%.

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan,

ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan sasaran meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah prosentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan, dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%.

5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sasaran meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah persentase penyampaian SPPT PBB pada WP, dengan target pada tahun 2025 sebesar 83,48% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 83,65%.

27. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 6 program yaitu :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah, ditandai dengan 3 indikator, yaitu: persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

2) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dengan sasaran meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, dengan target di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 5 kegiatan.

3) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan sasaran meningkatnya etika dan budaya politik, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah prosentase Pendidikan Politik pada

Kader Partai Politik, dengan target di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 65%.

4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan sasaran meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah prosentase organisasi kemasyarakatan yang aktif, target pada tahun 2025 sebesar 45% dan di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 64%.

5) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan sasaran meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah Prosentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonmi , sosial,budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan, target di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 80,5%

6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dengan sasaran meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, ditandai dengan 1 indikator. Indikator tersebut adalah prosentase konflik sosial yang yang diselesaikan, target di akhir perencanaan tahun 2030 sebesar 100%

Program pembangunan daerah Kota Salatiga tahun 2025-2030 berdasarkan masing-masing urusan dan perangkat daerah disampaikan melalui tabel berikut:



Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030

BIDANG, URUSAN DAN PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
DINAS PENDIDIKAN																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah					134.028.675.777		144.908.595.925		135.722.994.029		150.315.187.336		160.698.547.899		169.459.872.288
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	95,45	100		100		100		100		100		100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	85,29	90		100		100		100		100		100	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79,30*	79,30		79,31		79,32		79,33		79,34		79,35	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah					12.558.963.837		77.434.820.067		93.155.719.052		82.009.175.476		83.235.623.394		82.234.013.105
		Angka Partisipasi Sekolah PAUD (Tingkat parsipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD)	%	97,88	100		100		100		100		100		100	
		Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (Tingkat partisipasi warga negara usia 7–12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar)	%	99,34	100		100		100		100		100		100	
		Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs (Tingkat partisipasi warga negara usia 13–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama)	%	96,82	100		100		100		100		100		100	
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Kesetaraan (Tingkat partisipasi warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan)	%	71,05	100		100		100		100		100		100	
		Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,005	0,003		0,004		0,003		0,002		0,001		0	

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RPJMD KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2029



BIDANG, URUSAN DAN PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,058	0,41		0,057		0,056		0,055		0,054		0,053	
		Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI	%	88,44	87,31		88,45		88,46		88,47		88,48		88,49	
		Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs	%	87,78	97,73		87,78		87,79		87,8		87,81		87,82	
		Persentase sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang	%	78,07	0,24		78,08		78,09		78,1		78,11		78,12	
		Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik	%	87,43	87,36		87,44		87,45		87,46		87,47		87,48	
		Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik	%	95,45	50		95,46		95,47		95,48		95,49		95,5	
		Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	2,81	1,98		93,79		93,8		93,81		93,82		93,83	
		Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	2,55	1,8		85,07		85,08		85,09		85,1		85,11	
		Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	2,84	2,06		94,76		94,77		94,78		94,79		94,8	
		Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	2,73	1,87		90,93		90,94		90,95		90,96		90,97	
		Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	78,15	69,04		69,05		69,06		69,07		69,08		69,09	
		Iklim Kebhinekaan SMP	Nilai	80,75	74,57		74,58		74,59		74,6		74,61		74,62	
		Iklim Keamanan SD	Nilai	77,9	73,69		73,7		73,71		73,72		73,73		73,74	
		Iklim Keamanan SMP	Nilai	76,73	74,39		74,4		74,41		74,42		74,43		74,44	
		Iklim Inklusivitas SD	Nilai	59,5	61,43		61,44		61		61,46		61		61,48	
		Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	63,56	64,09		64,1		64		64,12		64		64,14	
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan					30.375.738		10.454.765		32.172.856		84.604.775		76.358.330		471.408.857
		Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SD/MI	%	74,19	20,2		74,2		74,21		74,22		74,23		74,24	
		Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SMP/MTs	%	63,89	18		63,9		63,91		63,92		63,93		63,94	
		Persentase sekolah yang menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang PKBM	%	75	66,67		75,01		75,02		75,03		75,04		75,05	
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya mutu dan distribusi institusi pendidikan					19.169.661.565		14.344.838.787		16.198.298.964		16.596.110.363		16.599.508.529		16.222.713.914
		Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang TK/RA	%	36,84	32		36,85		36,86		36,87		36,88		36,89	

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RPJMD KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2029



BIDANG, URUSAN DAN PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
		Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang SD	%	49,31	42		49,32		49,33		49,34		49,35		49,36	
		Persentase Guru bersertifikat pendidik jenjang SMP	%	58,65	52		58,66		58,67		58,68		58,69		58,7	
		Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang PAUD	%	87,8	84,98		87,81		87,82		87,83		87,84		87,85	
		Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SD	%	97,15	97,33		97,16		97,17		97,18		97,19		97,2	
		Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SMP	%	99,1	96,46		99,11		99,12		99,13		99,14		99,15	
1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan					22.602.747		23.844.233		26.858.320		66.005.722		21.814.313		86.850.040
		Persentase TK/RA yang terakreditasi	%	90,35	86,12		90,36		90,37		90,38		90,39		90,4	
		Persentase Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat (PKBM) yang Terakreditasi	%	83,33	58,36		83,33		83,33		83,33		83,34		83,34	
		Persentase lembaga Kursus dan Pelatihan yang berijin	%	92,86	32		92,86		92,86		92,86		92,87		92,87	
		Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SD/MI	%	100	99		100		100		100		100		100	
		Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SMP/MTs	%	100	99		100		100		100		100		100	
1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah					282.488.662		264.668.873		133.605.580		152.544.534		162.969.140		173.958.155
		Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SD/MI	%	20,43	12		20,43		20,43		20,43		20,44		20,44	
		Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SMP/MTs	%	42,86	12		42,86		42,86		42,86		42,87		42,87	
		Persentase PKBM yang sudah memasukkan pembelajaran Bahasa Jawa pada mata pelajaran yang diberikan ke siswa	%	66,67	35		66,67		66,67		66,67		66,68		66,68	
DINAS KESEHATAN																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah					105.249.400.992		80.944.172.285		77.558.801.495		88.070.467.071		96.317.411.555		103.760.619.528

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RPJMD KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2029



BIDANG, URUSAN DAN PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,31	73,31		73,31		73,4		73,5		73,6		73,7	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	86,9	86,90		86,91		86,92		86,93		86,94		86,95	
Rumah Sakit						141.546.860.185		138.168.702.013		124.366.363.213		132.524.979.029		135.876.241.042		137.101.930.222
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit	Nilai	88,57	86		86,5		87		87,5		88		88,5	
		Cost Recovery Rumah Sakit	Nilai	102,32	100		100		100		100		100		100	
KPM (Klinik Paru Masyarakat)						1.361.755.924		620.690.286		551.477.678		580.677.014		588.866.196		588.236.359
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Klinik Paru Masyarakat	Nilai	84,92	84,95		85		86		87		88		90	
Puskesmas Tegalarjo						1.272.823.120		1.148.765.907		1.020.668.067		1.074.709.838		1.089.866.276		1.088.700.579
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Tegalarjo	Nilai	86,5	86,5		86,5		87		88		89		90	
Puskesmas Cebongan						1.743.643.908		1.416.543.299		1.258.585.847		1.325.224.756		1.343.914.161		1.342.476.741
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Cebongan	Nilai	88,52	88,65		88,75		89		89,25		89,5		90	
Puskesmas Kalicacing						1.083.660.985		936.675.107		832.227.319		876.291.633		888.649.814		887.699.336
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Kalicacing	Nilai	88,4	88,65		88,75		89		89,25		89,5		90	
Puskesmas Mangunsari						1.221.658.286		1.033.501.891		918.257.037		966.876.405		980.512.087		979.463.354
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Mangunsari	Nilai	85,17	86,00		86,5		87		88		89		90	
Puskesmas Sidorejo Lor						2.278.673.619		2.033.539.322		1.806.781.206		1.902.445.661		1.929.275.507		1.927.211.999
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas sidorejo Lor	Nilai	82,05	85,00		86,5		87		88		89		90	
Puskesmas Siderejo Kidul						2.172.580.981		1.978.575.813		1.757.946.627		1.851.025.416		1.877.130.092		1.875.122.357
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Sidorejo Kidul	Nilai	87,35	88,00		88,75		89		89,25		89,5		90	
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat					36.746.440.344		51.492.119.583		49.338.537.520		56.025.466.616		61.271.707.817		66.006.657.156
		Angka Kematian balita (AKABA)	per 1.000 KH	11,49	11		11,49		11,49		11,49		11,49		11,49	
		Capaian penemuan kasus TB (Notifikasi kasus TB)	%	134	140		134,5		135		135,5		136		136,5	
		Prosentase pasien TBC yang memulai pengobatan (Enrollment TBC)	%	90,04	90,08		91		92		93		94		95	



BIDANG, URUSAN DAN PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
		Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah	%	20	25		30		35		40		45		50	
		Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk	1.000 penduduk	0,74	< 1		< 1		< 1		< 1		< 1		< 1	
		Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	kelurahan	2	3		5		8		12		17		23	
		Persentasi KK melaksanakan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)	%	74	74		75		76		77		78		79	
		Persentasi KK melaksanakan Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMMRT)	%	74	74		75		76		77		78		79	
		Persentasi KK melaksanakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PSRT)	%	74	74		75		76		77		78		79	
		Persentasi KK melaksanakan Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga (PLCRT)	%	39	39		40		41		42		43		44	
		Kelurahan sehat iklim	%	25	33,33		3		5		7		9		11	
		Persentase rumah tangga dengan kualitas air minum memenuhi syarat	%	30	30		30		31		32		33		34	
		Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat	%	70	70		70		71		72		73		74	
		Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	%	84,87	100		85		86		87		88		89	
		Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	%	82,07	100		83		84		85		86		87	
		Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	%	82,07	100		83		84		85		86		87	
		Cakupan imunisasi di usia sekolah dasar	%	98,92	100		95,5		96		96,5		97		97,5	
		Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan	%	100	100		99		99		99		99		99	
		Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A	%	99,6	100		100		100		100		100		100	
		Cakupan kepesertaan JKN	%	98,55	100		100		100		100		100		100	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100		100		100		100		100		100	



BIDANG, URUSAN DAN PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
		Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3)	%	99,55	100		100		100		100		100		100	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Persentase Depresi yang mendapatkan layanan	%	NA	1		1,5		1,5		2		2		2,5	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	338	100		100		100		100		100		100	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Prevalensi Obesitas > 18 tahun	%	N/A	58		59		60		61		62		63	
		Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	N/A	30		40		50		60		70		80	
		Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	%	N/A	16,7		15,7		14,7		13,7		12,7		11,7	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	98,16	100		100		100		100		100		100	
		Cakupan pembinaan remaja di sekolah	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	99,71	100		99,72		99,73		99,74		99,75		99,76	
		Cakupan Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	99,44	100		65		68		70		73		75	
		Deteksi Dini Triple Eliminasi Ibu Hamil	%	75,78	75,79		75,8		75,85		75,9		75,95		76	
		Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	100	95		95,5		96		96,5		97		97,5	
		Incident Rate DBD per 100.000 penduduk	/ 100 rb penduduk	9,18	<8		9,15		9,1		9,05		9		8,95	
		Kasus HIV/AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	%	60	75		61		62		63		64		65	
		Persentase penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	95,68	80		80		80		80		80		80	
		Persentase tempat kerja formal yang melaksanakan kesehatan kerja	%	50	100		50		55		60		65		70	
		Persentase tempat kerja informal yang melaksanakan kesehatan kerja	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)	Kasus	6	6		6		6		6		6		6	



BIDANG, URUSAN DAN PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
		Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)	%	7,21	7,21		7,1		7		6,9		6,8		6,7	
		Persentase Ibu hamil KEK	%	13,78	7		13,5		13		12,5		12		11,5	
		Persentase Ibu Hamil yang Anemia	%	7,43	10		7,4		7,3		7		7		7	
		Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	%	NA	53		57		60		62		64		66	
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan RME	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Persentase Pustu, Puskesmas, dan RSUD yang memenuhi standar Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) dan Sumbe	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	118,86	84		85		85		85		85		85	
		Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	/1000 penduduk	3,99	0,401		4		4		4,1		4,1		4,2	
		Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam	%	100	100		100		100		100		100		100	
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (RSUD)						36.746.440.344		51.673.986.071		49.359.571.322		56.033.865.387		61.423.180.674		66.022.330.971
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart		100	100		100		100		100		100		100	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	%	66,13	71,43		76,73		82,03		87,33		92,63		100	
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan					87.595.730		400.224.068		383.485.286		435.459.646		476.236.215		513.038.754
		Persentase tenaga kesehatan yang sudah mengikuti pelatihan sesuai kompetensinya	%	73,04	65		73,5		74		74,5		75		75	
		Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	%	8,82	8,82		8,91		9,00		9,09		9,18		9,20	
		Persentase Puskesmas dengan SDM sesuai standar	%	100	100		100		100		100		100		100	

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RPJMD KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2029



BIDANG, URUSAN DAN PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
		Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	100	100		100		100		100		100		100	
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (RSUD)								333.447.134		279.222.545		505.251.483		472.684.620		441.145.623
		Persentase karyawan RSUD yang yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi minimal 20 jam per tahun	%	57,50	59,75		60		60,25		60,5		60,75		70	
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi alat kesehatan, dan makanan minuman					86.016.938		262.304.070		251.333.588		285.397.222		312.121.902		336.242.030
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	%	50	54		58		62		66		70		70	
		Persentase pangan Industri Rumah Tangga aman dan bermutu	%	74,58	75		76		77		78		79		80	
		Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	%	16,27	16,27		29,76		36,51		43,25		50		51	
		Persentase apotek dan toko obat yg mampu memelihara persyaratan perijinan	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti olehPemerintah Daerah	%	81	83,5		84		84,5		85		85,5		86	
		Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	89,28	89,28		90		90,5		91		91,5		92	
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					4.672.191.827		4.048.022.418		3.878.719.842		4.404.408.804		4.816.838.942		5.189.074.173
		Cakupan desa siaga strata mandiri	%	100	95,6		100		100		100		100		100	
		Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna	%	97,55	96,61		97,65		97,75		97,85		97,95		98	
		Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna	%	95,65	96,8		95,75		95,85		95,95		96,05		96,15	
		Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat	%	90,34	96,62		90,45		90,56		90,67		90,78		90,89	
		Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat	%	94,34	93,56		94,45		94,56		94,67		94,78		94,89	
		Cakupan sosialisasi dan edukasi Kawasan Tanpa Rokok	%	25	37,5		50		62,5		75		87,5		100	

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RPJMD KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2029



BIDANG, URUSAN DAN PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
		Cakupan sosialisasi dan edukasi Kawasan Tanpa Rokok	%	37,5	37,5		50		62,5		75		87,5		100	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah					18.988.632.500		12.066.733.309		11.036.511.781		11.962.657.130		12.488.169.147		12.841.718.325
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88,22	88,5		88,6		88,7		88,7		88,8		88,8	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,96	71,96		72		73		73,5		74		74,5	
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman					41.835.807.761		21.277.980.110		20.388.059.931		23.151.285.555		25.319.178.756		27.275.791.897
		Rasio kemantapan jalan	%	91,97	95,52		95,53		95,54		95,55		95,56		95,57	
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi					5.452.236.975		5.066.185.740		4.854.299.983		5.512.210.846		6.028.375.894		6.494.236.166
		Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Nilai	64,84	65,5		66		66,5		67		67,5		68	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya asks masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah					1.905.438.502		5.572.804.315		5.339.729.982		6.063.431.931		6.631.213.484		7.143.659.783
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	10,29	15		19,4		23,8		28,2		32,5		36,9	
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan					21.107.210.829		2.761.208.879		2.474.925.110		2.626.840.984		2.683.209.937		2.696.350.917
		Prosentase jaringan drainase kondisi baik	%	96,49	96,5		96,7	-	96,9	-	97,2	-	97,5	-	97,8	-
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum					1.796.556.302		2.533.092.870		2.427.149.992		2.756.105.423		3.014.187.947		3.247.118.083

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RPJMD KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2029



BIDANG, URUSAN DAN PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
PENYEDIAAN AIR MINUM																
		Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	63,83	65		66,09		68,35		70,61		72,87		75,13	
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya kualitas bangunan gedung					925.498.701		690.843.510		661.949.998		751.665.115		822.051.258		885.577.659
		Presentase Bangunan Gedung Negara milik Pemerintah Kota dalam Kondisi Baik	%	71,93	74,5		76,93		77,43		77,98		78,59		79,25	
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata					6.859.578.609		11.237.721.097		10.767.719.963		12.227.085.878		13.372.033.802		14.405.396.586
		Persentase penataan bangunan dan lingkungan	%	25	28,5		32,24		33,77		35,46		37,32		39,36	
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi					234.096.730		184.224.936		160.472.727		165.656.224		164.698.474		161.296.388
		Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi	Orang	67	75		75		75		75		75		75	
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang					675.069.641		921.124.680		802.363.634		828.281.119		823.492.370		806.481.942
		Jumlah KKPR yang diterbitkan	Dokumen	396	400		400		400		400		400		400	
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah					8.494.385.773		6.753.861.168		6.471.390.872		7.348.467.845		8.036.580.621		8.657.583.653
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	95	90		95,1		95,2		95,3		95,4		95,5	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,6	74,65		74,7		74,8		74,9		75		75,1	
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terken relokasi akibat pemerintah					1.420.366.123		1.342.078.659		1.285.948.196		1.460.234.764		1.596.971.578		1.720.382.199

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RPJMD KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2029



BIDANG, URUSAN DAN PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
		Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana atau relokasi kabupaten/kota	%	100	66,67		100		100		100		100		100	
		Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	75		100		100		100		100		100	
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman					7.804.240.577		5.778.859.905		5.537.167.601		6.287.628.580		6.876.403.972		7.407.798.079
		Presentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/ kota yang ditangani	%	10,01	11,27		19,71		23,25		7,65		3,82		62,91	
1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH						-		2.302.811.700		2.005.909.084		sekr2070702797,3 3262		2.058.730.925		2.016.204.856
		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	%	5,11	5,18		5,2		5,25		5,3		5,35		5,4	
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman					5.364.669.515		8.588.290.180		8.076.648.502		9.009.774.477		9.668.754.187		10.252.160.501
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	46	55		65		70		75		80		85	
1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil					-								20.000.000		20.000.000
		Persentase terfasilitasinya registrasi pengembang perumahan	%	0	0		0		0		0		36		36	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																
2.10.17 PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN						21.776.440		13.816.870		16.047.273		16.565.622		16.469.847		16.129.639
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	50	100		100		100		100		100		100	
2.10.09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH						87.105.760		184.224.936		160.472.727		248.484.336		164.698.474		161.296.388
		Persentase luas lahan bersertifikat	%	50	100		100		100		100		100		100	

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RPJMD KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2029



BIDANG, URUSAN DAN PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan					-		4.145.061.060		2.808.272.718		2.898.983.916		2.470.477.110		2.419.445.827
		Persentase peningkatan penggunaan dan pemanfaatan tanah	%	100	100		100		100		100		100		100	
2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)					-		92.112.468		80.236.363		82.828.112		82.349.237		80.648.194
		Persentase bidang tanah yang didistribusi	%	100	100		100		100		100		100		100	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)																
URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah					13.382.415.056		9.696.515.731		10.301.317.666		10.975.578.266		11.057.646.396		11.258.592.561
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	87,09	88		88		88		88		88		88	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,55*	69,00		70		70,5		71		71,5		72	
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada dan Meningkatnya penanganan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum					1.613.748.097		958.098.625		1.050.838.801		1.181.664.691		1.770.508.595		1.309.898.528
		Persentase Penegakan Perda dan Per Ka Da (Prosentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada)	%	100	97		100		100		100		100		100	
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (prosentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran)	%	100	100		100		100		100		100		100	



BIDANG, URUSAN DAN PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGA N, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran					330.940.479		199.711.621		220.649.999		194.646.063		156.463.550		197.588.076
		Presentase ketersediaan Sarana Prasarana Damkar yang memadai	%	75	67		75		80		80		80		80	
		Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Kebakaran (Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran)	Menit	7	< 15		< 15		< 15		< 15		< 15		< 15	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100		100		100		100		100		100	
BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH BPBD																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAN																
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah					1.457.432.582		1.811.352.075		1.735.595.183		1.970.814.331		2.155.370.143		2.321.932.483
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	86	87		88		88,25		88,5		88,7		88,81	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	63	64		65		67		69		70		71	
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGA N BENCANA	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat, dan Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana					1.885.567.501		1.161.998.784		1.424.195.450		1.532.320.070		1.564.635.503		1.693.612.079
		Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana)	%	100	100		100		100		100		100		100	



BIDANG, URUSAN DAN PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
		Persentase Cakupan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana (Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana)	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Persentase Cakupan Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana)	%	100	100		100		100		100		100		100	
DINAS SOSIAL																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah					7.301.933.252		6.459.603.283		5.908.101.713		6.403.888.882		6.685.207.699		6.874.470.806
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat ((IKM) Perangkat Daerah	Nilai	89,91	90		90,47		91,03		91,59		92,15		92,71	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,75	70,80		70,9		71,05		71,2		71,35		71,5	
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pemberdayaan sosial					1.467.229.022		746.367.064		682.644.480		739.929.610		772.434.254		794.302.430
		Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan sosial yang Meningkatkan Kulitasnya dalam pelayanan sosial	%	NA	40		46		60		73		86		100	
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya rehabilitasi sosial					1.410.210.680		1.102.910.202		984.729.248		1.041.950.836		1.061.824.914		1.065.888.667
		Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Presentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Presentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Presentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100		100		100		100		100		100	

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RPJMD KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2029



BIDANG, URUSAN DAN PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial					1.028.774.557		1.269.888.345		1.133.815.058		1.199.699.867		1.222.582.835		1.227.261.832
		Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	%	92,72	96		96		98		98		98		98,5	
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya perlindungan sosial korban dan bencana					76.217.540		36.635.961		32.710.281		34.611.041		35.271.209		35.406.197
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	%	100	100		100		100		100		100		100	
1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan					263.621.228		131.737.213		117.621.077		124.455.916		126.829.777		127.315.173
		Persentase TMP yang terkelola dengan baik	%	100	100		100		100		100		100		100	
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA																
URUSAN TENAGA KERJA																
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah					6.994.378.180		6.646.642.804		15.583.078.261		6.262.727.066		6.805.937.325		7.289.545.611
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	tad		100		100		100		100		100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	88,78	88,98		89,03		89,28		89,53		89,78		90,03	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,6*	tad		74,9		75,2		75,5		75,8		76,1	
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja					860.169.381		686.237.887		656.333.452		781.069.095		853.138.095		848.419.003
		Persentase Tenaga Kerja yang terlatih	%	0,232	0,04		0,31		0,34		0,36		0,39		0,42	
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya penempatan tenaga kerja					255.873.170		440.866.852		422.444.453		474.190.941		512.624.000		535.100.769
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	%	71,05	71,48		71,69		71,91		72,12		72,34		94,27	
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi					517.190.451		709.408.778		677.716.443		769.237.099		841.186.339		906.191.458
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata	%	93,24	93,51		94,07		94,35		94,64		94,92		95,24	



BIDANG, URUSAN DAN PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
		kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)														
URUSAN PERINDUSTRIAN																
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya realisasi pembangunan industri					1.039.825.011		533.122.467		510.825.404		580.058.370		634.375.207		683.398.395
		Persentase Industri Kota Salatiga yang berkembang	%	0,31	0,56		0,44		0,88		1,32		1,76		2,2	
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IJIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN /KOTA	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian					65.329.320		19.343.618		18.454.364		20.707.028		22.234.294		24.194.458
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100		100		100		100		100		100	
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri					32.664.660		80.598.410		77.026.909		86.969.517		94.701.623		100.810.243
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100		100		100		100		100		100	
URUSAN TRANSMIGRASI																
3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi					103.438.090		110.534.962		98.690.727		108.504.827		110.347.978		114.520.436
		Persentase pelaksanaan proses transmigrasi	%	20	100		60		60		60		60		60	
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG																

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RPJMD KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2029



BIDANG, URUSAN DAN PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah		%	100		7.809.060.913		6.164.566.680		5.711.010.402		6.481.181.060		7.084.121.824		7.627.557.398
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	85,44	89		85,5		85,85		86,28		86,71		87,14	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,9	76,95		77		77,1		77,2		77,3		77,4	
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMA AN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan					244.646.871		240.662.982		230.597.607		261.850.861		286.370.653		308.500.778
		Persentase Kelembagaan PUG Aktif	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	%	100	100		100		100		100		100		100	
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan					193.588.197		414.741.085		360.875.284		397.437.199		422.376.648		442.993.939
		Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani sesuai standart	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Persentase UPTD PPA sesuai standart layanan	%	0	0		100		100		100		100		100	
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak					583.848.134		598.118.494		573.103.069		650.776.624		711.715.538		766.715.426
		Persentase PKK aktif	%	100	100		100		100		100		100		100	
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak					56.406.424		46.056.234		44.130.000		50.111.008		54.803.417		59.038.511
		Persentase Perangkat Daerah yang berkontribusi dalam sistem data gender dan anak	%	100	100		100		100		100		100		100	
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif					382.322.969		273.448.757		262.012.166		297.523.084		325.383.233		350.528.168
		Persentase kelembagaan forum anak yang aktif	%	100	100		100		100		100		100		100	

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RPJMD KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2029



BIDANG, URUSAN DAN PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak					223.208.510		373.359.006		341.670.105		371.384.274		389.663.825		403.620.018
		Persentase korban kekerasan anak yang mendapat layanan komprehensif	%	100	100		100		100		100		100		100	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk					563.683.150		587.631.490		492.771.626		542.648.375		574.921.198		600.950.019
		Persentase OPD yang mengintegrasikan dokumen GDPK 5 pilar ke dalam dokumen Perencanaan daerah	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun	%	0,07	2,1		0,08		0,07		0,06		0,05		0,04	
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	23	22		23		23		23		23		23	
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)					861.913.674		2.411.883.916		1.749.834.730		1.885.563.331		1.922.401.351		1.961.147.705
		Rasio akseptor KB baru	%	14,31	72		14,4		14,5		14,55		14,84		15,13	
		Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	67,7	78,2		67,75		68,77		70,14		71,54		72,98	
		Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	%	8,51	13		8,47		8,45		8,43		8,4		8,38	
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	26,65	26,75		26,65		27,05		27,59		28,14		28,71	
		Persentase Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	%	65,71	65,96		69,75		70		70,25		70,5		70,6	
		Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)	%	13	12		11,7		11,2		10,8		10,4		10	
		Demand Satisfied (Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi)	%	81	81,80		82,7		83,5		84,3		85		85,7	
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN	Meningkatnya pemberdayaan dan					276.288.583		1.280.085.126		1.137.741.844		1.200.267.620		1.221.516.898		1.226.651.746

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RPJMD KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2029



BIDANG, URUSAN DAN PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera															
		Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	rasio	01:01,9	01:02		01:02		01:02		01:02		01:02		01:02	
		Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA)	%	100	90		100		100		100		100		100	
		Cakupan Kader BKB yang Terlatih	%	74,74	85		74,85		75,97		77,49		79,04		80,62	
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB	%	95,3	80		95,5		96,93		98,87		100		100	
		Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	56,5	56,90		57,3		57,7		58,1		58,5		58,9	
		Indeks Lansia Berdaya	Indeks	55,6	56,10		56,6		57,1		57,5		58		58,5	
		Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	Indeks	92,1	92,60		93,1		93,6		94		94,4		94,8	
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah					13.238.795.518		9.098.759.276		8.029.789.824		8.734.603.752		9.126.969.174	9.805.872.320	
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	89,10	90		90,03		90,06		90,9		91,2		91,5	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,65	71		71,35		71,7		72,05		72,4		72,75	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan					81.661.650		69.084.351		60.177.273		62.121.084		61.761.928	60.486.146	
		Presentase Peningkatan Indeks ketahanan Pangan	%	-3,03	3,27		0,06		0,15		0,07		0,07		0,18	
2.09.03PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat					559.654.509		595.724.930		533.959.818		566.735.344		578.896.826	581.731.964	
		Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	Rasio	1,49	1,56		1,63		1,77		1,91		2,06		2,2	

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RPJMD KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2029



BIDANG, URUSAN DAN PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan					35.495.597		106.449.095		95.412.389		101.268.993		103.442.109		103.948.715
		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	87,14	87,44		87,74		88,04		88,34		88,64		88,94	
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan					110.515.433		108.895.467		97.605.121		103.596.319		105.819.376		106.337.625
		Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	89,7	98		90		91,05		91,96		92,88		93,8	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian					509.894.254		690.592.785		618.991.717		656.986.672		671.084.842		674.371.469
		Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian	%	70	75		75	-	75,38	-	76,51	-	77,65	-	78,82	-
		Produksi tanaman pangan	ton/ha	6,938	6,952		6,966		6,980		6,994		7,008		7,022	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian					1.976.544.314		957.600.020		858.315.484		911.000.612		930.549.626		935.106.978
		Pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian	%	50	75		75	-	75,38	-	76,51	-	77,65	-	78,82	-
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner					622.359.768		261.252.981		234.166.117		248.539.704		253.873.077		255.116.417
		Mortalitas hewan/ternak akibat penyakit zoonosis	%	0	0		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGA N BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian					165.846.972		15.466.176		13.862.634		14.713.550		15.029.286		15.102.892
		Persentase penanganan bencana pertanian	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian					141.546.860		167.201.908		149.866.315		159.065.410		162.478.769		163.274.506
		Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani						-		-		-		-		-
		- Pemula	%	60	53,24		58,56	-	60,3	-	61,2	-	62,12	-	63,05	-
		- Lanjut	%	74	53,24		58,56	-	74,37	-	75,49	-	76,62	-	77,77	-
		- Madya	%	22	13,92		15,31	-	22,11	-	22,44	-	22,78	-	23,12	-
		- Utama	%	0	2,36		2,6	-	2,61	-	2,65	-	2,69	-	2,73	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG																

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RPJMD KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2029



BIDANG, URUSAN DAN PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
KELAUTAN DAN PERIKANAN																
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan budidaya					247.764.713		177.652.027		159.232.959		169.006.999		172.633.693		173.479.163
		Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
		Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	%	35	35		35	-	35,18	-	35,7	-	36,24	-	36,78	-
		Produksi perikanan budidaya	ton	677,706	691,260		705,085		719,187		733,571		748,242		763,207	
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya produksi perikanan budidaya					127.393.263		209.002.385		187.332.894		198.831.763		203.098.462		204.093.133
		Cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
		Persentase kelompok kelompok pengolah dan pemasar ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya ikan yang Baik (CBIB)	%	35	35		35	-	35,18	-	35,7	-	36,24	-	36,78	-
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							0		0		0		0		0	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							0		0		0		0		0	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah					8.148.711.229		7.178.808.784		7.946.829.026		7.935.283.924		6.976.020.980		7.010.185.936
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	82,43	83,21		82,82		83,23		83,63		84,03		84,43	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,10	77,11		77,12		77,13		77,14		77,15		77,16	
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan					1.900.851.840		1.405.549.083		1.315.418.349		1.439.382.718		1.516.924.505		1.655.373.841
		Nilai tingkat kegemaran membaca	nilai	75,23	85,83		75,33		76,23		76,73		77,23		77,73	
2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno					108.228.907		155.760.594		139.611.244		148.180.863		151.360.651		152.101.938
		Persentase koleksi nasional dan kuno yg dimiliki	%	0	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
URUSAN PEMERINTAHAN								-		-		-		-		-

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RPJMD KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2029



BIDANG, URUSAN DAN PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
BIDANG KEARSIPAN																
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis					731.625.233		529.134.994		664.938.088		708.988.392		747.182.700		775.653.473
		Tingkat ketersediaan Arsip	%	88,67	88,67		88,67	-	88,92	-	89,17	-	89,42	-	89,67	-
2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK					65.552.529		7.628.796		58.172.463		67.377.234		67.083.780		73.482.084
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	16,67	30		50	-	60	-	65	-	70	-	75	-
2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup					1.088.822		23.028.117		24.070.909		24.848.434		27.175.248		28.226.868
		Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	%	0	10		25	-	30	-	35	-	40	-	45	-
DINAS LINGKUNGAN HIDUP																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah					37.554.497.882		25.735.762.999		25.063.432.824		28.781.526.461		31.591.637.788		33.887.161.500
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	83	84		84,5		85		85,5		86		86,5	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,1	75,20		75,3		75,4		75,5		75,6		75,7	
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP					217.764.400		-		-		124.242.168		247.047.711		-
		Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan LH	%	100	100		30		60		100		100		100	
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup					446.220.162		561.886.055		541.595.453		612.928.028		675.263.743		733.898.568

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RPJMD KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2029



BIDANG, URUSAN DAN PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
LINGKUNGAN HIDUP																
		Persentase pemantauan status mutu air	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Persentase pemeliharaan sarana prasarana laboratorium	%	100	100		100		100		100		100		100	
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati					4.302.260.885		4.352.314.113		6.418.909.069		6.224.532.609		6.340.891.249		7.177.689.288
		Persentase Ruang Terbuka Hijau Tingkat Kota	%	17,4	17,4		18		18,5		19		19,5		20	
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)					141.034.025		92.112.468		96.283.636		115.959.357		131.758.779		145.166.750
		Persentase kelompok masyarakat yang memahami rencana aksi pengurangan dan penghapusan peralatan bermerkuri	%	5	7,5		10		20		30		40		50	
		Persentase sampah spesifik yang mengandung bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya beracun (limbah B3) yang terkumpul	%	0	20		30		40		50		60		70	
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan					61.677.411		64.478.728		60.177.273		65.434.208		69.173.359		72.583.375
		Persentase kegiatan penegakan hukum lingkungan	%	89,28	39,53		39,23		38,93		38,64		38,35		37,78	
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup					163.323.300		92.112.468		96.283.636		115.959.357		131.758.779		145.166.750
		Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh penyuluhan, kampanye dan pelatihan lingkungan hidup	%	30	50		60		63		65		67		70	
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam					-		138.168.702		140.413.636		153.232.007		160.581.012		161.296.388

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RPJMD KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2029



BIDANG, URUSAN DAN PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
HIDUP UNTUK MASYARAKAT	perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
		Persentase penghargaan lingkungan hidup yang terfasilitasi	%	100	100		100		100		100		100		100	
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup					-		18.422.494		16.047.273		17.393.903		18.940.325		20.162.049
		Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100		100		100		100		100		100	
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan					1.676.194.652		25.791.491.042		23.268.545.375		24.848.433.568		25.528.263.468		25.807.422.159
		Persentase penanganan sampah	%	76,51	70		74		73		72		71		70	
		Persentase pengurangan sampah perkotaan	%	21,65	23		25		26		28		29		30	
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIl																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIl																
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah					8.224.453.692		5.349.206.825		5.803.956.719		6.127.921.071		6.456.621.531		6.394.325.917
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	82,91	82,91		82,96		83		83,05		83,1		83,15	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	90,85	88,6		91,05		91,25		91,3		91,35		91,4	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,51	68,55		68,6		68,7		68,75		68,8		68,85	
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk					1.259.089.808		465.928.812		458.951.998		951.695.006		588.797.045		620.991.096
		Perekaman KTP-Elektronik	%	98,19	96,2		98,2		98,5		98,7		98,9		99	
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	85,86	85,90		85,95		86		86,2		86,4		86,5	
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIl	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil					88.434.123		79.496.744		368.399.646		38.100.931		388.688.399		79.035.230
		Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun yang mempunyai Akta Kelahiran	%	99,44	99,45		99,47		99,48		99,49		99,5		99,51	



BIDANG, URUSAN DAN PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan					116.965.615		55.083.256		40.618.857		42.759.184		43.335.462		43.246.788
		Persentase PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	100	100		100		100		100		100		100	
DINAS PERHUBUNGAN																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah					8.664.984.667		7.678.594.758		6.331.493.851		7.385.341.500		7.755.381.978		8.081.468.916
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	87,82	84,28		88		89		90		91		92	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,10	74,20		74,3		74,5		74,7		74,9		75	
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat					4.381.846.765		17.361.092.304		27.671.035.437		17.324.960.348		19.100.448.706		20.599.443.945
		Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio	0,35	0,4		4,5		0,5		0,55		0,6		0,65	
		Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota	%	7	7,5		8,05		9,26		10,65		12,24		14,08	
		Kinerja Lalu Lintas	V/C	31	35		45		44		44		43		43	
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah					7.636.465.341		8.417.187.674		15.722.189.752		8.344.589.010		8.711.161.565		8.957.780.903
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	82	85		88,31		88,75		89,2		89,64		90,09	

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RPJMD KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2029



BIDANG, URUSAN DAN PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,15	75,5		75,25		75,3		75,35		75,4		75,45	
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah					822.240.811		505.687.017		453.257.089		481.078.919		491.402.313		493.808.948
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	%	100	96		100		100		100		100		100	
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika					4.984.620.263		3.138.399.311		2.813.008.215		2.985.676.310		3.049.745.452		3.064.681.533
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	60,05	98		65		70		75		80		85	
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)					219.298.115		200.024.269		179.285.635		190.290.547		194.373.961		195.325.905
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	85		90		100		100		100		100	
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	85		90		100		100		100		100	
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya keamanan siber dan sandi di lingkungan pemerintah daerah					250.429.060		133.784.516		119.913.658		127.274.200		130.005.356		130.642.056
		Persentase tingkat kematangan daerah dalam penyelenggaraan keamanan informasi	%	70,85	73		70,9		71,05		71,1		71,15		71,2	
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RPJMD KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2029



BIDANG, URUSAN DAN PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah					4.939.769.455		5.050.775.761		4.113.317.168		4.324.041.581		4.413.507.357		4.433.634.479
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	85,42	83,42		85,73		86,1		86,52		86,94		87,2	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,90	68,95		69,05		69,2		69,35		69,5		69,65	
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi					114.326.310		165.802.442		108.319.091		115.959.357		119.406.394		120.972.291
		Prosentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	62,50	65,00		71,79		71,97		72,15		72,33		78,75	
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi					114.326.310		76.637.573		108.319.091		115.959.357		119.406.394		120.972.291
		Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	71,58	72,00		72,16		72,45		72,73		73		73,27	
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian					131.449.125		280.943.027		248.732.726		260.908.552		263.517.558		262.106.631
		Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	%	57,89	52,00		52,58		53,06		53,54		54		54,46	
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya produktivitas koperasi					212.320.290		280.943.027		248.732.726		260.908.552		263.517.558		262.106.631
		Persentase Koperasi Aktif	%	53,98	55,00		62,18		62,42		62,66		62,89		63,13	
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri					1.435.067.398		1.750.136.892		1.281.775.905		1.438.889.960		1.557.141.722		1.661.352.802
		Prosentase usaha mikro yang mendapatkan legalitas usaha	%	40,88	45,00		47,89		48,64		49,02		49,58		49,96	
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM					939.612.012		1.406.770.166		1.203.545.450		1.242.421.678		1.235.238.555		1.209.722.914
		Prosentase UMKM yang mengakses pembiayaan	%	24,8	23		25,55		25,93		26,31		26,68		27,06	
DINAS PENANAMAN																

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RPJMD KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2029



BIDANG, URUSAN DAN PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah					4.594.474.863		3.613.885.302		4.180.823.230		4.234.045.028		4.430.541.576		8.723.688.593
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	84,75	89		85		86		87		88		90	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,9	78,5		77		77,1		77,2		77,3		77,4	
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kemudahan berinvestasi					109.829.475		120.667.333		153.251.454		75.373.582		74.937.806		73.389.857
		Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Miliar rupiah	634,854	586,84		636,44		638,03		639,63		641,23		642,83	
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal					114.030.151		53.425.231		104.307.272		111.817.951		115.288.932		116.939.882
		Jumlah investor berskala nasional	pelaku usaha	363	367		370		370		370		370		370	
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko					157.879.190		234.253.981		240.709.090		248.484.336		247.047.711		241.944.583
		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	97,64	97,69		97,75		97,8		98		98,25		98,5	
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal					128.651.042		103.165.964		124.366.363		140.807.790		152.346.088		161.296.388
		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	67	67		67		70		70		70		75	
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal					43.552.880		36.844.987		32.094.545		33.131.245		32.939.695		32.259.278
		persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data	%	0	80		80		80		80		80		80	
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RPJMD KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2029



BIDANG, URUSAN DAN PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah					6.279.736.462		5.589.859.399		4.884.200.465		5.081.848.815		5.080.384.242		4.991.329.242
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	78,84	80		80		80		80		80		80	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,2	68,2		68,2		68,5		68,5		69		69	
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANG KEPEMUDAAN	Meningkatnya daya saing kepemudaan					1.573.347.792		1.645.884.001		1.433.679.388		1.479.989.269		1.471.432.636		1.441.038.064
		persentase Pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan	%	5,44	5		5		5		5		5		5	
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANG KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga					14.884.196.759		17.538.213.909		11.923.123.596		13.517.547.861		15.629.885.182		18.524.890.219
		persentase Atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga	%	17,04	27		17		17		17,5		17,5		17,5	
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya kualitas kepramukaan					-		5.757.029.251		2.647.799.991		2.774.741.748		1.976.381.688		1.975.880.759
		persentase fasilitasi pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%	65	70		65		65		67		67		68	
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA																
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah					6.244.400.278		5.251.761.506		4.390.214.278		6.612.969.369		4.670.343.510		4.374.074.957
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	86,64	85		87		88		89		90		91	

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RPJMD KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2029



BIDANG, URUSAN DAN PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	69,6	69,8		70		70,5		71		71,5		72	
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan					108.882.200		221.069.923		118.749.818		161.100.678		201.755.631		32.259.278
		Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	38,57	39,5		40		42		45		48		51	
2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Meningkatnya tata kelola museum					250.603.272		165.802.442		88.260.000		132.939.120		148.228.627		93.551.905
		Persentase Penambahan Jumlah Koleksi Museum	%	38,18	4,8		38,68		39,18		39,68		40,18		40,68	
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan					1.875.583.003		990.209.031		617.277.544		903.931.620		885.254.298		673.762.032
		Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan	%	57,97	30		58		59		60		61		62	
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional					59.340.799		552.674.808		64.189.091		102.913.929		494.095.422		57.042.871
		Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	%	0	57		58		59		60		61		62	
2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah					402.864.141		469.773.587		182.351.338		179.958.734		419.981.109		156.889.287
		Persentase Sejarah yang Dilestarikan dan Dikembangkan	%	0	23		25		30		35		40		45	
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata					1.484.921.236		3.014.383.740		4.453.118.167		2.070.702.797		2.696.937.512		4.435.650.684
		Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara	%	NA	5		5		5		5		5		5	
		Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten / Kota	%	NA	5		5		5		5		5		5	
		Tingkat Hunian Akomodasi	%	51,42	53,92		56,42		58,92		61,42		63,92		66,42	
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata					1.434.288.261		317.788.015		212.626.363		265.049.958		205.873.092		403.240.971
		Persentase Fasilitasi Pemasaran Pariwisata	%	100	100		100		100		100		100		100	
3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif					157.694.090		957.969.667		593.749.089		364.443.692		494.095.422		282.268.680

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RPJMD KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2029



BIDANG, URUSAN DAN PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL																
		Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	0	4		3		5		7		9		11	
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif					46.267.313		617.153.536		561.654.544		596.362.406		613.501.816		645.185.554
		Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%	0	25		50		75		100		100		100	
DINAS PERDAGANGAN																
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah					14.657.154.507		12.032.904.720		11.529.646.202		13.092.277.170		15.750.066.048		16.967.198.187
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	96,46	100		100		100		100		100		100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	86,66	84,15		87,06		87,46		87,86		88,26		88,66	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	67,35	67,50		67,65		67,95		68,25		68,55		68,85	
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha					17.421.152		15.659.120		14.442.545		15.737.341		16.469.847		16.936.121
		Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	%	100%	100		100%		100%		100%		100%		100%	
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi					1.282.196.789		2.271.205.149		43.085.748.053		3.063.422.981		35.477.787.837		4.474.197.093
		Prosentase fasilitasi pedagang pasar rakyat yang menggunakan platform digital	%	90%	20		25		40		60		80		100	
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Menigkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting					37.984.318		28.554.865		25.675.636		27.333.277		27.998.741		28.226.868

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RPJMD KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2029



BIDANG, URUSAN DAN PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
		Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	%	100%	100		100%		100%		100%		100%		100%	
		Disparitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	-0,68	-0,66		-0,64		-0,62		-0,6		-0,58		0,56	
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor					117.592.776		184.224.936		160.472.727		207.070.280		205.873.092		201.620.486
		Fasilitasi Pelaku Usaha Ekspor Barang dan Jasa	%	3,3%	0		3,5		3,7		3,9		4,1		4,3	
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk					39.158.721		33.897.388		447.317.726		29.818.120		34.586.680		35.485.205
		Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	70,23%	90		45		55		60		65		68	
SEKRETARIAT DAERAH																
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah					36.719.141.991		32.457.838.853		29.092.590.936		30.878.352.606		31.540.966.143		31.695.437.542
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	NA	100		100		100		100		100		100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	84,19	85		86		87		88		89		90	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,86	72,5		73		73,25		73,5		73,75		74	
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat					2.229.375.460		2.516.904.946		2.255.950.754		2.394.425.543		2.445.807.130		2.457.785.433
		Cakupan Koordinasi Administrasi Pemerintahan	%	185	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
		Cakupan Koordinasi Bidang Administrasi Kewilayahan	%	136	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
		Cakupan Fasilitasi Kerjasama Daerah	%	430	95		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
		Ketepatan waktu penyampaian LKPJ (30 maret)	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
		Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Hukum	%	120	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
		Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan					766.916.132		1.061.570.659		951.506.386		1.009.911.759		1.031.583.291		1.036.635.454



BIDANG, URUSAN DAN PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
		Cakupan Koordinasi Program Perekonomian dan Pembangunan	%	312	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
		Cakupan Koordinasi OPD Pengampu DBHCHT	%	162	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
		Cakupan Koordinasi dan Pembinaan BUMD/BLUD	%	120	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
		Cakupan Koordinasi bidang Lingkungan Hidup dan SDA	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
		Cakupan Koordinasi POK	%	99,04	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
		Persentase Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan	%	57,13	84,00		60	-	63	-	66,15	-	69,46	-	72,93	-
SEKRETARIAT DPRD																
SEKRETARIAT DPRD																
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah					30.618.183.308		23.111.983.562		21.870.025.562		22.665.912.820		22.637.805.250		22.254.869.203
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	84,07	85		86		86,5		87		87,5		88	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72	72,5		73		73		74		74		75	
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan					20.770.875.890		16.997.053.159		15.843.873.492		16.417.774.199		16.405.203.248		16.550.219.183
	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Tingkat capaian kinerja dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100	100		100		100		100		100		100	
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																
5.01 PERENCANAAN																
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah					7.544.613.365		7.455.247.251		6.682.282.810		7.092.454.752		7.244.650.583		7.280.131.148
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	82,58	82,8		83		83,2		83,42		83,65		84	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,9	71,2		71,5		71,8		72,1		72,4		72,7	



BIDANG, URUSAN DAN PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah					2.119.542.501		627.952.367		562.845.895		597.394.506		610.213.897		613.202.411
		Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	%	98	85		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang perekonomian dan SD					1.025.245.140		1.284.565.231		1.151.380.749		1.222.054.811		1.248.278.687		1.254.392.112
		Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Kesra	%	97,24	87		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
		Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Ekbang	%	88,38	87		90	-	90,46	-	90,92	-	91,38	-	91,85	-
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya dukungan hasil kelitbangan di bidang inovasi dalam perencanaan pembangunan					268.541.614		476.682.189		427.259.497		453.485.544		463.216.816		465.485.414
		Persentase terfasilitasinya inovasi masyarakat daerah	%	44,3	44,38		44,44	-	44,53	-	44,75	-	44,98	-	45,21	-
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH																
5.02 KEUANGAN																
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah					19.866.575.138		18.300.905.144		17.287.325.668		19.630.303.933		21.468.491.377		23.127.531.457
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	78,47	78,47		78,47		78,48		78,49		78,5		78,51	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	82,73	81,5		82,75		82,77		82,79		83,01		83,03	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,11	72,15		72,15		72,19		72,23		72,27		72,31	

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RPJMD KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2029



BIDANG, URUSAN DAN PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan					9.401.977.982		3.017.471.927		2.704.618.654		2.874.135.483		2.932.234.038		2.140.112.667
		Persentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	18,94	20,2		20,2	3.275.856.127	20,3		20,41		20,51		20,62	
		Cash managenent (Persentase anggaran)	%	15,07	15,07		8,28		7,14		6,16		5,32		4,59	
		Persentase laporan keuangan tepat waktu	%	100	100		100		100		100		100		100	
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya tata kelola aset daerah					1.956.613.137		1.930.137.022		1.730.019.274		1.836.211.333		1.875.614.292		1.884.800.085
		Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	2,7	2,85		3		3,3		3,6		3,9		4,1	
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital					5.476.872.411		1.882.491.455		1.914.249.935		2.106.295.742		2.075.349.443		2.085.513.435
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berkas Digital	%	100	100		100		100		100		100		100	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																
5.03 KEPEGAWAIAN																
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah					7.890.173.599		6.142.124.645		5.751.399.388		6.351.318.319		6.726.344.037		6.990.642.631
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	-	100		100		100		100		100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	87,519	83,5		87,55		87,65		87,7		87,85		87,9	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79,9	79,92	-	79,95		79,99		80		80,15		80,3	
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian					1.023.009.549		482.343.346		650.522.414		754.398.443		914.735.325		1.057.136.530
		Nilai Indeks NSPK Manajemen ASN	Nilai	75,11	75,3		76		77		78		79		80	
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar					3.084.464.483		1.751.259.782		2.972.714.095		3.068.736.984		3.050.994.927		2.987.972.208



BIDANG, URUSAN DAN PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	kader, manajerial dan fungsional															
		Persentase PNS yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	NA	NA		15		16		17		18		19	
INSPEKTORAT																
6.01 INSPEKTORAT DAERAH																
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah					8.478.435.563		13.132.463.510		11.991.353.390		11.151.595.976		11.690.361.916		12.268.098.466
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	80	80		81,4		81,5		81,8		82		82,5	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78	78		78,2		78,4		78,6		78,8		79	
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan					268.336.807		147.379.949		211.021.636		145.777.477		227.283.894		141.940.822
		Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Tahun Anggaran N-1	%	90	90		90,1		90,15		90,2		90,25		90,3	
		Tindaklanjuti Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	94	94		94,1		94,15		94,2		94,25		94,3	
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi					1.763.804.537		2.181.223.242		1.899.997.084		3.916.941.411		3.894.295.417		3.813.853.106
		Nilai Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP)	Nilai	94	94,6		94,7		94,8		94,9		95		95	
		Prosentase Penyelesaian Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat (DUMAS)	%	100	100		100		100		100		100		100	
KECAMATAN ARGOMULYO																
7.01 KECAMATAN																
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah					12.000.615.796		9.436.033.462		8.264.376.333		8.723.888.839		11.956.012.588		8.996.161.205

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RPJMD KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2029



BIDANG, URUSAN DAN PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	85,26	80		86		87		88		89		90	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73	78		73		73,01		73,02		73,03		73,04	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik					131.503.566		246.170.571		214.913.099		223.635.902		223.166.432		219.363.088
		Tingkat pencapaian pembangunan kelurahan dalam 1 tahun	%	0	75		80		85		87		92		95	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan					593.407.991		7.746.876.682		7.133.213.125		7.706.958.913		8.020.404.261		8.222.466.816
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	100	50		100		100		100		100		100	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					34.842.304		62.139.071		54.560.727		57.151.397		57.644.466		58.066.700
		Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					127.392.174		131.278.689		114.738.000		119.272.481		119.406.394		117.746.364
		Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP	%	73	73,37		75		76		77		78		79	
KECAMATAN SIDOMUKTI																
7.01 KECAMATAN																
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah					9.863.635.092		10.306.316.481		8.564.830.607		9.259.768.769		9.275.406.309		9.641.088.381
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	90,28	90,285		90,29		90,3		90,4		90,5		91	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,9	70,93		70,95		71		71,5		71,75		71,8	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik					95.816.336		208.542.628		181.655.127		187.522.845		186.438.673		182.587.512

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RPJMD KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2029



BIDANG, URUSAN DAN PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
		Tingkat pencapaian pembangunan kelurahan dalam 1 tahun	%	0	78		80		85		87		92		95	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan					473.637.571		5.722.947.637		4.985.887.619		5.147.767.154		5.160.003.190		5.054.222.334
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					16.332.330		11.053.496		12.035.455		12.424.217		12.352.386		12.097.229
		Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					97.993.980		73.689.974		65.793.818		70.403.895		69.996.851		68.550.965
		Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP	%	89,73	85,1		89,74		89,75		89,8		89,85		89,9	
KECAMATAN SIDOREJO																
7.01 KECAMATAN																
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah					12.805.788.046		10.356.556.648		9.892.341.239		10.652.523.471		11.029.033.311		11.231.067.531
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	88,67	88		89		89,2		89,4		89,6		89,8	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	69,15	69,15		70		70,2		70,4		70,6		70,8	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik					117.592.776		222.912.173		194.974.363		202.100.593		201.755.631		198.394.558
		Tingkat pencapaian pembangunan kelurahan dalam 1 tahun	%	0	78		80		85		87		92		95	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan					477.600.883		7.154.375.390		6.873.849.249		7.795.781.891		8.553.615.247		9.199.539.518
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	100	50		100		100		100		100		100	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Meningkatnya penyelenggaraan urusan					121.948.064		82.901.221		72.212.727		74.545.301		74.114.313		72.583.375

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RPJMD KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2029



BIDANG, URUSAN DAN PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
PEMERINTAHAN UMUM	pemerintahan umum															
		Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					246.993.827		198.041.806		212.626.363		260.908.552		300.574.715		334.690.006
		Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP	%	82,9	93,54		83		83,5		84		84,5		85	
KECAMATAN TINGKIR																
7.01 KECAMATAN																
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah					13.788.841.826		11.752.436.357		10.571.943.237		11.151.148.704		11.267.846.098		11.294.779.604
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	91,45	91,46		91,47		91,48		91,49		91,5		91,51	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,35	72,35		72,36		72,37		72,38		72,39		72,4	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik					364.058.524		307.987.248		267.187.090		280.787.299		284.104.868		283.075.162
		Tingkat pencapaian pembangunan kelurahan dalam 1 tahun	%	0	80		80		85		87		92		95	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan					7.687.115.995		7.745.230.448		7.340.022.520		7.722.064.872		7.825.647.992		7.809.164.649
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					15.243.508		13.816.870		16.047.273		20.707.028		24.704.771		28.226.868
		Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					174.211.520		151.985.572		140.413.636		153.232.007		160.581.012		161.296.388
		Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP	%	83,48	83,48		83,49		83,5		83,55		83,6		83,65	

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RPJMD KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2029



BIDANG, URUSAN DAN PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah					7.536.797.684		6.572.911.923		6.320.876.926		7.177.555.254		7.849.663.643		8.456.269.220
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	86,13	85		86,13		86,14		86,15		86,16		86,17	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,7	68,7		68,7		68,7		68,72		68,72		68,72	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan					1.079.012.477		910.913.276		957.713.084		1.087.024.749		1.188.122.334		1.278.994.356
		Cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Kegiatan	5	5		5		5		5		5		5	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya etika dan budaya politik					1.077.919.691		766.287.965		676.462.177		708.500.954		715.546.823		712.769.308
		Prosentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	NA	45		50		55		58		60		65	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan					1.761.565.919		1.501.599.252		1.438.797.075		1.633.799.491		1.786.788.956		1.924.868.267
		Prosentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	60	45		60		61		62		63		64	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat					323.789.488		109.276.153		104.705.437		166.537.647		223.686.945		275.978.121
		Prosentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, sosial, budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan	%	60	60		80		80,25		80,3		80,4		80,5	



BIDANG, URUSAN DAN PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
		Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan														
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Menigkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan					957.842.834		766.046.376		734.007.615		833.488.814		911.536.953		975.134.008
		Prosentase Konflik Sosial yang yang diselesaikan	%	100	100		100		100		100		100		100	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Penetapan target indikator kinerja didasarkan pada berbagai pertimbangan kunci untuk memastikan relevansi dan kelayakan, meliputi keselarasan dengan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang dijadikan sebagai acuan utama, analisis kinerja tahun sebelumnya untuk memahami tren dan pencapaian, serta evaluasi ketersediaan sumber daya daerah seperti anggaran dan SDM. Selain itu, target juga harus mengakomodasi kebijakan nasional dan provinsi, mempertimbangkan masukan dari masyarakat melalui partisipasi publik, dan didasarkan pada hasil evaluasi kinerja tahunan untuk perbaikan berkelanjutan. Penetapan target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sampai dengan tahun 2030 menjadi faktor kunci untuk menetapkan target periode berikutnya karena target tersebut berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian dan titik awal evaluasi dari RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029.

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang menunjukkan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029. Adapun indikator yang disajikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun	Target Tahun					
			2024*	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	85,72	85,87	86,43	86,85	87,19	87,48	87,67
2.	Pertumbuhan ekonomi	Persen	5,37	5,40-6,10	5,56 – 6,56	6,60-7,60	7,00-7,80	7,40-8,00	7,80-8,30
3.	PDRB Perkapita	Juta Rp	89,83	94,93-98,48	103,48-108,48	112,68-117,68	121,88-126,88	131,08-136,08	140,28-145,28
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,86	3,84-3,54	3,84-3,54	3,82-3,52	3,80-3,50	3,78-3,47	3,76-3,37
5.	Angka Kemiskinan	Persen	4,57	4,52-4,24	4,34-4,20	4,30-3,39	4,26-3,00	4,24-2,74	3,44-2,54
6.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	80,67	81,35	82,15	82,66	83,15	83,46	84,00
7.	Penurunan emisi GRK kumulatif	TonCo2EQ	17,696.43	71,295.00	95,271.24	127,239.68	175.192,33	231.137,09	323.591,93
8.	Indeks Daya saing Daerah	Nilai	4,16	4,50	4,84	5,15	5,50	5,75	6,00

2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Ukuran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ditetapkan melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD). IKD Kota Salatiga ditetapkan sebagai parameter yang digunakan untuk menilai sejauh mana pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara makro maupun sektor. Penentuan target IKD Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.3
Indikator Kinerja Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	INDIKATOR KINERJA DAERAH							
	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI							
1.	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	94,34	94,4	94,54	94,61	94,68	94,85
2.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	4,02	3,90	3,63	3,28	2,89	2,34
3.	Konsumsi Listrik Per kapita	kWh/kapita	262.271.447	280.630.448	300.274.580	321.293.800	343.784.366	367.849.272
4.	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	Persen	63,83	66,09	68,35	70,61	72,87	75,13
5.	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	40,60	43,70	46,80	49,90	53,00	56,10
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Nilai	69,93	69,98	70,03	70,07	70,12	70,16
7.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	15	19,4	23,8	28,2	32,5	36,9
8.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	27,87	28,63	29,30	30,18	30,97	31,75
9.	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	10,00	30,00	45,00	60,00	75,00	90,00
10.	Indeks Risiko Bencana	Nilai	74,54-73,82	73,71-72,69	72,89-71,67	72,06-70,45	71,24-69,32	70,41-68,20
11.	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,58	0,6	0,67	0,74	0,76	0,78
12.	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,3	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1
13.	Kepadatan Penduduk	Orang/km ²	3.863	4.063	4.263	4.463	4.663	4.863
14.	Wilayah dengan Infrastruktur kondisi baik	%	62,93	64,70	66,04	67,43	68,83	70,29
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.	Indeks Gini	Nilai	0,387	0,372	0,357	0,342	0,327	0,312
2.	Usia harapan Hidup	Tahun	78,35	78,64	78,87	79,1	79,33	79,73
3.	Indeks Keluarga Sehat	Nilai	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45
4.	Prevalensi stunting	%	5,69	5,60	5,43	5,27	5,11	5,00
5.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,94	16,10	16,18	16,26	16,34	16,47
6.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,50	11,52	11,53	11,55	11,57	11,73
7.	Angka Literasi/Numerasi	%	91,30	91,55	91,80	92,05	92,30	92,55
8.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	100	100	100	100	100	100
9.	<i>Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan</i>	%	51,76	54,00	56,24	58,47	60,71	62,50
10.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	79,00	79,20	79,40	79,60	79,80	80,00
11.	Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0,12-0,12	0,12-0,11	0,12-0,11	0,12-0,11	0,12-0,11	0,12-0,11
12.	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	95,44	95,41	95,4	95,38	95,35	95,33
13.	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah	Orang	13.778	14.232	14.460	14.687	14.914	15.141



No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
14.	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	18,26	18,71	18,93	19,16	19,38	19,60
15.	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	%	0,97	1,07	1,12	1,17	1,22	1,27
16.	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok Bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	89,73	89,93	90,03	90,13	90,23	90,33
17.	Jumlah Kasus Kematian Ibu (kasus)	kasus	2	2	2	2	2	1
18.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	%	21,2	22,8	23,61	24,41	25,21	26,00
19.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	92,82	95	95,5	96	96,5	97
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1.	Angka Ketergantungan	%	49,48	49,49	49,50	49,51	49,52	49,53
2.	Rasio PDRB Industri pengolahan	%	33,74	34,32	34,60	34,89	35,18	36,06
3.	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	7,87	8,20	8,36	8,53	8,69	8,71
4.	Rasio Kewirausahaan	%	2,83	3,11	3,25	3,27	3,52	3,65
5.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,79	1,88	1,90	1,95	2,00	2,04
6.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,85	71,05	71,27	71,52	71,81	72,11
7.	Indeks Inovasi Daerah	Angka	51,5	52	53	54	55	56
8.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	Angka	91,43	91,94	92,00	92,20	92,70	93,00
9.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	42,92	42,00	41,55	41,09	40,63	39,75
10.	Ekspor Barang dan Jasa	Rp	168.263.992	180.042.471	192.645.444	206.130.625	220.559.769	235.998.953
11.	Rasio panjang jalan	%	95,52	95,53	95,54	95,55	95,56	95,57
12.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	92,82	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00
13.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,68	0,65	0,64	0,62	0,61	0,59
14.	Tingkat Inflasi	%	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
15.	Indeks Akses Keuangan Daerah	Angka	5,71	5,71	5,72	5,73	5,74	5,74
16.	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Angka	0,69	0,71	0,73	0,75	0,77	0,79
17.	Return on Aset (ROA) BUMD	%	2,40	3,03	3,34	3,66	3,97	4,13
18.	Disparitas Harga	Angka	±10	±10	±10	±10	±10	±10
19.	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	60,82	62,60	64,38	66,16	67,94	68,00
20.	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota Per PDRB	%	42,03	44,79	47,55	50,30	53,06	55,00
21.	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah	Orang	13.778	14.232	14.460	14.687	14.914	15.141



No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
22.	Jumlah kejadian konflik SARA	Kali	n/a	0	0	0	0	0
23.	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Nilai	63,50-67,03	63,50-64,82	63,50-64,82	63,50-64,82	63,50-64,82	64,83-65,52
24.	Kapabilitas Inovasi	Nilai	3,80	3,84	3,86	3,88	3,90	4,00
25.	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	16,42-16,92	16,93-17,42	17,43-17,93	17,94-18,41	17,94-18,41	18,42-19,51
26.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	%	21,2	22,8	23,61	24,41	25,21	26,00
27.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	65,18	66,74	67,52	68,3	69,08	69,85
28.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	Ribu Orang	1.066	1.120	1.146	1.173	1.200	1.228
ASPEK PELAYANAN UMUM								
1.	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	79,35	80,60	81,23	81,85	82,48	83,45
2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,69	3,75	3,81	3,87	3,94	4,00
3.	Indeks Pemerintahan Digital	Nilai	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
4.	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,65	4,68	4,70	4,72	4,74	4,76
5.	Indeks Integritas Nasional	Nilai	79,49	80,06	80,65	81,27	81,91	82,56
6.	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100
II INDIKATOR KINERJA KUNCI								
URUSAN PENDIDIKAN								
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
URUSAN KESEHATAN								
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	%	4,15	4,32	4,5	4,68	4,85	5
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Persentase luas daerah irigasi kewenangan Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	87,93	88,20	88,46	88,73	88,99	89,26
7	Rasio kemantapan jalan	%	92,25	93,09	94,22	95,37	96,53	97,71
8	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT & PERMUKIMAN								
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangan	%	10,13	10,60	14,84	20,78	29,09	40,73
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	5,15	4,44	3,81	3,27	2,80	2,41
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	65,89	68,32	71,05	73,89	76,85	79,92
URUSAN TRANTIBUM & LINMAS								
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	1.244,00	1.304,00	1.364,00	1.424,00	1.484,00	1.544,00
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan	Orang	735,00	770,00	805,00	840,00	875,00	910,00



No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana							
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	8.684,00	8.511,00	8.341,00	9.175,00	8.012,00	7.852,00
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	Menit	<15	<15	<15	<15	<15	<15
	URUSAN SOSIAL							
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	URUSAN TENAGA KERJA							
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rp/TK	110,38	114,67	118,91	123,15	127,40	131,64
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar	%	93,51	93,79	94,07	94,35	94,64	94,92
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	%	71,26	71,48	71,69	71,91	72,12	72,34
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	9,26	9,69	10,18	10,68	11,22	11,78
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk	%	44,71	42,35	40,23	38,22	36,31	34,50



No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)							
	URUSAN PANGAN							
1	Persentase cadangan pangan (beras/ jagung)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	URUSAN PERTANAHAN							
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota	%	61,63	61,63	61,81	61,99	62,17	62,35
2	Terlaksananya pengelolaan sampah Regional/Terpadu di wilayah Kota	%	98,25	98,35	98,44	98,54	98,64	98,74
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	17,85	19,44	21,22	23,17	25,30	27,63
	URUSAN ADMINISTRASI PENDUDUK & CATATAN SIPIL							
1	Perekaman KTP Elektronik	%	98,48	98,38	98,57	98,76	98,95	99,14
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	87,66	88,97	90,56	92,18	93,84	95,52
3	Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun yang mempunyai Akte Kelahiran	%	99,74	99,63	99,83	100,00	100,00	100,00
4	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA							



No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Nilai	2,2	1,72	1,74	1,77	1,80	1,82
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	65,91	67,02	68,36	69,05	69,74	70,44
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	8,48	7,66	6,89	6,20	5,58	5,02
URUSAN PERHUBUNGAN								
1	Rasio konektivitas Kota	Rasio	0,88	0,87	0,87	0,86	0,86	0,85
2	Kinerja lalu lintas Kota	Rasio	0,31	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI								
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
URUSAN KOPERASI DAN UMKM								
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	71,78	74,43	77,41	80,51	83,73	87,08
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
URUSAN PENANAMAN MODAL								
1	Persentase peningkatan investasi di Kota	%	6,89	6,91	6,92	6,94	6,96	6,98
URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA								
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1,96	2,64	3,59	4,87	6,60	8,95
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	44,08	46,13	48,42	50,82	53,35	56,00
3	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	33	36	42	48	55	63
URUSAN STATISTIK								



No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
URUSAN PERSANDIAN								
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	71,06	72,00	73,50	74,00	74,50	75,00
Urusan Kebudayaan								
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	38,69	40,00	42,00	45,00	48,00	57,00
Urusan Perpustakaan								
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Indeks	75,23	75,73	76,23	76,73	77,23	77,73
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Urusan Kearsipan								
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) (Pasal 40 dan Pasal 59 UU Nomor 43 Tahun tentang Kearsipan)	%	88,67	89,17	89,67	90,17	90,67	91,17
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	16,67	17,17	17,67	18,17	18,67	19,17
Urusan Kelautan Perikanan								
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kota di wilayah kota (sumber data: one data KKP) Rumus : Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) dibagi arget produksi perikanan (tangkap dan budidaya) yang ditetapkan	%	84,53	87,00	89,00	90,00	92,00	93,00
Urusan Pariwisata								
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan	%	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2



No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	nusantara yang datang ke Kota							
3	Tingkat hunian akomodasi	%	53,99	56,69	59,53	62,50	65,63	68,91
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	7,87	7,90	7,92	7,94	7,97	7,99
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,17	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21
Urusan Pertanian								
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	720,07	720,34	722,05	723,77	725,49	727,21
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Urusan Kehutanan								
Urusan Perdagangan								
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	63,97	65,25	66,56	67,89	69,25	70,63
3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	71,73	73,16	74,62	76,12	77,64	79,19
Urusan Perindustrian								
1	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di Kota	%	0,48	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Kecil dan Menengah yang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	dikeluarkan oleh instansi terkait							
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota	%	0	0	0	0	0	0
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Ada/tidak	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Urusan Transmigrasi							
	Perencanaan dan Keuangan							
1	Persentase Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	19,35	19,16	19,36	19,55	19,75	19,95
2	Persentase PAD	%	30,85	32,17	34,22	36,39	38,71	41,18
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3.003	3.023	3.043	3.063	3.083	3.100
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	3	3
5	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	87,22	88,09	88,97	89,86	90,76	91,67
6	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Pengadaan							
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	0	0
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	64,88	64,00	65,00	67,00	68,00	70,00
3	Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	60,01	59,83	60,86	61,90	62,95	64,03
4	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	1	1,5	2	3	3,5	4
	Kepegawaian							
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	74,44	74,44	74,44	74,44	74,44	74,44



No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	25,19	25,44	25,70	25,95	26,21	26,47
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	99,47	99,50	99,53	99,55	99,57	99,60
Manajemen Keuangan								
1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	4,35	4,5	4,65	4,8	4,95	5,1
2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	22,42	22,45	22,50	22,55	22,60	22,65
3	Assets management	Jumlah	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Apakah ada daftar aset tetap?	ada/tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap?	ada/tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan?	ada/tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran?	ada/tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Cash Management: Persentase anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	9,58	8,28	7,14	6,16	5,32	4,59
Transparansi dan Partisipasi Publik								
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>Information on resources available to frontline service delivery units</i>)	%	96,19	96,44	96,80	97,16	97,52	97,88
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

--o0o--

BAB

5

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dijelaskan melalui pelaksanaan rencana program yang disertai pendanaan selama 5 (lima) tahun ke depan. RPJMD disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 maupun pada dokumen Rencana Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD dilakukan melalui berbagai tahapan rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pembangunan Daerah di Kota Salatiga.

5.1. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 berlaku untuk kurun waktu lima tahun sejak tahun 2025 hingga tahun 2029. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan perencanaan setelah RPJMD tahun berakhir, maka RPJMD ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD tahun 2030 di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Saatiga tahun 2025-2045.

Agar pelaksanaan RPJMD dapat berjalan dengan baik, perlu diatur kaidah pelaksanaan RPJMD sebagai berikut.

- Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga agar melaksanakan program-program RPJMD dengan sebaik-baiknya mengarah pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
- RPJMD akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RKPD sejak tahun 2026 hingga tahun 2029;
- Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga berkewajiban melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah mengacu pada RPJMD. Renstra tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dalam kurun waktu tahun 2026 hingga tahun 2029;
- RPJMD akan menjadi instrumen dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga.

- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dan masyarakat diharapkan dapat mengawal dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD.

Keberhasilan pencapaian visi dan target kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 memerlukan kerja bersama seluruh perangkat daerah dan dukungan para pemangku kepentingan di Kota Salatiga. Oleh karena itu dukungan, kesungguhan, rasa tanggung jawab, dan semangat kerja keras harus dimiliki oleh seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan di Kota Salatiga. Semoga dengan pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029 dapat mewujudkan cita-cita Kota Salatiga di tahun 2029 yaitu :

“Terwujudnya Kota Salatiga Sebagai Kota BEDA: Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia”

RPJMD selain fokus dalam mencapai visi Kota Salatiga tahun 2025-2029, juga memiliki peran krusial dalam mengintegrasikan berbagai isu penting ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah. Secara nasional, terdapat 5 (lima) pengarusutamaan pembangunan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan RPJMD di daerah, yaitu gender dan inklusi sosial, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), transformasi digital, pembangunan rendah karbon; dan pembangunan berketahanan iklim.

RPJMD berperan penting dalam memastikan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial terintegrasi ke dalam seluruh tahapan pembangunan. Ini berarti dalam pelaksanaannya RPJMD harus selalu memastikan isu-isu kesetaraan gender dan ketidaksetaraan sosial yang ada di daerah. Isu-isu kesetaraan gender yang dirumuskan dalam program dan kegiatan yang secara spesifik dapat mengurangi kesenjangan. Selain itu, dukungan anggaran yang memadai untuk program-program yang mendukung pemberdayaan perempuan dan kelompok disabilitas, serta memastikan partisipasi mereka dalam proses pembangunan memiliki peran penting dalam menyelesaikan isu tersebut.

RPJMD menjadi instrumen utama di tingkat daerah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pelaksanaan pembangunan di Kota Salatiga menjadi bagian dari menerjemahkan 17 tujuan yang menjadi SDGs ke dalam konteks dan prioritas pembangunan lokal. RPJMD merancang berbagai program yang berkontribusi langsung pada pencapaian target SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, perlindungan lingkungan, dan pembangunan kota berkelanjutan.

Implementasi pembangunan di daerah tidak terlepas dari upaya mendukung transformasi digital sebagai bagian integral dari strategi pembangunan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menciptakan ekosistem yang kondusif untuk

pengembangan teknologi digital, misalnya dengan pembangunan infrastruktur internet yang merata. Integrasi pembangunan digital diharapkan akan meningkatkan literasi digital masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi dan memanfaatkan manfaat dari perkembangan teknologi.

Implementasi Pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Salatiga di dalamnya telah dirumuskan kebijakan pembangunan rendah karbon untuk mitigasi perubahan iklim. Pemerintah kota memiliki berbagai upaya ke depan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor-sektor kunci seperti transportasi, energi, dan industri. Kebijakan yang akan diterapkan diharapkan akan mendorong penggunaan energi terbarukan dan peningkatan efisiensi energi. Selain itu, akan dilakukan integrasi kebijakan pengelolaan limbah dan penggunaan lahan yang berkelanjutan untuk mengurangi jejak karbon daerah.

Dalam rangka memperkuat pembangunan berketahanan iklim untuk adaptasi terhadap dampak perubahan iklim yang sudah terjadi. Pelaksanaan pembangunan ke depan perlu mengidentifikasi risiko dan kerentanan daerah terhadap bencana terkait iklim, seperti banjir, kekeringan, dan kenaikan permukaan air laut. Program-program yang tertuang di RPJMD perlu dipertegas dalam berbagai kegiatan yang mendukung pada peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana, seperti pembangunan sistem peringatan dini, pengelolaan sumber daya air, dan pengembangan infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim. Selain itu, paling penting bagaimana proses pembangunan juga mampu mendorong edukasi dan partisipasi masyarakat dalam upaya adaptasi perubahan iklim.

5.2. Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Manajemen Risiko

5.2.1. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian sangat penting dalam pelaksanaan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 untuk memastikan bahwa semua program berjalan sesuai dengan rencana dan selaras dengan tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Tanpa pengendalian yang efektif, RPJMD berisiko tidak mencapai target, mengalami penyimpangan, atau bahkan mengalami kegagalan. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa pengendalian menjadi hal yang penting dilakukan dalam implementasi RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029:

1. Memastikan Seluruh Program Dilaksanakan

Seluruh program yang tertuang dalam RPJMD yang disertai dengan target kinerja dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD, termasuk dalam RAPBD tahunan.

2. Memastikan Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Pengendalian berfungsi sebagai mekanisme untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi kinerja secara berkala. Ini membantu pemerintah daerah mengidentifikasi hambatan atau masalah yang muncul di tengah jalan, sehingga dapat mengambil tindakan korektif secepat mungkin. Dalam hal ini, peluang untuk mencapai sasaran RPJMD menjadi lebih besar.

3. Optimalisasi penggunaan sumberdaya

Memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan secara efisien dan efektif untuk kepentingan publik dalam pelaksanaan RPJMD.

4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi

Proses pengendalian yang transparan dan terukur akan membuat pemerintah daerah lebih akuntabel terhadap masyarakat. Laporan hasil pengendalian dapat diakses publik, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi dan menilai kinerja pemerintah dalam melaksanakan janji-janji politik yang tertuang dalam RPJMD.

5. Menyesuaikan dengan Perubahan Lingkungan

Lingkungan eksternal (sosial, ekonomi, politik) dapat berubah sewaktu-waktu. Pengendalian yang fleksibel memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan strategi dan program kerja agar tetap relevan dan efektif. Misalnya, jika terjadi krisis ekonomi, pengendalian dapat membantu mengidentifikasi program yang perlu diprioritaskan atau direstrukturisasi.

6. Mendorong Perbaikan Berkelanjutan

Hasil dari proses pengendalian (evaluasi, audit, dan laporan) memberikan umpan balik yang berharga. Umpan balik ini dapat digunakan untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program di masa mendatang. Ini menciptakan siklus pembelajaran dan perbaikan yang berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Pelaksanaan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah proses penting untuk mengukur keberhasilan, mengidentifikasi kendala, dan memberikan masukan untuk perbaikan di masa mendatang. Evaluasi ini diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Evaluasi terhadap hasil RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Salatiga, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Evaluasi dilakukan dengan tujuan:

1. Mengukur Pencapaian Sasaran, yaitu menilai sejauh mana target pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD telah tercapai.
2. Menilai Efektivitas dan Efisiensi, yaitu dapat meninjau efektivitas program dan penggunaan anggaran.
3. Mengidentifikasi Masalah, yaitu menemukan faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan program.
4. Meningkatkan Akuntabilitas, yaitu dalam rangka mewujudkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah daerah.
5. Menyediakan Masukan, yaitu dalam rangka memberikan rekomendasi untuk penyusunan perencanaan periode berikutnya.

Evaluasi membantu memastikan konsistensi antara RPJMD dengan rencana tahunan (RKPD) dan Rencana Kerja Anggaran (APBD). Hal ini penting untuk mencegah adanya penyimpangan kebijakan dan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan selaras dengan tujuan jangka menengah. Pelaksanaan Evaluasi RPJMD merupakan langkah krusial yang berfungsi sebagai cerminan keberhasilan dan kegagalan sebuah rencana pembangunan. Proses ini tidak hanya mengukur pencapaian, tetapi juga memberikan landasan untuk perbaikan di masa depan.

5.2.1. Manajemen Risiko

RPJMD Kota Salatiga adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan sasaran dan program prioritas daerah selama 5 tahun. Namun, dalam perjalanannya, RPJMD selalu menghadapi ketidakpastian dan berbagai potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Untuk itu, manajemen risiko berperan sebagai "penjaga" yang memastikan rencana tersebut berjalan sesuai jalur. Untuk memastikan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD perlu dilakukan analisis manajemen risiko dengan mengidentifikasi potensi risiko baik pada lingkup internal maupun eksternal. Faktor risiko yang teridentifikasi sejak dini, pemerintah daerah dapat menyusun rencana yang lebih realistis dan memiliki strategi mitigasi yang kuat.

Pengelolaan risiko pada tingkat pemerintah daerah fokus pada tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam RPJMD Kota Salatiga tahun 2025-2029. Proses manajemen risiko mengacu pada Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Pemerintah Kota Salatiga. Terdapat 6 (enam) tujuan yang diharapkan melalui manajemen risiko Pemerintah Daerah, yaitu:

- a. Meningkatkan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah
- b. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan organisasi Perangkat Daerah

- c. Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan publik
- d. Meningkatkan efektivitas tujuan pada tingkatan kegiatannya.

Penyelenggaraan proses manajemen risiko Pemerintah Daerah dilakukan melalui 5 (lima) tahapan, yaitu:

1. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya sadar Risiko dan Manajemen Risiko. Identifikasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern. Dalam pelaksanaan identifikasi memerlukan kehati-hatian agar dapat memperoleh gambaran yang otentik, valid dan tidak bias, mengingat tingkat subjektivitas dan sensitivitasnya cukup tinggi.

2. Penilaian Risiko

Penilaian Risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dan merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Implementasi RTP meliputi kegiatan pembangunan infrastruktur pengendalian dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur, dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan Manajemen Risiko yaitu sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan Manajemen Risiko.

5. Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko Pemerintah Daerah pada RPJMD tahun 2025-2029 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pemantauan dilaksanakan oleh Wali Kota yang dalam pelaksanaannya oleh Wali Kota dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Pemantauan dalam bentuk Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku penanggung jawab pengawasan Manajemen Risiko meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan pengawasan lainnya.

Penerapan manajemen risiko pada RPJMD Kota Salatiga tahun 2025-2029 diharapkan akan membantu dalam meningkatkan kemungkinan pencapaian target, mengoptimalkan alokasi sumber daya dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Melalui pengelolaan risiko secara proaktif, pemerintah daerah dapat mencegah atau mengurangi kendala yang berpotensi menghambat program dan kegiatan, seperti keterlambatan proyek, pembengkakan biaya, atau kegagalan program yang menghambat pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Hal ini secara langsung meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kota Salatiga tahun 2025-2029.

WALI KOTA SALATIGA



ROBBY HERNAWAN

